Anomali sosial yang terjadi di tengah masyarakat Muslim harus dipahami sebagai bukti nyata tidak sehatnya sebuah kelompok sosial. Buku ini menganalisa dengan tajam fenomena dan latarbelakang yang kasat di mata sebagian besar orang. Buku ini juga berangkat dari sebuah analisa faktual dari peristiwa perpecahan NW Pancor dan NW Anjani. Prasyarat untuk diketahui bagi siapa saja yang ingin menemukan pintu perdamaian bagi kedua pihak, harus membaca buku ini.
(Tuan Guru Hasanain Juaini, Pimpinan Ponpes Nurul Haramain NW Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat).

Buku ini merupakan hasil penelitian yang komprehensif mengenai NW. Isinya membedah agama yang acapkali disalahgunakan dan disalaharahkan dalam konflik komunal untuk memperebutkan kekuasaan. Dengan argumentasi yang kuat telah disusun peta rekonsiliasi sebagai sikap tanggap dan upaya antisipasi atas konflik komunal. Buku yang luar biasa dan layak dibaca oleh orang yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(Profesor Thomas Santoso, Sosiolog dan Pengamat Kekerasan Politik Agama UK Petra)

Jika kita ingin meningkatkan pemahaman kita tentang konflik komunal dan kondisi daerah pasca reformasi rezim otoriter di Indonesia, kita tidak bisa sama sekali hanya bersandar pada studi politik di tingkat nasional yang konvensional. Berdasarkan pada politik lokal, budaya dan sejarah, studi tentang NW di Lombok Nusa Tenggara Barat ini memberikan nuansa yang berbeda dengan detail yang bagus dan menawarkan sebuah kunci wawasan tentang dan resolusi yang bisa diperjuangkan, konflik sosial dan kontestasi yang muncul selama masa transisi. Buku ini menyoroti pentingnya penelitian terpisah ketika berhadapan dengan entitas yang beragam dan plural seperti negara Indonesia dan memetakan kontinuitas, perubahan dan ketidakpastiannya.
(Dr. Paul J. Carnegie, Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam)

Dalam buku ini Saipul Hamdi menghadirkan secara jernih, teori yang mutahir 'sophisticated' dan data yang kaya dan detail tentang konflik yang sangat penting muncul di Lombok, khususnya terkait NW pasca kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998. Hasilnya adalah sebuah analisa yang mendalam tentang jalan di mana kejatuhan rezim otoritarian dapat menjadi titik kritik yang membuka kemungkinan hubungan ruang politik termasuk konflik dan juga kerjasama demokrasi *'democratic coopration'*
(Profesor Mark Woodward, Center for the Study of Religion and Conflict, Arizona State University)

Konflik akan menjadi barokah apabila dikelola dan dikontrol dengan baik. Konflik dapat diselesaikan dengan cara musyawaroh untuk mufakat. Meskipun tidak mudah mencari resolusi yang tepat dari tahap yang abstrak dan holistik, tetapi buku ini menjadi wacana awal yang diharapkan muncul konsep abstrak dengan landasan teori yang diangkat berdasarkan fakta dari hasil penelitian dan kajian secara ilmiah dengan landasan metodologi yang kuat.
(Profesor Agil Al Idrus, FKIP Universitas Mataram)

ISBN 978-623-91690-0-8
9 786239 169008

NAHDLATUL WATHAN DI ERA REFORMASI
Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi

Saipul Hamdi

NAHDLATUL WATHAN
DI ERA REFORMASI
Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi

Saipul Hamdi

NAHDLATUL WATHAN DI ERA REFORMASI
Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi

NAHDLATUL WATHAN DI ERA REFORMASI
Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi

Saipul Hamdi

NAHDLATUL WATHAN DI ERA REFORMASI
Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi

Penulis:
Saipul Hamdi

Editor: Mukhlis Muma Leon
Desain Kaver dan Layout: Fatich Bagus

Diterbitkan oleh:
PULHAM Media
Jl. Purbasari No.05, Mayura, Kec. Cakranegara,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83239
Telpon +62 813 924 356 41
E-mail. pulhammedia@gmail.com

Dicetak oleh:
Arti Bumi Intaran
Jalan Mangkuyudan MJ III/216 Yogyakarta 55143
Tlp. +62 818-0420-5694
Email: artibumiintaran@gmail.com

Cetakan I: Oktober 2019

xviii + 275 hlm. 15x23cm

ISBN 978-623-91690-0-8

Dedikasi

…………Buku ini aku dedikasikan kepada jemaah korban konflik Nahdlatul Wathan yang mampu bangkit merajut kembali persaudaraan di tengah gesekan dan guncangan nilai-nilai persatuan dalam kultur Sasak dan keangkuhan kaum elit untuk bersatu……….

(Saipul Hamdi)

Pengakuan

MENULIS sebuah buku tidak pernah mampu bekerja sendirian, sebaliknya banyak orang yang ikut memberikan kontribusi baik untuk pendanaan, bimbingan, penyempurnaan naskah, editing ataupun pemberi semangat. Sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang telah membantu dalam berbagai bentuk, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih.

Penelitian untuk bahan buku ini berasal dari disertasi saya pada program Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada tahun 2011. Penelitian ini disponsori oleh The Ryaichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) Tokyo Foundation, Asia Reasearch Institute (ARI) Singapura, Danamandiri, Ali Dahlan Center (ADC) Mataram, PT. Newmont Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Jakarta, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Lombok Timur. Saya juga mengucapkan terima kasih atas arahan, ide, saran, dan kiritik yang telah diberikan oleh Prof. Irwan Abdullah, Prof. Machasin dan Dr. Partini selaku promotor S3, dan Prof. Djoko Suryo, Prof. Heru Nugroho, Prof. Thomas Santoso Dr. Wening Udasmoro, Dr. Zuly Qodir selaku penguji.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh kolega, para dosen dan staf di CRCS, dan juga komunitas intelektual Lombok di Yogyakarta yang meluangkan waktunya untuk *sharing* dan diskusi. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada

seluruh informan yang telah memberikan informasi dan data selama penelitian khususnya kepada TGH. Abu Fuad, Dr. Najmul Akhyar, Siti Rohmi Jalilah, RTGB. Muhammad Zainuddin Astani, TGH. Yusuf Makmun, Abdul Kabir, Dr. Mugni Sn, Abdul Hayyi Nu'man, M. Suruji, dr. Mawardi Hamri, TGH. Mahmud Yasin, TGH. Salehuddin, TGH. Zaini Abdul Hannan, TGH. Junaidi, TGH. Abdul Hamid, TGH. Abdul Kadir, Kapolres Lotim, para jamaah NW dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya H. Ansori dan Hj. Zahiyah yang tidak pernah lelah mendukung karir saya di dunia akademik, kakek saya Papuk Tuan H. Ramli, Papuk Mis, dan Papuk Syarafudin yang terus bersemangat mendengar perkembangan karir saya dan selalu membuka ruang diskusi mengenai pengalamannya ketika masa pendudukan pemerintah Jepang di Indonesia. Terima kasih juga untuk saudara saya Syahida, Fatonah, Suja'an, dan Aini dan semua keponakan saya Zidan, Fadhila, Rosyid, Nazil, dan Teguh Imanda yang ikut menghibur ketika masa-masa sulit dalam penyelesaian tulisan ini. Khusus untuk istri saya Dr. Bianca, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk menerbitkan naskah buku ini. Beliau juga banyak memberikan masukan, saran, dan inspirasi supaya lebih kritis, sensitif, serta lebih tajam dalam melihat sebuah fenomena sosial.

Pengantar Penulis

SALAH satu dampak dari kejatuhan rezim Suharto pasca gerakan reformasi 1998 adalah munculnya instabilitas negara yang merembet pada terciptanya instabilitas di beberapa daerah. Peran dan posisi negara semakin melemah pasca runtuhnya rezim otoriter Orde Baru dan sebaliknya peran kelompok *civil society* semakin kuat dan mampu memainkan peran penting dalam proses reformasi sistem politik dan iklim demokrasi di Indonesia. Rakyat tidak lagi takut dengan pemerintah atau aparat kepolisian, sebaliknya rakyat justru dalam konteks tertentu yang mengendalikan kondisi sosial politik yang berkembang. Derasnya arus reformasi dan demokratisasi di Indonesia bukannya tanpa risiko keamanan. Masyarakat yang belum siap secara penuh dengan perubahan-perubahan akibat arus tersebut, rentan dengan konflik dan kekerasan komunal yang melibatkan satu komunitas dengan komunitas yang lain. Terbukti sejak lengsernya Suharto, konflik dan kekerasan sosial mengalami reproduksi dan eskalasi dalam ruang, konteks, dan struktur yang berbeda-beda.

Konflik internal organisasi Nahdlatul Wathan (NW) yang terjadi sejak 1998 pasca wafatnya Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1997, jika dilihat secara makro, adalah bagian dari serial konflik-konflik daerah yang terjadi akibat ketidakstabilan negara pada waktu itu. Walaupun konteksnya lokal yang hanya melibatkan kelompok internal NW, akan tetapi situasi politik nasional secara tidak langsung memiliki pengaruh besar atas terjadinya konflik tersebut. Konflik dan perpecahan yang berawal

dari perebutan kekuasaan antarelit mengalami transformasi ke dalam praktik kekerasan sosial berkepanjangan yang melibatkan hampir seluruh jemaah NW. Seandainya negara dalam kondisi stabil seperti pada masa Suharto, besar kemungkinan friksi dan konflik dapat diatasi, diredakan, didamaikan, dan tidak menjadi bola liar untuk saling meniadakan yang lain. Yang ingin saya katakan bahwa konflik NW adalah sesuatu yang 'jamak' karena pada waktu itu konflik menjadi fenomena sosial di banyak daerah. Pada waktu yang bersamaan konflik juga muncul di berbagai daerah seperti konflik etnis di Kalimantan dan Lampung, konflik agama di Maluku, Poso, Jawa, dan Lombok, serta konflik politik di Aceh, Maluku, dan Papua.

Berbicara tentang konflik NW, tidak bisa lepas dari konteks lokal kedaerahan di mana Nusa Tenggara Barat, Lombok khususnya, merupakan daerah rawan konflik. Pada dasarnya, konflik dan kekerasan telah menjadi bagian dari konstruksi budaya dan tradisi masyarakat lokal yang sulit untuk dihilangkan. Selain faktor budaya, terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan hal tersebut termasuk faktor ekonomi, sektarianisme, esklusivisme, primordialisme, dan pendidikan multikulturalisme yang masih kurang. Karakter mayarakat Lombok yang mudah terprovokasi dan tradisi saling menguji 'ilmu kesaktian' telah membuka akses kepada ruang-ruang konflik dan kekerasan sosial. Sebagai contoh, konflik NW tidak hanya melibatkan kelompok internal antar jemaah NW, tetapi juga kelompok eksternal orang-orang sakti (*pepadu*) yang ingin menguji kekuatan dan kesaktian ilmu mereka. Mereka menggunakan dan memanfaatkan konflik NW sebagai arena pertarungan untuk menguji ketinggian ilmu yang dimiliki.

Sejak masa reformasi konflik dan kekerasan sosial semakin meningkat di Lombok yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid.

Pola-pola konflik yang muncul di Lombok sangat beragam; mulai dari konflik agama yang melibatkan Muslim dan Kristen di Mataram, konflik Ahmadiyah di Lombok, konflik internal Wahabi, konflik etnis (Hindu) Bali dengan (Muslim) Sasak di Mataram, konflik Pamswakarsa Ampibi dengan masyarakat di Desa Perampuan Lombok Barat, dan konflik antar kampung di Lombok Tengah dan di Lombok Timur. Konflik Nahdlatul Wathan merupakan konflik produk reformasi yang berkepanjangan yang sampai sejauh ini belum menemukan titik temu. Berbagai upaya islah telah dilakukan oleh kedua kubu dan juga pemerintah daerah sebagai fasilitator, akan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Walaupun secara kultural sebagian besar jemaah NW sudah bersatu, akan tetapi secara struktural NW secara konstan masih pada dualisme kepemimpinan.

Konflik NW adalah konflik yang unik dan kompleks karena melibatkan banyak faktor di dalamnya. Konflik NW termasuk konflik yang berkepanjangan padahal adanya unsur keluarga di dalamnya yang semestinya dengan cepat dapat diselesaikan. Fakta berbicara lain, NW semakin larut dalam konflik struktural di mana kedua kubu masih mempertahankan posisi masing-masing. Hal ini memperkuat tesis Lewis Coser (1956) bahwa semakin dekat hubungan antara pelaku konflik, maka semakin sulit konflik itu diatasi. Pada waktu yang bersamaan kelompok ketiga atau yang dikenal kelompok kepentingan mempunyai posisi kuat di tingkat struktural, mereka sekuat tenaga mempertahankan konflik demi menjaga kepentingan individu dan kelompoknya. Jika pemimpin NW tidak pernah mampu menekan atau melawan kelompok ketiga yang berupaya mempertahankan konflik, maka NW selamanya tidak akan pernah bersatu kembali. Islah hanya bagian dari mimpi-mimpi indah warga NW yang tidak akan pernah terwujud.

Konflik NW berbeda dengan konflik-konflik yang lain.

Biasanya jika sebuah organisasi dilanda perpecahan dan konflik yang hebat, maka organisasi tersebut akan terancam mundur bahkan bubar. Kasus konflik NW memperlihatkan dinamika yang berbeda. Konflik telah membuat organisasi ini semakin luas ruang pendidikan dan dakwahnya dan juga semakin kuat secara politik dan mapan secara kelembagaan. Di tengah krisis perpecahan dan konflik yang melanda jemaah NW, justru keberhasilan mulai nampak ketika salah satu kader NW, Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi atau yang dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) berhasil menduduki kursi gubernur NTB selama dua periode (2008-2013 dan 2013-2018). Beliau adalah gubernur termuda di Indonesia dengan usia 36 tahun ketika terpilih pada priode awal kepemimpinannya di NTB dalam Pilkada 2008. Tuan Guru Bajang berhasil meraih kursi gubernur NTB tanpa 'didukung' oleh kubu NW yang lain. Kemenangan TGB dalam dunia politik ini menjadi 'trend' dan sekaligus 'virus' di kalangan Jemaah, khususnya para tuan guru dan kader-kader muda NW, banyak di antara mereka yang mengikuti langkah beliau masuk di ranah politik praktis dan berhasil sebagai bupati dan walikota.

Konflik juga telah mendorong kader-kader NW untuk memperluas sayap organisasi ke tingkat nasional. Sejak era reformasi NW telah hadir di kota-kota besar seperti Jakarta, Samarinda, Bogor, Yogyakarta, Batam, dan Makasar. Ketika pendiri NW masih hidup, fokus pembangunan NW lebih kepada daerah Lombok, bahkan NW identik dengan ke-Sasakan-nya yang berhasil mengintegrasikan budaya lokal dengan agama. Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri NW dan ulama kharismatik, seringkali menggunakan simbol-simbol lokal sebagai legitimasi dakwahnya supaya cepat diterima oleh masyarakat lokal seperti simbol Gunung Rinjani, Dewi Anjani, Amaq Milasih, Amaq Anom, dan kerajaan Selaparang. Dampaknya bahwa di satu sisi NW sangat kuat mengakar di Lombok, tetapi di sisi lain konsep lokalitas ke-Sasak-an

inilah yang menghambat arus migrasi NW keluar daerah. Sekarang ini, penyebaran NW keluar daerah lebih intens dilakukan oleh para kader NW yang dikirim oleh pengurus pusat untuk berdakwah dan membangun madrasah. Selain itu, posisi gubernur NTB dan politisi NW yang terlibat di partai politik nasional juga sangat membantu mengenalkan NW keluar daerah lewat jalur komunikasi politik dan jaringan struktural di pemerintahan. Sebagai kelompok majoritas di Lombok keberadaan NW sangat diperhitungkan oleh pemerintah pusat sebagai mitra politik untuk kebutuhan Pileg dan Pilpres.

Potensi besar yang dimainkan oleh NW sebagai kelompok mayoritas tidak akan pernah sempurna jika konflik masih menghantui para kadernya. Upaya-upaya islah atau rekonsiliasi selama ini selalu kandas di tengah jalan. Kedua kubu belum menemukan kata sepakat dalam proses rekonsiliasi karena kurangnya dialog dan kuatnya kepentingan kelompok ketiga yang sengaja menginginkan konflik tetap dipertahankan. Faktor wasiat pendiri NW yang meramalkan durasi konflik selama seperlima abad atau 20 tahun dijadikan dalih untuk menunda kesepakatan 'islah' karena khawatir jika wasiat tersebut tidak benar. Kebuntuan kran islah dan rekonsiliasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh kader NW untuk mencari jalan alternatif. Ruang-ruang sosial perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyatukan NW termasuk ruang sosial-politik. Pada Pilkada bupati Lombok Tengah di tahun 2010 misalnya, NW menggunakan jalur politik sebagai *bargaining position* menuju islah dan ternyata cukup berhasil. Kedua kubu berhasil mempertemukan masing-masing pimpinan organisasi dan melakukan kerja sama dalam bidang politik, yakni mendukung calon dari salah satu kubu yang ikut dalam Pilkada. Akan tetapi kegagalan menuju kursi bupati pada Pilkada tersebut membuat proses rekonsiliasi tersendat-sendat dan kandas di tengah jalan.

Kompleksitas konflik NW yang tidak ada ujungnya ini telah menggugah saya selaku akademisi yang lahir dari rahim dan besar di lingkungan NW untuk meneliti apa sebenarnya yang menjadi faktor utama konflik tersebut dan cara mengatasinya. Saya berharap, buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang menawarkan jalan tengah menuju rekonsiliasi NW. Buku ini tidak hanya bicara konflik dan rekonsiliasi, akan tetapi mengupas lebih dalam kultur NW yang dikembangkan oleh Tuan Guru Zainuddin. Kultur Islam versi NW sangat menarik untuk dikaji lebih jauh karena banyak sekali kekayaan lokal NW yang belum begitu dipahami oleh komunitas NW sendiri, apalagi komunitas di luar NW. Pada akhirnya, kritik, perbaikan dan juga saran sangat saya harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan buku ini.

Mataram, Oktober 2019

SH

Daftar Isi

BAB 1
Politik, Agama dan Reproduksi Konflik Sosial Pasca Reformasi

Janganlah nanda dibikin bubur
Oleh pemain politik catur
Peralat untuk melawan batur
Sehingga ukhuwah hancur lebur
(Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Wasiat Renungan Masa, 2002: 49)

Pendahuluan

Fenomena konflik merupakan salah satu ancaman besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi. Jatuhnya rezim Suharto pada 1998 ditandai dengan munculnya berbagai konflik komunal di beberapa daerah di Indonesia (Anwar et.al 2005; Avonius 2004; Nugroho et.al 2004; Woodward 2007). Pada dasarnya konflik bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia yang muncul hanya pada masa reformasi, namun konflik telah muncul jauh sebelum masa kemerdekaan. Bahkan konflik memiliki sejarah sendiri dan memainkan peran penting bagi lahir dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bangsa Indonesia lahir dan tumbuh dari konflik ketika rakyat Indonesia harus berhadapan dengan kelompok kolonial. Selama

tiga setengah abad rakyat Indonesia mengalami konflik dan perang melawan penjajah Belanda (Cady dan Simon 2007; Colombijn 2001; Ricklefs 2005; Rozi 2006). Setelah berhasil mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan, benih-benih konflik tidak hilang begitu saja, sebaliknya konflik muncul dan mengalami reproduksi dalam ruang, proses, struktur, konteks, dan sejarah yang berbeda.

Konflik vertikal dan horizontal terus meluas melanda bangsa Indonesia sejak awal masa kemerdekaan hingga era reformasi. Sukarno menghadapi berbagai konflik politik di daerah dan di pusat yang akhirnya memaksa dirinya menyerahkan tampuk kepemimpinan negara kepada Mayor Jenderal Suharto pada pertengahan 1966 (Ricklefs 2005: 518). Pada tahun 1968 Suharto resmi dilantik sebagai Presiden kedua Indonesia dan memulai babak baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Kebijakan pemerintah Orde Baru terfokus pada bidang stabilitas politik, ekonomi, dan pembangunan. Ricklefs (2005: 561) mengatakan, selama sekitar dua belas tahun rezim Orde Baru mencapai keberhasilan yang luar biasa; mereka mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan peningkatan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dari tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar 7,7% dan tidak pernah berada di bawah 5% (Hefner 1999: 20; Ricklefs 2005: 594). Kondisi ini membuat bangsa Indonesia sangat disegani oleh masyarakat dunia terutama di kawasan Asia Tenggara.

Keberhasilan Suharto dalam pembangunan ekonomi dan politik ternyata tidak sepenuhnya memuaskan banyak pihak oleh karena praktiknya yang dianggap sarat nuansa ketidakadilan dan ketimpangan (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Demonstrasi sebagai bentuk protes dari masyarakat di beberapa daerah yang menuntut keadilan dan pemerataan pembangunan tidak selalu direspons

secara positif oleh pemerintah Orde Baru yang dikenal otoriter. Sebaliknya, tidak jarang pemerintah merespons secara negatif dan mengklaim para demonstran sebagai kelompok pemberontak atau kelompok separatis yang makar terhadap kebijakan pemerintah dan negara (Anderson 2001; Cady dan Simon 2007; Tomagola 2006). Dampak dari sikap pemerintah tersebut melahirkan reaksi dan resistensi dari masyarakat sehingga terjadi konflik dan kekerasan yang berkepanjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Tunjuk misalnya Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Papua Merdeka, dan Republik Maluku Selatan (RMS) bukan lahir sebagai kelompok separatis yang makar terhadap pemerintah. Mereka adalah aktor-aktor lokal yang kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak seimbang dalam distribusi ekonomi dan peluang politik yang proporsional dan lebih cenderung pada etnis dan daerah tertentu. Isu separatisme mengalami politisasi oleh pemerintah untuk meredam gejolak yang ditimbulkan oleh gerakan tersebut (Andrianto 2000; Cady dan Simon 2007; Nugroho et.al 2004; Siregar 2004; Trijono 2004).

Saya berpendapat bahwa sebagian besar konflik sosial yang muncul sekarang ini tidak lepas dari kesalahan pemerintah Orde Baru. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Orde Baru selama 32 tahun mengalami titik balik pada masa reformasi yang memberikan kebebasan untuk berpendapat dan bersuara melalui sistem politik baru yang lebih demokratis dan terbuka. Negara tidak lagi memiliki kontrol yang kuat seperti yang terjadi pada masa Orde Baru sehingga berbias pada stabilitas sosial-politik nasional dan lokal. Konflik-konflik yang muncul pada masa reformasi lebih bersifat komunal yang melibatkan masyarakat, etnis, organisasi atau institusi sosial lainnya (Abdullah 2001: 36; Tomagola 2006: 14-15). Konflik komunal bersifat kompleks karena didasari oleh berbagai agenda dan kepentingan kelompok tertentu sehingga

sulit untuk mengidentifikasi apakah konflik tersebut murni konflik agama, etnis, politik, ekonomi atau budaya. Van Klinken (2005: 91) mengatakan bahwa konflik komunal semakin produktif ketika melibatkan unsur-unsur identitas yang lebih luas seperti unsur agama, budaya dan etnis sebagai instrumen konflik.

Konflik tidak hanya disebabkan oleh perbedaan identitas budaya, bahasa, dan agama, tetapi juga karena kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan (Bowen 1996; Cady dan Simon 2007; Giddens 1997; Horowitz 1985; Tambiah 1996). Anthony Giddens (1997:571) mengatakan, konflik sangat dekat dengan ideologi, politik dan kekuasaan, bahkan sebagian besar konflik hanya disebabkan oleh faktor kekuasaan. Fenomena konflik komunal di Indonesia seperti yang terjadi di Ambon, Maluku, Poso, Kalimantan Tengah dan Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan politik. Menurut Van Klinken (2005: 94), unsur politik sangat dominan pada kasus-kasus konflik di daerah tersebut sehingga menyebabkan konflik terus mengalami polarisasi, reproduksi, dan eskalasi.

Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang sangat rawan dengan konflik komunal sejak Orde Baru turun dari kekuasaan. Dalam satu dekade terakhir ini, beberapa kasus konflik komunal muncul di daerah yang dikenal dengan pulau seribu masjid ini di antaranya konflik antara kampung, antara agama, dan konflik internal keagamaan yang melibatkan Ormas-ormas Islam (Hamdi 2011; Kristiansen 2003; Lan 2006; Santoso 2002; Sihbudi 2001). Konflik yang bersifat keagamaan mendominasi konflik komunal yang terjadi di Lombok seperti konflik antara Islam dengan Kristen (2000) di Mataram, konflik internal organisasi Nahdlatul Wathan (1998-2009) di Lombok Timur, konflik antara Jemaah Ahmadiyah dengan masyarakat lokal (2002) di seluruh Lombok, konflik

kelompok Amphibi dengan komunitas Hindu di Mataram (1999), Amphibi dengan komunitas desa Perampuan (2000) di Lombok Barat, dan konflik LDII dengan masyarakat lokal (2002) di Lombok Timur (Avonius 2004; Macdougall 2007; Santoso 2002; Sihbudi 2001). Adapun faktor-faktor penyebab konflik di Lombok bervariasi termasuk faktor ekonomi, kepentingan politik, perbedaan ajaran, provokasi, budaya kawin lari, sengketa tanah, kebijakan pemerintah daerah di bidang pemekaran, perkelahian antara pemuda, dan budaya main hakim sendiri.

Buku ini akan mengeksplorasi konflik komunal yang terjadi di internal organisasi Nahdlatul Wathan (selanjutnya disebut NW) di Lombok Timur 1998-2010. Walaupun sudah tidak ada lagi kekerasan antara warga NW yang terbagi menjadi dua kelompok, namun perpecahan di tingkat struktural masih terus tetap terjadi hingga sekarang. Rekonsiliasi yang digagas oleh kedua kubu mengalami kegagalan di tengah jalan karena tingginya tingkat kepentingan berbagai agen di dalam NW (Hamdi 2011: 8). NW adalah organisasi sosial keagamaan yang berdiri pada 1953 di Lombok Timur, Lombok, NTB. Organisasi ini didirikan oleh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Madjid, salah seorang tokoh sufi yang kharismatik. Dalam waktu yang tidak lama, NW menjelma sebagai kelompok mayoritas Muslim di Lombok dengan jumlah anggota lebih dari setengah dari penduduk Pulau Lombok yang berjumlah tiga juta.[1] NW berkembang pesat melalui pengajian umum dan lembaga pendidikan (madrasah dan perguruan tinggi) dan lembaga sosial yang tersebar di seluruh daerah di Pulau Lombok. NW juga memiliki cabang organisasi di luar darah termasuk di Bali, Jakarta,

[1] Tidak ada data statistik yang pasti tentang jumlah anggota NW karena selama ini belum ada sistem yang memuat identitas keanggotaan NW dalam bentuk kartu anggota. Dari perolehan suara pada Pemilu dan Pilkada di Lombok menunjukkan bahwa jumlah warga NW melebihi setengah dari penduduk Lombok.

Kalimantan, Sulawesi, Yogyakarta, dan Jawa Barat (Baharuddin & Rasmianto 2004; Muhtar 2010; Muslim 2014; Nahdi 2012).

NW mengalami perpecahan dan konflik komunal setelah Tuan Guru Zainuddin wafat pada 1997. Sebenarnya, jauh sebelum Tuan Guru Zainuddin wafat, benih-benih perpecahan telah muncul di tubuh NW dan semakin tajam ketika beliau wafat dan diperparah dengan kondisi politik nasional pasca reformasi (Hamdi 2011; Muhtar 2010; Saprudin 2005). Munculnya konflik ini oleh karena dualisme kepemimpinan di tubuh NW yang melibatkan kedua putri beliau, yaitu Ummi Rauhun (R1) dan Ummi Raihanun (R2). Mereka bersaing memperebutkan posisi sebagai pemimpin NW yang baru menggantikan Tuan Guru Zainuddin yang telah wafat. Konflik mengalami puncak pada Muktamar NW ke-10 1998 di Praya, Lombok Tengah. Hasil Muktamar menunjukkan bahwa salah satu kubu memenangi pemilihan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW untuk lima tahun ke depan. Kemenangan ini tidak diterima oleh kubu yang lain karena dianggap tidak sah dan melanggar aturan organisasi. Hasil Muktamar ke-10 melahirkan pro-kontra di kalangan elit-elit NW sehingga berdampak pada konflik dan kekerasan antara pendukung kedua kubu (Hamdi dan Smith 2012; Mugni 2013; Nazri 2000; Sapruddin 2005).

Perpecahan dan konflik semakin tajam antara kedua kubu pasca Muktamar NW ke-10. Kekerasan antara masing-masing pendukung tidak bisa dihindari dan memaksa salah satu kubu yang mengklaim sebagai pemenang pada Muktamar ke-10 harus pindah dari desa Pancor (pusat organsiasi NW). Mereka pindah ke desa Kalijaga tahun 1999 dan kemudian pindah lagi ke desa Anjani di tahun 2001 (Hamdi dan Smith 2012; Mugni 2013). Kubu ini menjadikan desa Anjani sebagai pusat organisasi untuk menjalankan kegiatan pendidikan, sosial dan dakwah. Sedangkan kubu

kontra hasil Muktamar ke-10 tetap melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Karena tidak ada ruang untuk menyelesaikan konflik dan perpecahan kubu ini kemudian melakukan Muktamar yang dikenal dengan Muktamar Reformasi dan kepengurusannya tetap berpusat di Pancor. Kepengurusan ganda di dalam organisasi NW tidak membuat konflik semakin surut, bahkan terus meluas ke desa-desa yang merupakan basis massa kedua kubu NW. Konflik yang melibatkan keluarga dan elit-elit NW berubah menjadi konflik sosial yang melibatkan jemaah NW secara keseluruhan (Hadi 2010; Hamdi 2011; Muhtar 2010).

Perpecahan dan konflik internal antar jemaah NW terus mengalami eskalasi. Sepanjang 1998-2002 berbagai tragedi dan peristiwa kemanusiaan terjadi di komunitas NW seperti pengerusakan dan pembakaran rumah bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh masing-masing kubu. Massa kedua kubu tidak henti-hentinya saling membalas menyerang. Situasi tidak terkontrol dan sangat mencekam selama periode tersebut. Meskipun kekerasan fisik mulai berkurang sejak tahun 2005, tetapi perpecahan NW secara struktural masih terjadi hingga sekarang. Rekonsiliasi yang terus diupayakan oleh kaum intelektual NW belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pertanyannya adalah mengapa konflik komunal antara kerabat dapat terjadi dan bagaimana peran kekerabatan dalam konflik tersebut? Mengapa konflik NW terus berlanjut dan mengapa terjadi pemeliharaan konflik di kalangan elit-elit NW?

Saya melihat bahwa konflik NW tidak disebabkan oleh satu faktor, tetapi banyak faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya konflik seperti faktor ekonomi, politik, status sosial, kekerabatan, poligami, dan gender. Faktor gender misalnya walaupun bukan faktor utama, namun isu gender telah menjadi pemicu konflik di kalangan elit-elit NW (Smith dan Hamdi 2014: 37). Keterlibatan

elit-elit NW dalam kancah politik lokal dan nasional serta afiliasi NW ke partai politik membawa kepada sebuah asumsi tentang adanya faktor politik yang ikut memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dinamika konflik. Elit-elit NW tidak hanya memperebutkan sumber-sumber modal ekonomi yang berbentuk barang atau material, tetapi juga memperebutkan massa atau jemaah NW supaya bergabung ke kubu masing-masing (Hamdi 2011: 134). Keterlibatan keluarga pendiri NW dalam konflik ikut mempengaruhi tingkat intensitas konflik. Semakin dekat hubungan relasi antara aktor-aktor konflik, maka semakin intens konflik tersebut (Coser 1956: 67).

Begitu juga keterlibatan pihak ketiga, yaitu tokoh-tokoh intelektual NW seperti para dosen, guru, pengusaha, politisi, birokrat, dan termasuk tokoh-tokoh agama atau yang dikenal dengan sebutan tuan guru dalam tradisi Lombok. Tuan guru memainkan peran penting dan menjadi kunci atas berbagai peristiwa konflik dan kekerasan karena mereka mempunyai pengaruh kuat di masyarakat. Setiap tuan guru membawa massa dengan jumlah besar yang setia kepada pimpinan masing-masing. Massa dari masing-masing tuan guru inilah yang seringkali berhadap-hadapan dan melakukan tindak kekerasan satu sama lain. Massa dari tuan guru berani mati hanya untuk membela tuan gurunya dari serangan pendukung tuan guru yang lain.

Konflik, konsensus, dan *sharing* kekuasaan

Konflik dan konsensus ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat. Konflik dan konsensus selalu hadir secara bergantian dalam konteks, ruang, sejarah, dan interaksi sosial. Konflik dan konsensus sama-sama memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam sejarah

perkembangan studi konflik, para sarjana tidak hanya melihat konflik sebagai sesuatu yang disfungsional, tetapi konflik juga sebagai sesuatu yang fungsional. Ketika konsensus tidak dapat dicapai dan mengalami jalan buntu, maka konflik dapat berfungsi sebagai alternatif untuk pemecahan sebuah masalah. Konflik dapat berfungsi sebagai media negosiasi bagi kelompok yang bermusuhan dan bertentangan. Konflik dapat juga berfungsi untuk membangun dan menjaga keseimbangan kekuatan antara kelompok sehingga tidak ada dominasi kubu tertentu terhadap kubu yang lain.

Konflik NW salah satunya disebabkan oleh kegagalan elit-elit NW dari kedua kubu untuk melakukan konsensus dan *sharing* kekuasaan secara seimbang. Salah satu kubu berusaha mendominasi sumber-sumber modal yang terdapat di NW dan mencoba menutup akses dan peluang atas sumber modal terhadap kubu yang lain. Dominasi sumber-sumber modal ini menimbulkan resistensi dan perlawanan dari kubu yang merasa didominasi. Konsensus yang seharusnya sebagai pilihan ideal bagi kedua kubu untuk mengatasi persoalan *sharing* kekuasaan dan modal sulit untuk direalisasikan. Dalam kenyataannya, kedua kubu memilih konflik sebagai alat negosiasi dan memecah kebutuan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Hingga sekarang konflik tetap dijadikan pilihan dalam proses *sharing* kekuasaan yang berimbang.

Melihat konflik yang memiliki fungsi yang sama dengan konsensus di masyarakat, maka konflik memiliki nilai-nilai positif. Namun pandangan yang sering muncul adalah konflik hanya dilihat di sisi negatifnya karena kesalahan asumsi tentang konflik itu sendiri yang selalu identik dengan kekerasan. Sementara konflik dari segi filosofis dan teoretis berbeda dengan kekerasan.[2] Konflik

[2] Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Konflik merupakan proses sosial yang akan terus terjadi di masyarakat baik individu maupun kelompok dalam rangka perubahan untuk mencapai tujuan yang

tidak harus disertai dengan kekerasan, dan kekerasan hanyalah salah satu pengaruh dari konflik sosial yang tidak terkontrol dan ter-*manage* dengan baik. Konflik NW yang tidak mampu dikontrol dan dikelola oleh elit-elit NW telah melahirkan kekerasan sosial yang berkepanjangan sejak tahun 1998-2003.

Konflik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu, konflik realistik dan konflik tidak realistik. Konflik realistik adalah konflik yang memiliki agenda dan tujuan yang jelas sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Konflik realistik akan membawa dampak perubahan sosial yang sehat dan positif-konstruktif. Konflik realistik bisa berubah menjadi konflik yang tidak realistik karena muncul agenda dan kepentingan baru yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh para elit selama konflik berlangsung. Oleh karena itu, peran elit sangat menentukan akan kemana mereka mengarahkan konflik itu. Sedangkan konflik tidak realistik merupakan konflik yang tidak memiliki agenda dan tujuan yang jelas sehingga konflik terus mengambang. Konflik ini tidak akan pernah selesai dan selalu mengalami reproduksi dalam tubuh sosial. Konflik ini akan melahirkan perubahan yang tidak sehat atau negatif-destruktif.

Konflik akan mengalami reproduksi dan polarisasi jika konflik tidak mengerucut pada persoalan yang sebenarnya. Peran kelompok ketiga atau provokator sangat krusial dalam proses reproduksi konflik. Keberadaan mereka sulit dilacak karena selalu berada di balik layar. Mereka sangat pintar memanfaatkan celah-celah konflik, sementara pihak-pihak yang bertikai sangat lemah dalam mengkonfirmasi dan atau melakukan *cross-check* informasi sehingga elit dan massa mudah diprovokasi. Eksistensi aktor dan

---

diinginkan dengan cara menentang lawannya. Artinya, konflik memiliki agenda dan target yang jelas, bukan perlawanan membabi-buta. Adapun kekerasan merupakan gejala yang muncul sebagai salah satu efek dari adanya proses sosial yang biasanya ditandai dengan perusakan dan perkelahian (Waluya 2007: 35).

ruang sosial juga dapat mempengaruhi level dan intensitas konflik. Semakin dekat hubungan antara aktor, maka konflik semakin intens dan sebaliknya. Begitu juga dengan ruang konflik, semakin sempit ruang konflik, maka semakin mudah untuk dikelola; semakin luas ruang konflik, maka konflik semakin kompleks dan sulit untuk dikelola.

Intensitas konflik NW yang sangat tinggi salah satunya disebabkan oleh keterlibatan pihak keluarga dan kerabat dalam konflik. Konflik keluarga dan kekerabatan ini kemudian berubah menjadi konflik sosial yang melibatkan jemaahNW hampir di seluruh Pulau Lombok. Begitu juga dengan peran kelompok *grass root* yang sangat fanatik dan loyal pada kubu masing-masing ikut memberikan kontribusi terhadap meluasnya konflik NW ke desa-desa. Mereka mengikuti seluruh perintah pimpinan NW tanpa memikirkan lebih jauh konsekuensi dan akibat dari perintah tersebut. Pola kepemimpinan sufi yang sangat kuat telah mengontrol perilaku dan sikap jemaahNW. Doktrin NW dalam konsep kepemimpinan sufi adalah tidak boleh menentang atau melawan perintah pimpinan atau akan dikeluarkan dan dipecat dari NW. Mereka juga bersaing mempromosikan dan mensosialisasikan eksistensi kubu masing-masing dan mengklaim sebagai kelompok yang sah di NW.

Berdasarkan latar belakang dan asumsi-asumsi di atas, maka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peta konflik di tubuh organisasi NW, dan siapa aktor dan apa akar masalahnya? Bagaimana masyarakat lokal memahami dan menafsirkan konflik, dan mengapa terjadi proses reproduksi dan eskalasi konflik dalam organisasi NW? Mengapa rekonsiliasi tidak bisa terjadi di kalangan para elit NW dan bagaimana peran agama dan mengapa agama tidak dapat menyelesaikan konflik?

Konflik sosial telah banyak diteliti oleh para sarjana baik

di tingkat nasional maupun internasional. Hasil penelitian studi konflik menunjukkan adanya kecenderungan perbedaan pola-pola konflik yang terjadi di masyarakat. Setidaknya terdapat dua pola konflik yang muncul, yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal yaitu konflik yang melibatkan masyarakat bawah dengan pemerintah, sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang melibatkan agen-agen di tingkat masyarakat. Konflik horizontal dapat terjadi secara internal dan eksternal. Secara internal, konflik horizontal melibatkan agen-agen yang terdapat di dalam satu komunitas, sedangkan secara eksternal konflik ini melibatkan agen-agen di sebuah komunitas dengan agen-agen dari komunitas yang lain (Tomagola 2006: 41).

Di antara tulisan para sarjana yang masuk dalam kategori konflik vertikal, yaitu Ronald Jay May (2005) membahas tentang konflik antara suku di Melanesia pasca kolonial, Ted Robert Gurr (1993) membahas fenomena konflik dan kekerasan yang melibatkan kelompok suku minoritas dengan pemerintah di berbagai negera, Stanley J. Tambiah (1996) membahas tentang konflik vertikal di beberapa negara termasuk di Asia Selatan seperti Sri Lanka dan India yang melibatkan etnis minoritas dengan pemerintah yang berkuasa pasca kemerdekaan, Irwan Abdullah (2001) membahas tentang berbagai konflik etnis yang muncul di beberapa daerah akibat ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam, faktor-faktor penyebab konflik, relasi antara etnis dan perubahannya, dan pluralitas politik dalam diri etnis. Zaenuddin H. Prasojo (2008) mengkaji tentang kerusuhan antara suku Dayak dan Madura dalam berita, apa kepentingan mereka membuat pemberitaan, siapa aktor dan pengaruhnya terhadap kosntruksi bangunan asumsi publik terhadap pemberitaan tersebut. Sarjana lain yang masuk dalam kategori ini adalah John R. Bowen (1996) membahas adanya kesalahan persepsi tentang faktor-

faktor yang menyebabkan konflik etnis dan agama di negara Balkan, Abhoud Syed M. Lingga (2007) dan Kamlian (2004) membahas konflik etnis dan agama di Filipina dan peran pihak ketiga dalam proses perdamaian, dan Siregar (2004) menjelaskan bahwa konflik di Papua berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi.

Adapun yang masuk dalam kategori konflik horizontal adalah Gerry Van Klinken (2005) yang membahas tentang konflik antara agama di Ambon, Poso, dan Maluku Utara, dan konflik antara suku di Kalimantan, Donald L. Horowitz (1985) membahas fenomena konflik antara etnis di negara-negara Asia dan Eropa Timur, David G. Bromley dan J. Gordon Melton (2002) membahas kekerasan dan konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan ideologi dan doktrin antarkelompok sosial keagamaan.

Kajian di sini masuk dalam kategori konflik horizontal karena melibatkan aktor-aktor dari dalam komunitas sendiri. Meskipun memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian di atas, namun terdapat perbedaan pada fokus dan penekanannya. Para sarjana di atas lebih cenderung meneliti konflik di dalam sebuah komunitas, bukan organisasi sebagaimana fokus dalam buku ini. Perbedaan yang lain adalah studi dalam buku ini tidak membahas faktor perbedaan identitas budaya, bahasa, ideologi, dan agama sebagaimana banyak dibahas di atas, tetapi lebih pada aspek-aspek lain seperti sistem kekerabatan, kharisma, relasi keluarga, politik, kepemimpinan, ekonomi, dan peran agama di dalam konflik.

Di dalam konteks literatur NW, kajian ini selain memiliki persamaan terdapat juga perbedaan. Penelitian tentang NW sendiri pada dasarnya belum banyak dilakukan oleh para sarjana, apalagi penelitian khusus tentang konflik NW masih jarang. Di antara para sarjana yang membahas NW adalah M. Yusuf (1976) membahas tentang sejarah awal perkembangan organisasi NW, Abdul Hayyi

Nu'man (1999), Baharuddin dan Rasmianto (2004) membahas tentang sejarah kehidupan Tuan Guru Zainuddin dan sepak terjangnya di dalam berdakwah di Lombok, Muhammad Noor et.al (2004) membahas tentang pemikiran Tuan Guru Zainuddin dan visi kebangsaan dan religiusnya, Baharuddin (2007) yang melihat peran Tuan Guru Zainuddin dan Nahdlatul Wathan dalam proses Islamisasi di Lombok terutama di komunitas *Wetu Telu*. Fahrurrozi (2011) membahas tentang mobilisasi massa NW yang tergabung dalam Partai Bulan Bintang pada Pilkada Gubernur NTB 2008. Peneliti lain yang konsen dengan NW adalah antropolog feminis Bianca J. Smith (2012) menulis tentang NW dari perspektif gender, orang sakti *(pepadu)* dan kepemimpinan perempuan. Smith (2014) juga menulis tentang otoritas spiritual perempuan dan turunnya wahyu Tuhan di kelompok mistik dan pesantren Sufi salah satunya adalah pesantren NW di Lombok.

Adapun literatur tentang konflik NW belum banyak muncul dan sangat terbatas. Beberapa tulisan yang membahas konflik NW, yaitu Nazri (2001) membahas kronologi perselisihan antara keluarga Tuan Guru Zainuddin dan para pendukungnya yang berujung pada konflik dan perpecahan NW, Sapruddin (2005) juga membahas konflik antara Kubu Rauhun dengan Kubu Raihanun dalam organisasi NW, M. Mugni (2013) membahas tentang NW pasca Tuan Guru Zainuddin yang mengalami konflik dan perpecahan pasca Muktamar NW ke-10 di Praya Lombok Tengah 1998. Mugni juga membahas kepemimpinan Siti Raihanun dan kiprahnya di bidang politik nasional dan dakwah NW. Abdul Hadi (2010) lebih melihat munculnya konflik karena tidak ada tokoh yang setara kharisma dan keilmuannya untuk menggantikan Tuan Guru Zainuddin. Konflik NW juga pernah ditulis oleh Fathurrahman Muhtar (2010) membahas tentang konflik NW yang berimbas pada konflik pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan NW pasca

munculnya dualisme kepemimpinan. Hamdi dan Bianca J. Smith (2012; 2014) membahas tentang gerakan Sufi dan Salafi dalam kepemimpinan NW, peran kepemimpinan kaum perempuan serta proses rekonsiliasi antara elit-elit NW. Hamdi (2011) juga membahas tentang negosasi Islah dan politik NW di era otonomi daerah.

Reproduksi sosial atas konflik dan kekuasaan

Konflik merupakan sebuah fenomena sosial yang selalu hadir di tubuh masyarakat. Selama manusia hidup, maka konflik akan selalu muncul, tidak terhindarkan, dan sering bersifat agresif dan kreatif (Bowen 1996; Fisher et.al 2000; Gurr 1993; Rummel 1976). Sebagai sebuah konstruksi sosial, konflik mengalami transformasi makna dan definisi di dalam ruang, konteks, dan struktur sosial yang berbeda-beda. Studi konflik telah mengalami perkembangan pesat ketika muncul teori kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx. Meskipun teori kelas tidak secara langsung membahas konflik sosial, namun teori tersebut menjadi sumber dasar filosofis dan teoritis bagi teori konflik. Menurut teori kelas, masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial berdasarkan nilai ekonomi dan sistem penguasaan alat-alat reproduksi. Di dalam relasi kelas-kelas sosial terdapat unsur dominasi oleh salah satu kelas terhadap kelas yang lain (Dahrendorf 1986: 21; Resnick dan Wolff 2013: 93).

Dahrendorf sendiri mengembangkan teori konflik dengan menguji teori kelas yang dikembangkan oleh Marx. Dahrendorf menggunakan istilah kekuasaan dan otoritas sebagai pisau analisa untuk memahami proses dan mekanisme konflik di dalam sebuah organisasi, asosiasi atau institusi sosial. Dahrendorf (1986: 202) mengatakan, konflik muncul dari sistem pembagian peran dan posisi dalam sebuah organisasi atau institusi karena terdapat unsur paksaan atau dominasi oleh satu kelompok (mendominasi)

terhadap kelompok yang lain (terdominasi). Pembagian posisi dan peran melahirkan sistem relasi kekuasaan dan otoritas dalam diri kelompok. Kekuasaan dan otoritas sama-sama memiliki dampak dan pengaruh yang kuat dalam praktik kontrol dan dominasi oleh seseorang terhadap orang lain. Perbedaan antara keduanya terletak pada kenyataan bahwa kekuasaan berhubungan dengan kepribadian atau personalitas individual, sementara otoritas berhubungan dengan posisi dan peran sosial seseorang (Dahrendorf 1986; Harrison 1959; Weller 2008).

Dahrendorf (1986: 204) tidak menafikan pengaruh kekuasaan dalam konflik, tetapi dia lebih memfokuskan kajian pada aspek otoritas daripada kekuasaan karena sistem relasi otoritatif yang berlaku dan dipraktikkan dalam sistem organisasi modern. Otoritas melahirkan relasi sosial yang bersifat '*super* dan *sub-ordinate*', yang mana praktik dominasi dan subjeksi dijalankan. Otoritas merupakan sebuah karakter universal dalam organisasi sosial modern sebagaimana masyarakat itu sendiri. Ketika otoritas dalam posisi itu, maka konflik dapat dipastikan terus akan terjadi di setiap organisasi, seperti dalam institusi negara, pemerintah, pendidikan, dan agama. Dahrendorf (1986: 201) tidak melihat adanya kerja sama secara sukarela atau konsensus umum dalam sebuah organisasi, tetapi praktik-praktik paksaanlah yang menyebabkan organisasi sosial melekat satu sama lain.

Sebagai implikasi dari sistem relasi super-subordinasi, konflik, dan kekuasaan akan terus mengalami reproduksi dalam organisasi atau institusi sosial. Antara kekuasan dan konflik terdapat dialektika, meskipun kekuasaan bukanlah satu-satunya faktor penyebab terjadinya konflik. Anthony Giddens (1997:571) mengatakan, konflik sangat dekat dengan ideologi dan kekuasaan. Lebih lanjut Giddens mengatakan bahwa sebagian besar konflik hanya karena

kekuasan. Memahami proses dan mekanisme reproduksi sosial dalam suatu masyarakat termasuk reproduksi atas konflik dan kekuasaan melibatkan unsur struktur, agen, sejarah, dan kekuatan budaya (Coser 1956; Giddens 2003; Harker et.al 2006). Bourdieu (1977) dalam teori habitusnya mencoba menjelaskan proses dan mekanisme reproduksi sosial.

Habitus mengacu pada sekumpulan pradisposisi yang tercipta dan terformulasi melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal (Bourdieu 1977; Harker et.al 2006: 13; Haryatmoko 2003). Dalam bahasa yang sederhana, habitus adalah lingkungan sosio-kultural yang mempradisposisi agen-agen dalam ruang sosial. Praktik-praktik sosial menurut Bourdieu (1977:72) diproduksi melalui habitus sebagai strategi melahirkan prinsip yang membuat agen mampu untuk menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan (*unforseen*) dan situasi yang berubah, kemunculannya ditetapkan oleh masa depan. Melalui habitus, praktik-praktik sosial tidak diproduksi melalui sebuah proses deterministik-mekanistik, tetapi melalui mediasi atas orientasi dan keterbatasan yang diberikan oleh operasi habitus tentang penciptaan (Bourdieu 1977: 95). Apa yang diproduksi manusia terbatas dari keterlibatan sejarah personal yang dimiliki dan lingkungan budaya tempat mereka berkembang, namun manusia juga tidak terikat memiliki kebebasan dan kreativitas. (Haryatmoko 2003: 11).

Teori habitus tidak bisa dipahami tanpa melihat hubungannya dengan konsep medan (*field*) dan modal (*capital*). Bourdieu mendefinisikan *field* sebagai '*a social arena in which people maneuver and struggle in pursuit of desirable resources*' (Harker et.al 2006: 10). Habitus dan *field* merupakan dua konsep yang sangat dasariah karena saling mengandaikan dua arah; *field* sebagai struktur objektif dan habitus sebagai struktur subjektif yang telah terintegrasi

pada pelaku. *Field* merupakan sebuah sistem tentang posisi-posisi sosial yang terstruktur secara internal dalam kerangka hubungan kekuasaan (Haryatmoko 2003: 14). Konsep *field* pada dasarnya merupakan pengembangan konsep kelas dalam teori Marx, namun Bourdieu sendiri tidak setuju dengan konsep kelas yang menganalisa masyarakat hanya berdasarkan pada relasi ekonomi. Bourdieu menggunakan *field* sebagai gambaran diversitas ruang-ruang sosial dan menekankan bahwa kapasitas intelektual para agen secara aktif bersandar atau berinteraksi pada produksi budaya dan sistem simbol sebagai peran yang esensial dalam memproduksi struktur sosial tentang kekuasan dan dominasi (Harker et.al 2006; Haryatmoko 2003).

Bourdieu melihat modal tidak hanya berupa materi nyata, tetapi bisa berbentuk modal sosial, budaya, dan modal simbolik (Harker et.al 2006: 16). Pertarungan dalam perebutan modal akan memunculkan konflik antara agen-agen sosial. Menurut Bourdieu semua modal memainkan peran penting dalam posisi-posisi sosial, tidak hanya modal ekonomi tetapi semua modal. Setiap generasi akan mempertahankan dan mereproduksi modal-modal yang mereka miliki. Peran habitus dan *field* menentukan arah dan jenis modal yang mereka perebutkan. Kesuksesan agen tidak seratus persen karena kepintaran dan kemampuannya dalam penguasaan modal, peran habitus dan *field* sebagai lingkungan yang mempradisposisi mereka dan modal mereka juga mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Bourdieu (1990) misalnya melihat dominasi kelompok elit dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi media reproduksi kekuasaan bagi kelompok elit karena besarnya dukungan modal yang mereka miliki berdasarkan *field* dan habitus mereka.

Wacana, pengetahuan, dan kekuasaan

Istilah 'wacana' sudah populer digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti bahasa, linguistik, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Dalam buku ini, saya memilih menggunakan teori wacana yang dikembangkan oleh Foucault. Konflik sosial menunjukkan adanya perang wacana terlebih dahulu antara agen dan kemudian berubah menjadi aksi sosial. Wacana memainkan peran penting dalam konflik karena wacana tidak hadir dalam keadaan kosong, tetapi melalui pertarungan atau konflik dengan wacana-wacana yang sudah ada. Foucault sebagaimana dikutip oleh Lara Lessa (2006:283) mendefiniskan wacana *'as sistems of thoughts composed of ideas, attitudes, courses of action, beliefs and practices that sistematically construct the subjects and the worlds of which they speak'*. Struktur wacana dapat dideteksi melalui sistematisasi ide-ide, pendapat, konsep, cara berpikir, dan tindakan yang dibangun dalam konteks tertentu. Foucault (1970) menekankan di dalam melakukan analisa struktur wacana tidak untuk menemukan kebenaran atau keaslian statemen, tetapi untuk menemukan dukungan mekanisme-mekanisme yang membangun dan menjaganya di tempat. Dukungan mekanisme ini berada di dalam dan di luar wacana itu sendiri dalam kekuatan sosial budaya. Dengan demikian, wacana tidak bebas nilai karena melibatkan dukungan otoritas dan kekuasaan untuk melegitimasi kebenarannya.

Wacana dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Ia merupakan elemen kunci dalam pembahasan wacana dan pengetahuan karena pengetahuan dan wacana dilegitimasi oleh kekuasaan dan otoritas. Hubungan tersebut tidak hanya diasumsikan karena adanya kekuasaan dan otoritas 'kebenaran' dalam pengetahuan dan wacana, tetapi juga ia memiliki kekuasaan untuk membuat benar (Hall 1997: 49-50). Kebenaran di sini bukanlah kebenaran

pengetahuan yang absolut, tetapi formasi wacana yang menjaga rezim kebenaran. Wacana tidak lahir dalam keadaan vacum atau kosong, tetapi dalam konstansi konflik dengan wacana sosial lain atau dengan praktik-praktik sosial lain yang menginformasikan mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya (Mills 1997: 189). Bourdieu (1977:64) menyebut kondisi ini sebagai '*doxa*' di mana wacana dominan diterima sebagai suatu kebenaran yang tidak boleh disentuh, dipertanyakan, dan dikritisi lagi karena kuatnya rezim kebenaran di dalamnya. Namun menurut Bourdieu (1977:165) pertarungan wacana akan terus berlanjut dan saling bergantian merebut posisi penting, baik itu wacana dominan '*orthodoxa*' maupun wacana yang terpinggirkan '*heterodoxa*'.

Kekuasaan sebagai elemen penting dalam hubungan dengan wacana dan pengetahuan menempatkan bahwa setiap hubungan manusia adalah sebuah perjuangan dan negosiasi kekuasaan. Foucault (1980) mengatakan bahwa kekuasaan selalu hadir dan bisa memproduksi dan menekan kebenaran. Kekuasaan menurut Foucault tidak hanya negatif tetapi juga produktif, ia melewati dan memproduksi sesuatu, ia membujuk kesenangan, membentuk pengetahuan, dan memproduksi wacana (Hall 1997: 49-50). Wacana seperti hubungannya dengan kekuasaan juga tidak dapat dipisahkan dengan konflik karena wacana lahir dari konflik dengan wacana yang lain yang diproduksi oleh agen-agen sosial sebelumnya. Perbedaan kepentingan para agen mendorong mereka terus berupaya memproduksi dan mereproduksi wacana-wacana baru sebagai respons dan resistensi terhadap wacana lama yang tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka. Dengan kata lain, sebuah kelompok agen berusaha untuk mempertahankan wacana lama, sedangkan kelompok agen lain berusaha melawan dengan wacana-wacana baru yang bertentangan dan saling berhadapan. Menurut Foucault wacana tidak hanya berfungsi sebagai media untuk

membangun kekuasaan, tetapi juga menumbangkan kekuasaan.

Selain sebagai proses pertarungan wacana, konflik juga telah menjadi salah satu wacana yang independen yang memiliki kekuatan sosial. Menurut Dale Bagshaw (2003: 1-2), 'wacana konflik' itu sendiri dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat sehingga wacana konflik harus diimbangi atau diganti dengan wacana perdamaian. Konflik akan mengalami reproduksi ketika 'wacana konflik' terus mengalami internalisasi dan sosialisasi oleh agen-agen dalam institusi. Menurut Bagshaw (2003:3), lembaga sosial harus difungsikan lebih aktif sebagai media untuk memproduksi wacana perdamaian sehingga dapat memberikan penyadaran kepada agen-agen sosial lainnya. Peran lembaga begitu besar sebagai media produksi dan legitimasi atas kontruksi wacana yang akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat.

Lokasi penelitian

Selama satu tahun lebih saya tinggal di Pancor dan Anjani untuk melakukan penelitian lapangan (2008-2009). Meskipun penelitian ini dilakukan di beberapa desa yang menjadi pusat konflik dan kekerasan antarjemaahNW seperti di Kelayu, Kesik, Wanasaba, Tebaban, Suralaga, Gotong Royong, Majuet, Paok Lombok, Borok Tumbuh, Pancor, dan Anjani, akan tetapi saya memprioritaskan dan menghabiskan sebagian besar waktu saya di Pancor dan Anjani karena kedua desa tersebut merupakan jantung dan pusat organisasi NW. Desa Anjani terletak di sebelah Utara Desa Pancor dengan jarak kurang lebih 8 km (BPS Lotim 2006). Sebelum kubu R2 masuk ke desa ini, penduduknya masih sepi dan daerah ini dikenal penghasil tebu. Sekarang desa ini telah berubah menjadi salah satu pusat pendidikan di NTB yang memiliki ribuan siswa dan mahasiswa. Data-data yang terdapat dalam buku ini adalah hasil

dari wawancara pribadi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh NW, mengadakan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai pihak dan diskusi-diskusi intelektual bersama kelompok akademisi, para tuan guru, dan tokoh-tokoh politik. Saya menyebut penelitian ini sebagai bagian dari *Anthropology at home* karena saya meneliti daerah dan budaya sendiri di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Antropologi di rumah sudah menjadi model penelitian yang familiar dilakukan oleh para Antropolog yang daripada meneliti budaya asing, justru meneliti budaya sendiri (Eriksen 2001: 29). Dalam wacana dan masa pos-kolonial, penduduk asli mempunyai kesempatan untuk meneliti daerah dan budaya sendiri yang selama ini didominasi oleh peneliti-peneliti dari 'Barat' yang biasanya meneliti dunia ketiga yang pernah dijajah.

Sesuai dengan etika penelitian bahwa saya tidak menyebutkan nama-nama orang yang membagi data yang sensitif karena dapat membahayakan informan. Saya mengganti nama asli dengan nama semaran, kecuali tokoh-tokoh yang telah setuju untuk dimasukkan namanya di buku ini. Informan-informan yang saya libatkan dalam penelitian ini cukup berimbang secara kuantitas dari kedua kubu NW, sehingga netralitas sebagai peneliti tetap saya jaga. Sebelum mengadakan wawancara, saya terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan maksud saya kepada informan supaya tidak ada kecurigaan dan salah paham dalam wawancara.

Sebagai setting sosial, penting untuk memahami perkembangan dan perubahan struktural dan kultural organisasi Nahdlatul Wathan di Kelurahan Pancor. Bagaimanapun NW tidak bisa dipisahkan dari Pancor secara historis karena organisasi NW lahir dan berkembang di kelurahan ini. Pendiri NW Tuan Guru Zainuddin dan keluarga besarnya berasal dari Pancor. Sejak berdiri pada tahun 1953, Pancor merupakan satu-satunya pusat organisasi

NW. Namun pasca perpecahan dan konflik di Pancor 1998, pusat organisasi terbagi dua, yaitu di Pancor dan Anjani. Perpecahan terjadi setelah Muktamar NW ke-10 di Praya Lombok Tengah yang menimbulkan konflik dan kekerasan antara pendukung masing-masing kubu. Kondisi inilah yang memaksa salah satu kubu pindah dari Pancor ke Anjani. Di akhir tahun 1998, kubu R2 ini memilih Desa Kalijaga sebagai tempat hijrah atau pindah untuk sementara. Selama empat tahun sejak 1998 mereka membangun pusat organisasi dan lembaga pendidikan NW di Kalijaga kemudian pindah ke Desa Anjani pada 2001. Hingga sekarang Anjani sebagai salah satu pusat organisasi NW selain Pancor.

Mayoritas masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok menganut agama Islam dan lainnya menganut agama Kristen, Hindu, dan Budda (BPS NTB 2008). Mereka tersebar ke dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Maraqit Ta'limat, Wahabi, dan Jamaah Tabligh (BPS NTB 2008). Proses Islamisasi di Lombok sudah mulai sejak abad XVI oleh Sunan Prapen (Sunan Giri) putra dari Ratu Giri. Proses Islamisasi ini belum berhasil secara maksimal selain karena waktu yang terbatas, tetapi juga karena faktor kuatnya kepercayaan lokal masyarakat Sasak (Syakur 2006). Keberhasilan dakwah Islam mulai nampak ketika kelompok Muslim ortodok dari Makassar transimigrasi ke Lombok pada akhir abad XVIII. Islam semakin berkembang setelah munculnya organisasi-organisasi Islam modernis yang aktif menjalankan dakwah ke seluruh daerah di Pulau Lombok (Bartholomew 1999; Budiwanti 2000; Lukman 2007).

Karakter Islam yang berkembang di Lombok pada awalnya adalah Islam sufistik yang bercampur dengan ajaran Hindu dan agama lokal Boda. Sinkretisme ketiga ajaran tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya varian *Islam Wetu Telu* (Avonius 2004;

Baharuddin 2007; Budiwanti 2000; Cederroth 1981; Syakur 2006). Meskipun tidak ada definisi yang pasti tentang aliran *Islam Wetu Telu,* tetapi kelompok ini telah eksis dan menjadi salah satu varian agama Islam yang berkembang cukup lama di Lombok. Dengan demikian, secara makro kelompok Islam dapat dibagi dua yaitu, pertama adalah *Islam Wetu Telu*, yaitu kelompok Islam yang memadukan ajaran Hindu, Boda dengan Islam. Kedua adalah *Islam Waktu Lima,* yaitu kelompok Muslim ortodoks yang memperaktikkan syari'at Islam secara ketat. Islam versi Nahdlatul Wathan yang dikenal terbuka dan toleran dengan tradisi dan budaya lokal sangat akomodatif dengan *Islam Wetu Telu*. Tidak ada wacana yang kuat untuk menghapus atau memusuhi kelompok ini, meskipun ada upaya dakwah di komunitas-komunitas mereka melalui lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren (Baharuddin 2007; Budiwanti 2000).

Di Kelurahan Pancor sendiri saya tidak menemukan adanya informasi tentang keberadaan *Islam Wetu Telu*. Padahal di beberapa desa di sekitar Pancor merupakan tempat basis *Islam Wetu Telu* seperti Desa Sukarara, Kecamatan Sakra, Desa Pengadangan Kecamatan Masbagik (Syakur 2006). Islam yang datang di Pancor sejak awal adalah Islam ortodoks yang mempraktikkan syari'at Islam secara kaffah. Mayoritas masyarakat di Pancor adalah penganut agama Islam dan hanya sebagian kecil yang beragama non Islam, yaitu etnis Cina yang berdagang di Pancor sejak masa pra kemerdekaan dan orang-orang Bali yang bekerja di institusi pemerintahan di Lombok Timur. Selama berdampingan dengan kelompok minoritas, masyarakat Lombok Timur termasuk Pancor selalu hidup rukun. Isu-isu konflik dan kekerasan berbau agama hampir tidak saya temukan, bahkan relasi yang terjalin selama ini dengan kelompok non Muslim terbilang baik dan toleran. Tidak ada upaya saling mencampuri urusan agama masing-masing.

Struktur buku

Buku ini terdiri dari enam bab serta kesimpulan yang mengcover isu-isu terkait dengan reproduksi konflik dan kekerasan sosial pasca reformasi (Bab 1), Nahdlatul Wathan, agama, dan politik sufisme (Bab 2), perpecahan dan konflik NW (Bab 3), reproduksi wacana dan tafsir sosial atas konflik dan kekuasaan (Bab 4), politik gender, otoritas kharisma, dan konflik tuan guru (Bab 5), dan peta rekonsiliasi NW (Bab 6). Bab 1 mebahas tentang perubahan politik pasca reformasi yang berdampak pada munculnya konflik sosial di hampir seluruh daerah di Indonesia. Bab ini juga menyoroti jenis-jenis konflik yang muncul di daerah yang tidak hanya melibatkan komunitas agama dan etnis, tetapi juga komunitas di dalam organisasi sosial keagamaan termasuk konflik Nahdlatul Wathan. Bab 2 menjelaskan lebih mendalam tentang organisasi NW. Bab ini mengeksplorasi bagaimana NW lahir dan berkembang di Lombok, perubahan-perubahan yang terjadi di NW ketika masa Tuan Guru Zainuddin masih hidup dan setelah wafat, bagaimana keterlibatan NW di bidang pendidikan, politik, dan ekonomi dan bagaimana masa depan NW khususnya pasca reformasi. Bab 3 membahas tentang konstruksi kekusaan di NW, bagaimana elit-elit NW menggunakan simbol Islam sufi sebagai alat legitimasi kekuasaan, bagaimana kronologi dan fase-fase konflik, apa saja faktor dan akar konflik NW, identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dan bagaimana dampak konflik terhadap kehidupan jemaahNW dan masyarakat Lombok pada umumnya. Bab 4 menguji tentang bagaimana proses reproduksi wacana konflik di lingkungan NW dan bagaimana mereka menafsirkan konflik tersebut. Bab ini juga membahas tentang perang wacana antara kedua kubu dan pengaruhnya terhadap eskalasi dan reproduksi konflik di komunitas NW dan bagaimana respons para pihak, baik dari tokoh agama di luar NW maupun dari pemerintah lokal. Bab 5 mengeksplorasi

tentang peran gender dan politisasi ideologi gender dalam konflik NW. Pada bab ini juga membahas tentang otoritas kharisma terkait dengan pemberian gelar 'tuan guru bajang' dalam tradisi NW, apa makna di balik gelar tersebut dan mengapa terjadi gugatan pada gelar ini, bagaimana peran tuan guru dalam konflik NW, bagaimana mereka digugat oleh jemaahNW atas keterlibatan mereka dalam konflik dan bagaimana demokrasi berkembang di NW pasca reformasi terkait dengan pola rektrutmen kepemimpinan NW. Bab 6 membahas tentang peta rekonsiliasi NW. Bab ini menguji tentang upaya-upaya rekonsiliasi NW, fator kegagalan rekonsiliasi dan tawaran rekonstruksi peta rekonsiliasi NW sebagai jalan tengah penyelesailan konflik.

BAB 2
Nahdlatul Wathan, Agama, dan Politik Sufisme

Nahdlatul Wathan pusakamu sendiri
Dilahirkan Tuhan di Lombok ini
Ciptaan Sasak Selaparang asli
Wajib dibela sampai akhirati
(Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat Renungan Masa*, 2002: 82)

Nahdlatul Wathan: Sejarah, jargon ideologis dan kelembagaan

Nahdlatul Wathan (NW) merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia yang fokus pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Organisasi NW didirikan oleh putra asli Sasak, yaitu Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 01 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Baharuddin dan Rasmianto 2004; Noor et.al 2004; Yusuf 1976). Organisasi NW memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di Lombok di awal abad XX melalui gerakan pesantren dan madrasah yang tersebar ke seluruh kampung yang terdapat di Lombok (Baharuddin 2007; Muhtar 2010; Syakur 2006). Kata Nahdlatul Wathan berasal dari bahasa Arab, *nahdlah,* berarti *kebangkitan, pergerakan* atau *pembangunan*, sedangkan *wathan* berarti *tanah air* atau *negara*. Maka secara bahasa, 'Nahdlatul Wathan' berarti 'kebangkitan tanah

air, pembangunan negara atau membangun negara'. Menurut Yusuf (1976: 31) dan Nu'man (1999: 48), nama organisasi ini diambil dari penggalan nama madrasah yang telah didirikan oleh Tuan Guru Zainuddin di 1937, yaitu Madarasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah.[3]

Istilah "nahdlatul wathan" pertamakali muncul di kalangan tokoh-tokoh pejuang Islam di Surabaya 1916. Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Mansur menggunakan istilah ini sebagai salah satu nama organisasi pergerakan sosial untuk menentang dan menandingi dominasi penjajah Belanda. Selain organisasi Nahdlatul Wathan di tahun 1918, mereka juga membentuk gerakan Nahdlatul Tujjar (gerakan pedagang) dan Nahdlatul Fikri (gerakan intelektual) sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang mengalami keterbelakangan ekonomi dan pendidikan akibat hegemoni politik kolonial (Noor et.al 2004: 294; Ridwan 2010: 36-37). Fakta sejarah ini melahirkan sebuah tanda tanya, apakah terdapat hubungan antara organisasi NW yang lahir di Surabaya 1916 dengan organisasi NW yang didirikan oleh Tuan Guru Zainuddin di Lombok Timur 1953? Menurut Muhammad Noor (2004: 304), secara organisatoris tidak ada hubungan antara kedua organisasi tersebut walaupun namanya sama karena jarak waktu cukup jauh dan tempat yang berbeda.

Dari sisi historis dan ideologis, organiasi NW lebih dekat ke NU daripada Muhammadiyah. Tidak ada perbedaan dalam praktik ibadah amaliyah antara NW dengan NU, apalagi sebelum itu Tuan Guru Zainuddin pernah diangkat sebagai konsulat NU di 1950-an

[3] Tidak ada data yang pasti tentang bagaimana mulanya Tuan Guru Zainuddin menggunakan istilah NW untuk nama organisasi yang didirikan tersebut. Sebagian mengatakan bahwa istilah NW ini diberikan oleh gurunya dari Mekah, Syaikh Hassan Masysyat. Sebagian berpendapat istilah NW diambil dari nama gerakan yang didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah dari Surabaya, dan sebagian juga berpandangan bahwa kata NW digunakan hanya untuk membedakan dengan istilah NU yang lebih dulu eksis di Jawa.

perwakilan dari Pulau Sunda Kecil. Hal ini menunjukkan adanya ikatan emosional antara NU dengan NW (Mugni 2013; Muslim 2014; Noor et.al 2004; Nu'man 1999). Pertanyaanya adalah kenapa Tuan Guru Zainuddin keluar dari NU secara struktural dan mendirikan organisasi NW? Salah satu penyebab keluarnya dari Kepengurusan NU adalah faktor kebijakan politik para tokoh Nahdliyin yang keluar dari Partai Masyumi dan membentuk partai baru, sedangkan Tuan Guru Zainuddin memilih tetap di Masyumi. Selain itu faktor internal juga memainkan peran signifikan, perkembangan madrasah-madrasah yang begitu pesat di beberapa desa menjadi pendorong Tuan Guru Zainuddin untuk membentuk sebuah organisasi yang nantinya akan berfungsi sebaga payung besar menaungi dan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan lembaga-lembaga pendidikan tersebut (Baharuddin 2007; Syakur 2006; Tohir 2003).

NW menganut paham akidah Ahlussunnah wal Jemaah dengan menganut Mazhab Syafi'i sebagai mazhab tunggal organisasi. Walaupun menganut Mazhab Syafi'i, namun dalam praktiknya tradisi keagamaan yang berkembang di lingkungan jemaahNW bercampur dengan praktik budaya lokal termasuk tradisi yang *Islam Wetu Telu*. Budaya dan tradisi lokal masih punya pengaruh kuat di kalangan jemaahNW, ia sejalan dengan praktik keagamaan (Baharuddin 2007; Hadi 2010; Smith dan Hamdi 2014). Tidak ada upaya purifikasi yang ketat dan pemisahan budaya dari agama oleh Tuan Guru Zainuddin. Namun pelan-pelan dominasi agama mulai terlihat di atas adat seiring berjalannya modernisasi pendidikan, salafisasi keagamaan, media, dan turisme di Lombok. Singkritisme agama dan adat di kalangan jemaahNW tidak lepas dari metode dakwah Tuan Guru Zainuddin yang mengikuti pola dakwah Wali Songo di Pulau Jawa (Hadi 2010; Hamdi 2013; Smith dan Hamdi 2014; Syakur 2006). Dia mengembangkan tradisi Islam sufi yang

sangat adaptif dan akomodatif dengan budaya lokal, menyisipkan prinsip dan nilai Islam dalam praktik lokal tersebut. Dia juga persuasif dalam dakwah, lembut, dan tidak ekstrim, bahkan kerap menggunakan simbol-simbol lokal seperti 'Gunung Rinjani', 'Gauz Abdur Rozak', 'Amak Milasih', 'Dewi Anjani', dan 'Kerajaan Selaparang' untuk melegitimasi dakwahnya supaya cepat diterima oleh masyarakat Lombok (Hamdi 2013).

Walaupun organisasi NW adalah organisasi keagamaan Islam ortodok, akan tetapi Tuan Guru Zainuddin justru menggunakan Pancasila sebagai asas organisasi, bukan Islam. Ini sangat menarik karena bertolak belakang dari latar belakang keagamaan dan kepartaian politiknya di Masyumi yang dikenal sangat islamis. Keputusan ini menunjukkan dirinya sebagai sosok nasionalis-religius yang mengedepankan kepentingan bangsa dari pada kepentingan pribadi dan kelompok (Hamdi 2011: 133). Tuan Guru Zainuddin dikenal sangat kooperatif dengan pemerintah daerah dan pusat. Dia selalu membuka tangan untuk berkerjasama baik di bidang pendidikan, kependudukan (KB), ekonomi, dan pelestarian budaya. Dia dikenal bijaksana dan seringkali mengambil jalan tengah dan damai dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat (Muslim 2014; Nahdi 2012).

Tujuan organisasi NW adalah *li i'ila-i kalimatillah wa izzil Islam wal Muslimin,* menegakkan kalimat Allah dan kejayaan Islam dan kaum Muslimin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan ini dituangkan dalam tiga bidang yang menjadi fokus pembangunan NW, yaitu bidang pendidikan, sosial, dan da'wah. Komitmen NW untuk tidak terlibat dalam dunia politik termaktub dalam khittah NW (Noor et.al 2004; Nu'man 1999). Meskipun demikian, sulit untuk mengatakan bahwa NW tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis karena kader-kader NW membawa

nama dan simbol organisasi ke ranah politik. Tidak adanya aturan yang jelas tentang ‘peran ganda’ yang dipegang oleh tokoh-tokoh NW di satu sisi sebagai politisi, dan di sisi lain sebagai pejabat NW telah melahirkan hubungan yang unik antara NW dengan partai politik. Tradisi ini tidak bisa hilang begitu saja, bahkan memiliki akar sejarah yang kuat sejak kelahirannya. Tuan Guru Zainuddin terlibat aktif dalam politik praktis ketika menjadi pengurus Partai Masyumi dan tetap menjadi pimpinan di tubuh organisasi NW. Tradisi ini terus berkembang hingga masa reformasi, bahkan di era reformasi peran ini lebih kuat di mana elit-elit NW mampu meraih posisi kekuasaan di eksekutif dan legislative (Hamdi 2013: 5; 2011: 133-134; Muhas 2009). Tidak ada perubahan regulasi sementara ini terkait dengan status mereka di organisasi. Ketika kepentingan politik personal muncul, secara tidak langsung harus melibatkan organisasi untuk mobilisasi massa.

Simbol organisasi NW adalah bulan bintang bersinar lima dengan warna gambar putih dan warna dasar hijau. Simbol NW ini mirip dengan lambang partai politik Masyumi dan Partai Bulan Bintang (PBB) di era reformasi. Keterlibatan Tuan Guru Zainuddin dalam partai politik Masyumi sangat mempengaruhi konsep pemikirannya dalam mengembangkan organisasi NW. Simbol ini memiliki makna filosofis, yaitu: ‘bulan’ melambangkan ‘Islam’; ‘bintang’ melambangkan ‘iman dan taqwa’; ‘sinar lima’ melambangkan ‘rukun Islam’; ‘warna gambar putih’ melambangkan ‘ikhlas dan istiqamah’; ‘warna dasar hijau’ melambangkan ‘selamat bahagia dunia-akhirat’ (Noor et.al 2004: 215; Nu’man 1999; Syakur 2006). Bagi jemaahNW, simbol ini tidak hanya menjadi pajangan, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui lembaga pendidikan formal dan informal seperti Ma’had Darul Qur’an wal Hadist, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Wathan penyebaran dan penguatan

nilai-nilai keislaman terus dilakukan oleh para tuan guru. Bahkan di setiap pengajian Tuan Guru Zainuddin selalu menekankan doktrin kompak, bersatu, ikhlas, dan istiqamah. Jargon NW yang merupakan representasi dari simbol NW adalah: "Pokoknya NW, Pokok NW Iman dan Taqwa" (Hamdi 2013: 9; Muslim 2014: 62; Nahdi 2012: 187).

Ketaatan pada pimpinan organisasi dan tokoh-tokoh agama, khususnya para tuan guru di lingkungan NW sangat ditekankan. Apa yang dikatakan oleh tuan guru harus diikuti karena merekalah sumber kebenaran. Jargon yang cukup terkenal adalah *sami'na wa atha'na,* dengar dan taati (Hamdi 2011: 6; Smith dan Hamdi 2014: 27). JemaahNW tidak boleh menolak atau mengkritisi kebijakan pimpinan, sebaliknya harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pimpinan. Jika pimpinan NW mengatakan A, maka jemaahNW harus A semua. Yang menjadi persoalan adalah ketika ketaatan kepada guru atau pimpinan organisasi mengalami politisasi oleh kelompok elit untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi mereka. Simbol agama yang melekat pada diri tuan guru dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan oleh kelompok elit (Hamdi 2011: 4).

Sebagaimana organisasi Islam besar lainnya, NW juga memiliki badan-badan otonom di luar tanggungjawab Ketua Umum Pengurus Besar NW. Di antara badan-badan otonom tersebut adalah kelompok Muslimat NW, kelompok Pemuda NW, Ikatan Pelajar NW, Himpunan Mahasiswa NW, Persatuan Guru NW, Ikatan Sarjana NW, Ikatan Putri NW dan Badan Kajian Penerangan dan Pengembangan Masyarakat. Tidak semua badan otonom ini berjalan dan memiliki kepengurusan yang lengkap (Nu'man 1999; Noor et.al 2004). Hanya beberapa yang terlihat aktif seperti Pemuda NW, Muslimat NW, Ikatan Pelajar NW, dan Himpunan Mahasiswa (Himmah) NW. Di tingkat pusat, kelompok Muslimat NW selama

ini diketuai oleh anak dan cucu pendiri NW. Sedangkan di tingkat daerah dan cabang biasanya dipegang oleh para istri tuan guru atau tokoh-tokoh NW. Himmah NW sangat aktif dan dominan di kampus-kampus NW. Pengurus NW tidak memberi ruang yang luas terhadap organisasi kemahasiswaan dari luar organisasi. Kader-kader NW yang menimba ilmu di kampus luar daerah juga membentuk Himmah NW.

Selain badan otonom, terdapat juga lembaga-lembaga di dalam organisasi NW yang berada di bawah tanggungjawab ketua umum di antaranya adalah Jam'iyatul Qurra' wal Huffaz, Jemaah Hizib, Tarekat Hizib, Kelompok Wirid dan Lembaga Bimbingan Ibadah Haji NW (LBIH NW) (Nu'man 1999: 61-62) . Para santri yang belajar di madrasah yang dilengkapi dengan fasilitas asrama ditekankan untuk menghafal Al-Qur'an. Mereka dibimbing oleh guru yang sudah menghafal 30 juz. Sementara JemaahHizib bersifat umum di mana semua warga NW diharuskan untuk membaca hizib (kumpulan doa yang disusun pendirinya) supaya memperoleh keselamatan. Hizib diyakini dapat membentengi mereka dari musibah dan bencana. Dari sari pati buku hizib inilah dibuat amalan tarekat yang dikenal dengan Tarekat Hizib NW. Pengamal tarekat sangat terbatas dan tidak dipublikasikan secara massal mengingat gerakan tarekat masih sensitif di kalangan masyarakat Lombok. Tuan Guru Zainuddin mengklaim bahwa tarekat Hizib NW adalah tarekat akhir zaman yang amalannya sangat sederhana. Pengamal tarekat NW harus dikuatkan dengan pemahaman syari'ah dan ilmu-ilmu agama lainnya sehingga mereka tidak buta dan tersesat dengan tarekat itu (Hadi 2010; Muslim 2014; Smith dan Hamdi 2014).

Keanggotaan NW dibagi menjadi dua, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah setiap orang Islam yang seasas dan setujuan dengan organisasi NW serta bersedia memenuhi

kewajiban organisasi. Sedangkan anggota kehormatan adalah setiap orang yang menyokong serta bekerjasama dengan organisasi (Nu'man 1999; Syakur 2006). Keanggotaan di NW menjadi isu penting karena belum ada mekanisme dan prosedur yang jelas sebagai anggota. Di awal-awal berdirinya, orang yang ingin menjadi anggota NW biasanya masuk sebagai siswa di lembaga pendidikan di bawah naungan NW. Sebagian juga dilakukan secara lisan, orangtua menyerahkan anak-anaknya ke Tuan Guru Zainuddin untuk ikut berjuang di dalam NW. Setelah itu, Tuan Guru Zainuddin membaiat mereka yang berisi taat kepada Allah dan setia mengikuti perjuangan NW turun temurun. Dari berbagai mekanisme sebagai anggota ini belum ada bukti tertulis misalnya kartu anggota. Implikasinya, hingga sekarang sulit mengetahui secara pasti jumlah warga NW, meskipun diprediksi bahwa NW adalah kelompok mayoritas Muslim di Lombok (Hadi 2010; Hamdi 2011; Muhtar 2010).

Di komunitas NW dikenal istilah abituren dan pencinta. Abituren adalah para alumni yang pernah belajar baik secara formal dan informal di lingkungan pendidikan NW. Sedangkan pencinta adalah orang-orang yang dinilai memberikan manfaat dan simpati kepada NW, walaupun mereka tidak di dalam organisasi. Abituren biasanya dimintai dana sumbangan untuk acara-acara besar NW seperti hari ulang tahun (haul) organisasi. Jumlah dana kontribusi dari abituren sekitar Rp. 35.000, sedangkan dari pencinta sekitar Rp. 15.000 (Nu'man 1999). Jumlah ini tidak terbatas dan tergantung dari keikhlasan masing-masing. Peran aktif para jemaahNW dalam pendanaan sengaja didesain oleh Tuan Guru Zainuddin supaya mereka terlatih untuk beramal dan berinfak dalam pembangunan. Pendekatan partisipatif ini menguatkan perasaan masyarakat sebagai kelompok yang merasa sebagai insider dan memiliki NW (Hamdi dan Smith 2012). Inilah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh NW yang membuatnya masih eksis dan dapat bertahan hingga sekarang.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa NW telah membuat sejarah baru dan sejarah besar di Lombok terkait dengan perubahan sosial keagaaan masyarakat Sasak. Kehadirannya tidak hanya membantu bangsa Indonesia khususnya masyarakat Lombok bebas dari kolonialisasi Belanda dan Jepang, tetapi juga berperan aktif dalam setiap aspek pembangunan. NW telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Sasak yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika berbicara NW, maka di sana terdapat identitas Sasak atau sebaliknya. Identitas ini akan terus mengalami perubahan dan penguatan seiring perubahan politik dan demokrasi yang berkembang di Indonesia. Proses integrasi nilai-nilai lokal dan tradisi keagamaan baru yang diwacanakan pada waktu itu menempatkan sosok Tuan Guru Zainuddin sebagai salah satu tokoh pembaharu di Lombok. Kiprah dan gerakan-gerakan Tuan Guru Zainuddin akan dieksplorasi lebih jauh pada sub bab berikutnya.

Tuan Guru Zainuddin: Keluarga, pendidikan, dan karya

Tuan Guru Zainuddin lahir di Lombok Timur tepatnya di Kampung Bermi, Desa Pancor, Selong 1904. Dia lahir dari lingkungan keluarga kelas menengah-atas dan dikenal sebagai keluarga yang religius. Ayahnya bernama Abdul Madjid berasal dari Pancor berprofesi sebagai guru ngaji, sedangkan ibunya bernama Halimatussa'diyah dari Desa Kelayu Lombok Timur (Jamaludin 2011; Nu'man 1999; Syakur 2006). Ayahnya dikenal juga sebagai pedagang sukses dan menjadi tuan tanah. Kesuksesannya ini membuat dia mampu menguasai tanah pertanian dengan jumlah yang cukup luas yang terletak di sebelah Selatan Desa Pancor. Setelah Abdul Madjid wafat, tanah pertanian miliknya tersebut diabadikan menjadi sebuah nama perkampungan yang disebut kampung 'Madjidi'. Nama kampung 'Madjidi' ini diambil dari

nama "Madjid" sebagai bentuk penghormatan dan pengabadian dirinya di kampung itu (Noor et.al 2004: 112).

Silsilah keturunan Tuan Zainuddin dari sisi ayahnya sulit ditemukan karena dokumen keluarga pernah hilang ketika Desa Pancor mengalami kebakaran hebat pada 1943. Kebakaran ini telah menghabiskan seluruh rumah penduduk termasuk rumah keluarganya. Menurut catatan beberapa sumber bahwa keturunan Tuan Guru Zainuddin dari garis ayahnya berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Sumber lain juga menyebutkan Tuan Guru Zainuddin adalah keturunan raja Selaparang yang ke-17 (Noor et.al 2004: 108). Tuan Guru Zainuddin mempunyai saudara sebanyak tiga belas orang, lahir dari ibu yang berbeda-beda karena ayahnya menganut praktik poligami. Dari satu ibu Tuan Guru Zainuddin adalah anak keenam dari enam bersaudara, yaitu Siti Sarbini, Siti Cilah, Saudah, Masyitah, M. Shabur, dan Tuan Guru Zainuddin.

Tanda-tanda akan menjadi tokoh ulama besar telah muncul sebelum Tuan Guru Zainuddin lahir. Kelahiran Tuan Guru Zainuddin memiliki sejarah yang unik, tiga hari sebelum lahir dua orang ulama besar dari Hadlramaut dan Magribi mendatangi kedua orangtuanya. Ulama dari Hadlramaut menyarankan untuk memberi nama anak mereka yang akan lahir Saggaf (Jamaludin 2011: 284; Nu'man 1999: 1). Salah satu ulama ini kebetulan mempunyai nama yang sama, yaitu Saggaf. Pada saat menjelang kelahirannya Ahmad Rifa'i, salah satu ulama dari Magribi juga menemui ayahnya dan menyampaikan pesan bahwa 'akan lahir dai istrimu seorang anak laki-laki yang akan menjadi ulama besar' (Nu'man, 1999; Jamaludin 2011;). Kata Saggaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *saqqaf* yang artinya tukang perbaiki atap. Kata *saqqaf* dalam dialek bahasa Indonesia menjadi Saggaf', sedangkan dalam dialek bahasa Sasak menjadi *Segef*. Pada masa kecil dia selalu dipanggil dengan panggilan

'*Gef*' sesuai dengan dialek Sasak.

Kelahiran Saggaf mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa bagi kedua orangtuanya, apalagi setelah memperoleh informasi dari para wali yang berkunjungan ke rumah mereka. Dari sejak kecil dia tinggal bersama orangtuanya dan memperoleh bimbingan dan pendidikan langsung. Saat usia lima tahun dia sudah mulai belajar membaca al-Qur'an. Dia memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat (SR) selama empat tahun (Muhtar 2010; Nahdi 2012; Noor et.al 2004). Untuk pengetahuan agama dia belajar nahwu dan sharaf ke TGH. Sarafuddin di Desa Pancor dan TGH. Abdullah bin Amak Dulaji dari Kelayu. Kepintaran dan kecerdasannya sudah terlihat saat masuk SR dan belajar agama. Ketika berumur 15 tahun dia berangkat ke Mekah bersama kedua orangtuanya dan dua saudaranya Ahmad Rifa'i dan M. Faisal serta guru agamanya TGH. Syarafuddin (Noor et.al 2004: 135; Nu'man 1999: 5).

Setelah menunaikan ibadah haji, Saggaf berganti nama menjadi Muhammad Zainuddin. Sudah menjadi tradisi bagi orang Indonesia termasuk orang Lombok ketika selesai menunaikan ibadah haji, namanya diganti dengan nama baru. Nama Zainuddin sendiri diambil dari nama ulama besar di lingkungan Masjidil Haram. Selama dua tahun di Mekah kedua orangtuanya menemani dan mencarikan guru agama untuk mempelajari kitab-kitab Islam. Guru pertama yang ditemukan oleh orangtuanya bernama Kyai Marzuki dari Palembang. Kyai Marzuki adalah keturunan Arab kelahiran Palembang yang sudah lama tinggal di Mekah dan mengajar di lingkungan Masjid Al-Haram. Dia sangat fasih berbahasa Indonesia dan Arab (Noor et.al 2004: 136). Selama satu tahun, Tuan Guru Zainuddin belajar di Kyai Marzuki. Sebelum menemukan guru yang lain terjadi konflik sektarian antarkelompok Wahabi di tanah suci Mekah yang memaksa dia harus pulang ke Indonesia. Dia harus

menunggu sampai kondisi aman dan terkendali. Satu tahun kemudian dia berkenalan dengan Mawardi dari Jakarta dan mengajaknya untuk belajar di Madrasah Shaulatiyah, sebuah madrasah pertama yang beraliran Ahlussunnah wa al-Jemaah(Baharuddin dan Rasmianto 2004; Nu'man 1999; Yusuf 1976). Madrasah ini didirikan 1219 H oleh seorang ulama besar asal imigran India Syaikh Rahmatulah Ibnu Khalil Al-Hindi Al-Dahlawi.

Tuan Guru Zainuddin secara resmi masuk di Madrasah Shaulatiyah pada 1927. Madrasah sedang diketuai oleh cucu pendirinya, yaitu Syaikh Salim Rahmatullah. Telah menjadi tradisi bahwa semua siswa baru harus menjalani tes masuk madrasah untuk penempatan kelas sesuai dengan kemampuan atau hasil tes. Zainuddin diuji oleh kepala madrasah dan salah seorang guru Syaikh Hassan Muhammad al-Masysyath (Baharuddin dan Rasmianto 2004; Nu'man 1999; Syakur 2006). Dari hasil tes tersebut Zainuddin disuruh langsung masuk ke kelas 3, namun dia menolak dan minta supaya ditempatkan di kelas 2 dengan alasan ingin memperdalam ilmu-ilmu yang belum dikuasai. Zainuddin mulai menujukkan kelasnya sebagai siswa unggulan, dia mampu menyelesaikan studinya dengan hasil terbaik. Masa studi normal di madrasah ini adalah sembilan tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 9. Tuan Guru Zainuddin dapat menyelasikan masa studinya hanya dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 2 langsung ke kelas 5, kemudian naik langsung ke kelas 6, 7, 8, dan 9 (Nu'man 1999; Syakur 2006; Tohir 2003).

Pada tahun 1932 Tuan Guru Zainuddin menyelesaikan studinya di Madrasah Shaulatiyah (Noor et.al 2004: 142; Nu'man 1999: 8). Setelah selesai, Tuan Guru Zainuddin tidak langsung pulang ke Lombok karena harus menunggu adiknya selesai sekolah. Dia tinggal di Mekah selama dua tahun dengan memanfaatkan

waktu untuk studi sambil menunggu adiknya Faisal selesai. Dia memanfaatkan waktu dua tahun ini untuk memperdalam ilmu fiqh kepada Syaikh Abdul Hamid Abdullah al-Yamani (Noor et.al 2004). Tuan Guru Zainuddin juga menggunakan waktunya untuk memperkuat spiritual dan ilmu tasawuf. Pada tahun 1934 dia pulang ke kampung halaman di Lombok Timur. Setelah di Lombok dia langsung mendirikan Pesantren Al-Mujahidin dan mulai berdakwah. Melihat kiprahnya yang intens berdakwah dan komitment tinggi dalam dunia pendidikan pesantren masyarakat kemudian memberikan dia gelar tuan guru (Muhtar 2010; Muslim 2014; Tohir 2003).

Tidak lama setelah mendirikan pesantren, Tuan Guru Zainuddin kurang puas dan menggantinya dengan sistem pendidikan madrasah (pendidikan formal). Maka, di tahun 1937 dia mendirikan madrasah NWDI dan madrasah NBDI di tahun 1943. Ketika mendirikan madrasah inilah dia mendapat tantangan dan resistensi dari masyarakat dan tokoh-tokoh agama lokal. Mereka menilai sistem belajar madrasah merupakan produk pendidikan Barat dan perpanjangan kepentingan kelompok Wahabi (Muhtar 2010; Nahdi 2012; Noor et.al 2004; Nu'man 1999; Tohir 2003). Mereka yang tidak setuju ini memprovokasi para wali murid untuk menarik tanah wakaf yang sudah mereka sumbangkan ke pesantren. Provokasi mereka berhasil, tanah-tanah wakaf ditarik kembali oleh wali murid bahkan sebagian anaknya disuruh berhenti bersekolah (Noor et.al 2004: 140).

Selain memprovokasi mereka juga memberikan pilihan yang dilematis kepada Tuan Guru Zainuddin terkait dengan idenya mendirikan madrasah. Ada dua pilihan yang mereka tawarkan, yaitu apakah tetap menjadi imam dan khatib shalat Jum'at di masjid di kampungnya atau tetap mendirikan madrasah? Jika

memilih madrasah, maka harus berhenti jadi imam dan khatib atau sebaliknya. Menanggapi pilihan yang rumit ini, dia tetap konsisten dengan sikapnya mendirikan madrasah (Noor et.al 2004; Nu'man 1999). Perlahan tapi pasti madrasah NWDI dan NBDI terus mengalami perkembangan yang cukup siginifikan tiap tahun siswanya terus bertambah. Kemajuan ini justru membalik opini masyarakat yang selama ini mempunyai prasangka negatif terhadap ide pembangunan madrasah. Masyarakat memberikan dukungan kembali dan menyerahkan anaknya bersekolah di sana. Hingga akhir hayatnya, Tuan Guru Zainuddin dan murid-muridnya telah berhasil mendirikan hampir seribu madrasah yang tersebar di Pulau Lombok. Dia juga mendorong masyarakat membangun masjid di setiap dusun. Oleh karena jasanya inilah dia diberi gelar *Abul Madaris* dan *Abul Masajid* (Baharuddin dan Rasmianto 2004; Muhtar 2010; Muslim 2014; Tohir 2003).

Tuan Guru Zainuddin selama masa hidupnya telah menikah sebanyak tujuh kali. Dia termasuk tokoh yang melakukan praktik poligami. Meskipun berpoligami, dia sangat penduli dengan nasib pendidikan kaum perempuan di mana dia mendirikan sekolah khusus untuk kaum perempuan. Adapun perempuan yang pernah dinikahinya adalah Hasanah, Siti Fatmah, Raihan, Siti Jauhariyah, Siti Rahmatullah, Siti Zuhriah Mukhtar, dan Baiq Adniyah. Dari ketujuh istri tersebut dia hanya memperoleh dua orang anak perempuan, yaitu Siti Rauhun dari istri Siti Jauhariyah[4] dan Siti Raihanun dari istri Siti Rahmatullah.[5] Dia sangat menyayangi kedua putrinya dan memberikan pendidikan yang bagus. Dia sering

---

[4] Siti Jauhariyah berasal dari Selong, Lombok Timur. Bapaknya bernama Abdur Rahim dari Jawa dan ibunya bernama Masnah dari Lombok.

[5] Siti Rahmatullah berasal dari Desa Rarang, Lombok Timur. Bapaknya adalah sahabat dari ayah Tuan Guru Zainuddin.

membawa keduanya ke pengajian-pengajian dan melatihnya untuk berceramah di depan para jama'ahnya (Noor et.al 2004; Nu'man 1999).

Menginjaiak usia dewasa kedua putri Tuan Guru Zainuddin pun menikah. Siti Rauhun menikah dengan H. M. Djalaluddin, seorang dosen dan birokrat dari Apitaik Lombok Timur. Dari pernikahan ini Rauhun memperoleh enam orang anak, yaitu Siti Rohmi Jalilah, Syamsul Lutfi, Muhammad Zainul Majdi, Jamaluddin, dan Surayya (Noor et.al. 2004). Pada tahun 1977 terjadi konflik internal di organisasi NW yang melibatkan Djalaluddin selaku Ketua Umum PB NW sehingga berdampak pada eksistensi keluarganya yang berujung pada perceraian (Hamdi 2011). Di tahun 1986 R1 menikah lagi dengan M. Syubli, seorang dosen dari Desa Pancor. Pernikahan yang kedua ini R1 dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Siti Hidayati. Adapun Siti Raihanun menikah dengan Lalu Gede Wiresentane, seorang birokrat dari keluarga aristokrat Bonjeruk, Lombok Tengah. Dari hasil perkawinan ini mereka memperoleh tujuh anak, yaitu Lalu Gede Wirasakti Amir Murni, Lale Laksmining Puji Jagat, Lale Alyaqutunnafis, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Lale Syifaun Nufus, Lalu Gede Muhammad Zainuddin Astani, dan Lalu Gede Muhammad Fatihin (Nu'man 1999). Wiresentane meninggal dunia 1997 setelah beberapa bulan Tuan Guru Zainuddin wafat. Raihanun menikah lagi dengan Hayyi Nu'man di 1999, seorang dosen dan politisi NW. Raihanun tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya kedua ini. Dari kedua putrinya ini Tuan Guru Zainuddin memperoleh 14 orang cucu.

Tuan Guru Zainuddin adalah sosok yang sangat tekun dalam berdakwah. Dia mengadakan pengajian keliling ke desa-desa di seluruh penjuru Pulau Lombok. Umur tidak menjadi halangan baginya untuk melakukan dakwah. Ketika menginjak masa tua dan

tidak bisa lagi berjalan, dia memakai kursi roda dan ditandu di setiap pengajiannya. Di tengah kesibukan berdakwah dan mengajar, dia aktif menulis buku-buku Islam, wasiat, dan lagu-lagu perjuangan. Di antara karya-karyanya dalam bentuk buku berbahasa Arab dan Indonesia (Baharuddin dan Rasmianto 2004; Noor et.al 2004; Nu'man 1999; Tohir 2003), yaitu:

1. Risalah Al-Tauhid (Tanya jawab ilmu tauhid)
2. Sullam Al-Hija Syarh Safinah al-Naja (Ilmu fiqh)
3. Nahdlah Al-Zainiyah (Nadzam ilmu faraid)
4. Al-Tuhfahl Al-Fananiyah Syarh Nahdlah A-Zainiah,
5. Al-fawakih Al-Nahdiyah (Tanya jawab ilmu faraid)
6. Mi'raj Al-Syibyan ila sama'i Ilm al-Bayan (Ilmu balaghah)
7. Al-Nafahat 'ala al-Taqrirah al-Saniyah (Ilmu mushtalah al-Hadis)
8. Nail al-Anfal (Ilmu tajwid),
9. Hizb Nahdlah al-Wathan (Do'a dan wirid untuk laki-laki dan perempuan)
10. Thariqah Hizb Nahdlah al-Wathan
11. Ikhtisar Hizb Nahdlah al-Wathan (Wirid harian)
12. Batu Ngompal (Ilmu tajwid)
13. Anak Nunggal Taqrirat Batu Ngompal (Ilmu tajwid)
14. Wasiat Renungan Masa I dan II (Berisi nasihat, pengalaman hidup, moral, etika dan ramalan).

Di kalangan masyarakat NW, Tuan Guru Zainuddin juga dikenal sebagai seorang wali. JemaahNW yakin dia mempunyai kekuatan spiritual yang mampu berkomunikasi dengan alam ghaib, memprediksi peristiwa-peristiwa alam dan sosial di masa depan (Hamdi 2013; Muslim 2014; Smith dan Hamdi 2014). Bukti kekeramatanya telah muncul sejak masih hidup. Banyak cerita dan laporan ke Tuan Guru Zainuddin jika seseorang bertemu dengan

beliau di satu daerah, padahal dia tidak kemana-mana. Contoh lain adalah peristiwa konflik dan perpecahan 1998 yang melanda jemaahNW yang melibatkan keluarga kedua putrinya telah diprediksi jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi (Hamdi 2011). Dia menulis kejadian ini dalam buku wasiat yang dikenal dengan 'Wasiat Renungan Masa', yaitu sebuah buku yang berbentuk sajak dan syair yang berisi prinsip moral, etika, *local values*, interaksi dan kehidupan baik dalam bidang agama, sosial, politik, ekonomi, moral, dan organisasi. Dengan kewaliannya inilah masyarakat seringkali meminta doa supaya selamat, bahkan para penjabat tidak ketinggalan meminta berkah supaya sukses dalam karirnya (Baharuddin dan Rasmianto 2004; Nu'man 1999).

Trajektori perubahan NW di era dan pasca Tuan Guru Zainuddin

Sub bab ini akan membahas trajektori perubahan-perubahan yang terjadi di NW pada era dan pasca Tuan Guru Zainuddin. Pembahasan ini sangat penting tidak hanya membantu memahami di mana letak perbedaan dan persamaan NW di dua periode yang berbeda ini, tetapi juga untuk memahami latar konflik yang menggerogoti kader-kader NW. Perubahan-perubahan yang akan dibahas di sini bukanlah perubahan secara mikro, tetapi perubahan secara makro yang meliputi peristiwa-peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi NW. Kajian atas perubahan-perubahan ini akan ditarik pola-polanya sehingga dapat diidentifikasi perbedaan dan persamaan tersebut. Saya berargumen bahwa NW di era Tuan Guru Zainuddin memiliki perbedaan dengan era setelahnya. Perubahan-perubahan ini tidak lepas dari pengaruh kondisi sosio-politik dan ekonomi yang berkembang baik di tingkat lokal, regional, dan nasional yang secara tidak langsung

berpengaruh terhadap perkembangan organisasi NW.

NW di era Tuan Guru Zainuddin melewati tiga episode politik di Indonesia mulai dari zaman pra kemerdekaan, Orde Baru dan Orde Lama. Situasi politik di tiga era ini mempunyai pengaruh bersar terhadap perjalanan NW secara politik, ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Sedangkan NW Pasca Tuan Guru Zainuddin berada pada era transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Perubahan sistem politik dan arus demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia telah membawa NW pada ranah baru yang lebih prospek. NW mampu beradaptasi dan memamfaatkan secara maksimal fasilitias sistem politik dan demokrasi yang baru tersebut untuk menopang pembangunan di semua bidang. Faktanya, NW merajai di tingkat lokal dan jauh lebih dikenal di tingkat nasional karena semakin bertambahnya ruang, akses dan pintu jaringan khususnya dalam pemerintahan dan politik.

NW di era Tuan Guru Zainuddin

Sebagaian besar masyarakat menilai bahwa kejayaan NW terletak pada masa Tuan Guru Zainuddin. Pandangan ini tidak selamanya benar dan juga tidak salah, tergantung pada aspek mana mereka memandang dan aspek apa yang dibandingkan di antara kedua era tersebut. Tidak bisa dipungkiri jika Tuan Guru Zainuddin telah mencapai segudang prestasi dan membawa NW pada masa 'keemasan' sejak mendirikan dan berkiprah di NW (Hamdi 2013; Mugni 2013; Muslim 2014; Nahdi 2012). Dia menjadi ikon NW yang sulit digeser oleh generasi setelahnya, meskipun berbagai persoalan konflik sosial dan politik muncul selama kepemimpinannya di NW. Organisasi NW dan aset-asetnya merupakan karya agung Tuan Guru Zainuddin. Selama kepemimpinannya, NW perlahan-

lahan berkembang sebagai organisasi besar dan mapan dari segi sistem, struktur, dan kultur organisasi. Bahkan hingga sekarang NW menjelma sebagai kekuatan kultural yang sulit ditandingi oleh organisasi keagamaan lokal yang lain, khususnya di Lombok (Hamdi 2011; Muhtar 2010; Smith dan Hamdi 2014).

Kebesaran NW tidak hanya diukur dari segi kuantitas jemaahyang dimilikinya sebagai kelompok mayoritas di Lombok, tetapi juga keberhasilan NW di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, sosial, dan dakwah. Di bidang pendidikan Tuan Guru Zainuddin adalah tokoh pertama di Lombok yang mengembangkan sistem pendidikan modern madrasah (Baharuddin 2007; Mugni 2014; Muhtar 2010; Muslim 2014; Nu'man 1999). Sistem pendidikan madrasah berbeda dengan sistem pendidikan pesantren yang tidak dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Tuan Guru Zainuddin mengganti sistem pesantren ke madrasah karena kurang efektif dalam mencetak *output* pendidikan yang bagus dan terkontrol kualitasnya. Padahal pada masa pra kemerdekaan sistem pendidikan pesantren sangat populer, sementara sistem madrasah masih jarang dan dianggap produk kolonial. Cukup aneh jika NW yang kental dengan 'Aswaja' mendirikan madrasah dan menghapus sistem pesantren. Berbeda dengan Muhammadiyah memang berkiblat ke pendidikan Barat yang fokus pada pendidikan formal (Nakamura 1983).

NW pada masa Tuan Guru Zainuddin telah berhasil membangun ratusan cabang madrasah di hampir seluruh daerah di Lombok. Bisa dikatakan NW tidak punya pesantren, tapi hanya punya madrasah. Lembaga pendidikan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist yang berbasis kitab kuning belum dikategorikan pesantren secara utuh karena para santri tidak diasramakan walaupun sistem belajarnya menggunakan sistem pesantren dengan cara duduk

bersila dan berpakaian tradisional. Terhitung sejak kepulangannya dari Mekah, terdapat 600 lembaga pendidikan yang berbeda-beda mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi (Muslim 2014: 60; Noor et.al 2004: 193; Nu'man 1999: 36-37). Adapun perguruan tinggi yang masih bertahan sampai sekarang berjumlah lima buah, yaitu STKIP Selong, IAIH Pancor dan IAI Lotim, STMIK Anjani, dan Universitas NW Mataram.

Tuan Guru Zainuddin adalah orang yang pertama mendirikan lembaga pendidikan untuk kaum perempuan di Lombok yang dikenal dengan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI). Dia sadar bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak akan dapat berkembang secara utuh (*holistic*) jika tidak melibatkan kaum perempuan. Kombinasi dan integrasi pendidikan kaum laki-laki dan perempuan ini disebut 'dwi tunggal pantang tanggal', dua menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Nu'man 1999; Muslim 2014; Smith dan Hamdi 2014;). Tuan Guru Zainuddin melihat adanya gap yang sangat lebar dalam pembangunan SDM di lingkungan masyarakat Sasak yang lebih mengedepankan kaum laki-laki karena pengaruh budaya patriarki dalam struktur sosial masyarakat Sasak. Struktur budaya ini dapat diubah melalui lembaga pendidikan (Hamdi 2011; Nasri 2014). Apa yang dilakukan oleh Tuan Guru Zainuddin ini mirip dengan RA. Kartini, tokoh yang memperjuangkan nasib kaum perempuan Jawa melalui lembaga pendidikan. Meskipun tidak mengembangkan ide kesetaraan gender dalam organisasi NW, akan tetapi pembangunan lembaga pendidikan ini merupakan pondasi meningkatkan kualitas kaum perempuan dan penguatan wacana gender secara tidak langsung (Smith dan Hamdi 2014).

Kemajuan lain yang dicapai oleh NW pada masa Tuan Guru Zainuddin adalah di bidang sosial dengan mendirikan 23 panti

asuhan yang tersebar di beberapa cabang NW. Panti asuhan ini mengadopsi anak-anak yatim dan anak yang kurang mampu. Tuan Guru Zainuddin juga membawa NW bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menekan tingkat populasi di NTB (Nu'man 1999: 82-84). Sosialisasi program KB yang dilakukan oleh pengurus NW cukup efektif karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan agama. Pengurus organisasi NW termasuk para tuan guru mensosialisasikan progran KB melalui pengajian-pengajian di masyarakat. Selain itu NW pada masa Tuan Guru Zainuddin juga tercatat sebagai organisasi yang sangat kooperatif dengan pemerintah baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Hampir tidak ada konflik dan pertentangan yang signifikan antara NW dengan pihak pemerintah (Hamdi 2011: 132-133).

Prestasi lain yang dicapai NW pada masa Tuan Guru Zainuddin adalah pengembangan dakwah islamiyah di Lombok. Tuan Guru Zainuddin telah berhasil melakukan dakwah di Lombok termasuk ke komunitas *Wetu Telu, Wetu* salah satu varian agama Islam yang berkembang di Lombok memadukan ajaran Islam dengan Hindu dan kepercayaan lokal masyarakat Lombok, yaitu Boda (Avonius 2004; Baharuddin 2007; Budiwanti 2000; Cederroth 1981). Komunitas *Wetu Telu* hampir punah karena kuatnya arus konversi ke Islam Waktu Lima atau Islam ortodok yang dilakukan oleh Tuan Guru Zainuddin dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Hanya sebagian kecil masyarakat adat yang masih mempraktikkan ajaran *Wetu Telu* terutama di daerah Bayan (Baharuddin 2007:75-76; Budiwanti 2000: 119-120; Syakur 2005: 129). Keberhasilan dakwah ini karena Tuan Guru Zainuddin menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di Jawa. Dia sangat akomodatif dengan budaya lokal serta mampu menggunakan simbol budaya lokal ini untuk kepentingan

penyebaran agama (Hamdi 2013: 9).

Masuknya gerakan dakwah para tokoh NW memberikan pencerahan bagi pengikut *Wetu Telu.* Mereka menyekolahkan putra-putri mereka di madrasah NW. Sebagian juga belajar di pesantren TGH. Mutawalli di Jero Waru, Lombok Timur dan di Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat pimpinan TGH. Shafwan Hakim (Baharuddin 2007; Budiwanti 2000; Muslim 2014). Setelah selesai studi mereka kembali ke kampung dan melakukan kegiatan dakwah dan mendirikan madrasah. Banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai guru di sekolah mereka. Daerah-daerah yang menjadi basis komunitas *Wetu Telu* seperti di Desa Sukarara, Pengadangan dan Sakra di Lombok Timur, Desa Bleka dan Mujur di Lombok Tengah, Desa Lembuak, Narmada di Lombok Barat, dan Desa Bayan di Lombok Utara telah bergeser komposisinya. Sebelumnya, di derah tersebut pengikut *Wetu Telu* sekitar 60% dan sisanya Waktu Lima, sedangkan sekarang terbalik 10% *Wetu Telu* dan 90% Waktu Lima (Syakur 2005: 126).

Bidang-bidang lain yang dicapai NW pada masa Tuan Guru Zainuddin adalah keberhasilan dalam membangun kultur masyarakat NW yang dikenal loyal. Salah satu kultur masyarakat NW adalah setia kepada guru dan organisasi NW. Kesetiaan yang berlebihan ini telah melahirkan sikap fanatik yang berlebihan di kalangan jemaahNW. Terkadang secara tidak sadar organisasi NW lebih dikedepankan daripada yang lain. Para tuan guru khususnya pendiri NW yang dikenal kharismatik mengalami 'pengkultusan' yang luar biasa di tengah komunitas NW (Hamdi 2013: 9-10). Doktrin ke-NW-an menjadi bagian dari sistem kepercayaan (*belief*) dan padangan hidup (*worldview*) bagi jemaahNW. Sebagian besar jemaahNW tidak mengenal organisasi-organisasi keagamaan lain di luar NW. Jika terdapat individu, keluarga atau kelompok yang

berbeda organisasi di sebuah desa yang jama'ahnya merupakan mayoritas orang NW, maka mereka akan mengalami diskriminasi. Bahkan terkadang mereka tidak mau berinteraksi dengan orang lain kalau bukan dari kalangan jemaahNW. Sikap ini juga berlaku kepada tokoh-tokoh NW terutama kepada tuan guru, sangat tabu bagi jemaahNW menentang perintah tuan guru atau mengkritisi gaya kepemimpinan dan kebijakannya (Hadi 2010; Hamdi 2011; Muslim 2014).

Ajaran yang menekankan kesetiaan kepada guru (mursyid) merupakan salah satu aspek ajaran sufi. Ideologi sufistik ini juga dikembangkan oleh Tuan Guru Zainuddin sebagai kerangka dan pondasi sosial organisasi (Hadi 2010; Hamdi 2013; Muslim 2014; Smith dan Hamdi 2014). Namun pada kenyatannya kultur sufistik yang dikembangkan ini tidak selamanya berdampak positif, tetapi juga negatif pada sisi-sisi tertentu. Dari sisi positif, ideologi sufistik ini merupakan modal sosial (*social capital*) yang dimiliki oleh NW. Kelebihan Tuan Guru Zainuddin adalah mampu membangun dan memanfaatkan ideologi sufistik secara maksimal untuk menciptakan perubahan sosial, kemajuan pendidikan dan partisipasi politik (Hamdi 2013: 9). Misalnya, ketika NW berencana membangun gedung sekolah, kampus, masjid, atau panti asuhan, pihak pengurus NW tinggal bergerak mengumpulkan dana melalui swadaya masyarakat yang dikenal dengan uang amal. Begitu juga ketika NW masuk pada ranah politik, tidak begitu sulit bagi elit-elit NW untuk memobilisasi massa dalam penggalangan suara pemilih. Jika pimpinan NW menginstruksikan kepada jama'ahnya, maka instruksi tersebut akan dilaksanakan tanpa pernah bertanya lebih jauh atau *sami'na wa atha'na* (Hamdi 2013; Smith dan Hamdi 2014).

Munculnya dampak positif ataupun negatif dari sikap ini tergantung bagaimana elit-elit NW memanfaatkan dan

mengelolanya. Namun setidaknya terdapat empat hal yang menjadi dampak negatif dari kultur ideologi sufistik ini, pertama, terjadinya pengkultusan. Sikap loyal, fanatik, dan sikap ta'zim yang berlebihan secara tidak langsung memosisikan seorang pemimpin sebagai objek pengkultusan. Saya mengamati bahwa Tuan Guru Zainuddin baik secara sadar ataupun tidak sadar telah mengalami pengkultusan dalam kultur yang dibangun oleh habitus NW, yakni habitus sufistik. Dia tidak hanya dipuja-puji atas prestasi, keilmuan, kepintaran, dan kealimannya tetapi juga disucikan secara agama dan tidak boleh dikritisi atau ditentang fatwanya. Meskipun Tuan Guru Zainuddin tidak senang dengan sikap masyarakat yang mengkultuskan dirinya secara berlebihan, akan tetapi sulit untuk mencegahnya karena telah mentradisi dan menjadi bagian dari budaya NW dan budaya lokal masyarakat Lombok secara umum (Alfarisi 2014; Hadi 2010; Jamaludin 2011; Smith dan Hamdi 2014).

Kedua, lemahnya budaya kritis. Dalam kerangka habitus sufistik ini jemaahNW kurang terlatih untuk berpikir kritis, bebas dan moderat, tetapi sebaliknya lebih pada sikap loyal, fanatik, dan menerima apa adanya instruksi dan perintah dari pemimpin NW. JemaahNW tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang organisasi lain, mereka lebih banyak diajarkan ke-NW-an *an sich*. Dampaknya jemaahNW alergi dengan komunitas dan organisasi di luar NW. Ketika berbicara organisasi lain yang berbeda ideologi, maka para jemaahcenderung menilai sesat organisasi tersebut. Ketiga, rawan konflik. Ketika pemimpin yang 'dikultuskan' wafat, maka para jemaahakan kebingungan mencari siapa penggantinya. Pada waktu yang bersamaan, Tuan Guru Zainuddin tidak menunjuk secara langsung siapa yang akan menggantikan posisi beliau pasca wafat. Sedangkan kharisma seorang tokoh seperti yang dikatakan Max Weber tidak bisa diwariskan secara total kepada generasi generasi berikutnya. Pemimpin yang baru tidak akan pernah sama

dengan pemimpin sebelumnya (Harrison 1959: 208). Di sinilah celah konflik akan terjadi di kalangan murid-muridnya. Pada masa transisi inilah terjadi konflik dalam perebutan kekuasaan oleh para pengikutnya yang melibatkan keluarga dan para elit NW.

Keempat, mudah dipolitisasi untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Idelogi sufistik yang menekankan sikap loyal dan fanatik sangat mudah dipolitisasi oleh elit-elit tertentu untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi mereka. Banyak sekali elit-elit NW yang pura-pura loyal, ta'at, dan fanatik, padahal targetnya adalah meraih kepentingan pribadi dan kelompok. Menurut wacana lokal yang berkembang bahwa mereka juga pintar mendekati pimpinan dengan berbagai cara untuk memperoleh simpatinya, bahkan dengan cara-cara yang tidak beretika seperti memfitnah dan menjelekkan lawan-lawan politiknya. Pola-pola ini sudah lumrah di dalam organisasi NW, bahkan cenderung dipelihara oleh elit-elit tertentu sehingga gesekan, perpecahan, dan konflik antarjemaahterus terjadi.

Adapun kelemahan selama kepemimpinan Tuan Guru Zainuddin adalah lemahnya manajemen konflik di tingkat internal. Tuan Guru Zainuddin tidak menyadari adanya ancaman besar, yaitu konflik dan perpecahan elit-elit NW akibat persaingan dalam perebutan kekuasaan di ranah organisasi maupun ranah politik. Tuan Guru Zainuddin seringkali menggunakan bahasa simbol di depan para jama'ahnya sehingga menimbulkan multi interpretasi, kesalahpahaman dan kontra- produktif. Sikap inilah yang sering menimbulkan konflik dan perselisihan di kalangan jama'ahnya dengan alasan bahwa mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Menurut wacana lokal juga bahwa dia cenderung mendengar elit-elit NW yang dekat dengan dirinya, tanpa melakukan *cross-check* lebih jauh atas kebenaran informasi tersebut. Munculnya

kasus pemecatan yang kontroversial terhadap elit-elit NW adalah salah satu bukti lemahnya manajemen konflik dan kontrol informasi yang masuk kepadanya. Selama masa hidupnya, berbagai peristiwa konflik internal antarelit NW pernah terhadi seperti kasus konflik tahun 1977 ketika M. Djalaluddin yang menjadi Ketua Umum PB NW dipecat oleh Tuan Guru Zainuddin karena dinilai tidak loyal dan menentang kebijakan organisasi.

Pemecatan Djalaluddin sebagai Ketau PB NW telah menimbulkan gejolak yang luar biasa di dalam tubuh organisasi. Pemecatan ini tidak hanya menyangkut masalah organisasi, tetapi juga berdampak pada persoalan rumah tangganya. Djalaluddin sangat kecewa dengan keputusan pemecatan dirinya karena dinilai tidak prosedural dan penuh dengan kepentingan dan intrik-intrik politik elit-elit NW yang tidak senang dengan dirinya. Siti Rohmi Jalilah (2008) mengatakan: 'Ayah saya difitnah dan menjadi korban politik pada waktu itu'. Menurut beberapa sumber, sebelum dipecat Djalaluddin dan Pengurus NW yang lain telah mengundurkan diri dan membubarkan kepengurusan organisasi. Pasca pemecatan tersebut dia juga mendirikan Lembaga Darul Ulum yang berpusat di Pancor sebagai lembaga tandingan NW karena diambil alih oleh Tuan Guru Zainuddin.

NW kembali dilanda konflik dan perpecahan pada tahun 1982. Kasus konflik 1982 pada awalnya merupakan konflik eksternal antara NW dengan Pengurus Golkar di Lombok. Pada tahun 1982 NW mengindikasikan untuk keluar dari Golkar karena tumpukan kekecewaan atas sikap partai yang tidak pernah merealisasikan janji-janji politiknya. NW ketika itu melakukan Gerakan Tutup Mulut (GTM), tidak mengungkapkan dukungan secara jelas ke salah satu partai termasuk ke Golkar karena risiko yang besar jika

berseberangan dengan rezim Orde Baru. Elit-elit NW yang menjadi anggota dewan dari Golkar pada waktu itu dihadapkan pada pilihan yang dilematis, apakah mendukung Golkar atau keluar mengikuti kebijakan Tuan Guru Zainuddin dengan konsekuensi dipecat sebagai anggota dewan dari Golkar. Sedangkan jika mereka tetap di Golkar mereka harus rela keluar dari NW. Sebagian elit-elit NW memilih tetap di Golkar seperti TGH. Najamudin Praya dan TGH. Zainal Abidin Sakra karena alasan pribadi dan keluarga. Selain itu, mereka menilai bahwa Tuan Guru Zainuddin tidak menggunakan bahasa yang jelas dengan keputusan GTM tersebut yang akhirnya menimbulkan multi tafsir di kalangan elit-elit NW, di mana sebagian elit memaknai boleh tetap di Golkar dan sebagian mengartikan harus keluar dari Golkar.[6]

NW pasca Tuan Guru Zainuddin

Wafatnya Tuan Guru Zainuddin tahun 1997 tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam bagi jemaahNW, tetapi juga meningalkan berbagai persoalan sosial-politik di internal organisasi NW yang belum terselesaikan (Hamdi 2011; Mugni 2014; Nazri 2000; Saprudin 2005). NW pasca Tuan Guru Zainuddin merupakan era baru bagi jemaahNW karena selama ini dia merupakan tokoh sentral dan ikon NW selama satu abad. Era pasca Tuan Guru Zainuddin merupakan era transisi dari kepemimpinan Tuan Guru Zainuddin ke elit-elit NW yang lain. Pada saat yang bersamaan, setahun setelah dia wafat, bangsa Indonesia sedang dalam proses

[6] Menurut TGH. Fuad dan TGH. Mahmud Yasin (wawancara 2008) bahwa gerakan tutup mulut (GTM) merupakan bahasa simbol yang digunakan oleh Tuan Guru Zainuddin untuk keluar dari Golkar. Muncul isu jika dirinya dan para jemaahNW beralih dukungan ke Partai Persatuan Pembangunan. NW sempat bersitegang dengan pemerintah Orde Baru pada waktu itu karena beberapa kadernya dipecat sebagai anggota dewan dari Partai Golkar termasuk TGH. Fuad yang memilih setia mengikuti fatwa Tuan Guru Zainuddin.

transisi dari era Orde Baru ke era reformasi di 1998. Sejalan dengan agenda reformasi di tingkat nasional, NW juga mengalami reformasi dan transformasi di setiap bidang baik di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Muhas 2009; Muhtar 2010; Smith dan Hamdi 2014).

Membandingkan era Tuan Guru Zainuddin dengan era setelahnya bukanlah sesuatu yang gampang karena harus melihat dari berbagai aspek. Selain itu, membandingkan dua era ini sulit berlaku objektif karena perbedaan setting sosial-politik yang mempengaruhi kondisi perkembangan pembangunan NW. Saya berpendapat bahwa di bidang-bidang tertentu, NW pasca Tuan Guru Zainuddin mengalami kemajuan yang lebih besar daripada masa Tuan Guru Zainuddin. Meskipun NW dari sejak awal ditinggal oleh Tuan Guru Zainuddin terjebak dalam konflik internal dan perang saudara yang berkepanjangan, namun di bidang politik dan pembangunan misalnya bahwa NW telah mencapai prestasi puncak ketika mampu mengantarkan kadernya sebagai gubernur NTB selama dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) dan juga bupati Lombok Timur satu periode (2008-2013).

Seperti yang saya kemukakan di atas bahwa telah muncul konflik dan perpecahan secara terbuka di tubuh organisasi NW setelah Tuan Guru Zainuddin wafat. Ketika dia masih hidup konflik dan perpecahan bersifat sembunyi-sembunyi atau di balik layar, tetapi setelah wafat konflik dan perpecahan bersifat terbuka di depan publik. Selama satu dekade, konflik dan perpecahan NW telah menjadi konsumsi publik dan komoditas politik dan ekonomi baik bagi masyarakat Lombok pada umumya dan jemaahNW khususnya. Muktamar NW ke-10 di Praya 1998 adalah puncak konflik pasca Tuan Guru Zainuddin (Hamdi 2011: 4). Pada Muktamar itu terdapat dua kubu yang bersaing sebagai orang nomor satu di NW,

yaitu Kubu Rauhun (R1) dan Kubu Raihanun (R2). Pemimpin kedua kubu ini adalah putri Tuan Guru Zainuddin sendiri, mereka bersaing memperebutkan posisi sebagai pemimpin NW yang baru. Hasil Muktamar di Praya yang menunjuk R2 sebagai pemimpin NW yang baru mendapat tantangan dan penolakan dari Kubu R1. Mereka melihat adanya pelanggaran aturan organisasi pada Muktamar Praya tersebut karena pencalonan R2 yang notabene perempuan sebagai pemimpin NW tidak sesuai dengan mazhab organisasi. Pro dan kontra hasil Muktamar ini melahirkan konflik dan perpecahan selama satu dekade sejak tahun 1998-2010 (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012; Mugni 2013; Muhtar 2010; Nazri 2000).

Peristiwa konflik merupakan salah satu yang paling menonjol dalam sejarah perkembangan NW pasca Tuan Guru Zainuddin. Yang menarik adalah meskipun NW di tengah perpecahan dan konflik komunal tetapi NW tetap eksis, bahkan terus menunjukkan grafik perkembangan yang lebih pada bidang-bidang tertentu jika dibandingkan dengan era Tuan Guru Zainuddin. Konflik dan perpecahan tidak menghambat elit-elit NW untuk terus mengembangkan sayap-sayap organisasi hingga ke tingkat nasional (Hamdi 2013; Hamdi dan Smith 2012; Muslim 2014). Pasca Muktamar Praya, organisasi NW terbagi ke dalam dua kubu yakni Kubu R1 dan Kubu R2. Dalam perkembangannya, kedua kubu ini juga dikenal dengan sebutan NW Pancor untuk Kubu R1 dan NW Anjani untuk Kubu R2. Munculnya nama atau istilah NW Pancor dan NW Anjani mengacu pada tempat masing-masing kedua kubu menjalankan roda organisasi pasca pecahnya konflik internal (Hadi 2010; Hamdi 2011; Mugni 2013; Muhtar 2010; Saprudin 2005).

Selama konflik dan perpecahan, kedua kubu bersaing

menunjukkan kubu siapa yang lebih baik dalam memimpin dan mengelola organisasi. Kubu R2 atau dikenal dengan NW Anjani bersama pendukungnya melanjutkan perjuangan NW dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan yang baru di Desa Anjani. Perkembangan NW Anjani tergolong cepat meskipun mereka mulai membangun dari nol (Hamdi 2011; Mugni 2013). Mereka membebaskan lahan sambil membangun institusi-institusi pendidikan NW seperti madrasah, kampus, stasiun radio, dan lain-lain. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kubu R1 atau NW Pancor, mereka terus meningkatkan pembangunan dan pengembangan kualitas *output* lembaga pendidikan yang telah ada di Pancor. Mereka juga merehab gedung-gedung sekolah yang sudah tua atau tidak layak pakai dengan membangun gedung-gedung baru bertingkat. Mereka merampungkan bangunan gedung perpustakaan Birrul wa Lidain dan membangun stasiun Radio Hamzanwadi (Hamdi 2011; Nazri 2000). Keberhasilan kedua kubu NW dengan membangun studio radio adalah pencapaian yang tidak pernah dilakukan pada masa Tuan Guru Zainuddin. Begitu juga dengan keberhasilan NW menyelesaikan bangunan gedung Birrul wa Lidain adalah sebuah prestasi tersendiri karena bangunan ini merupakan mega proyek yang menghabiskan dana miliaran.

Sebagai konsekuensi dari perpecahan NW, seluruh kebijakan tergantung pada kubu masing-masing. Seringkali kebijakan organisasi antara kedua kubu saling berbenturan. Nuansa persaingan antara keduanya telah masuk pada ranah politik praktis. Setelah resmi pecah menjadi dua kubu, masing-masing kubu mengubah arah kebijakan politik mereka dengan berafiliasi ke partai-partai baru yang muncul setelah reformasi Indonesia 1998. Pada Pemilu 1999, kubu Anjani tetap berafiliasi ke Partai Golkar, sedangkan

Kubu Pancor berafiliasi ke Partai Daulat Rakyat (PDR) Pimpinan Adi Sasono. Perubahan kebijakan politik juga terjadi pada Pemilu 2004, Kubu Pancor berafiliasi ke Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan kubu Anjani berafiliasi ke Partai Bintang Reformasi (PBR) (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Muhas 2009). Kedua partai politik afiliasi NW ini selalu memperoleh suara yang signifikan di NTB. Kedua kubu bersaing dalam mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Setelah kedua partai mereka gagal meraih suara 2.5% pada Pemilu 2008, kedua kubu mengubah kembali haluan politiknya pada Pilkada 2014, di mana NW Pancor beralih ke Partai Demokrat, sedangkan NW Anjani ke PKB dan Hanura (Hamdi 2013: 5-6).

Tahun 2008 merupakan tahun bersejarah bagi kedua kubu NW karena mereka terlibat langsung dalam pertarungan politik khususnya di tingkat lokal. Kedua kubu terlibat dalam persaingan Pilkada untuk posisi gubernur NTB dan bupati Lombok Timur. Saya berargumen bahwa inilah puncak kejayaan NW karena mampu memenangkan Pilkada di NTB meskipun di tengah konflik internal. NW berhasil memenangkan dua jabatan publik, yaitu sebagai gubenur NTB dan bupati Lombok Timur periode (2008-2013). Pada Pilkada tersebut Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi (Ketua PB NW Pancor) terpilih sebagai gubernur NTB dan Sukiman Azmy yang berpasangan dengan Syamsul Lutfi sebagai bupati dan wakil bupati. Pada Pilkada 2013 Tuan Guru Bajang kembali lagi terpilih sebagai gubernur NTB untuk priode kedua (2013-2018) (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Muhas 2009). Kemenangan ini merupakan sejarah baru bagi NW karena selama kepemimpinan Tuan Guru Zainuddin belum pernah ada kader NW yang berhasil

memegang kedua jabatan publik terebut.[7] Kemenangan ini juga menarik karena NW dalam kondisi konflik dan perpecahan, apalagi Kubu NW Anjani tidak mendukung calon dari kubu NW Pancor. Mereka justru mendukung calon lain di luar NW.

Prestasi lain adalah kader-kader NW pasca Tuan Guru Zainuddin semakin terbuka dan kritis. Pola-pola kepemimpinan yang mengutamakan sikap fanatik yang berlebihan perlahan-lahan mulai tereduksi. Dari kedua kubu ini terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan NW; Kubu R2 lebih cenderung mempertahankan pola kepemimpinan Tuan Guru Zainuddin yang mengedepankan ideologi sufistik yang menekankan keta'atan penuh kepada guru dan pemimpin organisasi. Tidak diperbolehkan seorang kader menentang atau mengkritisi kebijakan organisasi. Kubu R2 juga terkesan ekslusif dan tidak pernah membuka dialog dengan Ormas lain. Berbeda dengan Kubu R1 yang lebih menekankan sikap rasional dengan mewacanakan paradigma perubahan di tubuh NW. Tuan Guru Bajang berhasil membangun wacana baru di NW seperti wacana pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan keterbukaan. Dia juga membangun kembali hubungan dengan tokoh-tokoh dari luar NW seperti Muhammadiah, Wahabi, dan NU dengan mengundang mereka hadir di acara-acara besar NW (Hamdi 2013; Hamdi dan Smith 2012). Kubu NW Pancor juga berusaha melibatkan tokoh-tokoh di luar NW masuk ke jajaran pengurus NW di awal-awal kepemimpinan Tuan Guru Bajang. Dia

[7] Pada masa Tuan Guru Zainuddin kader-kader NW tidak pernah behasil duduk di lembaga eksekutif, hanya sebagai anggota legislatif. Tentu banyak faktor yang menyebabkan kegagalan elit-elit NW pada waktu itu termasuk kebijakan politik pemerintah Orde Baru yang lebih memprioritaskan kubu militer dan etnis Jawa sebagai pemimpin daerah. Dalam sejarahnya, Lalu Gede Wiresentane (Ketua PB NW pada masa Tuan Guru Zainuddin) pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati Lombok Tengah tetapi selalu gagal.

juga merekrut tokoh-tokoh yang pernah dibuang oleh Tuan Guru Zainuddin untuk ikut berjuang kembali di NW.

Keterlibatan ekonomi dan politik NW

Berbicara tentang keterlibatan NW dalam bidang ekonomi dan politik merupakan isu yang urgen meski kedua bidang tersebut tidak masuk secara khusus dalam fokus pembangunan organisasi. Walaupun NW hanya bergerak dalam di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah, tetapi kedua bidang (ekonomi dan politik) tidak bisa dipisahkan dari NW dan mempunyai pengaruh besar yang menentukan arah kebijakan organisasi. Faktor perubahan sosio-politik seringkali membuat sebuah organisasi atau institusi sulit untuk konsisten dengan visi dan misi awalnya. Organisasi NW termasuk salah satu dari ormas Islam yang tidak konsisten pada khittahnya untuk tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Dalam sejarahnya NW secara intens terlibat di dunia politik praktis berafiliasi ke salah satu partai politik nasional. Bahkan akhir-akhir ini politik praktis menjadi salah satu trend di kalangan jemaahNW sejak keberhasilan Tuan Guru Bajang memenangkan Pilkada sebagai Gubernur NTB selama dua periode (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Muslim 2014).

Dalam pada itu, aktivitas ekonomi dan pembangunan NW terus menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun NW tidak bergantung ke pemerintah daerah dan pusat. Pertanyaanya kemudian, bagaimana NW bisa eksis hingga sekarang dan dari mana NW memperoleh sumber dana untuk membangun infrastruktur lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga yang lain, dan sejauh mana komitmen NW terhadap pengembangan ekonomi masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab dalam

rangka memahami keterlibatan NW dalam bidang ekonomi.

Selama ini NW masih eksis dan *sustainable* dalam pembangunan karena mempunyai beberapa sumber pendanaan, yaitu uang pangkal dan uang iuran jemaahNW, hasil lembaga pendidikan, keuntungan harta benda organisasi, waqaf, infaq, hadiah, amal, zakat, dan usaha-usaha lainnya (Nu'man 1999). Pada masa Tuan Guru Zainuddin, pendanaan organisasi lebih banyak diperoleh dari uang iuran jemaahNW atau yang lebih dikenal dengan uang amal. Salah satu tradisi unik yang dikembangkan oleh Tuan Guru Zainuddin adalah melakukan pengajian keliling secara bergiliran ke seluruh kampung yang merupakan basis massa NW. Pengajian ini bertujuan untuk dakwah Islamiyah dan syi'ar organisasi NW. Saya berargumen bahwa di samping agenda dakwah dan syi'ar NW ke seluruh daerah terdapat juga agenda-agenda lain di dalam pengajian tersebut, yaitu agenda ekonomi dan politik. Tentu tidak ada yang salah dengan adanya agenda ekonomi dan politik di dalam pengajian karena agama sangat dekat dengan materi dan kekuasaan.

Di setiap akhir pengajian, para jemaahNW melakukan sebuah ritual keagamaan, yaitu 'lempar koin atau uang logam' ke arah Tuan Guru Zainuddin yang sedang membaca doa sebagai penutup acara pengajian. Ritual pelemparan uang logam ini sangat unik dan hanya ditemukan di NW. Dari sisi nilai uang logam ini tidak sebanding dengan uang kertas. Entah mengapa uang logam tersebut dilempar, tidak dikumpulkan dengan cara biasa. Menurut Tuan Guru Zainul Majdi (Lombok Post 2014) bahwa ritual lempar koin ini dimaksudkan supaya masyarakat yang tidak memiliki uang yang banyak dapat beramal jariah sesuai kemampuan dan juga supaya tidak ada rasa malu karena tidak ada yang memperhatikan jumlah nominalnya. Adapun makna simbolik dari melempar uang

koin itu adalah mirip dengan ritual melempar 'jumrah', yakni melempar batu kerikil kecil ke arah tiga tiang ketika melakukan ibadah haji yang tujuannya adalah mengusir sifat buruk (setan) yang menggangu manusia. Artinya bahwa ritual lempar koin tersebut memiliki makna supaya jemaahNW terbiasa dan tidak merasa berat untuk beramal dan mengusir sifat tamak. Tradisi ini masih diwarisi oleh jemaahNW dari kedua kubu. Bahkan ritual lempar koin masih dilakukan oleh sebagian jemaahNW di makam Tuan Guru Zainuddin sebagai simbol amal sosial (Lihat Hamdi 2013: 9-10).

Selain ritual lempar uang koin, sebagian jemaahNW memberikan uang kertas baik secara langsung ataupun melalui pengisian amplop yang telah dibagikan oleh panitia pengajian. Panitia berjalan keliling ke arah jemaahNW dengan membawa kantong plastik. Di tengah-tengah pengajian itu juga terdapat petugas dari kelompok ahli wirid yang menjual asesoris-asesoris NW seperti foto Tuan Guru Zainuddin, cincin yang memiliki kekuatan magis yang di dalamnya terdapat poto Tuan Guru Zainuddin, kalung yang berisi rajah-rajah, kalender NW, minyak seribu hajat, dan lain-lain. Dari satu kali pengajian pihak panitia pengajian dapat mengumpulkan uang amal berkisar antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 10.000.000 juta. Ini adalah pengajian rutin yang biasa setiap hari dilakukan oleh tokoh-tokoh NW. Hingga sekarang tradisi ini masih terus dijaga dan dipraktikkan sebagai identitas kultural NW. Saya berargumen bahwa pengajian merupakan mesin kapital organisasi NW. Selama satu hari, pengajian bisa dilakukan di tiga atau empat kali di dusun yang berbeda-beda.[8]

Tradisi pengumpulan dana dari media pengajian di atas masih

[8] Jika dikalkulasikan untuk setiap pengajian rata-rata Rp. 5.000.000, maka satu hari pihak organisasi dapat mengumpulkan dana 15 atau 20 juta, tergantung berapa kali pengajian diadakan.

terus dilestarikan oleh kedua kubu NW sebagai bentuk pengembangan ekonomi dan politik organisasi. Dalam perkembangannya, Kubu R1 tidak lagi menggantungkan ekonomi organisasi kepada amal masyarakat. Pembangunan gedung madarasah, kampus dan lembaga-lembaga yang lain tidak dibebankan kepada jemaahNW, tetapi dari sumber-sumber lain. Sedangkan Kubu R2 masih sangat tergantung kepada masyarakat, di mana hampir semua bangunan fisik, baik itu lembaga pendidikan, kantor NW, stasiun radio, dan lain-lain adalah murni hasil sumbangan para jama'ah. Kubu R1 lebih kreatif dalam mengelola dana mereka dan memanfaatkan posisi-posisi strategis untuk kepentingan organisasi, sementara pihak R2 belum menunjukkan hasil yang maksimum padahal tokohnya juga banyak yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif.

NW juga memiliki kegiatan usaha yang sangat prospek, yaitu memproduksi barang-barang azimat atau ilmu kedigdayaan yang diyakini memiliki kekuatan magis. Tuan Guru Zainuddin dan murid-murid kepercayaannya seperti TGH. Muhsin Maqbul, TGH. Sulaiman, H. Mustafa, TGH. Abdul Kadir, dan H. Sayyid Abdul Karim membentuk lembaga kelompok jemaahwirid.[9] Tuan Guru Zainuddin dan para muridnya di Lembaga JemaahWirid menciptakan ilmu-ilmu yang memiliki fungsi bermacam-macam. Sebagian ilmu berfungsi menjaga diri dari musibah, bala' dan bahaya yang mengancam, sebagian juga berfungsi untuk membantu perkembangan mental dan lain-lain. Untuk memperoleh ilmu tersebut para anggota harus membayar mahar yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 25.000, hingga Rp. 200.000. Harga mahar tergantung jenis dan tingkatan ilmu yang ingin diperoleh para

[9] JemaahWirid adalah nama lembaga yang khusus menangani kegiatan wirid dan pengembangan ilmu-ilmu hikmah. Lembaga ini bertugas melatih dan mengkoordinir para jemaahyang ikut atau mengambil ilmu hikmah.

jemaahNW.[10] Dari nilai bisnis, Lembaga JemaahWirid ini sangat produktif. Dalam satu minggu lembaga ini dapat memperoleh Rp.3.000.000 hingga Rp.10.000.000. Bisnis ilmu wirid ini merupakan lahan subur untuk memperoleh dana bagi organisasi karena hampir setiap jemaahNW ingin memiliki ilmu tersebut.

Kelompok JemaahWirid yang dibentuk Tuan Guru Zainuddin ini mengalami masa keemasan selama masa hidupnya. Melalui lembaga ini NW tidak hanya memperoleh dana besar, tetapi juga mampu menarik kelompok non NW masuk ke NW karena ingin memproleh ilmu tersebut. Banyak orang Bali yang non Muslim juga tertarik dengan ilmu-ilmu ini dan menjadi muallaf. Informasi tentang keberadaan ilmu wirid ini menyebar ke seluruh Pulau Lombok. Namun kelompok ini seringkali dilanda konflik karena persaingan antara tokoh-tokoh JemaahWirid. Konflik di antara mereka ikut memberikan kontribusi atas eskalasi konflik NW. Para ahli wirid terpecah menjadi dua, sebagian pro Kubu R1 seperti TGH. Muhsin Maqbul, dan sebagian lagi pro Kubu R2, yaitu H. Mustafa dan Sayyid Karim. Ketika konflik mengalami puncak para ahli wirid dari kedua kubu NW ini membekali jemaahmereka dengan ilmu yang sumbernya sama dari Tuan Guru Zainuddin. Kubu R2 mengembangkan ilmu 'Hikmah Shalawat Nahdlatain' sebagai ilmu andalan yang diyakini memiliki legitimasi kuat karena masih kuat silsilahnya dengan Tuan Guru Zainuddin, sedangkan Kubu R1 tetap mengembangkan ilmu 'Jubah Putih'.

Lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawan naungan NW merupakan sumber dana selain uang amal. Biasanya pihak yayasan mengelola seluruh keuangan sekolah maupun kampus

---

[10] Di antara nama-nama ilmu yang telah muncul, yaitu 'Ilmu Benteng Abdul Madjid', 'Ilmu Nur Hikmah', 'Ilmu Jubah Putih' dan lain-lain. Bagi jemaahyang ingin menerima ilmu tersebut harus diijazahkan terlebih dahulu kemudian dilatih untuk praktik dan penguatannya.

kemudian mendistribusikannya untuk kepentingan masing-masing lembaga. Pola ini seringkali menimbulkan masalah karena pihak yayasan terkadang tidak memahami kebutuhan-kebutuhan lapangan di sekolah ataupun di kampus sehingga terjadi perselisihan antara pihak yayasan dengan guru dan dosen. Namun sekarang, sebagian sekolah maupun kampus telah memiliki hak otonomi untuk mengatur keuangan mereka dan menyerahkan sebagian ke pihak yayasan sesuai dengan aturan yang disepakati.

Sumber dana lain diperoleh dari acara-acara besar seperti perayaan hari ulang tahun (Hultah) organisasi NW yang rutin dilakukan setiap tahun. Dalam tradisi NW, acara Hultah adalah acara yang sakral di mana seluruh jemaahdari berbagai daerah hadir pada acara tersebut mencapai jumlah ribuan orang. Acara ini dirangkai dengan pengajian dan pembacaan wasiat Tuan Guru Zainuddin serta lagu-lagu mars NW. Di acara ini juga pihak panitia Hultah biasanya mengundang tokoh-tokoh nasional baik dari kalangan politisi, pemerintah, maupun tokoh agama lintas Ormas. Kehadiran tokoh-tokoh politik nasional di acara Hultah NW merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk menjajaki dan negosiasi politik dengan tokoh-tokoh NW. Pesta demokrasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres seringkali dimanfaatkan untuk sosialisasi calon-calon tertentu yang mana kehadiran mereka juga memberikan keuntungan bagi NW secara ekonomi dan politik (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012; Muslim 2014). Begitu juga dengan kehadiran pihak pemerintah kadang-kadang memberikan bantuan dana ke pengurus NW untuk pembangunan gedung-gedung madrasah yang terdapat di lingkungan organisasi ini.

Kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat, saya tidak melihat keterlibatan langsung organisasi NW. Meskipun secara tidak langsung sebagian jemaahNW memperoleh fasilitas

lahan pekerjaan dari organisasi misalnya sebagai guru, dosen, politisi, birokrat, dan lain-lain yang tentunya berpengaruh dalam pengembangan ekonomi mereka. Namun secara khusus agenda pengembangan ekonomi masyarakat belum terlihat. Justru *image* yang muncul di masyarakat selama ini, yaitu pihak pengurus NW seringkali meminta uang kepada masyarakat, sedangkan timbal baliknya tidak sesuai. JemaahNW dengan senang hati selalu menyumbang kepada NW karena mereka sangat mencintai organisasi ini, bahkan mereka tidak segan-segan menjual barang supaya dapat menyumbang di acara pengajian. Mungkinkah kemiskinan di Lombok Timur disebabkan karena eksploitasi NW terhadap ekonomi umat melalui pungutan amal atau lemahnya peran NW di dalam pengembangan ekonomi umat? Sebuah pertanyaan yang membutuhkan renungan panjang.

Ranah ekonomi dan politik merupakan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keterlibatan NW dalam bidang politik tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan ekonomi organisasi dan elit-elit NW. Menurut Noor (2004: 245-246) bahwa dari sejak awal perkembangannya NW telah aktif di dalam dunia politik praktis. Pada Pemilu pertama 1950 Tuan Guru Zainuddin ikut aktif di Partai Masyumi dan di tahun 1952 diangkat sebagai Ketua Badan Penasehat Masyumi untuk daerah Lombok. Pada tahun 1955 dia menjadi anggota konstituante RI hasil pemilihan umum pertama di Indonesia periode 1955-1959. Setelah Masyumi dibubarkan oleh pemerintahan Sukarno, Tuan Guru Zainuddin ikut membentuk Parmusi bersama Ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah, Al-Jamiyatul Wasliyah, Gasbindo, Persatuan Islam, Mathla'ul Anwar, Syarekat Nelayan Islam Indonesia, Persatuan Buruh Islam Merdeka, dan Persatuan Umat Islam .

Sejak Orde Baru muncul di pentas politik nasional, NW ikut mengubah haluan politiknya, yaitu bergabung ke Sekretariat Bersama Partai Golkar (Sekber Golkar), sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh Genderal A. H. Nasution. Menurut Noor (2004: 257), dukungan NW untuk Sekber Golkar dilatarbelakangi oleh dua hal, pertama, Golkar adalah partai Orde Baru yang dinilai berjasa menumpas gerakan PKI. Keberhasilan ini paling tidak bagi NW adalah sebuah kemaslahatan bagi kaum Muslimin. Kedua, dalam organisasi politik ini aspirasi politik NW lebih terakomodir dari partai politik lainnya. Pada 1970 NW secara resmi bermitra dengan Golkar. Pada Pemilu 1971-1977 Tuan Guru Zainuddin terpilih sebagai anngota Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) dari Golkar. Pada Pemilu 1982 dia terpilih sebagai anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah.

Keterlibatan NW di ranah politik praktis memiliki pengaruh atas melebarnya konflik pada ranah-ranah lain termasuk ranah politik. JemaahNW tidak hanya terbagi berdasarkan jenis kubu di NW, tetapi juga berdasarkan pada pilihan politik pimpinan NW. Sulit bagi jemaahNW dari masing-masing kubu untuk mengalihkan dukungan politik di luar garis politik yang telah ditentukan oleh masing-masing elit NW. Saya melihat perbedaan partai politik ikut mempertegas perbedaan identitas kedua kubu NW. Momentum-momentum konflik semakin bertambah karena setiap Pemilu, Pilkada, maupun Pilpres terjadi gesekan-gesekan di kalangan jemaahNW. Upaya-upaya untuk menunjukkan kubu siapa yang lebih superior dan lebih besar merupakan sikap yang masih terbawa oleh masing-masing pendukung kedua kubu (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012).

Pada Pilkada gubernur dan bupati di NTB Juli 2008 kedua

kubu NW terjebak dalam konflik politik praktis. Konflik NW sangat kental mewarnai Pilkada, baik untuk posisi gubernur NTB maupun posisi bupati Lombok Timur. Keduanya harus saling berhadap-hadapan karena mendukung calon yang berbeda. Kubu R1 mencalonkan Tuan Guru Bajang sebagai calon gubernur dan Sukiman Azmy berpasangan dengan Syamsul Lutfi sebagai bupati dan wakil bupati.[11] Sementara Kubu R2 mendukung calon dari luar NW, yaitu Lalu Serinata sebagai calon gubernur dan Ali bin Dahlan sebagai calon bupati Lotim.[12] Calon dari Kubu R1 hanya didukung oleh dua partai politik, PBB dan PKS, sedangkan calon dari Kubu R2 didukung oleh partai besar hasil koalisi, Golkar, PDIP, PBR, dan partai Patriot (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Muhas 2009). Alasan Kubu R2 mendukung Serinata dan Ali karena mereka adalah calon potensial yang dapat mengalahkan calon dari Kubu R1. Kubu R2 mempunyai misi utama menggagalkan Tuan Guru Bajang supaya tidak naik sebagai gubernur. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat pada baleho politik kampanye yang menyerang Tuan Guru Bajang dengan membawa isu NW.

Meskipun calon dari Kubu R1 hanya didukung oleh dua partai yang tidak terlalu besar PBB dan PKS, namun mereka berhasil memenangkan Pilkada di dua posisi tersebut, baik sebagai gubernur maupun sebagai bupati. Yang menarik adalah fenomena keberhasilan yang dicapai calon dari Kubu R1 padahal mereka tidak

---

[11] Sukiman Azmy adalah alumni madrasah NW, sedangkan Syamsul Lutfi adalah putra kedua Ummi Rauhun Tuan Guru Bajang. Dia juga memegang jabatan sebagai salah satu Pengurus NW di Pancor.

[12] Lalu Srinata adalah pejabat dari calon incumbent gubernur NTB. Dia bukan termasuk pengurus NW, sedangkan Ali bin Dahlan juga calon yang berasal dari incumbent bupati Lotim. Ali memiliki latarbelakang organisasi NU, meski demikian pad saat itu dia sangat dekat dengan tokoh-tokoh NW dari kubu R2.

didukung oleh Kubu R2. Suara NW terpecah karena salah satu kubu mendukung calon yang lain. Saya melihat bahwa Kubu R1 berhasil memanfaatkan kampanye hitam yang dilakukan oleh Kubu R2 selama masa kampanye. Kubu R2 menggunakan isu NW untuk menjatuhkan calon dari Kubu R1. Upaya ini justru berbalik karena sebagian besar masyarakat simpati kepada calon dari Kubu R1. Selain itu, calon yang didukung oleh Kubu R2 sedang menjalani kasus korupsi yang disangkakan kepadanya (Hamdi 2011: 139; 2013: 5).

Keberhasilan NW di panggung politik lokal adalah sejarah baru di dalam perjalanan karir politik NW. Sangat sulit bagi kader-kader NW untuk menduduki jabatan tersebut pada masa Tuan Guru Zainuddin karena masih dalam kontrol rezim Orde Baru. Keberhasilan NW di pentas politik ini merupakan trend positif dan penguatan identitas politik NW. Kader-kader NW mempunyai posisi tawar yang tinggi dan juga organisasi secara kelembagaan. Keberhasilan kader-kader NW terus berlanjut pada Pilkada di beberapa daerah lainnya di NTB. Pada tahun 2009, salah satu kader NW Zaini Aroni berhasil memenangkan Pilkada di Lombok Barat sebagai bupati. Pada tahun 2010, salah satu kader NW Najmul Akhyar, sebagai wakil bupati, juga berhasil sebagai pemenang pada Pilkada di Lombok Utara. Begitu juga dengan Pilkada 2010 untuk posisi walikota Mataram, NW berhasil mengantarkan kadernya Tuan Guru Akhyar Abduh, sebagai walikota. Sedangkan pada Pilkada di Lombok Tengah bulan Juli 2010 walaupun calon dari NW Lalu Gede Sakti gagal menang pada putaran kedua, tetapi pada putaran pertama Sakti berhasil menempati urutan tertinggi dengan perolehan suara 24%.

Prestasi yang bagus yang ditunjukkan oleh kader-kader NW di

dunia politik lokal, di satu sisi merupakan sebuah kebanggaan bagi NW, namun di sisi lain nama besar NW sedang dalam pertaruhan. Jika mereka gagal dalam menjalankan roda pemerintahan maka nama NW yang akan rusak, tetapi jika mereka berhasil, maka dapat mengangkat nama NW baik di pentas politik lokal maupun nasional. Fenomena lain yang muncul sekarang ini pasca keberhasilan NW pada Pilkada di Lombok adalah banyak sekali orang yang mengaku sebagai orang NW. Padahal sebelumnya mereka malu mengaku orang NW karena dianggap sebagai organisasi tradisional.

NW ke depan

Konflik dan perpecahan yang terjadi di NW tidak membuat organisasi ini semakin lemah atau mengecil, sebaliknya NW semakin solid dan semakin berkembang berjalan dengan dua arah. Meskipun konflik dan perpecahan NW harus dibayar mahal dengan jatuhnya korban jiwa dan harta dari kalangan jemaahNW, namun tidak sedikit pun mengurangi semangat untuk melanjutkan perjuangan organisasi Islam Sasak ini: 'NW fil Khair, NW Fastabiqul Khairat'. Konflik beralih fungsi sebagai motivasi tersendiri bagi elit dan jemaahNW untuk menunjukkan kubu siapa yang terbaik dan lebih mampu memegang roda organisasi. Konflik jalan, pembangunan juga jalan, itulah gambaran realitas sosial di dalam organsiasi NW.

Konflik juga menjadi sebuah keberkahan bagai elit-elit NW khususnya di bidang politik. Mereka mampu memenangkan Pilkada di tengah konflik yang sangat hebat melanda NW. Artinya, konflik mempunyai pengaruh besar untuk meraih kekuasaan. Kalau tidak ada konflik, kemungkinan Tuan Guru Bajang tidak akan berhasil menjadi gubernur. Konflik inilah yang membakar semangat kader-kader NW untuk terus maju dan memenangkan setiap pertarungan. Sebagai bukti, meskipun tidak didukung oleh Kubu R2 di dalam

Pilkada gubernur dan bupati Lotim, tetapi Kubu R1 menyapu bersih kedua posisi tersebut hanya dalam satu putaran. Pilkada di beberapa daerah lain di Lombok juga dimenangkan oleh kader-kader NW. Militansi NW dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh elit-elit NW. Sekarang NW tidak hanya berkuasa di tingkat kultural sebagai kelompok mayoritas, tetapi juga di tingkat struktural sebagai penguasa di beberapa daerah di NTB.

Keterlibatan NW dalam politik praktis bukanlah pilihan yang paling ideal bagi NW, apalagi ketika merujuk pada khittah NW yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Bagaimanapun NW tetap merupakan organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah, bukan dalam bidang politik seperti sekarang ini. Ada anggapan bahwa NW telah masuk terlampau jauh dalam dunia politik praktis. Menurut pendapat saya, NW tidak banyak pilihan untuk konteks sosial-politik yang menganut sistem desentralisasi sekarang ini. Terdapat dua pilihan bagi NW, apakah masuk ke wilayah politik praktis dengan memegang kendali kekuasaan atau sebagai alat penguasa yang selalu dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh elit-elit politik dari luar NW? Yang terpenting ke depan adalah bagaimana menjaga nama baik NW dengan menciptakan perubahan-perubahan yang lebih bagus di masyarakat. Jangan sampai kader-kader NW gagal melakukan perubahan karena akan berdampak pada masa depan politik NW.

Saya juga melihat keterlibatan NW dalam politik praktis dapat melahirkan peluang-peluang yang prospek bagi kedua kubu NW untuk melakukan *sharing* kekuasaan di pemerintahan (luar organisasi NW) sebagai bentuk rekonsiliasi NW. Menurut saya, konflik NW bukanlah konflik ideologi, tetapi lebih kepada konflik politik dan kekuasaan. Dengan demikian, salah satu solusinya adalah menyelesaikan konflik melalui jalur politik dan *sharing* kekuasaan.

Kenapa elit-elit NW harus bersusah payah mempertahankan konflik demi kekuasaan yang sangat terbatas di dalam organisasi NW, sementara kekuasaan di luar NW jauh lebih luas dan menjanjikan yang bisa digarap bersama-sama. Sulit bagi salah satu kubu NW memenangkan Pilkada jika tidak didukung oleh kubu NW yang lain. Keberhasilan Pilkada 2008, tidak lepas dari dukungan jemaahNW yang terdapat dari Kubu R2. Mereka secara diam memilih calon dari Kubu R1, meskipun pihak R2 telah melarang keras. Dalam kondisi ini jemaahNW tidak lagi melihat dari mana kubunya, tetapi melihat bahwa calon tersebut adalah keturunan Tuan Guru Zainuddin.

BAB 3
Perpecahan dan Konflik Nahdlatul Wathan

Seperlima abad anakku berpisah
Selama itu timbullah fitnah
Di sana sini anakku berbantah
*Sesama saudara di dalam nahdla*h
(Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat Renungan Masa*, 2002: 72)

Konstruksi kekuasaan dan politisasi simbol Sufi

Konflik komunal di Indonesia tidak hanya muncul di dalam sebuah komunitas, tetapi juga di dalam sebuah organisasi sosial (Abdullah 2001; Tomagola 2006; Trijono et.al 2004; Van Klinken 2005). Konflik internal NW yang terjadi pasca reformasi 1998 di Lombok masuk kategori konflik organisasi karena yang menjadi sumber persoalan adalah status dan *leadership* organisasi yang melibatkan agen-agen sosial di dalamnya. Sebagai organisasi sosial-keagamaan NW adalah media tempat berkumpulnya agen-agen sosial yang berkompetisi dan berkontestasi untuk memperoleh berbagai posisi, peran, dan modal (Hamdi 2011; Muhtar 2010; Nahdi 2012; Smith dan Hamdi 2014). Perbedaan posisi, peran, dan modal inilah yang kemudian menyebabkan benturan kepentingan antara agen yang berimplikasi pada konflik, perpecahan bahkan berujung pada

kekerasan individu dan sosial (Dahrendorf 1986; Horowitz 1985; Rummel 1976). Konflik NW berawal dari konflik antarelit NW dalam perebutan kekuasaan baik di dalam maupun di luar organisasi. Tidak ada perbedaan ideologi yang melatarbelakangi konflik tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh perebutan status, legitimasi, kekuasaan, kepemimpinan, dan warisan modal (Hamdi, 2011: 5; Hamdi dan Smith 2012: 7). Elit-elit NW yang terbagi ke kubu-kubu merupakan representasi dari kelompok-kelompok kepentingan yang terdapat di NW. Mereka telah muncul sejak organisasi NW lahir dan terus berupaya eksis dan bersaing mempertahankan dan mencapai kepentingan mereka (Hadi 2010; Mugni 2013; Muhtar 2010; Saprudin 2005). Saya berargumen bahwa NW menjadi tempat memperoleh modal ekonomi (materi, barang) dan non-ekonomi (non materi) dan sekaligus sebagai tempat pertarungan agen-agen untuk memperebutkan dan mempertahankan modal tersebut.

Untuk memahami konflik NW, maka sangat penting melihat dan menguji aspek-apek luar seperti kekuasaan, struktur organisasi, ajaran, dan kultur masyarakat lokal di Lombok yang merupakan habitus jemaahNW. Kekuasaan lahir dari sebuah relasi yang dibangun oleh aktor-aktor sosial di masyarakat, di mana dalam relasi itu terdapat kelompok yang mendominasi (*super ordinate*) dan terdominasi (*sub-ordinate*) (Dahrendorf 1986: 21). Kekuasaan berasal dari berbagai sumber tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari non-ekonomi seperti budaya, agama, dan kekuasaan simbolik (Bourdieu 1977; Giddens 2003; Harker et.al 2006). Konstruksi kekuasaan di NW berasal dari struktur organisasi dan di luar struktur, yaitu kultur yang berkembang di komunitas.

Kekuasaan dalam struktur organisasi NW dibentuk berdasarkan sistem pembagian peran dan posisi oleh para agen sosial. Di dalam sistem pembagian peran dan posisi terdapat unsur paksaan

atau dominasi oleh salah satu kelompok (mendominasi) terhadap kelompok lain (terdominasi) (Dahrendorf 1986; Horowitz 1985; Rummel 1976). Sistem pembagian peran dan posisi inilah yang melahirkan relasi kekuasaan dan otoritas antara agen. Kekuasaan adalah hubungan faktual karena adanya unsur-unsur paksaan dan perlawanan dari seseorang atau kelompok, sedangkan otoritas adalah hubungan yang tidak faktual karena dikonstruksi oleh sistem pembagian peran dan posisi mereka yang legal formal (Dahrendorf 1986: 204). Saya melihat relasi kekuasaan lebih kuat daripada relasi otoritas di dalam praktik-praktik sosial keorganisasian di lingkungan NW. Aturan-aturan organisasi tidak berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Kelompok yang berkuasa atau atasan seringkali membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan bawahannya, bahkan tidak peduli dengan kondisi mereka. Pada waktu yang bersamaan kepentingan pribadi dan kelompok lebih utama daripada kepentingan organisasi (Jamaludin 2011; Muhtar 2010; Muslim 2014).

Konflik NW juga muncul akibat dari ketidakseimbangan pembagian *sharing* kekuasaan (posisi dan peran) antara kedua kubu yang bersaing. Salah satu kubu ingin mendominasi atas kubu yang lain sehingga menimbulkan perlawanan dan resistensi dari kubu yang merasa didominasi, karena kedua kubu merasa berhak sebagai representasi dari kelompok kepentingan yang sah di dalam organisasi NW (Hamdi dan Smith 2012; Muhtar 2010; Saprudin 2005). Terdapat upaya-upaya untuk menjegal salah satu kubu di NW dan menjadi penguasa tunggal. Sementara elit-elit NW yang memiliki kepentingan tidak ingin melihat kedua kubu ini bersatu karena mereka tidak mau kehilangan peran dan posisinya di dalam organisasi. Elit-elit tersebut sangat aktif, progresif, dan kreatif dalam menciptakan peluang-peluang konflik, perpecahan dan berupaya memeliharanya selama mungkin demi mencapai tujuan

dan kepentingan yang diinginkan (Hamdi 2011, 2013; Hamdi dan Smith 2012; Nazri 2000; Saprudin 2005).

Sumber-sumber kekuasaan di luar struktur organisasi adalah kultur lokal, tradisi, dan praktik keagamaan juga sangat penting untuk diuji dalam rangka memahami pola dan *frame* konflik yang diciptakan oleh elit NW. Kultur, tradisi, dan praktik keagamaan lokal telah membentuk pola-pola kekuasaan yang berkembang di masyarakat Sasak. Sebelum Islam datang, masyarakat Sasak telah menganut dan mengembangkan budaya *patron-client* (Budiwanti 2000; Lan 2006). Masyarakat Sasak terbagi ke dalam stratifikasi sosial yang berbeda-beda tingkatannya. Terdapat dua tingkatan yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu kelompok bangsawan (*menak*) dan kelompok masyarakat bawah (*jajar karang)*. Kelompok *menak* berasal dari keluarga dan keturunan raja yang digelari *raden nuna* untuk laki-laki dan *denda* untuk perempuan. Kelompok inilah yang memegang kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan di Lombok sejak masa kerajaan hingga masa kemerdekaan (Budiwanti 2000: 246; Syakur 2006: 227).

Kelompok *jajar karang* sangat loyal kepada kelompok *menak* yang menjadi raja atau pemimpin mereka. Sikap loyal dan militansi kepada raja (*datu*) ini terus dipelihara dan dijaga oleh masyarakat Lombok. Bahkan pihak Kerajaan Bali mengalami kesulitan menaklukkan Kerajaan Lombok karena sikap loyal dan militansi yang kuat rakyat Lombok kepada rajanya (Jamaludin 2011; Lan 2006; Lukman 2007). Mereka mencoba menghilangkan sistem kasta dan stratifikasi sosial di Lombok dengan menghapus, menyembunyikan, dan membakar silsilah raja-raja Lombok. Dominasi kelompok *menak* di Lombok mulai luntur setelah Kerajaan Bali mencoba menghilangkan identitas masyarakat Sasak sebagai strategi politik kolonial dan mempertahankan kekuasaan

(Jamaludin 2011; Lukman 2007). Faktor lain adalah masuknya kelompok Muslim ortodoks dari Makassar yang melakukan purifikasi agama di Lombok yang membawa konsep dan ajaran yang lebih egaliter dan *equal*. Islam yang tidak mengenal sistem kasta perlahan-lahan telah mengubah sistem kasta yang terdapat di masyarakat (Cederroth 1981; Lan 2006). Perubahan ini juga merupakan bagian dari dampak perubahan Undang-undang negara yang berlaku secara nasional bagi masyarakat Indonesia (Avonius 2004).

Melemahnya peran kelompok adat di masyarakat Lombok telah digantikan oleh peran tokoh agama. Para tuan guru mengambil alih peran yang selama ini dimainkan oleh tokoh-tokoh adat di berbagai bidang seperti pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial (Alfarisi 2014; Habibuddin 2005; Hamdi 2011; Lan 2006). Artinya, institusi agama telah menggantikan institusi adat. Saya tidak mengatakan peran adat diambil alih oleh agama secara total, karena masih terjadi dialog dan negosiasi antara agama dan budaya, antara tokoh adat dengan tokoh agama. Meskipun terjadi perubahan dan transisi peran sosial dari tokoh adat ke tokoh agama, tetapi sistem relasi *patron-client* yang dibangun tidak pernah berubah hingga sekarang. Apalagi sistem kepemimpinan sufi yang menekankan loyalitas dan keta'atan seorang murid kepada guru (mursyid) sangat cocok dengan sistem *patron-client* yang berkembang pada masa tradisional di Lombok. Sistem *patron-client* hanya berganti bentuk dan baju di dalam kekuasaan tokoh-tokoh agama sekarang ini karena pada esensinya tetap sama (Hamdi 2013; Smith 2014; Lan 2006; Van Beruinessen 2007).

Saya berargumen bahwa kekuasaan yang dibangun di dalam organisasi dan komunitas NW berdasarkan sistem kepemimpinan sufistik yang menekankan keta'atan seorang murid kepada guru (mursyid). Guru yang dimaksud di sini adalah guru secara umum

seperti guru di sekolah, dosen, dan para tuan guru. Apa yang dikatakan oleh guru harus diikuti oleh jemaahNW tanpa bertanya lebih jauh apa tujuan dan manfaatnya (Hamdi 2013; Muslim 2014; Smith dan Hamdi 2014). Bourdieu (1997) menyebut kondisi ini sebagai *doxa,* di mana masyarakat hanya menerima apa adanya dan tidak mengkritisi. Konsep kepemimpinan sufistik inilah yang dikembangkan oleh Tuan Guru Zainuddin di NW secara ketat, halus dan total karena mengacu pada kultur sufi yang harus memegang silsilah (Baharuddin dan Rasmianto 2004; Muslim 2014; Smith dan Hamdi 2014). Apa yang dilakukan oleh Tuan Guru Zainuddin cukup berhasil terbukti dengan perkembangan NW yang menjelma menjadi organisasi besar di Lombok. Kepemimpinan sufistik ini coba diwarisi oleh generasi berikutnya dan mereka mengalami kendala karena selain adanya perubahan sosial dan sistem politik di Indonesia pasca reformasi, tetapi juga berkembangnya politisasi ajaran sufi untuk kepentingan kelompok. Jargon *sami'na wa atha'na* dimanipulasi dan dipolitisasi sebagai doktrin supaya jemaahNW mendukung kubu mereka (Hadi 2010; Hamdi 2011; 2013; Muslim 2014; Smith dan Hamdi 2014). Jika terdapat tokoh yang berani menentang doktrin ini maka dia harus siap menanggung risiko seperti pemecatan secara tidak hormat dan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi NW.

Tuan guru merupakan kelompok tertinggi dalam hierarkhi keagamaan di Lombok. Mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar karena dilegitimasi oleh modal spiritual (*spiritual capital*), modal budaya (*cultural capital*), dan modal keagamaan (*religious capital*) yang mereka miliki (Fahrurrozi 2011; Habibuddin 2005; Jamaludin 2011; Kingsley 2010; Nahdi 2012). Di komunitas NW khususnya, posisi tuan guru merupakan posisi tertinggi dan memiliki nilai prestisius di tengah masyarakat. Mereka ibarat raja-raja kecil yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Posisi mereka sama

dengan kiai-kiai di Jawa yang diibaratkan sebagai raja (Alfarisi 2014; Dhofier 1994; Jamaludin 2011; Kingsley 2010; Turmudi 2004). Menurut Zamakhsyari Dhofier (1994: 56), kebanyakan kiai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dan kiai merupakan sumber dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Tidak seorang pun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kiai di lingkungan kekuasaanya, kecuali kiai lain yang lebih besar pengaruhnya (Dhofier 1994; Turmudi 2004). Beginilah kondisi para tuan guru di NW, bahkan para tuan guru lebih kuat posisinya karena selain mengelola pesantren dan madrasah, mereka juga aktif di masyarakat melakukan pengajian keliling secara rutin . Tuan guru mempunyai wilayah-wilayah kekuasaan di masyarakat yang tidak boleh dimasuki oleh tuan guru yang lain karena akan terjadi benturan (*clash*) dan konflik antara tuan guru dan pendukungnya (Habibuddin 2005; Hamdi 2013; Jamaludin 2011; Muslim 2014).

Di dalam komunitas NW sendiri terdapat hierarkhi di antara tuan guru. Tuan Guru Zainuddin selaku pendiri NW adalah tuan guru yang paling tinggi tingkatannya. Dia tidak hanya dianggap sebagai tuan guru, tetapi juga sebagai wali yang memiliki kharisma dan pengaruh yang sangat kuat. Setelah dia meninggal, masyarakat meyakini jika dia adalah sultan dari semua wali di alam kubur atau yang disebut dengan *sultan auliya* (Baharuddin dan Rasmianto 2004; Smith dan Hamdi 2014). Yang menarik adalah ketika konsep kepemimpinan sufistik yang dikembangkan oleh Tuan Guru Zainuddin di dalam organisasi dan komunitas NW dipolitisasi oleh elit-elit NW untuk kepentingan politik dan kekuasaan pribadi dan kelompok mereka. Seringkali konsep kepemimpinan sufi yang loyal dan ta'at kepada guru mengakibatkan konflik internal ketika muncul intervensi kepentingan politik. Saya melihat inilah yang terjadi di NW, Tuan Guru Zainuddin yang menjadi simbol kekuatan

sufistik di komunitas NW membuat para elit-elit NW berkontestasi untuk memperoleh legitimasinya. Siapa yang dekat dengannya akan mendapat legitimasi yang lebih kuat untuk memperoleh kekuasaan. Ideologi sufistik sangat efektif di dalam membangun kekuatan dan mobilisasi massa. Fenomena ini pernah terjadi pada Partai Persatuan Tarekat Islam (PPTI) di era 1950an yang melibatkan para kader partai dengan pemimpin kharismatik mereka (Van Bruinessen 2007: 92).

Menurut wacana yang berkembang di masyarakat lokal bahwa para elit saling menjatuhkan dan menjelekkan satu sama lain dengan cara saling melaporkan kepada Tuan Guru Zainuddin. Mereka yang tidak pintar untuk cari muka dan melakukan pendekatan kepadanya akan kesulitan untuk eksis dan bertahan di NW (Jamaludin 2011; Muhtar 2010). Bahkan ketika Tuan Guru Zainuddin meninggal dunia, nama besarnya kerap dijadikan sebagai kekuatan simbolik untuk kepentingan politik. Saya menyebut ini dengan istilah 'politisasi tuan guru'. Konflik internal NW yang terjadi pada tahun 1977 dan 1982 merupakan deretan konflik yang menunjukkan bagaimana kepentingan politik dilegitimasi oleh kekuatan sufistik (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Muhtar 2010; Smith dan Hamdi 2014). Elit-elit yang jatuh dan menjadi korban konflik politik pada tahun 1977 dan 1982 memiliki pola yang hampir sama, yakni mereka dianggap tidak loyal dan ta'at kepada pimpinan. Begitu juga pola konflik NW tahun 1998, para elit berkontestasi untuk meraih pengaruh dan simpati Tuan Guru Zainuddin. Tidak jarang mereka saling melaporkan kejelekan masing-masing sehingga muncul kebijakan yang kontroversial yakni pemecatan elit-elit tertentu dari organisasi NW.

Dengan masuknya NW ke ranah politik praktis, maka konflik semakin sulit untuk dihindari, para elit bersaing dan berkontestasi

untuk menunjukkan supremasi mereka di tengah jemaahyang mereka pimpin. Penekanan pada loyalitas dan fanatisme kepada pimpinan yang memiliki otoritas kharismatik tidak selalu cocok dengan sistem demokrasi modern. Eksploitasi ajaran dan manipulasi simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik terus dilakukan oleh para tokoh tersebut. Sementara regenerasi kepemimpinan yang mengutamakan unsur keluarga dari tokoh kharismatik menjadi persoalan tersendiri apalagi terdapat banyak tokoh yang telah disiapkan dan dikader sebagai pengganti pimpinan ketika uzur atau meninggal dunia.

Kronologi dan fase-fase konflik

Konflik NW tahun 1998 merupakan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya, puncak dari proses rentetan sejarah panjang yang melibatkan elit-elit NW dalam pertarungan perebutan kekuasaan, modal, posisi, dan peran strategis baik di dalam maupun di luar organisasi NW (Fahrurrozi 2011; Hadi 2010; Hamdi dan Smith 2012; Muhtar 2010; Saprudin 2005). Meskipun terlalu jauh untuk mengaitkan hubungan konflik NW 1998 dengan konflik NW 1977[13] di masa-masa awal perkembangannya karena konteksnya sudah berbeda, tetapi secara tidak langsung terdapat benang merah yang menghubungkan antara konflik yang berbeda dekade tersebut. Ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebagian besar aktor-aktor yang terlibat konflik merupakan aktor-aktor lama (Fahrurrozi 2011:

[13] Tahun 1977 merupakan awal konflik yang terjadi dalam organisasi NW. Konflik ini memiliki dampak luas yang melibatkan unsur politik dan persaingan antara elit-elit. Djalaluddin yang menjadi Ketua Umum PB NW pada waktu itu harus berhenti dari jabatannya. Menurut informasi bahwa dia dipecat oleh Tuan Guru Zainuddin karena berbeda pandangan mengenai kasus diterimanya kembali H. Zakaki dari Kapek oleh pengurus NW. Djalaluddin tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan memprotes keras atas pemecatan dirinya. Dalam suratnya kepada Tuan Guru Zainuddin dia mengkritisi bahwa pemecatan tersebut tidak sesuai dengan aturan organisasi, apalagi dirinya sedang mengemban amanat untuk belajar di Jakarta.

3; Hamdi 2011:6). Saya berargumen bahwa konflik NW merupakan konflik 'warisan' antara keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin yang ingin menguasai aset-aset NW.[14] Masing-masing keluarga merasa berhak atas warisan tersebut sehingga terjadi konflik dan perpecahan antara mereka.

Konflik NW meletus pada masa transisi kepemimpinan di lingkungan NW dari generasi pertama (Tuan Guru Zainuddin) ke generasi berikutnya. Kepergian Tuan Guru Zainuddin melahirkan pertanyaan siapakah yang akan menggantikan posisinya tidak hanya sebagai pemimpin organisasi keagamaan NW, tetapi juga sebagai pemimpin umat Islam di Lombok dalam konteks yang lebih luas. Secara biologis beliau tidak memiliki anak laki-laki yang biasanya akan menjadi generasi penerus dalam tradisi pesantren atau Ormas Islam tradisional, tetapi dia hanya mempunyai anak perempuan, yaitu Siti Rauhun (R1) dan Siti Raihanun (R2). Dari kedua putrinya tersebut telah lahir cucu laki-laki dan perempuan, namun karena usia mereka yang masih sangat muda belum siap untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin NW dan umat Islam (Hadi 2010; Hamdi 2011; Mugni 2013; Nazri 2000; Sapruddin 2005). Setelah tiga bulan wafat, tokoh-tokoh penting di NW juga wafat termasuk H. Lalu Gede Wiresentane, menantu yang dipercaya memegang kekuasaan di organisasi NW sebagai ketua umum. Wiresentane adalah suami pertama Siti Raihanun, yang menjabat Ketua Umum PB NW dari sejak 1986-1997. Dengan wafatnya kedua tokoh ini, maka secara otomatis NW membutuhkan pimpinan organisasi yang baru.

Wafatnya Tuan Guru Zainuddin merupakan babak baru

[14] Warisan di sini memiliki dua makna, pertama adalah mewarisi konflik yang pernah terjadi sebelumnya antara keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin sejak kasus 1977, dan kedua adalah berkonflik karena perebutan harta warisan yang berupa aset-aset organisasi NW termasuk status kepemimpinan di dalamnya.

bagi organisasi dan komunitas NW. Kepergian tokoh kharismatik ini menjadi mimpi buruk bagi jemaahNW karena selama ini dia dapat memediasi dan mengatasi setiap konflik dan perpecahan yang muncul di internal NW. Namun sejak kepergiannya konflik dan perpecahan semakin tajam dan terbuka antara keluarga, kerabat, dan elit-elit NW dalam perebutan jabatan politis sebagai ketua umum organisasi (Fahrurrozi 2011; Hadi 2010; Muhtar 2010; Mugni 2013, Nazri 2000). Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sejak Tuan Guru Zainuddin masih hidup konflik antara keluarga yang melibatkan puterinya Siti Rauhun (R1) dan Raihanun (R2) seringkali terjadi, sehingga hubungan mereka kurang stabil. Sementara elit-elit NW yang mendukung keduanya tidak pernah netral dan sebaliknya selalu memihak kepada salah satu dari kedua putrinya sehingga mengakibatkan konflik terus mengalami eskalasi dan reproduksi di tengah-tengah jemaahNW. Apa yang dilakukan oleh elit-elit NW yang memihak salah satu puterinya ini berlawanan dengan wasiat dan pesan yang sering diungkapkan oleh Tuan Guru Zainuddin kepada jama'ahnya untuk tidak berpihak kepada salah satu putrinya. 'Tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap putri saya karena perilaku tersebut sama dengan menghina saya', kata Tuan Guru Zainuddin. Realitasnya, para elit dan jemaahNW terjebak dalam keberpihakan karena kuatnya kepentingan ekonomi dan politik individu dan kelompok mereka (Hamdi 2011; Nazri 2000).

Di akhir-akhir masa hidup Tuan Guru Zainuddin, tanda-tanda akan terjadi konflik dan perpecahan antara keluarga kedua putrinya sudah mulai nampak. Sementara elit-elit sebagai pendukung dari kedua kubu terus saling menyerang dan menjatuhkan. Kedua kubu seringkali berseberangan dalam pengambilan kebijakan organisasi karena kepentingan yang berbeda (Mugni 2013; Nazri 2000; Sapruddin 2005). Kubu R2 lebih dominan dan lebih dekat

dengan Tuan Guru Zainuddin. Salah satunya karena faktor Ummi Rahmatullah, ibunda Raihanun adalah satu-satunya istri yang masih hidup mendampingi Tuan Guru Zainuddin hingga akhir hayatnya. Kubu R2 mengklaim sebagai kubu yang paling loyal kepada Tuan Guru Zainuddin dan mendapat restu darinya untuk mengelola dan mewarisi organisasi NW. Sementara Kubu R1 terus memberikan perlawanan dan protes karena merasa didiskreditkan oleh Kubu R2. Konflik semakin memanas ketika suami R1 M. Syubli dipecat dari jabatannya sebagai Sekretaris Umum PB NW. Apalagi muncul surat kuasa yang memberikan mandat kepada keluarga R2 untuk mengelola organisasi NW semakin membuat suasana politik di internal NW memanas dan tidak menentu (Fahrurrozi 2011; Mugni 2013; Muhtar 2010). Aksi saling teror antara pendukung kedua kubu tidak dapat dihindari. Dalam suasana yang kacau dan tidak menentu inilah Tuan Guru Zainuddin menghembuskan nafas terakhirnya (Nazri, 2000: 8-9).

Kekhawatiran banyak pihak akan terjadi konflik terbuka antara kedua Kubu R1 dan R2 pasca Tuan Guru Zainuddin menjadi kenyataan. Setelah wafat kedua kubu terus bersaing dan melakukan konsolidasi internal untuk menyambut pemilihan pemimpin NW yang baru melalui Muktamar. Serangkaian aksi kekerasan terus terjadi antara kedua kubu seperti pemukulan, teror, intimidasi, dan pengusiran oleh masing-masing pendukung (Hamdi dan Smith 2012; Mugni 2013; Nazri 2000). Hal ini berdampak pada roda organisasi NW yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena aksi kekerasan tersebut. Guru-guru tidak berani masuk mengajar ke sekolah karena takut adanya ancaman dari salah satu pendukung kedua kubu (Hadi 2010; Mugni 2013; Nazri 2000). Di tengah konflik dan kekerasan antara pendukung kedua kubu, datanglah momentum yang ditunggu-tunggu oleh elit-elit NW, Muktamar NW ke-10 tahun 1998 di Praya, Lombok Tengah.

Sebelum membahas Muktamar NW ke-10 di Praya yang melahirkan konflik dan perpecahan di dalam tubuh organisasi, terlebih dahulu saya akan membahas fase-fase penting yang menjadi pengantar dari konflik ini. Menurut pandangan saya, fase-fase ini sangat penting untuk diteliti dan dikaji dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensip dan mendalam tentang konflik dan perpecahan NW pasca Muktamar ke-10. Saya berargumen bahwa konflik dan perpecahan internal NW tidak muncul begitu saja pada acara Muktamar ke-10 di Praya, tetapi ini merupakan puncak dari letupan-letupan sebelumnya yang memicu konflik yang berkepanjangan di Tanah Selaparang. Berikut saya membagi fase-fase konflik NW menjadi enam fase, yaitu:

Fase pertama (1996): Pernikahan cucu Tuan Guru Zainuddin

Saya berargumen bahwa kegagalan rumah tangga Sakti dan Hidayati (cucu Tuan Guru Zainuddin) telah memperuncing konflik dan perpecahan antara kedua keluarga Tuan Guru Zainuddin yang berdampak pada konflik dan perpecahan organisasi NW. Pernikahan Tuan Guru Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni (putra sulung R2), yang biasa dipanggil Sakti, dengan Siti Hidayati (putri bungsu R1) pada 1996 merupakan salah satu tahapan penting dari rangkaian proses konflik yang melibatkan keluarga Tuan Guru Zainuddin dan elit-elit NW yang lain. Pernikahan Sakti dengan Hidayati adalah pernikahan antara sepupu karena ibu mereka adalah saudara kandung, meskipun lahir dari ibu yang berbeda. Dalam tradisi masyarakat Sasak, pernikahan antara sepupu paralel (anak dari saudara ayah atau ibu) sangat dianjurkan (Bartholomew 1999; Bennett 2005; Budiwanti 2000; Smith 2014). Dari sudut pandang tradisi lokal, pernikahan ini merupakan sesuatu yang biasa, namun

dari aspek lain pernikahan ini memiliki nilai lebih. Pernikahan ini memiliki agenda khusus, yaitu ingin menyatukan keluarga yang berkonflik dan menyelamatkan organisasi dari perpecahan (Mugni 2013; Nazri 2000). Karena bukan rahasia publik bahwa pada waktu itu NW sedang dilanda perpecahan dan konflik hebat antara keluarga R1 dan R2 dan para pendukungnya. Pernikahan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan kerabat Tuan Guru Zainuddin dan elit-elit NW.

Syubli, ayah Hidayati sebagaimana dikutip oleh Nazri (2000) misalnya mengatakan: 'Apa kata orang kepada saya jika saya mengizinkan anak saya yang masih duduk di bangku sekolah melangsungkan pernikahan sementara saya adalah pengamat dan praktisi pendidikan'. Apa yang dikatakan Syubli dapat dipahami karena pada waktu itu sedang menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong, salah satu perguruan tinggi ternama di lingkungan organisasi NW. Di sisi lain Kubu R2 tetap berupaya keras untuk menikahkan anaknya dengan tujuan supaya keturunan mereka berdua akan melanjutkan estafet kepemimpinan NW. Penyatuan keluarga lewat pernikahan ini dinilai representasi dari kedua keluarga besar Tuan Guru Zainuddin yang selama ini selalu berseberangan dan terjebak dalam persaingan perebutan peran dan status.

Dalam tradisi masyarakat Sasak, proses pernikahan dilakukan dengan cara melarikan atau mencuri calon pengantin perempuan pada malam hari. Proses pencurian dilakukan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh pihak keluarga perempuan karena jika mereka tahu dan tidak menginginkan pernikahan tersebut maka pihak keluarga dapat menggagalkan rencana itu (Bartholomew 1999; Bennett 2005; Smith 2014). Hidayati dicuri pada sore hari di SMA Gelang setelah selesai mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Pencurian

tersebut tidak diketahui oleh kedua orangtuanya. Hidayati sempat menolak dan terus menangis karena tidak mau melangsungkan pernikahan. Setelah keluarga R2 memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan tersebut semata-mata untuk menyelamatkan NW dari perpecahan, Hidayati mulai menerima rencana pernikahan ini (Mugni 2013; Nazri 2000).

Kedua orangtua Hidayati dan para pendukungnya sangat kecewa dan mengalami pukulan berat dengan peristiwa ini. Mereka melakukan perlawanan dengan melaporkan kasus ini ke polisi dengan tuduhan penculikan karena pihak pengantin pegantin perempuan dilarikan pada sore hari, bukan pada malam hari sebagaimana adat Lombok. Selama proses persembunyian upaya dari pihak R1 mengambil anaknya terus dilakukan, bahkan sempat terjadi peperangan antara kedua pendukung baik secara fisik maupun metafisik yang melibatkan orang-orang sakti di belakang mereka (Nazri 2000: 5-6). Melalui proses yang panjang Kubu R1 memberikan restu pernikahan kepada anaknya karena intervensi Tuan Guru Zainudin. Acara pernikahan berlangsung di Pancor dengan sangat meriah, selain menggunakan agama mereka juga menggunakan proses adat. Pernikahan ini berlangsung tepat pada perayaan hari ulang tahun (Hultah) NW ke-60 pada tahun 1996. Seluruh tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh NW berkumpul menghadiri acara pernikahan termasuk kedua putri Tuan Guru Zainuddin yang sudah lama tidak bertemu dan berkomunikasi akibat konflik keluarga. Masyarakat NW tidak hanya terharu melihat pasangan pengantin, tetapi juga terharu melihat kedua putri Tuan Guru Zainuddin yang duduk berdampingan. Mereka berdua mengucurkan air mata melihat dan menyaksikan proses pernikahan kedua anaknya (Nazri 2000: 6).

Tiga bulan menjalani bahtera rumah tangga, kedua pasangan

ini tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Sejak Hidayati pulang ke rumah orangtuanya tidak pernah lagi bertemu dengan Sakti. Menurut pendukung R1 (2008), Hidayati tidak mau kembali ke Sakti karena adanya pihak ketiga yang hadir di rumah tangga mereka. Perlu diketahui bawa kedua pasangan ini dijodohkan oleh orangtua mereka tanpa proses pacaran terlebih dahulu. Sedangkan menurut Kubu R2 (2008) perceraian Sakti karena intervensi orangtua Hidayati karena takut kehilangan pengaruh di kalangan pendukungnya. Perceraian antara kedua cucu Tuan Guru Zainuddin ini tidak hanya berdampak pada retaknya hubungan keluarga, tetapi juga perpecahan organisasi NW. Di sini sulit memisahkan antara masalah keluarga dengan masalah organisasi karena kedua keluarga ini adalah tokoh sentral dan ikon di dalam organisasi. Jabatan Ketua Umum PB NW pada waktu itu dipegang oleh Wiresentane, ayah dari Sakti, sedangkan Sekjennya adalah Syubli, ayah dari Hidayati (Hamdi 2011; Nazri 2000).

Perceraian keduanya menguntungkan pihak-pihak tertentu terutama kelompok elit yang mempunyai kepentingan terhadap perpecahan keluarga Tuan Guru Zainuddin. Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kedua keluarga ini bersatu, karena jika mereka bersatu maka kepentingan kelompok ketiga tidak mudah terpenuhi. Kenyataannya, perceraian mereka melibatkan elit-elit NW yang lain yang memiliki kepentingan. Nazri (2000:7) menggambarkan terjadi konflik terbuka antara kedua kubu baik di dalam proses perkawinan maupun di dalam proses perceraian. Setelah perceraian tersebut kondisi NW semakin parah, berbagai kebijakan kontroversial muncul terkait dengan posisi dan peran Syubli di NW. Syubli harus menerima pemecatan sebagai Sekjen PB NW dan sebagai Ketua STKIP akibat tindakannya yang 'mengintervensi' pernikahan anaknya.

Fase kedua (1997): Pemecatan M. Syubli dan surat kuasa

Perceraian Sakti dan Hidayati tidak hanya berpengaruh pada retaknya hubungan keluarga, tetapi juga organisasi NW. Setelah perceraian tersebut, Syubli diberhentikan dari berbagai jabatannya di NW. Pada tanggal 26 Juli 1997, Ketua Umum PB NW mengeluarkan surat pemberhentiannya sebagai Sekjen PB NW dan sebagai Sekretaris Yayasan. Surat pemberhentian tersebut ditandatangani langsung oleh Tuan Guru Zainuddin selaku Ketua Dewan Syuro PB NW. Posisinya sementara digantikan oleh Ma'sum Ahmad, sepupu Tuan Guru Zainuddin yang menjabat sebagai Wakil Ketua PB NW. Isi surat tersebut menjelaskan alasan pemberhentian Syubli karena dianggap tidak loyal dan tidak disiplin dalam melaksanakan tugas (Mugni 2013; Nazri 2000; Saprudin 2005). Surat ini menunjukkan bagaimana konflik dan perpecahan dalam internal NW semakin parah akibat perceraian anaknya. Menurut kubu R2 (2008), pemecatan Syubli merupakan konsekuensi dari sikapnya terhadap perkawinan anaknya, sementara Kubu R1 (2008) menyayangkan surat pemberhentian tersebut dan menilai sangat politis dan penuh rekayasa oleh Kubu R2.

Pasca pemberhentian Syubli membuat kondisi NW tidak menentu. Konflik dan perpecahan semakin tajam antara kedua pendukung. Pemecatan Syubli tidak berhenti sampai di sini, selang satu bulan kemudian, pada tanggal 21 Agustus 1997 dia juga diberhentikan sebagai Ketua STKIP Hamzanwadi. Pemberhentian juga berlaku untuk beberapa dosen STKIP yang dianggap loyal kepadanya, yaitu Marfu'atun selaku Puket II dan Bambang E.S selaku Puket III. Sebagai penggantinya ditunjuk Tuan Guru Musatami'uddin Ibrahim sebagai Ketua STKIP, M. Suparta selaku Puket I, M. Hilmi Kholidi sebagai Puket II, dan Fauzan Azima sebagai Puket III (Mugni 2013; Nazri 2000). Pemberhentian

Ketua STKIP dan beberapa dosen tersebut mendapat perlawanan dan protes keras dari Syubli serta pendukungnya. Mereka menilai pemecatan tersebut tidak sah dan tidak prosedural karena harus melalui persetujuan Kepala Kopertis di Bali bukan dari Ketua Yayasan. Dalam surat pemberhentian itu dijelaskan bahwa alasan pemberhentian karena mereka dinilai sering tidak melakukan koordinasi dengan Ketua Umum PB NW dan Ketua Dewan Syuro PB NW ketika mengambil keputusan. Pemecatan ini tidak membuat mereka berhenti menjalankan aktivitas kampus sehingga sering terjadi ketegangan antara pendukung kedua kubu. Sementara dosen yang menjabat sementara tidak berani masuk ke kampus STKIP karena alasan keamanan (Mugni 2013).

Menurut salah satu pendukung R1 (2008), pemecatan Syubli sebagai Ketua STKIP selain faktor perceraian anaknya juga tindakannya menentang tim pendata aset NW yang bermaksud menyita perumahan dosen STKIP yang ditempati oleh sebagian dosen dari luar Lombok. Tim ini sengaja dibentuk untuk menjatuhkan Kubu R1. Sedangkan menurut Kubu R2 (2008), pemecatan ini karena dia sering membuat kebijakan di luar kewenangannya dan di luar pengetahuan Ketua Umum PB NW dan Ketua Dewan Syuro seperti menyekolahkan dosen-dosen STKIP ke luar daerah tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Dia juga dianggap telah membentuk kelompok 'Pancor Bersatu' bersama tokoh-tokoh NW dari Pancor lainnya, yaitu H. Ropi'i Akbar, H. Ma'sum Ahmad, dan H. Pihiruddin yang bertujuan mengusir orang-orang dari luar Pancor (Mugni 2013; Nazri 2000).

Pemecatan Syubli dari seluruh jabatannya di NW semakin memojokkan posisi keluarga R1. R1 tidak lagi mendapat akses yang luas bertemu dengan ayahnya. Menurut Karim (2008), pendukung R2 bahwa akses R1 sengaja dipersempit karena dianggap tidak loyal

kepada ayahnya, bahkan selalu menentang kebijakannya. Sedangkan menurut Ahmad (2008), pendukung R1, ditutupnya akses R1 ke ayahnya semata-mata merupakan strategi untuk menguasai aset-aset NW karena kondisi Tuan Guru Zainuddin yang sudah tua dapat dipastikan adanya rencana untuk menjadi pewaris tunggal organisasi. Indikasi ini semakin kuat ketika muncul surat kuasa dari Tuan Guru Zainuddin kepada R2 tanggal 02 Agustus 1997 untuk mengelola asset-aset NW. Isi surat kuasa adalah menunjuk R2 sebagai pihak kedua diberi wewenang untuk mengelola sepenuhnya kekayaan NW yang berupa tanah, kebun, huler, badan usaha, lembaga pendidikan, dan menandatangani surat-surat serta kegiatan lainnya yang dibutuhkan pihak kedua.

Saya berpendapat bahwa keluarnya surat kuasa dari Tuan Guru Zainuddin ke R2 mempunyai makna lain, yakni keluarga R1 secara simbolik tidak mendapat tempat di dalam organisasi NW. Akan tetapi munculnya surat kuasa tersebut tidak dipercaya begitu saja oleh Kubu R1 karena dinilai sebagai bentuk rekayasa yang hanya menguntungkan pihak R2. Menurut Kubu R1 (2008), 'Tidak adil sebagai anak pertama R1 dibuang dan tidak diakui di dalam organisasi NW. Sebagai keturunan Tuan Guru Zainuddin dia juga berhak', kata salah satu pendukung R1. Sikap diskriminatif yang ditunjukkan oleh para masyayikh, tuan guru, dan elit-elit NW kepada R1 telah memancing reaksi keras dari para pendukungnya.

Fase ketiga (1997): Wafatnya Zainuddin dan L. Gede Wiresentane

Saya berargumen bahwa wafatnya Tuan Guru Zainuddin merupakan awal terjadinya konflik terbuka antara kedua kubu NW. Di tengah kurang harmonisnya hubungan keluarga, kerabat dan persaingan antarelit NW, pada tanggal 01 Oktober 1997 Tuan

Guru Zainuddin menghembuskan nafas terakhirnya. Wafatnya pendiri NW yang dikenal tokoh agaa paling kharismatik di Lombok merupakan pukulan berat bagi warga NW yang sedang dalam kondisi kritis akibat perpecahan dan konflik internal (Muhtar 2010; Hadi 2010; Smith dan Hamdi 2014). Pasca beliau wafat konflik perlahan-lahan mulai muncul ke permukaan publik, di mana kedua kubu tidak lagi berjalan satu arah, mereka berjalan sendiri-sendiri dengan pendukung masing-masing. Isu yang muncul setelah beberapa hari wafatnya Tuan Guru Zainuddin adalah bentuk dan style makam yang akan dibangun untuk beliau. Sebelum wafat, Tuan Guru Zainuddin telah memerintahkan beberapa masyayikh dan tuan guru pergi ziarah ke makam Wali Songo di Jawa. Para tuan guru awalnya tidak paham maksudnya kenapa disuruh berziarah ke makam-makam tersebut. Sebagian besar yang pergi berziarah ke makam Wali Songo adalah para tuan guru pendukung R2. Hasil ziarah makam ini kemudian dijadikan dasar untuk membangun makam Tuan Guru Zainuddin dengan ukuran besar, tinggi dan megah seperti makam para Wali Songo di Jawa (Mugni 2013).

Bentuk dan ukuran makam yang tinggi ini menjadi perdebatan antara pendukung kedua kubu. Tokoh-tokoh dari Kubu R1 tidak setuju dengan bentuk makam yang tinggi karena alasan teologis. Mereka menginginkan bentuk makam yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pendek dengan ketinggian batu nisan sejengkal tangan. Perdebatan bentuk makam ini menjadi isu hangat di kalangan para turan guru. Menurut Irzani (2008), Ketua Senat STKIP kala itu, untuk mencari jalan keluar tentang perdebatan bentuk makam ini, maka pihak senat menyediakan forum diskusi ilmiah untuk membahas bentuk makam menurut ajaran Islam. Forum ini dinamakan Forum Silatul Fikri dengan tujuan mencari titik temu perbedaan pandangan dan penafsiran yang selama ini terjadi antara tuan guru yang lebih banyak berdebat di belakang layar. Panitia

Silatul Fikri mengundang beberapa tuan guru dari kedua belah pihak, namun yang hadir hanya berasal dari Kubu R1. Para tuan guru dari Kubu R2 tidak ada satupun yang hadir meskipun mereka telah menyanggupi undangan dari panitia sehingga pembahasan tentang bentuk makam tidak pernah tuntas. Makam tuan guru yang besar dan megah kemudian dipotong, dibongkar dan dibuat lebih sederhana oleh kubu R1, di mana menurut mereka sesuai dengan ajaran Islam merujuk pada 'makam Nabi Muhammad'.

Pemakaman Tuan Guru Zainuddin dilakukan pada pukul 16.15 Wita di depan Mushalla Al-Abrol. Ribuan orang menshalatkan dan mengantarnya ke tempat pemakaman. Tercatat dia dishalatkan sebanyak 163 kali oleh murid-muridnya dari seluruh penjuru Pulau Lombok. Menurut Mugni (2013: 15), pembawa jenazah Tuan Guru Zainuddin tidak perlu berjalan karena jenazahnya terus berada di atas kepala para jemaahkarena jumlah jemaahyang sangat banyak. Ummat Islam berduka cita atas kepergian Tuan Guru Zainuddin, salah satu ulama besar yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di pulau Lombok melalui lembaga pendidikan madrasah dan masjid-masjid. Selama enam dekade sejak tahun 1930an Tuan Guru Zainuddin telah mengabdikan hidupnya untuk masyarakat Sasak yang pada waktu itu masih tidur 'tidem' dari ilmu pengetahuan dan keagamaan. Pondasi yang dibangun ini harus dilanjutkan oleh para murid dan santrinya mengembangkan ajaran NW ke seluruh penjuru nusantara bahkan dunia sesuai dengan wasiat beliau di buku 'Wasiat Renugan Masa'.

Kurang lebih satu bulan setelah Tuan Guru Zainuddin wafat, suami R2 yang juga menjabat Ketua Umum PB NW Wiresentane wafat pada bulan November 1997. Selain sebagai menantu, Wiresentane merupakan salah satu tokoh penting di NW pada masa Tuan Guru Zainuddin. Dia menjabat sebagai Ketua Umum

PB NW selama dua periode sejak 1986-1997 (Mugni 2013: 87). Menurut pendukung Kubu R2, dia dikenal sebagai tokoh NW yang sangat loyal terhadap perintah Tuan Guru Zainuddin selaku guru dan mertuanya. Apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Zainuddin selalu dikuti dan dita'ati, tanpa pernah bertanya dua kali. Wafatnya Wiresentane justru menambah keprihatinan terhadap kondisi NW yang sedang dalam keadaan krisis karena ancaman konflik dan perpecahan para elit. Wiresentane termasuk salah satu tokoh kunci dalam konflik NW karena posisinya sebagai Ketua Umum PB NW pada masa Tuan Guru Zainuddin yang memiliki otoritas pembuatan kebijakan.

Proses pemakaman Wiresentane menimbulkan ketegangan antara pendukung kedua kubu. Keluarga dan pendukung Kubu R2 berinisiatif untuk memakamkan beliau persis di samping makam Tuan Guru Zainuddin. Lokasi makam ini ditentang oleh Kubu R1 yang dinilai telah melanggar wasiat Tuan Guru Zainuddin yang menginginkan kedua putrinya yang harus dimakamkan di samping kiri dan kanan makamnya. Tokoh dari Kubu R1 mengatakan (2008), proses pemakaman ini tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan keluarga R1. Di sinilah letak persoalannya karena Kubu R2 merasa menguasai dan memiliki semuanya. Setelah diadakan musyawarah antara R1 dan R2 di gedung kampus STKIP Hamzanwadi akhirnya mereka sepakat untuk memakamkan Wiresentane di lingkaran pemakaman keluarga, bukan di samping makam Tuan Guru Zainuddin. Menurut R1, tidak boleh ada orang yang dimakamkan dekat Tuan Guru Zainuddin karena berkaitan dengan wasiat ayahnya. Tuan Guru Zainuddin pernah berwasiat, jika kedua anaknya meninggal nanti, mereka harus dimakamkan di samping kanan dan kiri makamnya.

Ketegangan sempat terjadi antara kedua kubu karena pihak

R2 telah menggali lubang makam. Setelah kedua kubu membuat kesepakatan, lubang makam yang sudah digali harus ditutup kembali dan menggali lubang yang baru berdampingan dengan makam istri dan keluarga Tuan Guru Zainuddin (Nazri 2000). Sedangkan di samping makam Tuan Guru Zainuddin tetap di kosongkan untuk persiapan pemakaman kedua putrinya jika kelak mereka wafat. Posisi Wiresentane sebagai Ketua Umum PB NW digantikan sementara oleh Ma'sum Ahmad. Meninggalnya kedua tokoh ini bertepatan dengan akan diadakannya Muktamar NW ke-10 untuk memilih pemimpin NW yang baru. Siapakah yang akan menjadi pemimpin NW pasca Tuan Guru Zainuddin menjadi isu hangat di kalangan jemaahNW pada waktu itu. Siapapun terpilih pada Muktamar ini akan mengemban tugas berat menyelamatkan NW dari krisis konflik internal.

Fase keempat (1998): Muktamar ke-10 di Praya

Nuansa Muktamar NW ke-10 di Praya berbeda dengan Muktamar-Muktamar NW sebelumnya. Setidaknya ada tiga hal yang membuat nuansa Muktamar ini berbeda, pertama, Muktamar ini tidak diikuti oleh Tuan Guru Zainuddin karena telah wafat. Sebelumnya dia selalu hadir pada setiap acara Muktamar dan mempunyai pengaruh besar di dalam menentukan formasi kepemimpinan dan struktur kepengurusan organisasi. Ketidakhadirannya merupakan sesuatu yang baru bagi kader-kader NW karena selama ini kebijakan organisasi selalu meminta restu beliau sebagai orang nomor satu di NW. Kedua, Muktamar ini sarat dengan nuansa konflik dan kepentingan politik elit-elit NW untuk memperebutkan posisi-posisi penting di struktur kepengurusan organisasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ada dua kubu yang muncul bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan NW.

Ketiga, Muktamar diadakan pada masa reformasi setelah Suharto menyerahkan jabatannya sebagai presiden R1 di tahun 1998. Masa reformasi ditandai ketidakstabilan sosial-politik di tingkat nasional karena melemahnya peran dan kontrol negara atas masyarakat. Kondisi nasional yang tidak stabil ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kondisi lokal, tentunya tidak bagus bagi NW yang sedang mengalami masa transisi kepemimpinan. Saya berpendapat bahwa ketiga faktor di atas berpengaruh terhadap kualitas dan legitimasi produk hasil Muktamar NW di Praya.

Tradisi yang berkembang di muktamar-muktamar NW sebelumnya adalah yang memegang posisi sebagai ketua umum berasal dari unsur keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin. Karena tidak memiliki anak laki-laki, Tuan Guru Zainuddin memberikan kesempatan kepada menantunya mengisi posisi ketua umum dan sekretaris umum, sementara dia sendiri sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Dalam sejarahnya, Tuan Guru Zainuddin memegang jabatan Ketua Umum PB NW 1953-1967, kemudian digantikan oleh H. M. Djalaluddin 1967-1977 dan H. Lalu Gede Wiresentane 1986-1997. Tradisi ini cenderung dipelihara hingga sekarang oleh tokoh-tokoh NW di setiap Muktamar. Sulit bagi orang di luar keluarga menduduki jabatan sebagai ketua umum. Dengan demikian, secara tidak langsung NW ibarat kerajaan yang kepemimpinannya diwarisi secara turun temurun (Hadi 2010; Hamdi 2913; Mugni 2013; Muhtar 2010). Inilah yang membedakan NW dengan Ormas-ormas lain termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang terbuka dengan siapapun sebagai pemimpin organisasi.

Meninggalnya kedua tokoh NW, Tuan Guru Zainuddin dan Wiresentane, memberikan ruang bagi kader-kader NW yang lain untuk tampil sebagai pemimpin baru di NW. Pertanyaannya adalah apakah NW bisa keluar dari kungkungan tradisi yang menggunakan

sistem keluarga, meskipun dalam proses dan mekanisme Muktamar tetap menggunakan sistem demokrasi, yaitu pemilihan secara langsung oleh masing-masing pengurus daerah? Kenyataannya NW menganut sistem semi demokrasi karena mengedepankan keturunan dan kerabat Tuan Guru Zainuddin daripada elit-elit NW yang lain sebagai pemimpin tertinggi organisasi. Masyarakat NW sulit keluar dari pengaruh dan bayang-bayang nama besar Tuan Guru Zainuddin, di mana keluarga dan keturunannya selalu mendapat dukungan dari masyarakat apalagi jika benar-benar mampu akan lebih diprioritaskan.

Muktamar NW ke-10 tidak lepas dari persaingan dan pertaruhan gengsi dan legitimasi sosial oleh elit-elit NW, termasuk kerabat dan keluarga Tuan Guru Zainuddin. Jauh sebelum pelaksanaan Muktamar kedua kubu telah menyusun strategi masing-masing untuk memenangkan calon mereka. Muktamar ke 10 berlangsung pada tanggal 24-26 Juli 1998 di Praya Lombok Tengah, Muktamar ini dihadiri oleh gubenur NTB, menteri agama yang diwakili oleh sekjen Departemen Agama Marwan Sarijo. Melalui perdebatan panjang, Panitia Muktamar memutuskan bahwa peserta yang berhak memilih sebanyak 92 orang (Lihat Mugni 2013).

Pemilihan ketua umum dilakukan melalui dua tahap yaitu penjaringan bakal calon ketua umum dan pemilihan calon ketua umum. Bakal calon yang berhak maju untuk tahap kedua adalah apabila mendapat suara minimal 18 dari keseluruhan suara. Hasil tahap pertama pemilihan bakal calon ketua terdapat dua nama yang muncul, yaitu Ummi Raihanun dan Ma'sum Ahmad. Dari jumlah pemilih sebanyak 92 orang, R2 memperoleh suara terbanyak 54 suara, dan Ahmad 34 suara, 1 abstain, 1 batal dan 2 utusan tidak ikut memilih (Mugni 2005; Hamdi 2011; Saprudin 2005). Munculnya nama R2 sebagai calon ketua umum tidak pernah

diperkirakan sebelumnya oleh Kubu R1 yang mengusung Ahmad. Mereka tidak pernah mengira R2 akan dicalonkan karena selama ini dia lebih dikenal sebagai ibu rumah tangga. Mereka justru mengkhawatirkan nama-nama lain yang dianggap potensial seperti Tuan Guru Mustami'uddin Ibrahim dan Hayyi Nu'man. Saya melihat pencalonan R2 merupakan strategi politik yang taktis karena status R2, di mana sebagai putri kandung Tuan Guru Zainuddin akan sulit tertandingi oleh calon lain kecuali oleh saudara kandungnya sendiri Siti Rauhun. Sementara R1 lebih dulu menyatakan tidak mencalonkan diri karena tidak mau membawa masalah keluarga ke ranah organisasi. Dia juga khawatir jika perpecahan keluarga semakin tajam akibat persaingan politik. Hasil pemilihan babak pertama ini menunjukkan bahwa pencalonan R2 merupakan kemenangan strategi politik dari Kubu R2, dan sebaliknya kekalahan bagi Kubu R1.

Setelah pemilihan putaran pertama sidang diskor karena harus melaksanakan shalat Jum'at. Kubu R1 sangat gelisah dengan munculnya R2 sebagai calon karena secara matematis mereka akan kalah dan sulit untuk ditandingi. Salah seorang informan dari Kubu R1 menceritakan (2008) bahwa tidak ada jalan lain untuk menghadang laju R2 kecuali dengan mempertanyakan statusnya sebagai pemimpin perempuan menurut Mazhab Syafi'i'. Ketika memasuki tahap kedua sebelum pemilihan dimulai, Ahmad mengintrupsi dan mempertanyakan tentang keabsahan perempuan sebagai pemimpin menurut Mazhab Syafi'i. Menurut tafsir Kubu R1 bahwa perempuan tidak dibolehkan sebagai pemimpin termasuk pemimpin organisasi NW menurut Mazhab Syafi'i, sedangkan NW hanya menganut mazhab ini. Merespons pertanyaan tersebut, para anggota Dewan Syuro yang terdiri dari TGH. Ruslan Zain dan TGH. Hilmi Najamudin (keduanya adalah pro R2) mengatakan, tidak ada larangan perempuan sebagai pemimpin menurut Mazhab

Syafi'i khususnya sebagai pemimpin organisasi. Menurut penafsiran mereka, Mazhab Syafi'i tidak membolehkan perempuan sebagai pemimpin pada kasus-kasus tertentu seperti menjadi kepala negara, imam shalat bagi laki-laki, dan menjadi hakim pidana (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012; Mugni 2013; Muslim 2014).

Mendengar respons dari Dewan Syuro, Ahmad merasa tidak puas dan mengundurkan diri pada putaran kedua. Dia dan pendukungnya *walk out* dan tidak bertanggungjawab atas hasil Muktamar. Sementara para peserta Muktamar yang mayoritas pendukung R2 tetap melanjutkan acara pemilihan tahap kedua. Mereka secara aklamasi memilih R2 sebagai Ketua Umum PB NW yang baru karena Ahmad dianggap mengundurkan diri. R2 dilantik sebagai Ketua Umum untuk masa jabatan 1998-2003. Hasil Muktamar Praya melahirkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat NW. Kubu R1 menolak hasil Muktamar karena dinilai melanggar aturan organisasi yang menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Kubu R2 merasa sah dan tidak melanggar aturan. Kedua kubu mengklaim bahwa merekalah pihak yang benar dan yang lain salah (Mugni 2014; Muslim 2014; Saprudin 2005).

Kedua kubu sama-sama aktif mensosialisasikan hasil Muktamar melalui pengajian-pengajian. Pengajian menjadi media sosialisasi yang paling efektif karena berkomunikasi langsung dengan jemaahNW. Di dalam pengajian, Kubu R2 menyakinkan para jemaahNW tentang terpilihnya Raihanun sebagai pemimpin NW yang baru dan sah karena melalui proses dan mekanisme Muktamar. Menurut kubu ini, tidak ada alasan untuk menolak R2 karena Mazhab Syafi'i tidak pernah melarang perempuan sebagai pemimpin organisasi. Mereka juga menggunakan sejarah Islam sebagai legitimasi, yaitu keterlibatan Aisyah istri Rasulullah sebagai pemimpin perang. Dalam tradisi NW, Tuan Guru Zainuddin pernah

menyetujui perempuan sebagai kepala desa di sebuah desa di Lotim. NW hanyalah sebuah organisasi keagamaan, kenapa harus menolak perempuan sebagai pemimpin? Kubu R2 menilai isu perempuan hanya dibesar-besarkan oleh Kubu R1 karena mereka kalah dalam Muktamar Praya.

Kubu R1 juga aktif turun ke masyarakat mengadakan pengajian-pengajian untuk menolak hasil Muktamar Praya. Kubu R1 menolak hasil Muktamar ini karena tidak sesuai dengan aturan organisasi yang menganut Mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan perempuan sebagai pemimpin. Terpilihnya R2 juga telah keluar dari tradisi NW di mana posisi Ketua Umum PB NW selama ini tidak pernah dipegang oleh perempuan. Perempuan, menurut Kubu R1, memiliki tempat sendiri dalam organisasi NW, yaitu Muslimat. Pro dan kontra hasil Muktamar inilah yang melahirkan konflik dan kekerasan yang berkepanjangan antara pendukung keduanya. Kondisi dan situasi di kota Pancor yang menjadi pusat organisasi NW sangat menegangkan. Perbedaan penafsiran teks telah berubah menjadi konflik dan kekerasan sosial antarjemaahNW. Para jemaahNW terlibat dalam konflik karena harus memilih salah satu dari kedua kubu tersebut. Baik pendukung R1 maupun R2 terus saling meneror dan melakukan tindak kekerasan. Kubu R1 lebih diuntungkan karena mayoritas masyarakat dan elit-elit NW dari Pancor mendukung mereka. Dari tanggal 6, 7, 8 dan 24 Agustus 1998 masyarakat Pancor yang mendukung R1 melakukan aksi penyerangan kepada tokoh-tokoh yang pro R2 yang dianggap tidak netral. Rumah dan toko-toko mereka menjadi sasaran amuk massa di antaranya adalah TGH. Lalu Anas Hasyri, TGH. Mahmud Yasin dan H. Tahir (Mugni 2013: 142; Nazri 2000: 14). Serangan demi serangan terus dilakukan oleh pendukung R1 yang berakhir dengan pindahnya Kubu R2 dan pendukungnya dari Pancor.

Fase kelima (1998): Hijrah dari Pancor Ke Kalijaga

Konflik dan kekerasan antara kedua kubu di Pancor telah mengancam eksistensi NW karena Pancor merupakan pusat seluruh kegiatan organisasi. Akibat aksi tersebut sebagian besar kegiatan organisasi yang meliputi pendidikan, sosial, dan dakwah tidak berjalan normal. Para guru dan dosen tidak berani mengajar ke Pancor karena faktor keamanan, sedangkan sebagian besar di antara mereka berasal dari luar Pancor yang notabenenya mayoritas pendukung R2. Melihat kondisi NW yang tidak kunjung membaik mendorong pendukung Kubu R2 mengusulkan untuk pindah atau hijrah dari Pancor. Istilah hijrah digunakan oleh kubu R2 untuk mengingat peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah. Para pendukung R2 meyakini situasi yang mereka hadapi hampir sama dengan yang dihadapi oleh Muhammad ketika berhadapan dengan kelompok Suku Quraisy pada masa jahiliyah. Usulan hijrah dari para jemaahini pada awalnya kurang mendapat respons dari R2 yang ingin tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin NW di Pancor (Mugni 2013).

Menurut Karim (2008), tokoh R2, setidaknya ada dua alasan mengapa R2 menolak pindah, pertama, jika mereka pindah dari Pancor maka secara tidak langsung sama artinya mengaku 'kalah' dan aset-aset NW akan pindah tangan ke Kubu R1. Kedua, adanya rasa tanggungjawab sebagai pemimpin NW yang sah untuk menjalankan amanat organisasi dan wasiat orangtua yang telah memberi surat kuasa kepada R2 untuk mengelola aset-set NW. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan, maka dia dan pendukungnya mengadakan rapat di rumah Tuan Guru M. Sholeh Ahmad (Ketua Dewan Syuro NW) di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Rapat ini membahas rencana hijrah dari Pancor dan tujuan tempat kepindahan mereka. Menurut Mugni

(2013: 152), hasil rapat itu berbagai tawaran muncul sebagai tempat pindah, yakni Desa Rengseng, Paok Lombok, Jenggik, Kembang Kerang, Praya, dan Kalijaga. Dari sekian tempat yang diusulkan, akhirnya Desa Kalijaga dipilih sebagai tempat pindah sementara bagi pendukung R2. Desa ini dipilih karena berbagai pertimbangan di antaranya adalah tempat tinggal Ketua Umum Dewan Syuro Tuan Guru M. Sholeh Ahmad, mayoritas masyarakat di desa tersebut mendukung kepemimpinan R2, dan layaknya sarana dan parasarana untuk belajar-mengajar santri.

Upaya pindah kelompok R2 awalnya tidak dilakukan secara langsung, tetapi bertahap dan hanya bersifat sementara. Jika situasi sudah aman, Kubu R2 berencana akan kembali lagi ke Desa Pancor. Namun karena kondisi di Pancor semakin parah dan tidak memungkinkan untuk bertahan, Kubu R2 akhirnya mengeluarkan Surat Perintah untuk pindah secara resmi 28 Oktober 1998. Pelaksanaan pindah dilakukan secara bertahap, sebagian para santri terlebih dahulu pindah sejak 26 Oktober 1998. Kedatangan mereka telah disosialisasikan kepada para para wali kos di Desa Kalijaga. Sedangkan tanggal 28 Oktober 1998 proses hijrah berlangsung secara besar-besaran termasuk Raihanun. Menurut catatan Mugni (2013: 154-156), sebelum meninggalkan Pancor, Kubu R2 terlebih dahulu ziarah ke makam Tuan Guru Zainuddin dan berdoa. Perpindahan Kubu R2 memiliki dampak luas terhadap jemaahdan aset-aset organisasi NW. Secara tidak langsung, perpindahan ini juga berdampak pada status lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di Pancor karena selama di Kalijaga Kubu R2 mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baru seperti yang terdapat di Pancor.

Hampir semua lembaga pendidikan terbagi menjadi dua kecuali perguruan tinggi STKIP Hamzanwadi. Di antara lembaga-lembaga yang pecah menjadi dua, yaitu Ma'had Darul Qur'an wal

Hadist Al-Madjidiyah Asyafi'iyah, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor, dan Madrasah Aliyah Keagamaan Putra (Fahrurrozi 2011; Muhtar 2010). Lembaga-lembaga yang didirikan oleh R2 tidak lagi berafiliasi ke Yayasan Darun Nahdlatain di Pancor karena telah diambil alih oleh Kubu R1. Oleh karena itu, untuk menaungi lembaga-lembaga tersebut, mereka mendirikan Yayasan baru 26 Desember 1998 yang dinamakan Yayasan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin. Nama yayasan ini diambil dari penggalan kata dari nama pendiri NW (Mugni 2013: 156).

Selama dua tahun empat belas hari, kelompok R2 tinggal di Desa Kalijaga dan berhasil mendirikan empat lembaga pendidikan baru selama 1999-2000, yaitu Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin dan Mu'allimat, Madrasah Aliyah Mu'allimin dan Mu'allimat. Mereka juga berhasil mengubah nama Institut Agama Islam Hamzanwadi ke Institut Agama Islam NW Lombok Timur tahun 2000 (Mugni 2013: 174). Selain mendirikan lembaga pendidikan, Kubu R2 juga mendirikan pam swakarsa yang diberi nama 'Barisan Hizbullah'. Barisan Hizbullah dibentuk pada 13 Januari 2000 yang bergerak dalam bidang keamanan dan kegiatan-kegiatan sosial. Untuk melaksanakan tugas keamanan, setiap anggota Hizbullah diberikan 'ilmu kekebalan tubuh', seragam, dan sarana komunikasi HT. Untuk menjadi anggota Barisan Hizbullah, setiap jemaahNW harus menyumbang uang sebesar 100 ribu sebagai mahar ilmu yang diijazahkan, yaitu ilmu *kaifiyat shalawat nahdlatain* (Hamdi dan Smith 2012; Mugni 177-176). Uang itu dijadikan donasi untuk pembangunan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Selain diijazahkan, mereka juga diberi baju rompi yang berwarna hijau dan di dalamnya terdapat azimat yang diyakini memiliki kekuatan magis. Untuk membuktikan ilmu tersebut berjalan atau tidak, setiap anggota aka dites dengan pedang, kris dan memakan bahan dari kaca.

Pada tahun 2001, Kubu R2 pindah dari Kalijaga ke Desa Anjani. Desa Kalijaga memang direncanakan untuk tempat tinggal sementara, sehingga para tokoh R2 harus mencari tempat baru sebagai pusat organisasi. Sebelum menetapkan Anjani sebagai tempat pindah, tokoh R2 terus berkeliling mencari lokasi yang bagus dan strategis untuk membangun lokasi pendidikan. Dari beberapa alternatif lokasi yang dilihat, Anjani akhirnya ditetapkan sebagai lokasi baru. Desa Anjani dianggap representative untuk pusat organisasi dan pendidikan karena lahannya luas dan masih banyak yang kosong. Pada bulan Juli 1999, Kubu R2 berhasil membebaskan tanah seluas 0, 73 Ha. milik ayah TGH. Ruslan Zain yang dibeli dengan harga Rp. 2.000.000/are (Mungi, 2013: 186). Berpindahnya seluruh aset-aset NW dari Kalijaga ke Anjani, maka otomatis fokus perhatian pembangunan hanya terpusat di Anjani. Perkembangan lembaga pendidikan NW di Anjani berkembang pesat. Mereka telah berhasil membebaskan tanah puluhan hektar selama setengah dekade. Sejalan dengan itu, pembangunan gedung-gedung lembaga pendidikan juga terus berjalan.

Pada tanggal 20 Maret 2000 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah di Anjani dengan jumlah 16 ruang. Untuk ajaran tahun 2000/2001, siswa Tsanawiyah dan Aliyah Mu'allimin-Mu'allimat yang terdapat di Kalijaga akhirnya dapat dipindah ke Anjani. Pada tahun 2001, Kubu R2 telah membangun Stasiun Radio Dewi Anjani yang dibiayai dari uang iuran dari anggota Hizbullah. Mereka mendirikan SMA NW tahun 2001/2002, SMP NW 2002/2003, TK 2003/2004, dan SMK NW tahun 2004/2005. Pada tahun 2005 telah berhasil dibangun gedung sebanyak 12 unit dan pembebasan tanah 20 hektar dengan sebagian besar dana (96%) bersumber dari swadaya masyarakat. Jumlah santri secara keseluruhan pada tahun 2005, yaitu mencapai 5.152 orang (Mugni 2013: 188).

Kubu R2 terus melanjutkan pembangunan gedung-gedung lembaga pendidikan di lingkungan Ponpes Anjani. Kehadiran NW di Anjani telah memberikan perubahan besar terhadap perkembangan Desa Anjani khususnya dan Lotim pada umumnya. Tanah yang dulunya sebagai tempat menanam tebu kini telah berubah menjadi pusat kegiatan organisasi dan pendidikan. Anjani sekarang dikenal sebagai salah satu kota santri selain kota Pancor. Dari sinilah kemudian muncul istilah NW Anjani yang merujuk pada Kubu R2.

Fase keenam (1999): Muktamar reformasi

Di tengah kesibukan Kubu R2 membangun lembaga pendidikan yang baru di Kalijaga dan Anjani, Kubu R1 juga dihadapkan pada persoalan yang sama, di mana mereka harus membenahi sistem dan struktur organisasi yang kacau-balau selama konflik dan pasca ditinggal oleh Kubu R2. Pancor hampir menjadi kota mati setelah ditinggal oleh Kubu R2 karena sebagian besar siswa, guru, dan tuan guru ikut bergabung pindah ke Kalijaga (Hamdi dan Smith 2012; Muhtar 2010; Saprudin 2005). Kubu R1 perlahan-lahan bangkit dan terus berkembang sejak dipimpin oleh cucu Tuan Guru Zainuddin, yaitu Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang menggantikan pamannya Ahmad yang telah wafat sebagai Ketua Umum PB NW yang kontra Muktamar Praya. Yang menarik adalah R1 berbeda dengan adiknya R2 yang tetap memegang posisi Ketua Umum di Kubu R2, sedangkan R1 merekomendasikan putranya Tuan Guru Bajang sebagai Ketua Umum PB NW. Meskipun R1 tidak memegang posisi ketua umum, tetapi dia merupakan tokoh simbolik yang memiliki kharisma dan memainkan peran penting di organisasi NW, di mana kebijakan makro organisasi melalui persetujuan dan restu beliau.

Tuan Guru Bajang adalah salah satu cucu Tuan Guru Zainuddin yang dikenal cerdas, alim dan kharismatik. Setelah menyelesaikan Program Master Jurusan Tafsir Hadist di Universitas Al-Azhar Kairo Tuan Guru Bajang pulang ke Pancor. Kepulangannya disambut hangat oleh jemaahNW terutama dari pihak pendukung ibunya, mereka berharap dialah yang akan menjadi pemimpin NW yang baru menggantikan kakeknya yang telah wafat. Setelah mengisi ceramah di Masjid At-Taqwa Pancor, para jemaahNW memberikan beliau gelar '*Tuan Guru Bajang*' (TGB), artinya Tuan Guru Muda. Dia digelari TGB karena dia masih muda, berbakat, dan memiliki wawasan keilmuan yang luas seperti kakeknya. Pemberian gelar ini mengingatkan orang pada kakeknya sewaktu pulang dari Mekah 1934, ketika itu dia juga digelari Tuan Guru Bajang oleh masyarakat.

Proses terpilihnya Tuan Guru Bajang sebagai pemimpin NW melalui Muktamar Reformasi yang diadakan oleh Kubu R1 pada 11-12 September 2009 di Pancor, Lombok Timur. Muktamar Reformasi adalah muktamar tandingan yang dilakukan oleh Kubu R1 setelah tidak menemukan ruang negosiasi terhadap evaluasi hasil Muktamar NW ke-10 di Praya. Pada Muktamar ini Tuan Guru Bajang ditetapkan sebagai Ketua Umum PB NW. Dia terpilih secara aklamasi karena calon lainnya, Syahdan Ilyas, yang mencalonkan diri pada Muktamar tersebut mengundurkan diri. Hasil Muktamar Reformasi telah menetapkan para pembantu ketua, yaitu M. Syubli sebagai Ketua I, Zainul Arifin Faesal sebagai Ketua II, Zabur Ainy sebagai Ketua III, dan Mawardi Hamri sebagai Ketua IV. Posisi Sekretaris dipegang oleh Abdul Hanan, mantan Kabid Penerangan Kanwil Depag NTB (Nazri 2000: 52). Yang menarik juga adalah fenomena munculnya tokoh-tokoh dari luar yang masuk sebagai pengurus di NW. Mereka diposisikan sebagai anggota Dewan Syuro PB NW di antaranya Dr. Jamalullail Abdul Aziz, dosen Universitas Kebangsaan Malaysia, Kyai Abdurrosyid Abdullah Syafi'i, pimpinan

Ponpes Salafiyah Asyafi'iyah Jakarta, dan Kyai Zainuddin Habib Al-Jufri dari Jakarta. Tokoh-tokoh non NW ini merupakan simpatisan dan pencinta NW karena mereka seringkali membantu perjuangan NW.

Tampilnya Tuan Guru Bajang sebagai pemimpin NW yang baru versi Muktamar Reformasi telah memberikan warna baru di lingkungan komunitas NW. Perlahan tapi pasti dia mampu mengubah paradigma berpikir jemaahNW yang feodal, ekslusif, dan kaku. Tuan Guru Bajang berhasil mengembangkan wacana-wacana baru di tengah-tengah jemaahNW seperti wacana Islam kekinian, toleransi, pluralisme, politik santun, multikultralisme, dan kerjasama lintas organisasi (Hamdi 2011; 2013; Muslim 2014; Smith dan Hamdi 2014). Dia membuat terobosan baru membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi di luar NW yang selama ini dianggap 'tabu' di dalam tradisi NW. Setiap tahun beliau mengundang tokoh-tokoh nasional dari organisasi NU dan Muhammadiyah untuk hadir di acara hari ulang tahun NW. Dia juga sering mengisi pengajian di komunitas-komunitas di luar NW sehingga dia sangat diterima oleh semua kalangan. Sejak memimpin NW, Tuan Guru Bajang juga fokus pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Pancor. Seluruh gedung yang sudah tua direhab, diperluas, dan dibangun gedung-gedung baru untuk sekolah dan perguruan tinggi (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012).

Setelah terpilih sebagai Ketua Umum NW, Tuan Guru Bajang memberikan ceramah di depan para peserta Muktamar. Berikut adalah petikan ceramah beliau sebagaimana dikutip oleh Nazri (2000):

'Untuk saat ini hal yang paling penting dibutuhkan

> oleh organisasi NW adalah islah atau rekonsiliasi pengembalian keutuhan NW sebagaimana masa-masa pendirinya masih hidup. Kenyataan ini menyedihkan karena tidak sesuai dengan keinginan ninikda Al-Magfurullah Maulana Syaikh Tuan Guru Zainuddin. Kita yang merasa belum menyimpang dari ajaran dan petunjuknya harus selalu berusaha mengembalikan kekompakan dan keutuhan organisasi. Untuk itu, kepada saudara-saudara kita yang masih terombang-ambing dan berada di seberang, saya mengajak berdialog. Mari kita bahas perbedaan pendapat yang ada, sebab dalam keadaan apapun, kita masih bersaudara. Kalau saja nanti pihak kami ternyata yang bersalah, kami akan langsung minta maaf, dan kalau tidak, kami tetap membuka pintu maaf'.

Tuan Guru Bajang (Nazri 2000) menegaskan bahwa dia akan mengupayakan terjadinya islah tetapi harus berpegang kepada asas pokok organisasi NW. Lebih lanjut dia menyatakan: 'Kita tidak perlu takut karena kita yakin berada dipihak yang benar, kita tunjukkan bahwa kita ini bukan orang yang bodoh. Kita tetap terbuka pada kritik dan saran. Kalau kita yang salah, kita akan bertaubat, tetapi sebaliknya kalau mereka yang salah, mereka harus bertaubat. Ke depan mari kita kedepankan berpikir rasional bukan menggunakan hawa nafsu'. Dia juga menyatakan kesiapannya untuk berdialog kapanpun dan di manapun. 'Saya tetap membuka diri terhadap iktikad baik pihak-pihak lain yang menyediakan diri sebagai mediator. Sebagai orang yang ditunjuk memimpin NW ke depan, saya butuh belajar banyak, harus dikoreksi, ditegur, dan dinasehati jika saya melakukan kesalahan. Kalau ada keputusan dan perintah yang salah dan bertentangan dengan agama jangan ikuti saya, tetapi ingatkan saya', katanya lebih jauh.

Dengan terpilihnya Tuan Guru Bajang sebagai pemimpin

NW yang baru pada Muktamar Reformasi, maka NW secara *de facto* dan *de jure* memiliki kepemimpinan ganda karena sebelumnya sudah terbentuk kepengurusan hasil Muktamar Praya (Hamdi 2011). Terbentuknya kepengurusan ganda dalam organisasi NW tidak menyelesaikan masalah karena melahirkan perpecahan dan konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat karena secara organisatoris masyarakat akan terpecah menjadi dua, mereka dikondisikan untuk memilih salah satu kubu. Kepengurusan ganda juga akan berdampak pada meluasnya ranah konflik seperti ranah politik, ekonomi, dan kekuasaan. Di sisi lain, terbentuknya kepengurusan ganda tersebut dapat membantu menyelesaikan persoalan-persalan internal keorganisasian di satu pihak. Di kalangan internal NW Pancor misalnya, eksistensi seorang pemimpin sangat dibutuhkan karena organisasi dalam keadaan tidak stabil. Kehadiran pemimpin baru setidaknya dapat menyelamatkan aset-aset NW dan melanjutkan perjuangan organisasi ke depan.

Pasca terbentuknya kepengurusan NW Reformasi, konflik semakin meningkat dan meluas. Konflik meluas ke desa-desa di luar Pancor seperti Kesik, Kelayu, Paok Lombok, Wanasaba, Dasan Tumbu, Tebaban, Majuet, dan lain-lain. Kedua kubu sama-sama aktif mengadakan pengajian. Tuan Guru Bajang yang memiliki wacana baru dan talenta yang luar biasa dalam berdakwah banyak menarik simpati masyarakat secara luas. Fenomena ini secara tidak langsung menjadi ancaman bagi Kubu R2. Aksi saling hadang dan saling menggagalkan pengajian membuat konflik dan kekerasan antara kedua pendukung tidak dapat dihindari. Apalagi, kedua kubu telah membentuk pam swakarsa yang bertugas menjaga keamanan kedua kubu ikut membuat konflik semakin parah. NW Anjani membentuk kelompok Barisan Hizbullah, sedangkan NW Pancor membentuk Satgas Hamzanwadi. Kedua kelompok pam swakarsa inilah yang sering bentrok dan terlibat dalam tindak kekerasan.

Barisan Hizbullah dan Satgas Hamzanwadi saling bergantian menyerang, membakar, dan merusak rumah warga yang menjadi pendukung salah satu kubu karena munculnya pihak-pihak ketiga yang ikut dalam konflik (Hamdi dan Smith 2012).

Akar konflik

Memahami akar konflik tidak cukup hanya melihat apa yang terjadi di permukaan saja, tetapi harus melihat apa di balik permukaan itu. Jika kita kembali melihat hasil Muktamar NW ke-10 Praya bahwa yang muncul di permukaan adalah terjadinya perbedaan penafsiran teks antara kedua kubu tentang posisi dan status perempuan sebagai pemimpin organisasi. Perbedaan penafsiran teks ini menjadi senjata bagi kedua kubu untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kedua kubu sama-sama mengaku sebagai pihak yang benar dan menyalahkan kubu yang lain. Saya berargumen bahwa perbedaan penafsiran teks tersebut lebih pada sebuah alat legitimasi untuk mempertahankan kepentingan kedua kubu. Tanpa legitimasi ajaran agama, kedua kubu tidak akan mampu untuk menolak atau menyetujui sebuah keputusan bersama apalagi dalam forum tertinggi Muktamar.

Di luar perbedaan penafsiran teks di atas, saya melihat akar konflik tidak hanya bersumber dari internal tetapi juga eksternal. Setidaknya terdapat empat hal yang menjadi akar konflik NW dari sumber internal, yaitu:

Pertama adalah poligami. Saya berargumen bahwa poligami menjadi salah satu akar konflik dalam kasus konflik NW. Mengapa R1 dan R2 yang masih saudara kandung (lain ibu) saling memusuhi dan saling menjatuhkan? Saya tidak mengeneralisir bahwa poligami merupakan sesuatu yang negatif, tetapi dalam konteks masyarakat Sasak, poligami seringkali melahirkan berbagai persoalan sosial di

keluarga maupun di masyarakat. Salah satunya adalah perpecahan keluarga karena perebutan harta warisan dan perceraian. Tuan Guru Zainuddin adalah tokoh agama yang menganut poligami dan telah menikah sebanyak tujuh kali dalam sejarah hidupnya. Di Lombok, penganut poligami akan memperoleh status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan penganut monogami.

Kedua adalah kekuasaan. Kedua kubu bersaing untuk mendominasi posisi-posisi strategis di dalam organisasi NW. Tujuannya bukan hanya kekuasaan di NW, tetapi juga di luar NW. Siapa yang berkuasa di NW, maka dialah yang mendapat peluang dan akses untuk kekuasaan yang lebih luas baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Jabatan-jabatan politik akan sangat mudah diraih jika melalui organisasi NW karena mempunyai massa yang cukup besar di tingkat lokal. Dukungan suara jemaahNW dapat mengantarkan seorang tokoh untuk duduk sebagai anggota legislatif ataupun eksekutif. Apalagi jika Tuan Guru Zainuddin atau keluarganya memberi instruksi dan rekomendasi kepada elit-elit tertentu untuk menempati sebuah posisi atau jabatan politis, maka calon tersebut akan mudah memperoleh kesuksesan.

Ketiga adalah gengsi dan legitimasi. Terpilihnya Raihanun sebagai pemimpin baru di NW tidak diterima oleh Kubu R1. Menurut pendukung R1, tidak layak memilih seorang adik sebagai pemimpin, sementara kakaknya diabaikan dan tidak diberi tempat. Itu sama artinya membuang salah satu putri Tuan Guru Zainuddin, padahal beliau telah mengingatkan untuk tidak memihak kepada salah satu putrinya dan harus berlaku adil kepada keduanya. Akan tetapi pesan ini sulit dipegang oleh elit-elit NW yang memihak kepada salah satu kubu. Apalagi kondisi NW yang sedang dilanda perpecahan dan konflik keluarga maka dengan terpilihnya Raihanun, bukan lagi menyatukan NW tetapi mempertajam

perpecahan keluarga karena kalau berbicara siapa yang lebih berhak antara kedua putri Tuan Guru Zainuddin, tentu yang lebih tua didahulukan kemudian diganti oleh adiknya. Bagaimana mungkin seorang kakak menerima kepemimpinan adiknya sementara dia tidak dilibatkan atau tidak didukung. Kubu R1 juga menambahkan bahwa pemilihan Raihanun sebagai pemimpin NW sarat dengan kepentingan politik elit-elit NW dan telah menyalahi tradisi yang berkembang di NW karena ketika Tuan Guru Zainuddin masih hidup, NW tidak pernah dipimpin oleh perempuan, sebaliknya para suami (RI dan R2) yang memegang kepemimpinan NW. Berbeda dengan pandangan Kubu R1, pendukung Kubu R2 beralasan untuk mendukung Raihanun sebagai pemimpin NW karena mendapat restu dari Tuan Guru Zainuddin. Dialah yang diberi surat kuasa untuk mengelola organisasi NW dan bukan R1. Di luar itu, Kubu R2 berpandangan bahwa R2 terpilih secara demokratis setelah melalui mekanisme Muktamar ke-10. Artinya, jemaahNW memang menghendaki R2 sebagai pemimpin NW yang baru.

Keempat adalah ekonomi. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam konflik NW. Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Lombok, NW menyediakan sumber-sumber ekonomi seperti lahan pekerjaan sebagai guru, dosen, politisi, dan birokrat, baik di lembaga-lembaga NW ataupun di luar NW. Lahan-lahan pekerjaan inilah yang menjadi perebutan elit-elit NW. Sebagian besar mereka yang bekerja di NW bertujuan mencari sumber penghidupan dan jika mereka dipecat dari NW, maka otomatis sumber penghidupan mereka tidak lagi ada. Dukungan terhadap salah satu putri Tuan Guru Zainuddin merupakan salah satu jalan untuk mendapat lahan pekerjaan di NW. Siapa yang dekat dengan keluarga Tuan Guru Zainuddin, maka dia akan mudah mendapat pekerjaan dan berbagai fasilitas lainnya. Sangat wajar jika mereka mati-matian membela salah satu kubu.

Adapun unsur eksternal yang menjadi akar konflik NW adalah kepentingan politik dan kekuasaan elit-elit di luar NW. Elit-elit politik dan pemerintah lokal mempunyai kepentingan yang sangat besar atas konflik NW. Sebagian mereka tidak mau melihat NW bersatu karena jika NW bersatu, maka tidak tidak mudah bersaing dengan tokoh-tokoh NW terutama di ranah politik karena NW adalah kelompok mayoritas Muslim di Lombok. Selain itu, kepentingan elit-elit Golkar tidak dapat dipungkiri dalam membesarkan konflik NW.

Aktor-aktor Konflik

Salah satu hal penting di dalam memahami konflik adalah mengenal aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik tersebut. Setelah mengidentifikasi aktor-aktor kemudian memahami latarbelakang dan *setting* sosial-budaya yang membentuk dan mempengaruhi karakter para aktor. Aktor-aktor konflik NW dapat dipetakan menjadi empat kelompok, yaitu keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin, kelompok intelektual, tuan guru, dan jemaahNW.

Kelompok pertama adalah keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin. Keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin terdiri dari anak, menantu, cucu, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. Keluarga dan kerabat ini merupakan kelompok lapisan pertama yang menjadi aktor konflik. Keluarga kedua putrinya (Rauhun dan Raihanun) bersaing memperebutkan dan menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pendiri NW. Harta warisan terbesar di sini adalah organisasi NW dan aset-asetnya. Setelah Tuan Guru Zainuddin wafat, maka secara otomatis kepemimpinan NW akan turun kepada anak dan cucunya. Meskipun kedua putrinya tidak bersaing secara langsung ketika dia masih hidup, tetapi yang terjadi adalah persaingan antara menantu tidak dapat dihindari. Persaingan

antara menantu mulai nampak ketika suami R1 dan R2 bergantian memegang posisi penting dalam organisasi NW.

Djalaluddin, suami pertama R1, telah memegang posisi sebagai Ketua Umum PB NW selama dua periode (1966-1977). Di mengalami pemecatan pada tahun 1997 setelah terjadi konflik antara elit-elit NW. Sebagian berpendapat pemecatan tersebut karena dia tidak bisa menerima keputusan Tuan Guru Zainuddin yang menerima kembali H. Zakaki dari Kapek di NW. Pendapat lain muncul bahwa pemecatan ini disebabkan oleh keberadaan Wiresentane, suami R2, yang cenderung didukung oleh Tuan Guru Zainuddin. Terlepas dari kebenaran data tersebut, kedua keluarga Rauhun dan Raihanun seringkali mengalami konflik pasca peristiwa ini. Setelah era kepemimpinan Djalaluddin, Tuan Guru Zainuddin menunjuk Wiresentane sebagai Ketua Umum PB NW selama dua periode 1986-1997. Dari sinilah posisi keluarga R2 semakin kuat, apalagi Wiresentane dikenal sebagai tokoh yang sangat loyal kepada Tuan Guru Zainuddin.

R1 yang bercerai dengan Djalaluddin menikah untuk yang kedua kalinya dengan M. Syubli, seorang tokoh intelektual yang berasal dari Pancor. Syubli memegang berbagai jabatan penting di NW setelah mendapat simpati dari Tuan Guru Zainuddin, yakni sebagai Sekjen PB NW mendampingi Wiresentane, Sekjen Yayasan Pondok Pesantren Darun Nahdlatain dan Ketua STKIP Hamzanwadi Selong. Kuatnya kelompok kepentingan yang berada di sekeliling mereka seringkali menimbulkan konflik dan perpecahan di antara Syubli dan Wiresentane. Konflik dan perpecahan semakin terbuka antara keluarga R1 dan R2 setelah gagalnya pernikahan anak mereka Sakti dan Hidayati. Perceraian tersebut akhirnya berdampak pada pemecatan Syubli dari berbagai posisinya di NW. Kondisi ini melahirkan konflik baru bagi kedua keluarga kedua putri Tuan

Guru Zainuddin.

Kelompok kedua adalah kelompok intelektual. Kelompok ini saya sebut sebagai kelompok kepentingan yang terdiri dari para dosen, guru, dan politisi. Mereka merupakan kelompok lapisan kedua sebagai aktor konflik NW. Kelompok ini memiliki kepentingan yang sangat besar dalam organisasi karena sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya di NW. Bagi kelompok ini, NW bukan hanya sebuah organisasi tempat mengabdi, tetapi sebagai *field of struggle,* tempat mereka bersaing dan berjuang untuk memperoleh kapital dan berbagai kepentingan lainnya. Para aktor ini tidak segan-segan untuk menjatuhkan lawan-lawannya meskipun dengan cara-cara yang tidak bermoral dan beretika. Di NW misalnya, para tokoh saling melaporkan kejelekan mereka kepada pimpinan organisasi NW sehingga sering muncul pemecatan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada mereka yang dianggap bermasalah. Kelompok inilah yang berhasil memecah belah keluarga Tuan Guru Zainuddin.

Ketiga adalah kelompok tuan guru atau tokoh agama. Kelompok ini masuk dalam kelompok kepentingan; mereka memiliki status yang lebih istimewa di masyarakat. Kelompok ini memainkan peran penting dalam konflik NW. Mereka terjebak dalam aksi mendukung salah satu putri Tuan Guru Zainuddin. Di beberapa aksi kekerasan, mereka ikut terlibat sebagai aktor intelektual di dalamnya. Mereka menjadi target pembunuhan dari pendukung salah satu kubu sehingga para pendukungnya ikut menjaga keselamatan dan keamanan mereka.

Keempat adalah kelompok *grass root,* jemaahNW. Kelompok ini juga memiliki peran yang sangat besar dalam konflik NW. Merekalah yang sering bentrok di lapangan ketika terjadi penyerangan antarmassa kedua kubu. Sebagian besar kelompok *grass root* tidak memahami akar masalah konflik, keterlibatan mereka lebih karena

pengaruh dan provokasi yang dilakukan oleh para elit NW termasuk para tuan guru yang menjadi panutan mereka. Pun, keterlibatan mereka karena membela para tuan guru mereka yang selama konflik menjadi target serangan dari massa kubu yang lain.

Dampak Konflik

Sebagian orang melihat bahwa konflik itu indah jika konflik mengalami transformasi dan reproduksi nilai-nilai konstruktif. Sebaliknya konflik itu buruk jika konflik disertai dengan tindak kekerasan yang merusak tatanan nilai-nilai dan integritas sosial di masyarakat. Di sini konflik dapat menjadi bencana sosial yang menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi manusia. Bagaimana konflik dapat berubah sebagai sesuatu yang konstruktif sangat tergantung pada aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik, mau dibawa kemana konflik tersebut. Selama ini, konflik yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Lombok khususnya, selalu disertai dengan tindak kekerasan antara aktor, padahal konflik tidak harus disertai dengan kekerasan. Namun *image* yang berkembang di masyarakat selama ini bahwa konflik selalu identik dengan kekerasan.

Konflik NW di satu sisi mengarah kepada nilai-nilai konstruktif, yakni NW semakin besar dan berkembang. Di sisi lain, konflik NW juga sangat destruktif karena menyebabkan terjadinya pembunuhan, pembakaran, dan pengerusakan rumah-rumah warga. Tidak sebanding antara kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan oleh koflik ini daripada keuntungan yang diperoleh. Bahkan konflik ini bagi sebagian orang tidak memperoleh apa-apa kecuali kerugian dan penderitaan. Jumlah nominal materi yang telah hilang selama konflik NW tidak terhitung lagi jumlahnya. Apalagi konflik NW juga telah menelan korban jiwa dari jemaahkedua belah pihak. Saya

membagi dampak konflik NW menjadi dua, yaitu dampak negatif dan positif. Di antara dampak negatif konflik NW, yaitu:

Pertama, putusnya relasi keluarga dan sosial di masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik NW masih memiliki hubungan keluarga dan sebagian masih memiliki hubungan darah. Selama konflik, para aktor tidak lagi saling menegur dan berbicara selama bertahun-tahun, bahkan sebagian keluarga memutuskan sama sekali relasi keluarga mereka karena perbedaan pilihan afiliasi kubu NW. Kedua, lahirnya krisis ekonomi bagi korban konflik. Mereka yang menjadi korban konflik adalah mayoritas dari kelompok *grass root*. Konflik telah menyebabkan kehilangan harta benda dan anggota keluarga yang meninggal pada waktu 'perang'. Dari kejadian di Pancor, pengerusakan, dan pembakaran rumah, serta toko-toko telah menimbulkan kerugian materi yang cukup besar. Di Desa Tebaban, Paok Lombok, Wanasaba, Majuet, Kelayu, dan Dasan Borok, ratusan rumah dirusak dan dibakar beserta isinya. Tanaman-tanaman di sawah juga tidak luput dari target kekerasan massa. Ratusan orang mengungsi akibat konflik dan sebagian besar tidak berani kembali ke kampung mereka sampai sekarang. Kalau dijumlahkan secara total kerugian yang dialami oleh masyarakat mencapai miliaran rupiah.

Ketiga, krisis rumah tangga bagi pasangan suami-istri. Ini merupakan salah satu dampak yang unik selama konflik NW. Pasangan suami-istri yang berbeda pilihan afiliasi ke-NW-nya telah menyebabkan konflik dan perceraian di antara mereka. Sebagian pasangan suami-istri juga dibuang oleh keluarga mereka karena berada pada kubu yang berbeda. Fenomena ini terjadi di beberapa desa tempat terjadinya konflik NW. Keempat, krisis makna hidup. Konflik NW melahirkan trauma sosial yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang kehilangan rumah, harta, dan

anggota keluarga yang meninggal dunia tidak pernah mendapat pendampingan dan konseling secara serius untuk proses rehabilitasi. Mereka dibiarkan begitu saja sehingga banyak masyarakat yang mengalami stres, depresi, dan menjadi gila.

Kelima, perubahan praktik ritual di masyarakat. Sebelum konflik, ritual-ritual keagamaan di masyarakat dilakukan bersama-sama menurut aturan dan norma adat yang berlaku. Perubahan besar terjadi pasca konflik dan perpecahan NW, ritual-ritual tersebut dilakukan menurut kubu masing-masing. Upacara kematian misalnya, warga yang meninggal dishalatkan dan dikuburkan oleh kubu masing-masing dengan cara yang berbeda. Kubu R2 dengan kelompok Barisan Hizbullah menggunakan baju seragam warna hijau untuk menyolatkan dan menguburkan jenazah, mereka juga menggunakan parade mobil layaknya kelompok militer. Di Kubu R1, di beberapa desa, mereka membentuk kelompok 'banjar kematian' di mana warga yang meninggal dishalatkan dan dikuburkan oleh kubu mereka. Kelompok Hizbullah tidak boleh ikut dalam ritual ini, dan begitu juga sebaliknya.

Adapun dampak positif dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu: pertama, NW semakin besar dan semakin maju. Biasanya konflik dan perpecahan membuat sebuah organisasi semakin mengecil atau mundur. Konsekuensi ini tidak berlaku dalam kasus NW, karena dengan konflik NW justru semakin besar dan mengalami banyak kemajuan. Secara umum, baik NW Anjani maupun NW Pancor, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terjadi persaingan antara keduanya untuk membuktikan siapa yang terbaik. Di Anjani misalnya, selama masa kepemimpinan Raihanun, jumlah gedung madrasah dan lembaga perguruan tinggi terus bertambah. Cabang-cabang NW juga terus berkembang sampai ke luar daerah seperti di Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Riau. Begitu juga di Pancor,

hampir semua pembangunan gedung direhabilitasi dengan megah. Kehadiran Tuan Guru Bajang membuat NW lebih dikenal di tinggkat nasional karena posisinya sebagai gubernur pertama dari kader NW.

Kedua, meningkatnya sikap loyal dan fanatik di internal kedua kubu NW. Massa dari kedua kubu semakin kuat dan solid selama dan pasca konflik. Elit-elit NW berhasil membangun militansi massa. Mereka yang tidak pernah aktif di organisasi NW sebelum konflik, ikut berpartisipasi dan aktif membantu pengembangan organisasi NW. Ada energi baru untuk saling berkompetisi secara sehat. Ketiga, meningkatnya ekonomi bagi kelompok elit. Konflik NW ibarat suatu keberkahan bagi elit-elit NW yang sebelumnya tidak mempunyai posisi dan peran di dalam organisasi. Setelah perpecahan dan konflik, mereka tiba-tiba memegang banyak peran dan posisi strategis. Konflik NW benar-benar menjadi sebuah 'rahmat' bagi para elit, sedangkan bagi masyarakat bawah konflik tidak lebih sebagai 'azab' yang sangat perih. Keempat, posisi tawar politik NW semakin kuat. Kondisi ini tidak lepas dari perubahan sosio-politik nasional pada era reformasi yang kembali menerapkan sistem multi partai dan pemilihan langsung. Organisasi NW ibarat gadis cantik yang mendapat banyak tawaran sebagai mitra politik.

Kelima, terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Setelah konflik NW, lapangan pekerjaan semakin meningkat khususnya di lingkungan organisasi NW. Baik di Anjani mapun di Pancor, lapangan kerja terus bertambah seiring perluasan pembangunan madrasah dan proyek organisasi. Di Anjani misalnya, mereka membutuhkan tenaga guru dan dosen untuk mengajar di lembaga tersebut. Begitu juga yang di Pancor, mereka membutuhkan tanaga pengajar untuk mengisi berbagai posisi karena ditinggal oleh sebagian para guru dan dosen yang ke Anjani. Keenam, munculnya tokoh-tokoh yang

terisolasi. Sebelum konflik, banyak sekali tokoh-tokoh NW yang tidak mendapat tempat karena ketatnya persaingan, namun setelah konflik tokoh-tokoh baru muncul memegang peran penting.

BAB 4
Reproduksi Wacana dan Tafsir Sosial atas Konflik dan Kekuasaan

Memang banyak macam ujian
Yang diderita Nahdlatul Wathan
Luar dan dalam penuh godaan
Selalu lulus dalam ujian
(Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat Renungan Masa,* 2002: 70)

Wacana lokal tentang konflik NW

Sub bab ini menguji wacana-wacana lokal yang muncul dan berkembang di kalangan jemaahtentang konflik NW, apa kepentingan yang melatari munculnya wacana tersebut dan bagaimana faktor dukungan kekuasaan mempengaruhi *output* kebenaran produksi wacana itu. Wacana yang dimaksud di sini tidak hanya secara etimologis berupa susunan ucapan, percakapan, dan tulisan, tetapi juga secara filosofis yang lebih mengarah ke makna teoretis dengan berbagai interpretasi (Mills 1997: 3). Foucault sebagaimana dikutip oleh Lessa (2006) mendefinisikan wacana sebagai sistem pemikiran yang terdiri dari ide dan atau sikap mental yang mengarahkan pada perbuatan, kepercayaan, dan praktik-praktik yang secara sistematis mengkonstruk subjek dan dunia yang

mereka bicarakan. Dari wacana tersebut dapat dipahami tidak hanya pandangan dan penafsiran mereka tentang sebuah realitas, tetapi bagaimana wacana telah membentuk dan mempengaruhi perilaku mereka sehari-hari (Bagshaw 2003; Foucault 1970; Mills 1997). Wacana mengalami transformasi ke dalam praktik-praktik konflik dan kekerasan di antara aktor-aktor konflik. Saya berargumen bahwa wacana memainkan peran penting di dalam konflik NW karena konflik lahir dari sebuah wacana yang diciptakan oleh para elit.

Sara Mills (1997: 189) mengatakan, wacana tidak lahir dalam kondisi vacum atau kosong, tetapi dalam konstansi konflik dengan wacana-wacana lain atau praktik-praktik sosial lain. Bagi Foucault (1980), memahami wacana tidak untuk menemukan kebenaran atau keaslian statemen, tetapi melihat dukungan mekanisme-mekanisme yang membangun dan menjaganya di tempat. Dukungan mekanisme ini berada di dalam dan luar wacana itu sendiri dalam kekuatan sosial budaya. Dengan demikian, wacana tidak bebas nilai karena melibatkan otoritas dan kekuasaan untuk melegitimasi kebenarannya. Wacana dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kekuasaan merupakan elemen kunci dalam pembahasan wacana dan pengetahuan karena wacana dan pengetahuan dilegitimasi oleh kekuasaan dan otoritas (Hall 1997: 39-50; Mills 1997: 49). Hubungan tersebut tidak hanya diasumsikan karena adanya kekuasaan dan otoritas 'kebenaran' di dalam wacana dan pengetahuan, tetapi ia juga memiliki kekuasaan untuk membuat benar (Foucault 1970; 1980).

Wacana dari satu kubu tidak lahir begitu saja, tetapi lebih sebagai respons atas wacana dari kubu yang lain. Sebelum konflik mengalami puncak, kedua kubu terjebak dalam perang wacana atas kebenaran, kubu siapa yang benar dan salah mengenai tafsir tentang status kepemimpinan perempuan dalam organisasi NW. Keduanya

berkontestasi menunjukkan dominasi dan kekuasaan atas kebenaran tafsiran masing-masing kubu dan berupaya mengalahkan wacana dari kubu yang lain. Dalam kasus NW, teori wacana Foucault dapat diuji ketika elit-elit NW sengaja memproduksi dan mereproduksi wacana dan dukungan kebenaran sebagai legitimasi baik dari dalam maupun dari luar NW. Selain faktor Tuan Guru Zainuddin, media agama berfungsi sebagai pendukung produksi dan mekanimse sosialisasi dan internalisasi wacana-wacana tersebut ke jemaahNW.

Wacana tidak hanya berfungsi sebagai media untuk membangun kekuasaan, tetapi juga menumbangkan kekuasaan. Wacana-wacana baru yang muncul seringkali bertentangan dengan wacana-wacana lama yang tidak mengakomodir kepentingan mereka. Lahirnya wacana yang menolak kepemimpinan perempuan pasca Muktamar NW ke-10 di Praya pada 1998 merupakan bentuk usaha untuk menumbangkan kekuasaan Kubu R2, meskipun Kubu R2 juga tidak tinggal diam dengan serangan wacana baru tersebut dan membalasnya dengan wacana-wacana lain yang lebih kuat. Perang wacana ini kemudian melahirkan praktik konflik dan kekerasan antara kedua kubu.

Wacana lokal tentang konflik NW yang muncul di masyarakat sangat variatif karena perbedaan kepentingan dan tujuan yang mendasari lahirnya wacana tersebut. Apalagi ketika mengkonfrontasi wacana-wacana yang muncul dari kedua kubu NW yang sedang bertikai selalu kontra dan bertolak belakang. Kubu R2 yang merasa sebagai kelompok yang sah karena memenangkan pertarungan pada Muktamar Praya 1998 sehingga di setiap kesempatan, tokoh-tokoh R2 terus mewacanakan hasil Muktamar ini. Saya mengutip salah satu ceramah R2 (2008) di sebuah pengajian di Anjani:

> 'Sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengakui keberadaan Pengurus NW selain hasil Muktamar di Praya. Pengurus NW yang lain tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan organisasi dan wasiat Tuan Guru Zainuddin. Di dalam wasiatnya jelas dikatakan, '*PB itu satu, bukannya dua, bukannya telu* (Ketua NW itu satu, bukannya dua, bukan tiga). Mereka yang membentuk kepengurusan lain, tidak berpegang lagi dengan wasiat pendiri NW. Tuan Guru Zainuddin juga tidak pernah melarang perempuan sebagai pemimpin NW, bahkan selalu mendukung kaum perempuan'.

R2 dalam kesempatan lain (2008) menceritakan bahwa dirinyalah yang diberi surat kuasa oleh ayahnya untuk mengelola NW dan seluruh asetnya. Lebih lanjut, R2 (2008) menyatakan: 'Saya memiliki surat kuasa, maka saya akan mati-matian membela NW karena ini perintah dari ayah saya. Alasan penolakan diri saya sebagai pemimpin NW karena berjenis kelamin perempuan adalah rekayasa dan terlalu dibesar-besarkan'. Adapun terkait dengan pindahnya R2 dan pengikutnya ke Desa Kalijaga hanya bersifat sementara karena kondisi keamanan yang tidak menentu. Dia dan para jama'ahnya berniat suatu saat akan kembali ke Pancor dan merebut kembali kota tersebut atau yang dikenal dengan 'fathu Pancor'. Pada mulanya R2 sangat berat meninggalkan Pancor karena adanya wasiat yang diberikan oleh ayahnya yang menginstruksikan supaya dia tetap menjalankan roda organisasi, namun keadaan yang memaksanya harus meninggalkan Pancor. R2 sangat menyayangkan sikap masyarakat Pancor yang melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya dan para pendukungnya.

Apa yang dikatakan oleh R2 menunjukkan bahwa wacana

yang dibangun di atas adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa dialah orang yang diberi mandat dan otoritas untuk memimpin NW pasca Tuan Guru Zainuddin wafat. Otoritas ini diberikan melalui penerbitan surat kuasa untuk mengelola organisasi. Semua aset-aset organisasi di bawah kendali R2 baik berupa kekayaan fisik maupun kelembagaan organisasi. Surat kuasa ini dibuat sebelum Tuan Guru Zainuddin meninggal, di mana pada waktu itu konflik keluarga sedang memanas. Dukungan ayahnya, Tuan Guru Zainuddin adalah modal sosial yang digunakan sebagai simbolpembenar atas tindakan dan produksi wacana untuk membangun kekuasaan. Orang yang tidak mendukung atau mengikutinya dianggap sebagai jemaahyang tidak setia atau ingkar kepada Tuan Guru Zainuddin.

Pada pihak lain, Kubu R1 tetap berkeyakinan bahwa merekalah kelompok yang benar karena mengikuti aturan organisasi. Salah satu ceramah dari Tuan Guru Bajang yang dikutip oleh Nazri (2000) di awal kepemimpinannya ketika terpilih pada Muktamar Reformasi mengatakan:

> 'Kita yang merasa belum menyimpang dari ajaran dan petunjuk Tuan Guru Zainuddin harus selalu berusaha menjaga kekompakan dan keutuhan organsiasi NW. Untuk itu, kepada saudara-sudara kita yang masih terombang-ambing dan berada di seberang, saya ajak untuk berdialog. Mari kita bahas perbedaan pendapat yang ada, sebab dalam keadaan apapun kita msih bersaudara. Kalau saja nanti ternyata pihak kami yang salah kami akan langsung minta maaf, dan kalau tidak kami tetap membuka pintu maaf. Kita tidak perlu takut karena kita yakin berada dipihak yang benar, kita tunjukkan bahwa kita ini bukan orang yang bodoh'.

Di beberapa kesempatan acara pengajian, Tuan Guru Bajang selalu mewacanakan islah dengan Kubu R2. Dia ingin mengembalikan keutuhan NW seperti masa kakeknya. Di acara Hultah NW pada tahun 2008 misalnya, Tuan Guru Bajang mengatakan:

> 'Saya siap berdialog kapanpun dan di manapun asalkan tidak saling menjatuhkan dan merendahkan, tuan guru Anjani silahkan ketemu dengan tuan guru yang ada di Pancor biar sama-sama saling menghormati. Kita malu kenapa sesama saudara tidak saling tegur dan bersilaturRohmi, sementara dengan orang lain kita bisa'.

Menanggapi wacana kepemimpinan perempuan, dalam sebuah dialog, seorang tokoh NW dari luar daerah pernah bertanya kepada Tuan Guru Bajang tentang keabsahan pemimpin perempuan sebagaimana dikutip oleh Abdul Kabir (2008) mengatakan:

> 'Saya mencoba mendialogkan kembali status perempuan sebagai pemimpin menurut Mazhab Syafi'i, kami tidak menolak eksistensi perempuan sebagai pemimpin, tetapi kita perbaiki dulu mazhab organisasi. Kami mau menerima perempuan asal NW mengubah haluan mazhabnya, tidak hanya menganut Syafi'i, tetapi menganut multi mazhab dan di sinilah letak persoalannya'. Jika dialog dilaksanakan secara terbuka dan transparan, maka 70% persoalan NW akan dapat diselesaikan'.

Wacana yang dibangun oleh Tuan Guru Bajang di atas sangat kontras dengan wacana R2, di mana Tuan Guru Bajang mau berbagi atau sharing kekuasaan dengan kubu R2. Tuan Guru Bajang tidak memandang suatu masalah dengan 'ekstrim' atau 'saklek', tetapi lebih moderat dan terbuka dengan peluang-peluang kerjasama dalam

menyelesaikan masalah di antara kedua kubu. Dia sadar bahwa kedua keluarga punya hak dan kewajiban untuk melajutkan perjuangan NW dalam kerangka 'NW fil khair, NW fastabiqul khairot', oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak atau memblok salah satu keluarga untuk beraktivitas dan berkreasi dalam organisasi. Dia meyakini bahwa persoalan organisasi dapat diselesaikan lewat dialog termasuk tentang perbedaan penafsiran teks agama terkait dengan peran dan status perempuan sebagai pemimpin organisasi. Keterbukaan dan sikap moderasi Tuan Guru Bajang inilah menjadi salah satu kekuatan wacana untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. JemaahNW secara umum sangat menghormati kedua putri Tuan Guru Zainuddin dan menginginkan mereka dapat bersama-sama mengembangkan dan melanjutkan agenda perjuangan organisasi. Terbukti bahwa kedua-duanya mempunyai dukungan yang sama-sama kuat dari jemaahNW.

Siti Rohmi Jalilah (2008), salah satu putri R1, mengatakan bahwa keluarganya selalu mengalami diskriminasi oleh keluarga R2 dan para pendukungya. 'Ummi saya tidak diberi akses untuk bertemu dengan kakek saya Tuan Guru Zainuddin ketika masih hidup, padahal beliau adalah ayahnya sendiri. Ketika adik saya Tuan Guru Bajang mau menikah, ibu saya dihalang-halangi untuk bertemu dengan ayahnya, sedangkan dia hanya ingin memberi tahu dan meminta izin untuk merestui pernikahan tersebut. Ibu saya akhirnya meminta izin lewat surat karena tidak boleh bertemu langsung dengan ayahnya. Masak seperti itu cara-cara yang dilakukan oleh mereka, sangat tidak Islami'. Terkait dengan hasil Muktamar di Praya, Jalilah (2008) mengatakan bahwa 'Terdapat ketidakjujuran dalam proses Muktamar Praya. Pihak kami tidak mau mengikuti Kubu R2. Sekarang saya dan keluarga hanya ingin fokus untuk mengembangkan NW yang di Pancor saja. Biarlah di Anjani diurus sama pihak mereka. Kalau hanya mengurus konflik,

kapan ada waktu untuk melakukan yang lain. Kita tidak ada waktu lagi untuk mengurus hal-hal yang tidak penting seperti kemarin-kemarin. Toh juga masyarakat sudah mulai sadar dengan kondisi konflik dan perpecahan ini. Saya percaya tidak ada lagi konflik di tingkat masyarakat, tetapi hanya di tingkat elit-elit tertentu'.

Salah satu putra dari Kubu R2, Raden Tuan Guru Bajang (RTGB) Muh. Zainuddin Astani (2008), mengatakan: 'Pihak Kubu R1 telah keluar dari rel-rel organisasi dan wasiat Tuan Guru Zainuddin. Membentuk kepengurusan organisasi yang baru, jelas tidak dibolehkan oleh Undang-undang karena organisasinya sama. Kalau membuat kepengurusan yang lain kenapa tidak membuat organisasi yang baru sekalian'. RTGB Astani lebih lanjut mengatakan: 'Kemana NW Reformasi yang didengung-dengungkan dan dibentuk kepengurusannya oleh Kubu R1? Sekarang nama NW Reformasi tidak terdengar lagi, malahan mereka kembali lagi ke NW yang lama. Saya heran kenapa kembali lagi ke yang lama, sementara reformasinya dihilangkan. Saya juga sangat kecewa dengan pemerintah kenapa mereka memberi izin atas terbentuknya kepengurusan yang lain, padahal tidak sah menurut undang-undang'. RTGB Astani juga mengkritisi Kubu R1 yang telah merehab gedung-gedung sekolah yang lama seperti Madrasah Muallimin. 'Ini sama artinya dengan menghilangkan jejak pendiri organisasi NW. Sekarang kita tidak bisa melihat karya Tuan Guru Zainuddin yang asli dan seolah-olah semua hasil karya mereka dan merasa lebih hebat daripada Tuan Guru Zainuddin. Begitu juga dengan ajaran yang berkembang di R1 tidak murni ajaran NW, tetapi sudah campur-campur termasuk ajaran Wahabi. Saya sempat menangis ketika melihat makam Tuan Guru Zainuddin yang tidak punya batu nisan, kenapa mereka memperlakukan makam ulama seperti itu'.

Apa yang dikatakan oleh Siti Rohmi Jalilah dan RTGB Astani di atas adalah dua wacana yang berbeda kepentingan. Jalilah lebih banyak menceritakan pengalamannya yang buruk diperlakukan tidak adil oleh kubu R2 termasuk para tuan guru. Ada resistensi yang muncul dari Jalilah melihat ketidakadilan tersebut, sementara dia merasa sebagai keluarga yang juga memiliki hak atas akses kepemimpinan dan peran partisipastif di NW. Jalilah menunjukkan perubahan wacana di masyarakat yang tidak lagi mendukung terjadinya konflik, tetapi menginginkan wacana islah dan persaudaraan. Alasan inilah yang membuat kubu R1 terus membangun wacana islah untuk melawan wacana konflik dari kubu R2. Berbeda dengan RTGB yang menyalahkan pihak pemerintah yang tidak tegas pada penegakan hukum. RTGB juga menyalahkan kubu R1 yang tidak mematuhi aturan organisasi serta ketidakkonsistenan menggunakan istilah NW Reformasi. RTGB juga menunjukkan identitas NW yang asli dari Tuan Guru Zainuddin yang diwarisi oleh NW Anjani dan dia tetap akan menjaga keasliannya, sementara kubu R1 telah dianggap banyak menyimpang dengan memasukkan ajaran-ajaran baru yang lebih ke Wahabi. Ada upaya dari RTGB untuk menentang apa yang dilakukan oleh kubu R1 dengan membangun wacana menyimpang 'heresy' dalam praktik keagamaan NW.

Tuan Guru M. Yusuf Ma'mun (2008), Amid dan Masyaikh Ma'had Darul Qur'an wal Hadist dan juga anggota Dewan Syuro PB NW dari Kubu R1, mempertanyakan kenapa elit-elit NW harus berpihak kepada salah satu dari putri Tuan Guru Zainuddin.

> 'Kalau kita memperlakukan keduanya secara adil maka saya yakin konflik dan perpecahan antara keluarga Tuan Guru Zainuddin tidak akan terjadi seperti ini. Sekarang ini kita hanya bisa mengambil manfaat dan hikmah dari konflik ini. Konflik NW telah memperlihatkan kebesaran NW, di Anjani NW maju, begitu juga dengan

> yang ada di Pancor. Yang sangat disayangkan adalah adanya suara-suara miring yang tidak enak didengar, klaim-klaim dari pendukung, dan elit kedua kubu yang yang mengatakan, di Anjani lebih besar dan di Pancor kecil atau sebaliknya. Kenapa kita tidak menyatakan di Anjani besar dan di Pancor juga besar'.

Abdul Hayyi Nu'man (2008), Sekjen PB NW dari Kubu R2, mengatakan:

> 'Yang membuat masalah sebenarnya adalah Kubu R1. Kenapa menolak hasil Muktamar Praya dan membuat kepengurusan NW yang baru, padahal sudah jelas mereka kalah pada Muktamar tersebut. Mudah saja menyelesaikan konflik NW ini, yaitu dengan membubarkan kepengurusan mereka dan mengakui kepemimpinan Kubu R2 sebagai kubu yang sah. Dengan demikian selesai permasalahannya. Kenapa harus susah-susah, kita dari pihak R2 ingin sekali bersatu tetapi tegakkan dulu aturan organisasi'.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Tuan Guru Abdul Hamid (2008), tokoh NW dari Kubu R1:

> 'Alasan saya tidak ikut ke Kubu R2 karena berangkat dari konsep filosofis, jika saudara membeli barang misalnya 'kacang garuda' tentu yang dinamakan kacang garuda terdiri dari isi, bungkus, dan mereknya. Kalau tidak ada bungkus dan mereknya, maka itu bukan kacang garuda. NW ini lahir dan besar di Pancor, maka alasan inilah yang membuat saya tetap di Pancor'.

Tuan Guru Hamid (2008) juga mengomentari konflik yang terjadi di antara keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin. Menurutnya, akar konflik NW salah satunya karena dalam darah

Tuan Guru Zainuddin tidak ada istilah kalah, tetapi selalu ingin menang. Inilah yang menjadi akar konflik karena masing-masing punya supremasi dan kekuatan yang seimbang sehingga sulit untuk didamaikan. Seandainya dalam keturunan Tuan Guru Zainuddin ada darah untuk 'mengalah' maka persatuan itu tidak sulit. Sekarang semua ingin berkuasa dan menunjukkan kekuatan masing-masing. Pengajian sekarang ini hanya kedok saja, mereka bukannya mengaji agama, tetapi lebih menunjukkan kekuatan kubu mereka.

Tuan Guru Mustami'uddin Ibrahim (2008), mantan Rektor UNW Mataram dan salah satu tokoh NW dari Kubu R2, menyayangkan sikap tangan besi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik NW. Dia mempertanyakan cara-cara kekerasan, padahal masih ada waktu Muktamar berikutnya untuk meraih pucuk pimpinan NW. Tuan Guru Ibrahim tetap menilai kepemimpinan R2 sudah sah karena melalui prosedur pemilihan Muktamar. Menurutnya, tidak ada persoalan dalam Mazhab Syafi'i terkait kepemimpinan perempuan karena Mazhab Syafi'i memiliki banyak versi yang salah satunya adalah kebolehan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. 'Isu kepemimpinan perempuan hanya dibuat-buat saja sebagai alasan untuk menolak hasil Muktamar, demikian kesimpulannya.

Menurut Muh. Suruji (2008), mantan Ketua STKIP dan Sekjen PB NW Kubu R1 mengatakan bahwa persoalan NW bukan terletak pada kedua putri Tuan Guru Zainuddin, tetapi pada elit-elit yang ingin menguasai NW. Tidak ada masalah antara Rauhun dan Raihanun sepanjang yang saya ketahui. Justru peran beberapa elit yang ingin menjadi nomor satu, tetapi kemampuannya nomor tiga. Mereka memaksakan kehendak untuk berkuasa sehingga menimbulkan konflik, kata Suruji. Menurut M. Mugni Sn (2008), Ketua STMIK NW Anjani dan anggota PB NW dari Kubu R2

bahwa faktor kecemburuanlah yang menyebabkan Kubu R1 menolak hasil Muktamar, padahal mekanisme pemilihan telah sesuai dengan aturan organsiasi. 'Kita dari Kubu R2 sangat ta'at dengan perintah Tuan Guru Zainuddin termasuk menjalankan wasiat-wasiatnya. Dualisme kepemimpinan NW telah melanggar wasiat Tuan Guru Zainuddin, dia tidak pernah mengakui pemimpin NW lebih dari satu. Sekarang sulit untuk bersatu kembali karena tidak ada kubu yang mau mengalah. Saya melihat sebagian tokoh-tokoh yang muncul di Pancor sekarang ini adalah orang-orang baru yang tidak pernah kelihatan batang hidungnya pada masa Tuan Guru Zainuddin.

Konstruksi wacana yang dibuat oleh kelompok elit dan para tuan guru di atas tidak lepas dari idealisme dan subyektivitas masing-masing. Kedua kubu saling menyalahkan dan mengkritisi langkah-langkah mereka dalam menyelesaikan masalah organisasi. Hayyi Nu'man, Mugni dan TGH. Mustami'uddin Ibrahim menyayangkan ketidakdewasaan kubu R1 dalam menyikapi hasil Muktamar. Atas dasar wasiat dan proses demokrasi pada Muktamar Praya meyakinkan mereka bahwa kubu merekalah yang benar. JemaahNW menginginkan R2 sebagai pemimpin NW yang baru menggantikan ayahnya jika merujuk hasil muktamar yang dinilai cukup demokratis. Sedangkan TGH. Yusuf, TGH. Abdul Hamid dan M. Suruji mempertanyakan kebenaran surat kuasa dan kapabilitas mereka sebagai pemegang kendali dan pengelola organisasi. Mereka juga menilai adanya kecurangan dan ketidakjujuran dalam proses Muktamar Praya dari kubu R2. Munculnya ketidakpuasan dari masyarakat khususnya dari kubu R1 adalah bentuk kegagalan dari kubu R2 dalam menjalankan roda organisasi mengakomodir aspirasi kelompok yang lain. Mereka juga menggugat keaslian NW yang diklaim oleh R2, padahal menurut mereka bahwa NW yang asli adalah NW Pancor karena di sanalah NW lahir dan berkembang.

Saya melihat bahwa perbedaan persepsi tokoh-tokoh dari kedua kubu ini menunjukkan adanya kontestasi hebat dan perang wacana antara kedua kubu untuk mencari pembenaran sebagai alat dukungan kekuasaan masing-masing melalui legitimasi agama dan hukum.

Abid, jemaahNW dari level *grass root*, mengatakan bahwa konflik ini karena kesalahan para tuan guru yang berpihak kepada salah satu putri Tuan Guru Zainuddin dan membuang yang satunya. Ini tentu menyimpang dari wasiat Tuan Guru Zainuddin yang menginginkan kedua anaknya diperlakukan secara adil. Kondisi inilah yang membuat kami dari masyarakat Pancor sangat prihatin dan kasihan dengan salah satu putri yang dibuang. Lebih lanjut, dia mengungkapkan kerinduan masyarakat Pancor yang ingin melihat kedua putri Tuan Guru Zainuddin untuk bersatu kembali. 'Kalau bisa terwujud kedua Ummi bersatu, kami akan mengadakan syukuran dan pesta besar. Nanti kami akan menyembelih sapi di sini, katanya'. JemaahNW yang lain Abdullah mengatakan bahwa persaingan keluarga kedua putri Tuan Guru Zainuddin banyak dimanfaatkan oleh orang ketiga. kepentingan politik elit-elit di luar NW seperti Golkar sangat besar, mereka tidak pernah senang melihat NW bersatu karena kalau bersatu, mereka tidak akan mendapat tempat di dalam pemerintahan. Orang Pancor sebenarnya tidak pernah berpihak ke salah satu putri Tuan Guru Zainuddin, tetapi hanya simpati dengan Rauhun yang selalu didiskreditkan dan tidak diberi akses oleh pihak R2.

Sementara itu, Syamsuddin (2008) mengatakan bahwa tidak ada orang yang mengusir Kubu R2 dan pendukungnya dari Pancor. Mereka yang meninggalkan Pancor karena tidak bisa menguasai orang-orang di yayasan. Orang Pancor marah karena dipecat dari yayasan dan selalu direndahkan di pengajian-pengajian. Orang

Pancor tidak ada yang membenci mereka, malahan kita ingin melihat mereka bersatu. Makruf (2008) mengatakan bahwa para tuan guru yang harus bertanggungjawab terhadap konflik NW. Mereka di atas ini yang punya pekerjaan, sedangkan kita sebagai orang awam tidak tahu apa-apa hanya ikut-ikutan saja. Mereka yang di atas tidak bisa saling mengatur dan terjebak dalam konflik kepentingan. Seandainya para tuan guru lebih cermat dan cerdas membaca situasi politik NW, maka mereka tidak akan terjerumus ke dalam lubang konflik ini. Mereka seharusnya menjaga dan menaungi para jemaahdari perpecahan dan konflik, bukan membuat perpecahan.

Hal senada dikemukakan oleh Ahmad Abror (2008): 'Masyarakat bawah yang banyak kelahi karena tidak sadar. Kita cepat terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Coba lihat pemimpin-pemimpin kita yang di atas, mereka adam ayem saja. Mereka tidak ada yang saling memukul, apalagi saling membunuh. Hanya masyarakat bawah sendiri yang melakukan itu'. Arifin (2008) mengatakan bahwa 'Konflik di desa-desa termasuk di Paok Lombok adalah murni masalah NW. Tidak ada orang Paok Lombok yang membenci sesama warga di sini. Orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat yang membuat masalah. Kedua kubu NW masing-masing mengaku benar. Selama konflik sebagian orang di pihak R1 juga ikut mengungsi. Saya sendiri tinggal di Mataram waktu itu dan takut pulang. Saya yakin bahwa ada intervensi kepentingan politik dari orang luar'. Hamidi (2008), mengatakan bahwa 'Konflik ini kesalahan orang-orang atas. Terlalu banyak rasa saling iri di antara tokoh-tokoh NW, makanya kita pecah belah. Mau menang sendiri saja, coba kalau semua aman, yang duluan silahkan dan yang belakangan harusnya antri. Saya sedih kalau mengingat peristiwa yang dulu'.

Perang wacana tidak hanya terjadi di tingkat elit, tetapi juga di

kalangan masyarakat bawah atau *grass root*. Sebelum konflik besar-besaran, para pendukung kedua kubu mati-matian membela kubu mereka dengan membangun wacana atas kubu masing-masing. Mereka juga menjadi penyambung lidah dalam proses transfer dan sosialisasi wacana dan pembenaran wacana untuk kekuasaan. Pendukung kedua kubu mengklaim sebagai kelompok yang sah dan direstui oleh Tuan Guru Zainuddin dan menyalahkan kubu yang lain. Pembenaran wacana tersebut mengalami reproduksi di tingkat masyarakat dan terus dijaga oleh mereka. Wacana konflik memiliki kekuatan 'sendiri' yang memaksa para jam'ah dan elit untuk menjaga dan melestarikannya. Setelah konflik para pendukung jutru menyalahkan elit masing-masing yang gagal dalam menajaga keselamatan mereka. Mereka sadar bahwa para jemaahhanya dimamfaatkan untuk tujuan kekuasaan dan status sosial kelompok elit-elit tertentu.

Dari perang wacana ke praktik konflik dan kekerasan

Perang wacana yang terjadi antara kedua kubu NW, khususnya pasca Muktamar Praya, telah berubah menjadi konflik dan kekerasan sosial yang melibatkan antara pendukung kedua kubu NW (Muhtar 2010; Saprudin 2005; Smith dan Hamdi 2012). Proses produksi dan reproduksi wacana dilakukan melalui media agama, yakni pengajian yang juga berfungsi sebagai alat legitimasi atas wacana konflik dan kekerasan tersebut. Apa yang dikatakan dan diwacanakan oleh para elit NW telah menjadi kebenaran mutlak diterima begitu saja oleh masyarakat. Wacana yang diproduksi seperti sebuah 'sabda' yang mempunyai kekuatan 'magis' yang dapat membentuk dan mempengaruhi keputusan dan tindakan para jemaahNW (Hamdi 2011). Mereka akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemimpin tanpa bertanya asal-usul,

tujuan, manfaat, dan orientasi dari instruksi itu. Ketika jemaahNW diundang ke 'tempat kerusuhan' atau medan perang, maka dengan suka rela mereka datang demi melaksanakan 'tugas suci' membela kelompok masing-masing. Mereka tidak lagi memikirkan harta ataupun nyawa sebagai taruhan, tetapi hanya kesetian dan pelayanan yang diberikan atas nama pembelaan keyakinan dan kebenaran tafsir masing-masing kubu .

Praktik konflik dan kekerasan yang dilakukan antara jemaahNW mengalami polarisasi, reproduksi, dan eskalasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Konflik dan kekerasan hampir terjadi di seluruh daerah di Lombok ketika terdapat dua kubu NW di desa tersebut. Sulit bagi jemaahNW untuk memosisikan diri mereka netral oleh karena mereka akan dicurigai sebagai pendukung pada salah satu kubu atau mengalami marginalisasi oleh kedua kubu NW (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012). Elit-elit NW mengultimatum jemaahNW yang belum menentukan pilihan supaya secepatnya memilih. Meminjam bahasa Tuan Guru Lalu Anas Hasyri (2008) yang mengatakan: 'Kalau berada di tengah-tengah jalan, maka akan digilas oleh kendaraan'. Posisi netral bukanlah pilihan yang terbaik pada waktu itu bagi jemaahNW karena mereka tetap akan menjadi sasaran dan target, baik secara sengaja atau tidak sengaja.

Biasanya jemaahNW yang mengaku netral lebih cenderung berafiliasi ke Kubu R1 daripada Kubu R2 karena Kubu R1 lebih terbuka, cenderung menyuarakan islah, dan tidak memaksa untuk membenci salah satu kubu. Oleh karena itu, sulit sekali menemukan desa yang benar-benar netral tidak memihak ke salah satu kubu. Ketika konflik mengalami polarisasi dan eskalasi ke desa-desa, sebagian tokoh masyarakat di desa tertentu berupaya menjaga keharmonisan desa untuk tidak ikut terlibat aksi kekerasan. Namun di beberapa desa, para tokoh yang punya kepentingan sengaja

memprovokasi dan memobilisasi massa untuk menyerang dusun-dusun di sekitarnya atas nama kubu masing-masing. Kedua kubu saling mengidentifikasi apakah mereka jemaahdari Kubu R1 atau Kubu R2 supaya tidak salah sasaran.

Peristiwa kekerasan antara jemaahNW lebih banyak terjadi di Lombok Timur karena di sinilah pusat massa terbesar organisasi NW. Meski demikian kekerasan ini melibatkan hampir seluruh jemaahNW yang terdapat di berbagai daerah di Lombok. Saya menyebut kasus kekerasan NW sebagai perang *'pepadu'* atau perang antara pendekar di Lombok, karena kenyataanya yang terlibat kekerasan dalam peperangan bukan hanya orang NW, tetapi juga orang sakti yang ingin mengetes ilmu mereka.[15] Kedua kubu saling mengundang para *pepadu* dari desa-desa lain. Konflik NW menjadi ajang adu ilmu kesaktian oleh para pendekar-pendekar di Lombok (Smith 2012). Tak heran kemudian ada yang berpendapat bahwa perang 'atas' lebih dahsyat daripada perang 'bawah'.[16] Perang 'atas' hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai ilmu kesaktian tinggi yang bisa mengubah dirinya dalam berbagai bentuk (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012). Biasanya orang-orang sakti ini tujuannya hanya mengetes ilmu mereka dan membuktikan siapa yang paling sakti dan tinggi ilmunya. Namun tidak ada data pasti yang menyebutkan berapa jumlah orang yang meninggal dalam perang 'atas' ini. Sebagian mengklaim ratusan orang yang telah meninggal dalam perang atas yang melibatkan orang-orang sakti tersebut.

[15] *Pepadu* merupakan istilah yang digunakan untuk sebutan bagi orang-orang sakti di Lombok. Biasanya *pepadu* keluar pada malam hari untuk menjaga kampung atau sawah mereka dari pencuri.

[16] Istilah perang 'atas', perang di udara yang melibatkan orang-orang sakti yang berkelahi dengan cara terbang. Sedangkan perang 'bawah' adalah perang orang-orang biasa yang tidak terlalu sakti. Orang-orang sakti ini tidak mau menujukkan ilmunya pada siang hari, biasanya mereka bertempur pada malam hari.

Titik-titik kecamatan yang rawan konflik dan kekerasan adalah Suralaga, Masbagik, Kota Raja, Wanasaba, Pringga Sela, Pringga Baya, Suka Mulia, dan Aikmel. Konflik dipastikan muncul dan mengalami titik ekstrim jika terdapat elit-elit NW, terutama para tuan guru dari kedua kubu di satu desa. Konflik dan kekerasan tidak bisa dihindari karena tuan guru saling berebut pengaruh, status, dan simpati massa dan ingin menunjukkan kekuatan kubu masing-masing. Pada waktu yang bersamaan, tekanan-tekanan dari pusat juga sangat kuat kepada tokoh-tokoh lokal karena melalui mereka elit-elit di pusat bisa masuk ke desa tersebut. Misalnya, ketika elit-elit NW di pusat ingin mengadakan pengajian atau kampanye politik, maka yang menjadi panitia adalah tokoh-tokoh lokal di desa itu. Begitu juga sebaliknya, tokoh-tokoh lokal yang ingin menarik simpati elit-elit NW di pusat mereka menawarkan jasa dan fasilitas di desa mereka sehingga menimbulkan kecemburuan elit-elit lokal lain yang berbeda kubu. Dari sinilah kemudian konflik dan kekerasan terus mengalami reproduksi, polarisasi, dan eskalasi di komuntias-komunitas NW.

Keterlibatan dan intervensi elit-elit NW dari luar desa (tempat kejadian) tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Keterlibatan mereka justru melahirkan persoalan baru di desa tersebut. Keterlibatan kelompok dari luar desa atas nama salah satu kubu NW menimbulkan aksi balas dendam dari kubu lain. Elit-elit yang merasa sebagai korban akhirnya berusaha mengundang dan mendatangkan bantuan dari pusat. Dengan demikian, desa-desa tersebut menjadi tempat adu kekuatan dari kelompok luar desa. Pada waktu terjadi kerusuhan, ratusan bahkan ribuan orang berkumpul di desa tersebut sehingga terjadi pertempuran dan perkelahian massal. Di Desa Tebaban misalnya, Kubu R2 yang minoritas ingin melakukan kegiatan pengajian, tetapi Kubu R1 menghalangi dan menggagalkan kegiatan tersebut. Karena merasa terancam dan diserang oleh Kubu

R1, maka kelompok R2 mengundang Hizbullah yang berasal dari berbagai desa dan menyerang tokoh-tokoh lokal yang dianggap sebagai pendukung Kubu R1 yang telah memprovokasi massa. Mereka merusak rumah, mengancam, memukul, dan berbagai tindak teror lainnya. Keberadaan kelompok R2 dari luar di desa tersebut tidak selamanya bertahan karena mereka harus pulang ke desa masing-masing. Maka kesempatan inilah yang digunakan oleh Kubu R1 melakukan balas dendam dengan mendatangkan Satgas Hamzanwadi dari luar desa. Kelompok R1 yang berasal dari luar desa juga melakukan aksi yang sama.

Berdasarkan fakta yang demikian menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan seperti penyerangan, pengerusakan, dan pemukulan bukan dari penduduk desa setempat, tetapi dilakukan oleh pasukan dari luar desa yang mereka undang untuk menjaga dan membantu mereka ketika terancam. Aksi saling balas ini akhirnya melahirkan kerusuhan massal yang melibatkan ribuan orang. Dari kerusuhan ini puluhan orang meninggal, ratusan orang terluka, ratusan rumah dibakar dan dirusak, serta ratusan orang mengungsi. Berikut adalah penjelasan tentang rangkaian peristiwa konflik dan kekerasan yang terjadi di beberapa desa selama lima tahun sejak 1998-2002.

Kerusuhan di Kota Pancor (1998)

Sejak wafatnya Tuan Guru Zainuddin di Pancor tahun 1997, organisasi NW mengalami krisis akibat konflik politik antara elit-elit NW. Krisis politik di kalangan elit secara langsung berpengaruh pada stabilitas Desa Pancor sebagai pusat organisasi, apalagi sebagian elit-elit yang terlibat konflik dan kekerasan adalah aktor-aktor lokal yang berasal dari Pancor. Selama hidup Tuan Guru Zainuddin, Desa Pancor tidak pernah menghadapi konflik komunal yang besar sejak

peristiwa penyerangan komunitas China dan anggota PKI tahun 1965 oleh masyarakat di Lotim. Namun setelah wafatnya, konflik komunal muncul secara terbuka seperti konflik NW dan konflik Ahmadiyah di Pancor (2002). Semasa hidupnya juga tidak pernah terjadi perang saudara di Pancor, apalagi perang saudara antara jemaahNW.

Konflik internal NW tidak dapat dihindari karena pro dan kontra hasil Muktamar ke-10 di Praya di mana kedua kubu gagal dalam *sharing* kekuasaan. Pertanyaannya adalah kenapa masyarakat Pancor begitu marah dengan pendukung R2? Saya berargumen bahwa kerusuhan antara jemaahNW di Pancor tidak murni karena persoalan NW, tetapi terdapat faktor-faktor lain sebagai pemicu di balik perstiwa konflik tersebut. Konflik NW hanyalah pintu masuk untuk meluapkan rasa emosi yang telah lama terpendam di kalangan masyarakat dan elit-elit NW dari Pancor. Meskipun di permukaan tampak bahwa kerusuhan ini tidak lepas dari pengaruh sosio-politik NW sebagai pemicu kerusuhan di Pancor, akan tetapi saya ingin mencari lebih dalam tabir di balik tragedi yang sangat mengerikan tersebut.

Membaca peta politik elit-elit NW, khususnya di Pancor, secara umum mereka terbagi menjadi tiga kubu, yaitu Kubu R1, R2, serta sebagian kecil kubu yang mengaku netral. Sebagian besar masyarakat dan elit-elit NW dari Pancor mendukung Kubu R1 dan hanya sebagian yang mendukung Kubu R2. Keberpihakan kepada Kubu R1 disebabkan karena rasa kasihan kepada R1 yang mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminatif di dalam NW. Pada waktu yang bersamaan suami R1, Syubli, berasal dari Pancor dan representasi simbolik kekuatan politik masyarakat Pancor. Maka secara emosional, elit-elit NW dari Pancor lebih dekat ke Kubu R1. Faktor lain adalah masyarakat Pancor tidak suka

dengan sikap feodalisme suami R2, Wiresentane, sehingga tidak ada pilihan kecuali mendukung Rauhun. Perbedaan inilah yang sering membuat hubungan keluarga R2 tidak harmonis dengan masyarakat Pancor. Pendapat yang berbeda dari Kubu R2 yang mengatakan bahwa ketidakcocokan masyarakat Pancor dengan Wiresentane karena masyarakat Pancor tidak ta'at kepada Tuan Guru Zainuddin. Dalam sejarahnya, masyarakat Pancor pernah mengusir Tuan Guru Zainuddin ketika mendirikan madrasah di awal kepulangannya dari Mekah. Dengan kata lain, mereka tidak terlalu kuat ke-NW-annya mengingat tidak semua orang Pancor adalah bagian dari jemaahNW. Terlepas dari pro dan kontra tentang gaya kepemimpinan Wiresentane dan relasinya dengan masyarakat Pancor, pada kenyataanya Kubu R2 lebih banyak didukung oleh elit-elit dari luar Pancor. Pada masa hidup Tuan Guru Zainuddin, elit-elit NW dari luar Pancor memperoleh akses yang sama dengan elit-elit dari Pancor. Akses yang terbuka di NW ini membuat tokoh-tokoh dari luar Pancor cukup sukses membangun karir di NW, bahkan mereka lebih menonjol dibanding elit-elit dari Pancor.[17]

Kedekatan Wiresentane dengan tokoh-tokoh dari luar Pancor semakin mempermudah akses mereka di NW. Dukungan tokoh luar ini juga secara tidak langsung memperkuat posisi Kubu R2. Elit-elit dari Kubu R2 lebih banyak mengisi jajaran kepengurusan di NW (Mugni 2005; Nazri 2000). Dominasi kelompok R2 inilah yang menimbulkan tekanan dan kecemburuan sosial bagi Kubu R1 termasuk mereka yang berasal dari Pancor. Tekanan dari Kubu R2 semakin terasa ketika terjadi pemecatan secara sepihak terhadap elit-elit NW dari Kubu R1, khususnya pemecatan Syubli, Dosen STKIP

[17] Tokoh-tokoh besar NW sebagian besar berasal dari luar Pancor. Sebagian dari mereka tinggal dan menetap di Pancor, selain mengajar mereka juga berbisnis mendirikan toko-toko di Pancor. TGH. Mahmud Yasin, TGH. Lalu Anas Hasyri dan TGH. Tahir Azhari adalah orang-orang yang tergolong sukses di Pancor.

dan guru-guru yang berasal dari Pancor (Nazri 2000: 8). Pemecatan ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan elit-elit R1 yang berasal dari Pancor. Mereka menilai pemecatan tersebut sarat dengan muatan politik elit-elit dari Kubu R2. Munculnya istilah kelompok '*Pancor Bersatu*' merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi Kubu R2. Meskipun muncul pro dan kontra tentang eksistensi kelompok Pancor Bersatu, namun dalam kenyataanya yang melakukan aksi kekerasan terhadap pendukung R2 adalah masyarakat Pancor.[18]

Konflik dan kekerasan di Pancor tidak dapat dikendalikan pasca wafatnya Tuan Guru Zainuddin dan terpilihnya R2 sebagai pemimpin NW yang baru pada 1998. Sebelum terjadi penyerangan besar-besaran pada tahun 1998, berbagai letupan dan gesekan kecil terjadi antara pendukung R1 dan R2. Di antara letupan tersebut adalah ketika pendukung Kubu R2 melakukan pemakaman Wiresentane yang meninggal dua bulan setelah wafatnya Tuan Guru Zainuddin. Pendukung R1 menggagalkan upaya pemakaman Wiresentane di samping makam Tuan Guru Zainuddin. Kedua pendukung saling berhadap-hadapan, tetapi tidak ada korban dalam bentrokan ini. Kedua putri Tuan Guru Zainuddin bertemu dan mampu mengatasi masalah ini. Akhirnya beliau dikuburkan di dekat makam istri dan keluarga Tuan Guru Zainuddin, bukan di samping persis makamnya.

Letupan yang lain adalah penyerangan terhadap tokoh-tokoh Kubu R2 menjelang waktu perayaan acara hari ulang tahun (Hultah)

---

[18] Maksud dan tujuan dari istilah 'Pancor Bersatu' masih misterius karena tidak ada informasi yang pasti tentang ini. Dari kubu R2 memandang kelompok Pancor Bersatu adalah gerakan yang mau mengusir orang-orang di luar Pancor terutama dari kubu R2. Sedangkan dari kubu R1 berpendapat bahwa Pancor Bersatu hanyalah nama grup yang ingin menyatukan lapangan sepak bola yang terbagi akibat pemekaran desa Pancor. Entah kebetulan atau tidak istilah Pancor Bersatu muncul kembali ketika konflik NW terjadi.

NW ke-63 di Pancor. Kedua kubu sama-sama mengadakan Hultah tetapi pada hari yang berbeda. Ini pertamakali Hultah diadakan secara terpisah di dalam organisasi NW yang biasanya dilakukan sekali dalam satu tahun dan dihadiri oleh jemaahNW secara keseluruhan. Kubu R1 mengadakan Hultah NW terlebih dahulu pada hari Ahad 20 September 1998 yang dihadiri oleh para pendukungnya. Satu bulan kemudian, Kubu R2 yang mengadakan Hultah NW pada 4 Oktober 1998 yang juga dihadiri oleh para pendukungnya (Mugni 2013: 141; Nazri 2000: 20). Menurut informasi dari pihak R1, ketika Kubu R1 mengadakan Hultah muncul surat edaran dari Kubu R2 yang melarang jemaahNW hadir di acara Hultah tersebut. Pada acara Hultah R2, massa dari Kubu R1 membalas dengan melakukan teror terhadap peserta yang datang dari luar Pancor. Mereka juga memblokir jalan dan menghentikan saluran air sehingga para peserta tidak bisa mandi dan mencuci pakaian (Mugni 2013; Nazri 2000).

Meskipun tantangan Hultah ini sangat berat, tetapi pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Sebelum acara Hultah Kubu R2, massa dari Pancor terus menyerang tokoh-tokoh yang dianggap fanatik dan setia dengan Kubu R2. Beberapa tokoh yang dikenal dekat dengan R2 menjadi target seperti TGH. Lalu Anas Hasyri, TGH. Mahmud Yasin, dan TGH. Tahir Azhary. TGH. Haysri menjadi target karena dinilai sering mendiskreditkan masyarakat Pancor di pengajian-pengajiannya. Ungkapan TGH. Hasyri membuat tersinggung dan marah masyarakat dan tokoh-tokoh dari Pancor dan menjadikannya sebagai target. Pada 6 September 1998, TGH. Hasyri berkunjung ke rumah H. Pihiruddin, tokoh masyarakat Pancor, bermaksud meminta maaf atas ungkapan beliau sebelumnya pada waktu pengajian. Pemuda-pemuda Pancor yang mendengar informasi atas kedatangannya tersebut langsung mengepung rumah H. Pihiruddin yang terletak di sebelah selatan Masjid At-Taqwa Pancor (Mugni 2013; 144; Nazri 2000: 14). Ratusan massa

berkumpul dan mengepung rumah dan menunggu TGH. Hasyri keluar dari rumah dengan tujuan untuk menghakiminya. Tuan Guru Hasyri akhirnya apat diselamatkan oleh Kapolres Rumadi Ma'mun dari kepungan massa dengan menyamar menggunakan pakaian dan helm polisi untuk keluar dari rumah yang telah terkepung (Mugni 2013; Nazri 2000).

Massa yang sadar targetnya telah pergi akhirnya membubarkan diri pada jam 12.000 malam. Massa ternyata tidak benar-benar membubarkan diri, tetapi mereka menyusun gerakan lain untuk melanjutkan aksinya mencari Tuan Guru Hasyri ke rumahnya. Karena tidak menemukan targetnya para demonstran melempari rumahnya dengan batu sehingga atap dan kacanya rusak. Para demonstran juga menyerang Toko Mebel Hikam milik Tuan Guru Mahmud Yasin. Toko mebel yang berlantai dua ini rusak parah dan semua isinya dikeluarkan dan dibakar di tengah jalan pada malam hari. Meskipun mengambil dan membakar barang-barang toko, namun tidak terjadi penjarahan. Aparat keamanan datang untuk mengamankan situasi dan membubarkan para demonstran (Mugni 2013: 142; Nazri 2000: 15).

Aksi demonstran kembali terjadi pada malam selanjutnya setelah shalat Isya' dengan jumlah massa yang lebih besar mencapai ratusan, bahkan ribuan orang. Mereka tidak puas sebelum menemukan kedua tokoh tersebut dan mengganti targetnya ke tokoh-tokoh yang lain yang dianggap dekat dengan R2, yaitu TGH. Tahir Azhari, seorang pengusaha sukses dan tokoh NW. Massa menyerbu rumahnya dan berteriak memintanya untuk keluar. Karena tidak mau keluar, massa mulai melempar rumahnya dengan batu. Menghadapi situasi seperti ini, sopir TGH. Tahir Azhari berinisiatif menjemput Ummi Rauhun supaya menenangkan massa yang sedang mengamuk. Kehadiran R1 cukup berpengaruh, massa mulai tenang dan membubarkan

diri setelah mendengar seruannya. Sebagaimana dikutip oleh Nazri (2000:16), Ummi Rauhun menyarankan untuk mengontrol diri supaya tidak melakukan sesuatu yang buruk yang dapat merusak nama baik masyarakat Pancor.

Massa membubarkan diri setelah mendengar nasihat R1. Namun setelah R1 pulang ke rumah, massa kembali lagi menyerang rumah TGH. Tahir Azhari. Menurut Nazri untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk Dandim 1615 Letkol Inf. Maryanto meminta kembali bantuan R1 menenangkan massa menggunakan pengeras suara dari masjid. R1 kembali memberikan saran untuk tidak melakukan tindakan penyerangan. Langkah ini sangat efektif karena emosi massa mulai terkendalikan setelah mendengar suara R1 dari masjid. Setelah membubarkan diri dan R1 pulang ke rumahnya, massa bergerak lagi melanjutkan aksinya. Kali ini, mereka membagi gerakan menjadi dua kelompok, kelompok pertama bergerak ke arah Timur dan kelompok kedua bergerak ke arah Utara (Nazri, 2000: 17). Kelompok pertama menyerang kembali Toko Mebel Hikam milik Tuan Guru Yasin dengan membakar habis isi toko. Sementara kelompok yang lain menyerbu Toko Hikmah milik TGH. Tahir Azhari yang menjual pakaian dan buku-buku. Massa juga menjarah barang-barang di dalam toko terutama pakaian busana Muslim. Melihat situasi yang semakin gawat, Dandim menjemput kembali R1 untuk menenangkan massa. R1 di taruh di dalam kendaraan patroli yang dilengkapi dengan pengeras suara. Dalam orasinya, R1 terus mencoba untuk menenangkan massa, namun usaha kali ini gagal karena para demonstran tidak peduli. Aksi demonstran kali ini berhenti sekitar jam 12. 00 malam setelah merusak dan membakar isi toko.

Berdasarkan data di atas, saya berargumen bahwa kerusuhan di Pancor selain karena faktor sosial-politik di internal NW, juga

adanya tekanan dan kecemburuan sosial kepada elit-elit di luar Pancor yang banyak mendominasi posisi-posisi penting di dalam dan luar organisasi NW. Elit-elit Pancor merasa terpojok dengan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kelompok non-Pancor khususnya pendukung R2. Menurut Tuan Guru Rapi'i Akbar, tokoh Pancor mengatakan, 'gerakan para demonstran dari Pancor ini merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat Pancor yang telah lama terpendam. Para tuan guru pendukung R2 seringkali mengeluarkan fatwa yang tidak berpihak bahkan mendiskreditkan orang-orang Pancor' (Lihat Nazri 2000).

Kerusuhan di Dusun Gotong Royong (2000)

Kerusuhan di Pancor tahun 1998 hanyalah babak awal dari berbagai kerusuhan di tengah komunitas NW. Gerakan massa pro R1 telah berhasil memaksa Kubu R2 meninggalkan Pancor kemudian hijrah ke Kalijaga. Peristiwa kekerasan yang terjadi di Pancor rupanya masih menyisakan berbagai persoalan selain persoalan organisasi juga rasa dendam dan sakit hati para pendukung R2. Ini terlihat di setiap pengajian yang dilakukan oleh kelompok R2 yang selalu membahas peristiwa kekerasan di Pancor dan pengalaman buruk mereka selama peristiwa tersebut. Wacana-wacana kekerasan dan konflik terus mengalami reproduksi dan internalisasi oleh para tuan guru dan elit-elit R2 yang menjadi korban kekerasan. Secara bergantian mereka menceritakan peristiwa yang mengerikan kepada jama'ahnya dan menjelekkan Kubu R1 yang dinilai telah melakukan 'kekerasan'. Pengajian tidak lebih sebagai forum untuk saling menyerang dan memprovokasi massa dari masing-masing kubu. Internalisasi nilai-nilai konflik dan kekerasan kepada jemaahNW memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap perilaku masyarakat (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012).

Kegiatan pengajian yang dilakukan oleh kedua kubu di luar Pancor menjadi persoalan baru karena kedua kubu mempunyai massa pendukung di desa-desa tempat mereka mengadakan pengajian. Massa di bawah inilah yang sering bentrok karena dimanfaatkan untuk membela kubu masing-masing. Pola konflik yang terjadi secara keseluruhan adalah sama; mereka saling menyerang ketika melakukan pengajian. Peristiwa kerusuhan di Desa Gotong Royong merupakan peristiwa pertama yang terjadi di luar Desa Pancor. Kubu R1 merencanakan pengajian di Dusun Gotong Royong yang dipimpin oleh Tuan Guru Bajang pada siang hari setelah mengisi pengajain di Lendang Bedurik. Pengajian di Lendang Bedurik berjalan lancar, tidak ada keributan antara jemaahNW karena mayoritas jemaahNW di dusun tersebut adalah pendukung R1. Berbeda kondisinya di Dusun Gotong Royong, di mana terdapat Kubu R2 dan mereka menentang dan menghalangi pengajian Kubu R1.

Pendukung R2 tidak mengizinkan pengajian Kubu R1 yang akan dilakukan di Masjid Gotong Royong. Alasan mereka tidak memberikan izin karena tidak mau muncul masalah di dusun tersebut. Pada saat Tuan Guru Bajang tiba di dusun ini dan mau mengadakan pengajian di masjid, para pendukung Kubu R2 telah berjaga-jaga di dalamnya. Mereka mengunci masjid dengan gembok dan menaruh lumpur di halaman masjid supaya jemaahR1 tidak bisa menggunakan masjid untuk pengajian. Aksi Kubu R2 ini memancing emosi pendukung R1 sehingga terjadi perkelahian antara pendukung. Kubu R1 tetap ingin mengadakan pengajian karena sudah diagendakan dan apa yang dilakukan tersebut dinilai perbuatan mulia. Terjadi aksi saling pukul antara kedua pendukung karena Kubu R2 tetap berupaya menghalangi pengajian. Pendukung R2 yang terdiri dari beberapa orang tidak mampu menghadapi pendukung R1 yang jumlahnya jauh lebih

banyak. Akhirnya gembok pintu masjid dapat dibuka dan mereka membersihkan masjid kemudian melakukan pengajian. Setelah pengajian mereka shalat bersama yang diimami langsung oleh Tuan Guru Bajang. Peristiwa kerusuhan ini membuat kondisi masyarakat di dusun tersebut semakin mencekam. Pendukung R1 yang terdapat di dusun itu khawatir kalau pendukung R2 akan melakukan aksi balasan. Meskipun tidak terjadi aksi balasan tetapi suasana di dusun itu terus memanas. Wacana konflik dan kekerasan terus mengalir di masyarakat. Tidak ada korban jiwa di dalam peristiwa ini, hanya beberapa orang terluka. Namun peristiwa ini berakhir begitu saja tanpa rekonsiliasi antara pendukung di tingkat desa.

Saya melihat bahwa terdapat kekhawatiran tokoh-tokoh R2 terhadap pengajian Tuan Guru Bajang yang dikenal cerdas, mereka khawatir akan mempengaruhi massa pendukungnya untuk berpaling ke Kubu R1. Selain itu, saya juga melihat adanya tarik ulur kepentingan elit-elit di tingkat desa dengan di pusat. Mereka yang mengorganisir pengajian di desa tersebut tentu merupakan sebuah prestasi bagi dirinya karena dia akan memperoleh pujian dari pemimpin NW di pusat. Sebaliknya, pemimpin NW juga memiliki kepentingan yang sama bahwa mereka membutuhkan dukungan masyarakat bawah untuk kepentingan politik mereka.

Kerusuhan di Desa Kesik (2000)

Setelah peristiwa di Desa Gotong Royong, kerusuhan juga terjadi di Desa Kesik, kecamatan Masbagik. Pola kerusuhan yang terjadi di Desa Kesik sangat mirip dengan peristiwa Gotong Royong. Kubu R1 akan mengadakan pengajian pada bulan Mei tahun 2000 di Madrasah Tsanawiyah NW di desa ini. Rencana ini ditentang oleh pengurus madrasah karena sebagian besar dari mereka adalah pendukung R2. Pihak R1 telah melayangkan surat izin kepada

pengurus madrasah dan aparat desa untuk acara pengajian tersebut. Menurut versi dari Kubu R2, pihak madrasah dan aparat menolak izin pengajian karena anak-anak akan menghadapi ujian. Namun pihak R1 tetap pada rencana ingin mengadakan pengajian di madrasah tersebut.

Yang menarik adalah sebelum jemaahdan para pendukung R1 datang ke tempat pengajian, madrasah dan sekitarnya sudah dikuasai oleh pendukung R2. Pendukung R2 yang terdapat di madrasah tidak hanya berasal dari desa tersebut, tetapi juga dari luar desa. Mereka diundang oleh elit-elit R2 ke madrasah untuk mengikuti pengajian R2 yang dipimpin oleh Ummi Raihanun. Jadi ada dua pengajian yang akan berlangsung di sekolah ini. Informasi lain yang berkembang adalah para pendukung R2 sangaja diundang untuk menjaga madrasah supaya tidak digunakan sebagai tempat pengajian oleh pihak R1. Jika madrasah dijadikan tempat pengajian, maka secara simbolik madrasah akan diambil alih oleh Kubu R1. Alasan inilah yang digunakan untuk menghalangi pengajian tersebut, sedangkan Kubu R1 sudah siap mengadakan pengajian. Ketika rombongan jemaahR1 datang ke tempat pengajian terjadi aksi saling lempar batu, kedua jemaahsaling berhadap-hadapan, mereka saling lempar, dan saling pukul. Aksi saling lempar ini menyebabkan luka di antara pendukung kedua belah pihak. Kerusuhan ini terjadi sebelum pengajian Tuan Guru Bajang berlangsung.

Hampir dua jam terjadi kerusuhan antara kedua pendukung sehingga pengajian Kubu R1 harus ditunda. Polisi datang untuk mengamankan kedua belah pihak. Meskipun terjadi keributan Kubu R1 tetap mengadakan pengajian secara damai di desa itu. Mereka mengganti tempat pengajian ke sebuah bangunan penggilingan padi (huler). Sementara pendukung Kubu R2 tetap menunggu madrasah hingga acara pengajian R1 selesai.

Dari kejadian di atas saya melihat adanya kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk mengadu para jemaahNW supaya saling berkelahi dan melakukan tindak kekerasan. Kenapa pengajian harus dilakukan pada waktu yang sama, sementara di tempat madrasah tidak ada pengajian sama sekali. Saya berpendapat, para jemaahdari Kubu R2 sengaja diundang untuk menjaga madrasah supaya tidak digunakan oleh Kubu R1. Raihanun yang disebut akan mengisi pengajian tidak ada di tempat kejadian, hanya anak buah dan Hizbullah yang hadir di sana.

Kerusuhan di Dusun Paok Lombok jilid 1 (2000)

Kerusuhan antara jemaahNW terus meluas ke berbagai wilayah di Lombok Timur. Ketika terdapat dua tokoh dari kubu yang berbeda maka kemungkinan besar konflik akan terjadi di desa tersebut. Dusun Paok Lombok yang terletak di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga adalah salah satu dusun yang terkena imbas konflik NW. Konflik di dusun ini tidak kalah menariknya dari konflik dan kerusuhan di beberapa desa sebelumnya karena aktor-aktor yang terlibat di dusun ini masih mempunyai hubungan darah dan keluarga. Konflik di dusun ini merembet ke dusun-dusun lain akibat aksi saling dukung para jemaahantara kedua kubu. Dusun Majuet yang terletak sebelah Barat Paok Lombok merupakan basis massa R2. Jemaahdi dusun ini ikut membantu jemaahR2 yang di Paok Lombok ketika terlibat konflik. Begitu juga Desa Tababan sebelah Barat Dusun Majuet adalah basis Kubu R1. Mereka ikut membantu jemaahdari Kubu R1 yang mengalami serangan dari Kubu R2.

Konflik NW yang muncul di Paok Lombok telah mengubah wajah dusun ini yang sebelumnya dikenal damai dan tenang menjadi kacau dan mengerikan. Konflik NW merupakan bencana besar bagi

masyarakat Paok Lombok. Konflik NW di tingkat pusat mempunyai pengaruh kuat terhadap konflik lokal di dusun ini karena beberapa tokoh agama dari desa ini aktif di kepengurusan NW di pusat. Saya tidak menafikan faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Paok Lombok termasuk faktor internal persaingan elit-elit agama di dusun tersebut, namun tidak dapat dipungkiri kepentingan sosial-politik NW sangat kuat menjadi pemicu konflik dan kekerasan di dusun ini.

Jauh sebelum peristiwa kerusuhan Paok Lombok jilid 2 yang disebabkan karena perpisahan pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad di 2002, bibit-bibit konflik dan perpecahan sudah mulai muncul di Paok Lombok di awal-awal konflik NW tahun 1999-2001. Isu tentang perpecahan NW di tingkat pusat mengalami politisasi dan menjadi komoditas politik lokal di Dusun Paok Lombok. Peristiwa yang paling awal terjadi adalah ketika TGH. Zaini Abdul Hannan (dari Kubu R2) memberikan kritikan kepada TGH. Junaidi (dari Kubu R1) tentang adanya kekeliruan yang dilakukan di dalam khutbah Jum'atnya yang tidak menyebutkan kata-kata wasiat, padahal itu adalah salah satu rukun khutbah. Pendapat dan kritikan TGH. Zaini menjadi kontra-produktif di tengah-tengah masyarakat karena tidak disampaikan langsung kepada TGH. Junaidi. TGH. Zaini memberitahu pendukungnya jika terdapat kekurangan di dalam khutbah tersebut dan shalatnya dinilai tidak sah dan harus diqadha. Para pendukungnya kemudian meyakini karena shalat Jum'at yang dilakukan tidak sah, maka shalat Jum'at harus diganti dengan shalat Zuhur.

Isu untuk mengqadha shalat Jum'at terus berkembang di masyarakat, sementara masyarakat yang lain menjadi bingung khususnya pendukung Tuan Guru Junaidi. Sedangkan TGH. Junaidi berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan sudah benar

karena salah seorang imam mazhab fiqh tidak mengharuskan untuk menyebutkan kata-kata wasiat. Sayangnya, kedua tokoh agama yang disegani ini tidak pernah bertemu langsung mendiskusikan persoalan ini secara terbuka. Mereka hanya saling mengkritisi dari jarak jauh dan berada di balik layar. Wacana ini berkembang secara liar begitu saja di tengah-tengah masyarakat sehingga melahirkan ketegangan antara pendukung. Oleh karena itu, isu ini menjadi bola mentah yang dijadikan komoditas politik oleh elit-elit tertentu yang mempunyai kepentingan. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu konflik antara pendukung kedua tokoh yang berseberangan dalam afiliasi ke-NW-annya. TGH. Zaini dikenal sebagai tokoh yang setia di Kubu R2, sedangkan TGH. Junaidi memilih afiliasi ke R1 karena kedekatan emosionalnya dengan Tuan Guru Bajang, sesama alumni Universitas Al-Azhar Kairo. Sebelum perpecahan di tingkat pusat kedua tokoh ini dikenal cukup dekat dan sama-sama mengajar di Pancor.

Perdebatan tentang rukun khutbah Jum'at menjadi pemicu konflik secara tidak langsung. Masyarakat terjebak pada perpecahan mendukung tuan guru masing-masing. TGH. Khairuddin, salah satu tuan guru senior di dusun ini, mencoba menengahi persoalan ini dan berpendapat tidak perlu mengqadha shalat Jum'at karena dinilai sah menurut mazhab selain Syafi'i. Pendapat ini tidak dihiraukan dan diterima oleh masyarakat, khususnya pendukung TGH. Zaini. Pada shalat Jum'at berikutnya, masyarakat langsung meminta klarifikasi pandangan TGH. Khairuddin secara terbuka sebelum shalat Jum'at dimulai. TGH. Zaini berusaha memberikan pendapatnya, tetapi tidak mau didengar oleh pendukung TGH. Junaidi sehingga membuat suasana semakin tegang.

Bola panas khutbah ini merembet ke persoalan konflik NW karena terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang

dilakukan oleh para tuan guru di kubu NW masing-masing. Konflik ini tidak hanya melibatkan mereka berdua (TGH. Junaidi dan TGH. Zaini), tetapi juga tuan guru yang lain karena berbeda dukungan NW seperti TGH. Khairuddin, TGH. Salehuddin, TGH. Athar Azhari, TGH. Nasruddin, H. Hisbullah, H. Hasan, dan H. Ali Firdaus. Kerusuhan mulai muncul ketika pengajian mingguan yang dipimpin secara bergiliran oleh Tuan Guru Khaeruddin dan Tuan Guru Zaini tidak lagi mendapat dukungan dari masyarakat Paok Lombok khususnya massa kubu TGH. Junaidi. Pengajian mingguan pada hari Ahad yang biasanya dipimpin oleh TGH. Zaini berusaha digagalkan oleh pendukung TGH. Junaidi dan tuan guru-tuan guru yang lain yang pro R1. Gonjang-ganjing adanya usaha untuk menggagalkan pengajian terus berkembang di masyarakat. Alasan kelompok penentang pengajian adalah karena pengajian dianggap politis, sarat dengan muatan politik NW khususnya dari Kubu R2 karena sebagian besar jemaahyang hadir di pengajian tersebut besar berasal dari luar desa yang notabenenya pro R2.

Menanggapi adanya usaha penggagalan pengajian mingguan tidak menyurutkan niat Tuan Guru Zaini untuk tetap mengadakan pengajian tersebut. Beliau berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang benar. Pada waktu pengajian hari Ahad, pagi-pagi telah berkumpul beberapa jemaahpengajian dari berbagai desa di masjid untuk ikut pengajian. Ternyata kelompok penentang pengajian juga mulai berdatangan berusaha menggagalkan pengajian tersebut. Berbagai cara dilakukan untuk menggagalkan pengajian, ada yang menarik dan melipat tikar yang digunakan para jemaahpengajian dan kemudian membuangnya ke tempat kencing, ada yang menghidupkan musik *jangger* dengan *speaker* besar mengarah langsung ke masjid supaya pengajian terganggu, dan ada juga yang membawa senjata. Para jemaahpengajian yang juga masih keluarga tidak tinggal diam, mereka saling berebut tikar sehingga

terjadi ketegangan antara kedua pendukung. TGH. Salehuddin yang dikenal *pepadu* segera menolong para jemaahyang mengikuti pengajian dengan mendatangi masjid, dia menantang orang-orang yang menganggu pengajian. Selain itu muncul juga H. Ansori yang ingin membela TGH. Zaini karena faktor keluarga dan rasa kasihan. Sedangkan TGH. Zaini sendiri belum sempat hadir di pengajian, dia masih di rumahnya yang tidak jauh dari masjid. Mereka yang berkelahi ini masih memiliki hubungan darah dan keluarga.

Peristiwa ini langsung menyebar ke seluruh desa bahkan ke pusat organisasi NW melalui alat komunikasi HT. Kubu R2 yang mempunyai kelompok Barisan Hizbullah segera memberi bantuan ke tempat kejadian. Perlu diketahui bahwa Barisan Hizbullah memiliki anggota biasa dan anggota pasukan inti yang terlatih untuk tempur layaknya seorang tentara. Pasukan inti ini selalu siap datang mengamankan aset-aset NW termasuk para tokoh R2 dari serangan pihak luar. Sedangkan dari kelompok R1 juga memiliki pam swakarsa yang bernama Satgas Hamzanwadi. Hampir sama dengan Hizbullah, Satgas Hamzanwadi juga memiliki pasukan tempur yang bertugas mengamankan aset-aset NW dan tokoh-tokoh pro R1 yang dijadikan target serangan. Mendengar informasi adanya penyerangan terhadap pengajian TGH. Zaini, Pasukan Hizbullah berdatangan ke Dusun Paok Lombok. Mereka mengejar orang-orang yang dinilai telah melakukan provokasi. Dari peristiwa ini terjadi pemukulan dan aksi saling kejar-mengejar. Pemukulan ini mendapat reaksi keras dari pihak keluarga karena dinilai berlebihan. Pada waktu itu kondisi desa sangat mencekam selama beberapa minggu karena Pasukan Hizbullah terus berpatroli di dusun ini untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balik dari kelompok penentang pengajian. Kehadiran Pasukan Hizbullah di satu sisi menjadi keuntungan bagi Kubu R2, tetapi di sisi lain menjadi tekanan bagi pendukung Kubu R1. Tidak ada korban jiwa dalam

kerusuhan ini, hanya beberapa orang terluka.

Peristiwa ini merupakan tahap awal kerusuhan di Paok Lombok sebelum peristiwa puncak pada tahun 2002. Peristiwa ini mendapat perhatian dari akademisi Yogyakarta yang berasal dari Paok Lombok. Setelah peristiwa ini mereka melakukan Seminar tentang *Masa Depan Pesantren Unwanul Falah Paok Lombok*, namun seminar ini tidak membahas sama sekali persoalan yang sedang terjadi di masyarakat. Konflik ini berlarut-larut tanpa penyelesaian dan rekonsiliasi antara pelaku konflik. Zahidi dan beberapa anak muda dari dusun ini berencana untuk mempertemukan semua tokoh yang terlibat konflik. Dia membentuk sebuah forum rekonsiliasi yang kegiatannya diisi dengan zikir dan saling memaafkan. Setelah disebarkan undangan, sekelompok orang berusaha menggagalkan acara ini karena adanya kekhawatiran dan ketakutan terhadap langkah-langkah yang diambil dalam proses rekonsiliasi sehingga acara ini gagal total dan konflik terus berlanjut. Tentu sangat disayangkan adanya upaya penggagalan rekonsiliasi ini karena konflik di dusun ini tidak pernah selesai. Kenyataanya, konflik justru semakin parah dari hari ke hari, kedua kelompok terus mengalami ketegangan hingga terjadi perang besar di desa tersebut. Konflik ini mengalami puncak di tahun 2002.

Kerusuhan di Desa Kelayu (2000)

Tragedi di Desa Gotong Royong, Kesik, dan Paok Lombok jilid 1 ternyata berlanjut ke Desa Kelayu Kecamatan Selong, Lombok Timur. Desa Kelayu terletak 2 km ke arah Selatan Desa Pancor. Desa Kelayu merupakan salah satu desa yang sangat penting di dalam sejarah NW karena banyak tokoh-tokoh penting NW berasal dari desa tersebut. Tuan Guru Abdul Hamid menyebut orang-orang Kelayu sebagai kelompok Ansor karena jasa-jasa mereka membantu

pengembangan organisasi NW di Desa Pancor. Konflik ini berbeda dengan konflik sebelumnya karena yang mau mengadakan pengajian adalah Kubu R2. Raihanun dijadwalkan mengadakan pengajian pada hari Kamis 20 Juli 2000 di Pondok Pesantren Sa'adatain NW Kelayu. Pengajian R2 ini mendapat tantangan serius dari Kubu R1 yang tidak memberikan izin diadakannya pengajian di madrasah.

Membaca peta politik di Desa Kelayu, elit-elit NW terbagi menjadi dua, sebagian pro R1 dan sebagian pro R2. Sedangkan jemaah NW juga terbagi dua dan mayoritas dari jemaahNW merupakan pendukung R1. Pengurus madrasah di desa ini sebagian besar adalah pro R1 sehingga mereka tidak memberikan izin pengajian dari Kubu R2 di madrasah tersebut. Menurut Kubu R1 (2008), masyarakat Kelayu tidak pernah diinformasikan tentang rencana pengajian tersebut. Pengajian dilakukan dengan tiba-tiba dan sedikit memaksa, padahal pihak pengurus madrasah sudah tidak memberikan izin atas pengajian ini. Pada waktu yang bersamaan tokoh-tokh R1 tidak pernah dilibatkan untuk mendiskusikan acara pengajian, mereka hanya mendengar rencana pengajian dari pengumuman lewat masjid dan mushalla jika pengajian Kubu R2 akan berlangsung di Kelayu.

Informasi berbeda dari Kubu R2 yang mengatakan bahwa dua minggu sebelum hari pelaksanaan pengajian telah dibentuk panitia yang diketuai oleh Muh. Zaini. Sebagai ketua, Zaini mendatangi rumah-rumah pengurus yayasan untuk menginformasikan mereka tentang rencana pengajian dan sekaligus meminta izin atas rencana tersebut. Menurut pihak R2, mereka sudah mendapat izin dari Tuan Guru Hamid secara lisan, sedangkan H. Alimuddin Saefuddin tidak mau menerima tim panitia yang datang kerumahnya. Selain mendatangi rumah pengurus, pihak panitia juga bersurat secara formal kepada pengurus pondok pesantren. Panitia juga

memberitahukan kepada pihak aparat pemerintah termasuk kepada lurah dan Kapolsek Selong. Menurut Mugni (2013: 196) bahwa surat permakluman pengajian yang dimasukkan kepada pengurus ini tidak langsung mendapat jawaban .

Sehubungan dengan tidak adanya jawaban dari pengurus yayasan dan madrasah, panitia pengajian R2 mengasumsikan jika pengajian telah disetujui. Namun pada hari pelaksanaan pengajian pengurus yayasan dan madrasah memberikan jawaban dengan menolak usulan acara pengajian. Sementara undangan telah disebarkan oleh Kubu R2 kepada para jama'ahnya sehingga tidak ada waktu lagi untuk membatalkan acara itu. Terlepas adanya perbedaan informasi yang muncul dari kedua kubu, pengajian yang direncanakan berlangsung pada pukul 14.00 siang tersebut tidak bisa terlaksana. Massa dari Kubu R2 yang datang dari berbagai desa tidak bisa masuk madrasah karena pintu gerbang digembok oleh pendukung R1 yang sudah berjaga-jaga di dalam madrasah dan siap bertempur jika Kubu R2 berhasil masuk ke dalam madrasah.

JemaahKubu R2 yang telah datang ke madrasah berupaya membuka gembok madrasah dengan berbagai cara termasuk menggunakan ilmu, tetapi tidak berhasil. Kedua kubu sama-sama menggunakan ilmu kesaktian, baik untuk membuka dan mempertahankan gembok. Salah seorang saksi melihat Pasukan Hizbullah menggunakan 'ilmu' untuk membuka gembok tetapi tidak berhasil. Sedangkan dari Kubu R1 juga menggunakan ilmu untuk menjaga supaya gembok tidak bisa dibuka. Massa R2 yang tidak berhasil membuka gembok tetap bertahan hingga larut malam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, hanya beberapa orang terluka karena aksi saling lempar oleh kedua massa. Salah seorang tentara dari pihak R1 terlepas giginya akibat pantulan lemparan batu oleh Kubu R2. Ketika mulai malam aksi saling lempar semakin tidak

terkontrol. Melihat potensi terjadinya kekerasan yang lebih besar, pihak panitia pengajian meminta para jemaahmereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Aparat berhasil mengamankan keadaan sehingga kerusuhan massal tidak meluas.

Ummi Raihanun yang gagal dengan pengajiannya berada di rumah H. Shafari Asyari, salah satu tokoh NW dari Kelayu. Dia didampingi oleh Hayyi Nu'man dan tokoh-tokoh NW yang lain termasuk Syihabuddin Rahman, Abdurrahman Fajri, dan beberapa tuan guru. Mereka sudah berada di rumah H. Syafari sejak pukul 14.30-21.00. Rumah ini berjarak sekitar 200 meter dari Pondok Pesantren Sa'adatain tempat diadakannya pengajian. Ketika massa berangsur-angsur pulang para tokoh dari kedua kubu mengadakan pertemuan di Polres Lotim. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekda Lotim dan Camat Selong. Pertemuan ini berlangsung sampai larut malam dengan menghasilkan kesepakatan supaya madrasah tidak boleh lagi menjadi tempat pengajian karena berpotensi pada konflik dan kekerasan (Mugni 2013: 199).

Meskipun sudah melakukan pertemuan di Kantor Polres Lotim, tetapi massa dari Kubu R1 terlanjur kesal dan kecewa dengan tokoh-tokoh lokal yang menjadi panitia pengajian. Pada malam harinya sekelompok pemuda dari Kubu R1 melakukan aksi pengerusakan ke rumah-rumah panitia pengajian. Ust. Irfan, salah seorang panitia pengajian, menceritakan rumahnya diserang oleh sekelompok pemuda dengan melempar batu sehingga kaca pecah dan jendela rusak. Mereka juga berteriak meminta dirinya keluar rumah. Aksi pengerusakan ini sebanyak tiga kali mulai dari tengah malam hingga subuh. Akhirnya, setelah mereka pergi Ifan bersama istri dan anaknya pindah ke rumah keluarga mereka mencari perlindungan. Adapun jumlah rumah yang menjadi sasaran massa sebanyak tujuh buah. Sebagian rumah mengalami rusak ringan dan

satu rumah mengalami rusak berat, yaitu rumah Marzuki. Hingga sekarang Marzuki pindah ke desa lain karena tidak berani lagi tinggal di desa itu.

Rumah lain yang menjadi incaran massa adalah rumah Shafari Asyari, tokoh yang dikenal sangat dekat dengan R2. Menurut beberapa saksi yang tinggal di dekat rumahnya, di tengah malam sekelompok orang melempar rumahnya, tetapi tidak sampai rusak parah. Rumah Tuan Guru Abdul Kadir juga menjadi incaran massa. Mereka datang di tengah malam dan berteriak menyuruhnya keluar. Tuan Guru Kadir yang sudah mempersiapkan diri langsung keluar dan menghadapi mereka. Melihat dia keluar, kelompok pemuda tersebut membubarkan diri, mereka hanya melempar beberapa batu yang merusak genteng rumahnya. Tuan Guru Kadir (2008) menyayangkan adanya isu yang beredar tentang kematian dirinya di tengah masyarakat. Kabar itu sengaja dibuat oleh kelompok lawan supaya masyarakat pendukung R2 menjadi takut. Beberapa orang dekat Kadir datang ke rumah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Dari data di atas, pengajian lagi-lagi beralih fungsi sebagai media konflik dan kekerasan oleh kedua kubu. Terlihat muncul upaya untuk saling balas karena sebelumnya Kubu R1 yang diperlakukan seperti itu ketika mengadakan pengajian di Gotong Royong dan Desa Kesik. Sekarang gantian Kubu R2 yang kena getahnya karena mereka memaksa pengajian di wilayah kekuasaan Kubu R1. Menurut Tuan Guru Hamid (2008) bahwa 'Pengajian hanyalah kedok untuk mengambil alih madrasah, dan menunjukkan supremasi dan pamer jemaaholeh Kubu R2. Posisi Kelayu sangat vital di dalam NW, jika sampai takluk ke Kubu R2, maka mereka akan menguasai NW', kata Tuan Guru Hamid.

Kerusuhan di Desa Wanasaba (2002)

Sepanjang tahun 2000, 2001, dan 2002 kerusuhan demi kerusuhan terus terjadi antara jemaahNW. Pada tahun 2002 kerusuhan massal kembali lagi terjadi di Desa Wanasaba, Lombok Timur. Kerusuhan berawal ketika pihak R2 mengadakan pengajian pada acara peringatan anak Hultah NWDI ke-64 pada hari Ahad 20 September 2002 di lapangan umum Desa Wanasaba (Mugni 2013: 202). Menurut Tuan Guru Nasruddin (2008), selaku ketua panitia pengajian, bahwa masyarakat Wanasaba tidak mempermasalahkan acara tersebut dan semua persiapan sudah dilakukan secara matang dan maksimal. Panitia acara telah meminta izin kepada aparat desa dan aparat keamanan dan mereka mengizinkan acara tersebut. Panitia juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengurus pondok pesantren dan madrasah yang ada di dekat lokasi pengajian, yaitu di depan lapangan sepak bola Wanasaba. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kecurigaan yang terjadi antara pendukung kedua kubu mengingat situasi dan kondisi konflik NW yang masih memanas pada waktu itu.

JemaahNW di Wanasaba terpecah menjadi dua kubu dan mayoritas jemaahNW di desa ini berafiliasi ke Kubu R1. Kubu R2 mengadakan pengajian anak Hultah di lapangan umum persis di depan Madrasah Tarbiyatul Islamiyah NW Wanasaba. Pihak Pengurus madrasah sebagian berafiliasi ke Kubu R1 dan sebagian kecil ke R2. Meskipun masyarakat Wanasaba dan aparat desa memberikan izin, tetapi pada kenyataanya terjadi kerusuhan sebelum pengajian berlangsung. Pihak R1 yang dikoordinir oleh kelompok Pasukan 'Jubah Putih' (salah satu kelompok wirid di Kubu R1) bermaksud menjaga madrasah karena informasi yang didapatkan oleh mereka bahwa madrasah akan diambil oleh Kubu R2. Sejak pagi sebelum pengajian dimulai, terjadi pertempuran

hebat antara Kelompok Jubah Putih dengan Barisan Hizbullah. Menurut Kubu R2 yang melakukan penyerangan pertama adalah kubu Jubah Putih yang menyamar memakai pakaian seperti anak-anak ma'had. Sebaliknya dari pihak R1 menyatakan penyerangan pertama dilakukan oleh Barisan Hizbullah yang berusaha membuka pintu pagar madrasah.

Terjadi aksi saling lempar antara anggota Jubah Putih dan Barisan Hizbullah. Batu-batu yang dilempar dari dalam sekolah dipakai kembali melempar mereka oleh para jemaahpengajian. Para jemaahR2 mencoba menjebol pintu sekolah dan masuk ke dalam. Di dalam itulah terjadi aksi saling libas dengan pedang. Setelah selesai pertempuran, pengajian tetap dilanjutkan, sedangkan para korban yang luka di bawa ke panggung pengajian untuk mendapat pertolongan. Terdapat puluhan orang korban luka-luka berat seperti kehilangan batang hidung, jari-jari tangah, kepala pecah, perut sobek, dan lain-lain. Dari peristiwa ini tidak ada data yang pasti berapa jumlah jemaahdari kedua kubu yang meninggal. Kubu R1 mengklaim ratusan orang meninggal dari Kubu R2 dan begitu juga sebaliknya. Data di lapangan menunjukkan jumlah korban dari Kubu R2 dua orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka, sedangkan dari Kubu R1 juga dua orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka.

Yang menarik dari peristiwa ini adalah adanya miskomunikasi antara pendukung kedua kubu. Kubu R1 menilai pengajian R2 hanya upaya untuk merebut dan merusak madrasah. Sementara dari pihak R2 menjelaskan tidak ada maksud untuk merebut madrasah apalagi merusak, mereka hanya mengadakan acara anak Hultah yang dibarengi pengajian. Fenomena lain yang muncul adalah adanya pengajian dari pihak R1 di Desa Apitaik, beberapa kilometer dari Wanasaba. Pengajian ini persis dilakukan pada waktu yang sama.

Mungkinkah ada kesengajaan untuk mengadu jemaahmelalui pengajian yang diadakan pada hari yang sama, ataukah ada pihak-pihak yang bergerak di luar pantauan kedua pemimpin NW yang berbeda kubu? Saya melihat adanya peran pihak ketiga yang sengaja menyeting acara pengajian pada jam dan hari yang sama sehingga terjadi kerusuhan. Indikasi ini cukup kuat karena di beberapa peristiwa kerusuhan sebagian elit-elit NW tidak hadir ketika peristiwa kekerasan terjadi dan mereka juga tahu kerusuhan yang sedang berlangsung.

Kerusuhan di Dusun Paok Lombok jilid 2 (2002)

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa sebelum konflik dan kekerasan mengalami puncak di Dusun Paok Lombok pada 2002, serangkaian keributan terjadi antara pendukung dari kedua kubu yang terdapat di desa ini. Pasca penyerangan pengajian Tuan Guru Zaini 2000, perpecahan masyarakat semakin kuat, meskipun sebelumnya agak abu-abu dan mengaku netral. Mayoritas tuan guru dan masyarakat di desa ini lebih cenderung ke Kubu R1. Menurut catatatan kepolisian, pada 27 Februari 2002 terjadi kesalahpahaman antara TGH. Athar Azhari dengan TGH. Salehuddin di Madrasah Unwanul Falah, Paok Lombok. Tuan Guru Salehuddin merasa tersinggung dan kurang dihormati karena tidak dilibatkan dalam kepanitiaan ulang tahun Madrasah Unwaful Falah yang ke-55 yang rencananya akan diadakan 24 Maret 2002. Sementara beliau adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Unwanul Falah. Kondisi inilah yang membuatnya tersinggung sehingga sempat adu mulut dan argumen tentang posisi masing-masing.[19]

[19] Perlu diketahui bahwa lembaga pendidikan madrasah di Paok Lombok juga terkena imbas politik NW. Madrasah Tsanawiyah yang dikepalai oleh TGH. Salehuddin adalah tokoh R2, sedangkan Madrasah Aliyah yang dikepalai oleh H. Hasanuddin merupakan tokoh R1. Dengan kata lain, lembaga pendidikan terbagi menjadi dua, Madrasah Tsanawiyah ke R2 dan Aliyah ke

Perseteruan antara kedua tokoh penting di lingkungan Yayasan Unwanul Falah ini merembet kepada para pendukung keduanya. Pada 28 Februari 2002, satu hari pasca perselisihan itu, muncul isu bahwa Barisan Hizbullah akan merusak Madrasah Unwanul Falah. Isu ini mengundang reaksi dari masyarakat lokal, mereka berkumpul menuju madrasah dengan membawa senjata tajam. Setelah sampai di sana, kondisi madrasah masih utuh dan tidak ada gerakan pengerusakan dari Barisan Hizbullah. Aksi massa yang datang ke madrasah ini menimbulkan kekhawatiran dari kelompok R2 yang ada di desa tersebut, ditambah lagi dengan rumor yang tidak jelas mengenai aksi massa itu. Salah seorang anggota Hizbullah di desa ini menginformasikan anggota Hizbullah di pusat melalui HT tentang aksi massa yang dinilai akan menyerang kelompok mereka. Maka tidak lama setelah itu, Pasukan Hizbullah datang menyerbu massa yang berkumpul dan juga menyerang tokoh-tokoh R1 yang dianggap sebagai provokator. Sekitar jam 15.30 sore anggota Hizbullah yang berpatroli mencari tokoh-tokoh R1 ke rumah mereka termasuk ke rumah Tuan Guru Athar Azhari. Tuan Guru Athar bersembunyi di atas langit-langit rumahnya dan selamat dari kepungan Barisan Hizbullah. Karena tidak menemukan targetnya, anggota Hizbullah melakukan pengerusakan pada pintu dan kaca jendela rumah. Tokoh lain yang menjadi incaran Hizbullah adalah TGH. Nasruddin, H. Hasanuddin, dan TGH. Junaidi. Menurut TGH. Nasruddin bahwa dirinya sempat ditarik keluar rumah dan anggota Hizbullah menggeledah rumah dan mengambil sebagian barang. Pasukan Hizbullah juga melakukan pengerusakan dengan melempar rumah tokoh-tokoh yang dianggap sebagai provokator seperti rumah H. Hasanuddin, Amaq Us, H. Anwar, dan Lalu Wirabakti.

Kondisi Paok Lombok dan sekitarnya mencekam pasca

R1.

pengerusakan oleh Kubu R2. Kubu R1 yang merasa tertekan melakukan konsolidasi dengan mendatangkan bantuan dari luar desa. Konflik terus meluas ke desa-desa yang juga terbagi ke dalam dua kubu. Jemaahdari desa-desa tetangga saling membantu anggota masing-masing dari serangan lawan. Dusun Majuet misalnya, dikenal sebagai dusun yang menjadi basis R2, sebagian warganya terlibat dalam aksi kekerasan di Paok Lombok. Desa ini menjadi target penyerangan kelompok R1 yang berbasis di Desa Tebaban yang hanya berjarak 300 meter ke arah Selatan. Kelompok R1 yang berbasis di Desa Tebaban melakukan penyerangan ke Dusun Majuet pada pagi hari ketika masyarakat mulai tidur. Dalam penyerangan ini telah terbunuh seorang pendukung R2. Ia terbunuh dalam pertempuran dengan kelompok R1 yang berasal dari Tebaban. Selain itu Kubu R1 juga melakukan pembalasan dengan merusak rumah-rumah tokoh R2, yaitu rumah H. Usman dan keluarganya di Tebaban Barat. Pengerusakan juga terjadi di Dasan Borok Tumbuh Kecamatan Suralaga.

Puncak konflik di Paok Lombok terjadi pada bulan Juli 2002 ketika acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Maulid yang semestinya menjadi momen untuk merefleksikan peristiwa sejarah Nabi Muhammad, justru menjadi ajang perkelahian dan penyerangan antara kedua kubu NW. Kedua kubu NW ingin mengadakan maulid sendiri-sendiri secara terpisah yang diikuti oleh anggota mereka masing-masing. Penyelenggaraan acara maulid secara terpisah adalah dampak dari konflik dan perpecahan para tuan guru NW sebelumnya. Menurut versi Kubu R2, Kubu R1 yang mengadakan maulid terlebih dahulu tidak melibatkan tuan guru dari kubu mereka. Sedangkan menurut Kubu R1, kelompok R2 yang tidak mau melibatkan diri dan ingin mengadakan maulid secara terpisah. Terlepas dari adanya perbedaan pandangan antara kedua kubu, acara maulid telah menjadi bencana bagi kedua kubu

di dusun ini.

Sebagai kelompok mayoritas, Kubu R1 mengadakan maulid terlebih dahulu di masjid dan tidak ada perlawaan atau gangguan dari Kubu R2. Hanya saja, tokoh-tokoh R2 tidak dilibatkan sehingga jama'ahnya juga tidak ikut dalam perayaan tersebut. Pada saat Kubu R2 ingin mengadakan maulid di masjid, Kubu R1 tidak mengizinkan masjid sebagai tempat acara maulid. Negosiasi antara pemimpin dan para tuan guru dari kedua belah pihak mengalami jalan buntu. Kubu R1 tidak membolehkan menggunakan masjid sebagai tempat acara, sementara Kubu R2 tetap meminta supaya masjid dijadikan tempat acara dengan alasan mereka juga ikut memberikan kontribusi atas pembangunan masjid itu. Hingga hari terakhir pelaksanaan maulid, tokoh-tokoh R1 tetap tidak memberikan ruang dan izin, bahkan masjid digunakan untuk acara lain, yaitu pengajian yang dipimpin oleh Tuan Guru Khairuddin. Menurut Kubu R2 (2008) bahwa pengajian satu hari penuh oleh Kubu R1 ini sengaja dilakukan untuk menggagalkan acara maulid R2 yang akan dilaksanakan pada hari itu.

Suasana sangat mencekam di Dusun Paok Lombok, kedua kubu mengkhawatirkan terjadinya serangan dari kubu masing-masing seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Sebelum hari pelaksanaan maulid, kedua tokoh bertemu di kantor kepolisian yang diwakili oleh sebagian tokoh-tokoh mereka. Dari Kubu R2 diwakili oleh TGH. Salehuddin, H. Muhalli, H. Khairi, dan H. Khirul Anam, sedangkan dari Kubu R1 diwakili oleh H. Zuhdi, H. Taqiuddin, Ali Firdaus, dan lain-lain. Di kantor kepolisian, kedua kubu melakukan negosiasi yang alot, kedua kubu bertahan pada posisi masing-masing. Pertemuan pun ditunda karena waktu shalat Magrib telah tiba, sementara belum ada keputusan final. Setelah ditunggu-tunggu, Kubu R1 tidak lagi datang ke pertemuan

berikutnya sehingga pihak kepolisian memberikan izin maulid ke Kubu R2 dengan syarat harus ada jaminan keamanan. Sepulang dari kepolisian telah berkembang isu di Paok Lombok bahwa Kubu R2 mengajak perang jika tidak dikasih maulid di masjid. Entah siapa yang menyebarkan isu tersebut membuat suasana di dusun ini semakin kacau dan tidak menentu. Mengantisipasi adanya penyerangan dari pihak R2, para tuan guru dan tokoh-tokoh dari Kubu R1 meminta bantuan pasukan dari Pancor.

Menurut salah seorang informan dari Pancor (2008) yang ikut berperang di Paok Lombok menceritakan, beberapa orang meminta bantuan ke Pancor karena akan adanya isu akan diserang oleh Barisan Hizbullah. Selain itu muncul isu adanya rencana pembunuhan terhadap TGH. Khairuddin dan upaya merusak madrasah dan masjid. Pasukan dari Pancor akhirnya berangkat ke Paok Lombok, mereka dikasih tanda ikat kepala warna putih supaya dapat membedakan antara kawan dan lawan. Menurut beberapa saksi, mereka datang pada sore hari lengkap dengan senjata tajam seperti pedang, keris, dan tombak, layaknya ke medan pertempuran. Melihat kedatangan mereka, jemaahdari Kubu R2 sangat takut dan khawatir akan terjadi perang besar. Untuk menghindari perang, sebagian warga mulai mengungsi ke desa-desa lain, mereka tidak peduli lagi dengan acara maulid.

Di tengan malam sekitar pukul 03.00 subuh pasukan dari Pancor dan beberapa masyarakat lokal dari Kubu R1 mulai melempar rumah H. Muhalli, tokoh dari Kubu R2. H. Muhalli sendiri telah mengungsi terlebih dahulu dan hanya istrinya yang masih menjaga rumah. Istrinya menceritakan bahwa dia sangat takut dan tidak bisa tidur setelah pelemparan rumahnya yang hampir satu jam. Rumah-rumah lain yang ikut dilempar adalah rumah H. Daefullah, H. Rifa'i, dan H. Khairi. Ketiga tokoh ini dikenal dekat dengan Tuan Guru

Zaini. Lokasi rumah mereka yang berdekatan dengan rumah-rumah jemaahKubu R1 mempermudah pihak lawan untuk menyerang mereka. Pada pagi harinya, sebagian besar jemaahR2 mengungsi ke Desa Suralaga, Desa Anjani, dan sebagian masih tinggal. Mendapat laporan adanya rumah yang dirusak oleh pasukan R1, TGH. Salehuddin bergegas keluar dan hendak mengecek rumah-rumah tersebut. Ketika berada di jalan, dia langsung disergap dan diajak bertarung oleh orang-orang dari Kubu R1. TGH. Salehuddin yang dikenal sakti sempat mengeluarkan keris kecil peninggalan kakeknya yang diyakini dapat membunuh ribuan orang dalam satu kali ayunan, namun karena dia sadar tidak boleh membunuh apalagi statusnya sebagai tuan guru, maka pertarungan pun tidak terjadi. Beberapa orang kemudian mengamankannya dan dibawa ke rumah TGH. Khairuddin. Karena TGH. Khairuddin tidak ada di tempat, maka dia pulang ke rumahnya sambil beristirahat.

Setelah pulang dan beristirahat sejenak, tiba-tiba beberapa orang mengetuk pintu dan memintanya keluar. TGH. Salehuddin akhirnya mengikuti mereka karena alasan mau diajak ke kantor polisi. Di tengah jalan, ribuan orang telah menunggu, mengepung, dan dijadikan sandera sampai terjadi kesepakatan dengan Kubu R2. Di tengah jalan inilah banyak yang mau membunuh, memukul, dan mencaci makinya, namun dia tetap tenang. Dia kemudian disuruh naik mobil dan dalam mobil terdapat SL (salah satu pimpinan Kubu R1), sopir, dan dua orang polisi yang menjaganya. Di sepanjang jalan ke kantor polisi, tepatnya di Desa Tebaban, mobil yang ditumpangi diberhentikan dan sempat ditusuk-tusuk oleh massa yang tidak terkontrol lagi emosinya. Meskipun mobil tersebut dipukul dan ditusuk dengan pedang, anehnya mobil tersebut tidak apa-apa. Ada dua versi yang muncul dengan fenomena ini, menurut jemaahdari Kubu R1, mobil itu selamat karena kekeramatan Tuan Guru Bajang yang memiliki mobil itu, sementara menurut jemaahdari R2 karena

kesaktian TGH. Salehuddin. Menurut TGH. Salehuddin, dia sempat mau dibunuh di Desa Kerongkong namun gagal. TGH. Salehuddin akhirnya selamat kemudian dibawa kembali ke Dusun Paok Lombok ke rumah TGH. Khairuddin. Setelah datang Kapolres Lotim dia dievakuasi oleh mobil polisi dan dibawa ke keluarganya di Desa Suralaga.

Tertangkapnya TGH. Salehuddin membuat keluarga dan jemaahNW dari Kubu R2 khawatir karena menurut informasi yang mereka terima bahwa dia dibunuh. JemaahR2 yang masih di desa itu terus eksodus mengungsi ke Desa Anjani yang dianggap lebih aman karena wilayah kekuasaan R2. Mereka harus jalan kaki lewat sawah sembunyi-sembunyi ke tempat pengungsian karena pasukan Kubu R1 yang berasal dari luar desa terus berdatangan dan berjaga-jaga mengantisipasi serangan balik dari Kubu R2. Kubu R2 juga tidak tinggal diam, mereka menyusun strategi untuk serangan balik mengepung Paok Lombok dari berbagai arah. Pasukan bantuan untuk Kubu R2 dari Lombok Tengah dan Barat yang lengkap dengan senjata tajam di-*sweeping* oleh pihak kepolisian di Masbagik. Inilah perang terbesar antara jemaahNW dan menjadi puncak pertempuran kedua kubu. Seminggu setelah itu, pasukan R2 melakukan aksi balasan dengan merusak dan membakar Paok Lombok. Mereka menyerang pada pagi hari yang dikenal dengan 'serangan fajar'; mereka masuk lewat arah timur melewati Dusun Paok Lombok Timur, sementara sasaran mereka adalah Paok Lombok Barat. Aksi mereka dihadang di Paok Lombok Timur sehingga terjadi pertempuran dengan warga setempat. Mereka membakar setengah dari rumah penduduk di dusun ini dan merusak tanaman-tanaman yang terdapat di sekitarnya.

Pada siang harinya, Pasukan Hizbullah dan Satgas Hamzanwadi bertempur di Dusun Tumbuh sebelah selatan Dusun Paok Lombok.

Ribuan orang berhadap-hadap dengan membawa senjata tajam. Mereka hanya dipisah oleh sungai yang menjadi pembatas desa antara Dusun Borok dengan Dusun Tumbuh. Dusun Borok merupakan basis Kubu R1, sedangkan Dusun Tumbuh adalah basis R2. Dari pertempuran ini terdapat dua orang yang meninggal dari Kubu R2 dan puluhan terluka dari kedua kubu. Mereka memakai ketapel, pedang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Setelah peristiwa tersebut, hampir selama empat tahun masyarakat tidak saling menegur, menyapa, dan mencari keluarga mereka karena trauma akibat konflik. Sementara upaya rekonsiliasi dari tokoh-tokoh kedua kubu NW, pihak pemerintah, dan kepolisian terus dilakukan. Ustadz Khairi dari Suralaga dan beberapa tokoh dari Desa Tebaban dan Pancor mengadakan pawai islah seraya bertakbir keliling desa dan menyatakan bahwa konflik sudah harus dihentikan.

Tafsir sosial tentang konflik NW

Perkembangan studi konflik telah melahirkan berbagai perspektif dan tafsir yang sangat beragam tentang konflik. Konflik memiliki makna yang berbeda-beda tergantung bagaimana masyarakat mendefinisikan dan menafsirkan konflik. Saya melihat setidaknya ada tiga unsur yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dan pemaknaan konflik. Pertama, perbedaan posisi dan peran seseorang dalam konflik. Posisi dan peran di sini dapat dilihat konteksnya apakah seseorang tersebut merupakan aktor konflik atau korban konflik. Aktor konflik memiliki pemahaman, penafsiran, dan pemaknaan yang berbeda dengan korban konflik mengenai sebuah peristiwa konflik. Kedua, perbedaan kelas sosial. Kelas-kelas sosial yang berbeda di masyarakat akan mempengaruhi mereka dalam menafsirkan konflik. Kelompok elit akan memiliki pemahaman dan penafsiran yang berbeda dengan kelompok kelas

bawah karena cara pandang mereka yang berbeda dalam melihat sebuah masalah. Ketiga, kepentingan. Perbedaan kepentingan juga akan mempengaruhi penafsiran seseorang tentang konflik.

Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana tafsir dan pemahaman masyarakat tentang konflik NW, saya ingin membahas sekilas tentang definisi dan penafsiran konflik yang berkembang dalam tradisi akademik. Di kalangan akademisi, terdapat perbedaan perspektif dan penafsiran tentang makna dan definisi konflik. Simon Fihser (2001: 4) melihat konflik sebagai sesuatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan, dan sering bersifat kreatif. Lebih lanjut Fisher (2001) mengatakan, jika konflik selalu ada, maka berarti konflik memang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Konflik dapat membuat orang menyadari banyak masalah, mendorong ke arah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan psikologis, dan menimbulkan kesenangan. Tafsir yang berbeda dikemukakan oleh Diana Francis (2002: 1) bahwa konflik merupakan sebuah percekcokan, perselisihan atau pertentangan, baik yang bersifat individual, kelompok atau institusional. David Bromley dan G. Melton (2002: 1) melihat 'konflik lebih sebagai sebuah proses, sejarah, dan interaksi antarkelompok. Menurut Broomley, konflik tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses panjang dan melibatkan sejarah personal'. Lewis Coser (1964: 33) melihat konflik sebagai kekuatan positif yang mempunyai fungsi sosial sebagai penyeimbang dan sebagai media negosiasi antara kelompok yang bertikai .

Pendefinisian dan penafsiran konflik di atas mempunyai titik penekanan yang berbeda-beda dalam melihat fenomena konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Kaitannya dengan penelitian ini

sangat menarik untuk melihat bagaimana masyarakat menafsirkan konflik NW. Dari data di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada tafsir tunggal tentang konflik NW, tetapi sebaliknya tafsiran yang sangat beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menafsirkan konflik NW sebagai bentuk pengembangan dan perluasan organisasi NW. Tuan Guru Mustamiuddin Ibrahim (2008) mengatakan bahwa: 'Kalau tidak ada konflik NW, maka NW tidak akan berkembang sebesar sekarang ini'. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa NW Anjani yang dipimpin oleh R2 sudah berkembang dalam waktu yang cepat. Gedung-gedung madrasah sudah berdiri menyamai gedung-gedung sekolah NW yang terdapat di Pancor. Padahal NW Anjani harus membangun dari nol. Cabang-cabang madrasah NW mulai masuk ke luar daerah seperti di Kalimantan, Riau, Sulawesi dan Bali. Ini merupakan makna positif di balik konflik NW yang berkepanjangan'.

Tuan Guru Yusuf Ma'mun memahami bahwa persatuan itu harus dimulai dari konflik dan perpecahan. Dia mengatakan, '*farriq tasud*', buat perpecahan dulu dan perpecahan inilah yang akan membawa anda menjadi pemimpin. Menurut tafsir Tuan Guru Yusuf (2008), perpecahan NW adalah kebesaran NW itu sendiri. Dengan konflik ini, NW semakin berkembang, dewasa dan semakin matang dalam semua aspek seperti pendidikan, kelembagaan, ekonomi dan politik. Jika tidak ada konflik tidak menutup kemungkinan NW tidak pernah 'berkuasa' dan tidak sebesar sekarang gaungnya. Di tengah konflik kader-kader NW memegang posisi-posisi penting di pemerintahan baik sebagai gubernur NTB dan sebagai bupati Lombok Timur. Tidak hanya itu, banyak kader-kader NW yang juga duduk di legislatif baik di tingkat satu, dua, dan di pusat. Semua ini hikmah yang ada di balik konflik NW.

Sementara itu, pada tataran *grass root* menafsirkan konflik

NW sebagai bentuk arogansi kekuasaan elit-elit NW untuk meraih dan mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Elit-elit NW hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan menjadikan konflik sebagai media untuk mencapai kepentingan tersebut. Oleh karena itu, konflik sengaja dipelihara oleh elit-elit tertentu yang ingin mempertahakan kepentingan mereka supaya tetap langgeng. Mereka menyayangkan sikap para elit yang tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dampak konflik dan kekerasan di masyarakat. Kepentingan telah membutakan hati sebagian elit-elit NW, mereka tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang telah kehilangan harta benda, dan sanak keluarga yang terbunuh selama konflik NW terjadi. Selain itu, jemaah*grass root* juga memahami konflik NW adalah bentuk kepentingan yang dilandasi oleh hawa nafsu untuk mengejar materi, status, dan posisi-posisi sosial lainnya. Hawa nafsulah yang lebih banyak menyetir mereka dari pada imannya. Tidak mungkin orang beriman saling membunuh sesama saudara dan merusak hubungan keluarga mereka.

Penafsiran lain muncul di kalangan elit-elit NW yang tidak mau mengakui peristiwa ini sebagai konflik. Menurut penafsiran Mawardi (2008), 'istilah konflik tidak tepat digunakan dalam kasus NW karena konotasinya negatif. Lebih baik menggunakan istilah selain konflik karena kasus NW ini hanyalah perbedaan dan perselisihan yang biasa terjadi pada elit-elit tertentu. Peristiwa yang terjadi di NW hanya persoalan kecil saja, namun dibesar-besarkan oleh orang-orang tertentu'. Farhan (2008) memiliki penafsiran yang sedikit berbeda. Dia melihat konflik NW sebagai sebuah proses pembuktian eksistensi NW yang sebenarnya. Selama ini NW selalu mengalami diskriminasi dan dipandang sebelah mata oleh pemerintah lokal, baik pada tingkat daerah (kabupaten dan provinsi) maupun pada tingkat pusat. NW selama sejarahnya

hanya menjadi alat dan mesin politik pemerintah. Sekarang pasca konflik, NW telah berhasil menunjukkan eksistensi dirinya sebagai organisasi besar yang mempunyai posisi tawar politik yang sangat kuat. Artinya, konflik NW merupakan sebuah *sharing* kekuasaan antara elit-elit NW. Selama ini NW hanya didominasi oleh salah satu kubu, sedangkan kubu yang lain kurang mendapat tempat dan peran dalam struktur organisasi NW sehingga mereka tidak mampu membuktikan kemampuannya. Melalui konflik secara tidak langsung telah memaksa terjadi *sharing* kekuasaan antara kedua kubu yang berfungsi sebagai penyeimbang. Sekarang, tidak ada lagi dominasi salah satu kubu di NW, sebaliknya kedua Kubu R1 dan R2 mempunyai posisi yang sama. Kedua kubu memainkan peran penting dalam pengembangan dan pembangunan organisasi NW. NW seolah-olah memiliki dua ruh yang sama-sama aktif menjalankan roda organisasi meskipun dengan gaya kepemimpinan yang berbeda.

Tuan Guru Abdul Kadir juga mempunyai tafsir yang berbeda dalam memaknai konflik NW. Dia melihat konflik NW sebagai ajang pembuktian siapa yang benar dan siapa yang salah. Selama ini kedua kubu sama-sama mengaku benar dan menyalahkan kubu yang lain. Sekarang tinggal waktu yang membuktikan kubu yang mana sesungguhnya benar dan mana yang salah. Yang benar akan tetap bertahan dan yang salah akan tergusur oleh waktu. Tafsir lain juga muncul bahwa konflik NW merupakan pembuktian dan aktualisasi siapa berhak dan lebih mampu memimpin NW. Kalau berbicara siapa yang berhak, kedua kubu sama-sama mempunyai hak. Baik Kubu R1 dan R2 adalah keturunan langsung Tuan Guru Zainuddin. Apalagi Kedua putrinya tersebut mempunyai anak-anak yang dapat berperan untuk mengembangkan dan meneruskan perjuangan kakeknya. Pada waktu konflik inilah kedua tokoh ini dan keturunannya dapat menunjukkan kemampuan mereka

masing-masing dalam mengembangkan organisasi. Sebelumnya, ketersediaan ruang sosial di dalam organisasi NW bagi kedua kubu masih sangat terbatas karena ketatnya persaingan antara mereka.

Tafsir yang berbeda juga muncul di masyarakat. Sebagian mereka melihat konflik NW sebagai sebuah takdir yang harus dijalani oleh jemaahNW. Bagi mereka, konflik harus dihadapi untuk mencari identitas NW. Perpecahan dan konflik NW jauh sebelumnya sudah diprediksi oleh Tuan Guru Zainuddin dalam buku wasiatnya. Dengan demikian, masyarakat NW percaya bahwa bagaimanapun kuatnya usaha untuk mencegah atau menghindari konflik internal sulit dilakukan. Bahkan masa tenggang konflik dan proses rekonsiliasi juga telah dia ramalkan dalam wasiat renungan massa yang disusun semasa hidupnya. Dalam wasiat tersebut dikatakan bahwa masa perpecahan dan konflik akan memakan waktu selama seperlima abad atau 20 tahun. Oleh karena itu, upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh para elit NW sebelum masa yang diramalkan tidak akan bisa berhasil secara maksimal karena tidak sesuai dengan wasiat atau belum waktunya. Oleh karena itu, masyarakat NW harus menunggu, jika waktunya telah datang maka dengan sendirinya konflik NW akan selesai.

Respons beberapa pihak terhadap konflik NW

Sikap dan respons beberapa pihak tentang konflik NW sangat penting dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif tentang konflik ini dan kepentingan-kepentingan di balik respons tersebut. Saya melihat bahwa respons yang muncul tidak bebas dari faktor kepentingan. Ada dua kategori kelompok yang akan memberi respons dalam tulisan ini, yaitu tokoh organisasi keagamaan di luar NW dan pemerintah lokal.

Respons tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

Respons terhadap konflik NW yang muncul di kalangan para jemaahdan tokoh NU sangat beragam. M. Saleh Eding (2008), Ketua Lakpesdam NU NTB dan dosen IAIN Mataram menyayangkan terjadinya konflik dan kekerasan antara jemaahNW. Menurut Ending (2008), 'fenomena konflik NW memperlihatkan bahwa sebagian besar elit-elit NW belum dewasa menyikapi perbedaan pendapat dan konflik di kalangan internal mereka. Konflik yang terjadi di NW tidak harus disertai dengan tindak kekerasan jika para elit mampu mengelola konflik dengan baik di mana kepentingan politik sangat kental mewarnai konflik ini. Oleh karena itu, elit-elit NW harus menyadari ketika NW terlibat dalam politik praktis, maka NW tidak akan pernah sepi dari konflik'.

Lebih lanjut Ending menyarankan agar para elit NW untuk segera melakukan rekonsiliasi atau islah agar masyarakat tidak terpecah-pecah hanya karena kepentingan politik elit tertentu. Dalam hal ini, dialog yang melibatkan lintas generasi terutama kaum muda dapat memainkan peran penting untuk menyatukan langkah dan mempelopori langkah-langkah rekonsiliasi karena di kalangan anak muda tidak terlalu banyak persoalan. Menurutnya, yang bermasalah adalah kelompok-kelompok tua yang memiliki kepentingan politik. Secara organisatoris, langkah rekonsiliasi dapat dilakukan dengan kembali ke khittah NW yaitu tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, sebab salah satu faktor konflik NW adalah kepentingan politik praktis yang sangat kuat di kalangan elit. Rekonsiliasi ini menjadi krusial agar lebih maksimal mendorong terjadinya perubahan di NTB.

Mutawalli (2008), salah satu Pengurus NU dan dosen di IAIN Mataram turut prihatin atas terjadinya gesekan di dalam NW. Menurut pandangannya, apa yang terjadi di NW sebenarnya bukan

sebuah konflik, tetapi lebih pada gesekan-gesekan kecil. Konflik akan bernilai positif jika dapat dikelola dengan baik. Sayangnya, konflik-konflik di tingkat lokal termasuk konflik NW yang terjadi sebelumnya tidak dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh para elit NW. Konflik NW hanya terjadi pada tingkat elit, sedangkan pada tingkat *grass root* tidak ada masalah apa-apa. Sebagai bukti, ketika Pilkada NTB dan Bupati Lotim tahun 2008, banyak warga NW Kubu R2 ikut memilih Tuan Guru Bajang, meskipun dia adalah calon dari Kubu R1.

Mutawalli lebih lanjut menjelaskan semestinya yang perlu diperhatikan oleh elit-elit NW adalah politik 'keumatan' yang dikembangkan oleh Tuan Guru Zainuddin. Politik keumatan adalah politik yang memperjuanganakan kesejahteraan umat dan mencerdaskan bangsa. Gagasan yang demikian pernah disampaikannya kepada Tuan Guru Bajang ketika berdialog di IAIN Mataram. Kaitannya dengan peran NU dalam memfasilitasi rekonsiliasi konflik NW, Mutawalli mengatakan bahwa sebagai organisasi di luar NW, NU tidak punya kekuatan untuk memfasilitasi mereka. NU tidak memiliki otoritas untuk mengatur urusan dapur NW. Dia juga menyinggung upaya pemerintah seperti mantan Gubernur NTB Lalu Serinata yang pernah memfasilitasi islah antara kedua kubu, namun selalu gagal karena sulit sekali mempertemukan kedua tokoh kunci NW karena adanya elit-elit NW yang tidak menginginkan mereka islah. Oleh karena itu, kalangan internal NW jauh lebih punya kekuatan untuk menginisiasi islah dengan catatan ada keinginan kuat dan niat baik dari elit-elitnya. Oleh karena itu, menurut Mutawalli lebih jauh, pertama, jemaahNW harus memikirkan kembali warisan mulia dari pendiri NW. Warisan mulia yang dimaksud adalah organisasi NW dan aset-asetnya. Inilah yang harus dikembangkan dan dijaga betul oleh jemaahNW. Kedua, para pemimpin NW tidak ada yang merasa menang atau kalah,

sebaliknya mereka harus konsen memikirkan lembaga untuk umat khususnya warga NW.

Respons yang sama juga dikemukakan oleh Tuan Guru Ja'far (2008), tokoh senior NU Pancor. Menurutnya, tidak ada perbedaan ideologis yang menjadi sumber konflik antara kedua kubu. Kedua belah pihak, Rauhun dan Raihanun, sama-sama mempunyai tujuan yang baik, namun mereka sedang diuji oleh masuknya orang-orang yang ambisius yang memiliki kepentingan politik. Menurut Ja'far, belum bersatunya kedua kubu NW karena masih ada oknum-oknum yang tidak menginginkan NW bersatu. NU mengharapkan NW untuk segera melakukan islah. Ja'far lebih lanjut menceritakan bahwa dia pernah terlibat dalam proses islah antara kedua kubu NW di Pancor atas nama perwakilan NU. Proses islah ini juga melibatkan Kapolres, Bupati, Dandim, dan perwakilan dari Golkar.

Respons yang sama dari Munahar (2008), salah satu tokoh muda NU Pancor, bahwa konflik NW merupakan konflik keluarga yang direkayasa oleh kelompok elit tertentu. Konflik semestinya dipahami sebagai sebuah 'dialektika' sebagaimana yang terjadi di dalam NU, bukan dimaknai dan ditafsirkan dengan kekerasan. Konflik NW juga tidak lepas dari faktor kekuasaan dan kekayaan. Perpecahan NW sering dimanfaatkan secara politis baik oleh politisi lokal maupun nasional. Kaum muda NU mendukung gerakan islah antara kedua kubu karena jalan inilah yang terbaik untuk menyelamatkan jemaahNW dari konflik berkepanjangan. Tidak sulit bagi NW untuk islah karena tidak ada hijab ideologis antara keduanya, yang ada hanya hijab kepentingan. Kekhawatiran kelompok muda NU adalah elit-elit NW hanya sibuk mengejar kepentingan dan larut dalam gesekan.

Dari respons tokoh-tokoh NU di atas, mereka menginginkan supaya pihak internal NW segera mencari langkah konkrit untuk

islah. Bagaimanapun NW merupakan aset besar yang dimiliki oleh umat Islam di NTB. Jika konflik ini dibiarkan terus akan menghambat agenda-agenda besar yang harus dijalankan oleh NW terutama mengenai pemberdayaan masyarakat dan dakwah islamiyah. Namun sayang sekali, pihak NU secara organisatoris tidak menawarkan diri sebagai mediator di dalam proses rekonsiliasi NW.

Respons tokoh Muhammadiyah

Kelompok Muhammadiyah pada prinsipnya mempunyai pandangan yang hampir sama dengan kelompok NU. Abdul Malik (2008), Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur, mengatakan keprihatinannya terhadap konflik internal NW. Menurut Malik, konflik NW muncul dari kepentingan bukan dari perbedaan ideologi. Keinginan dari keluarga Tuan Guru Zainuddin untuk bersatu sangat besar, tetapi ring satu dan ring dua yang menjadi titik kendala. Yang membuat sulit bersatu adalah bukan agama atau ideologi tetapi kue-kue kekuasaan atau kue pembangunan. Malik menyarankan agar segera ada upaya-upaya atau langkah konkrit untuk melakukan islah. Salah satu langkah untuk islah adalah kembali ke al-Qur'an dan mengamalkan ajarannya. Sebagai sesama Muslim apalagi masih memiliki hubungan kekeluargaan, mereka harus mengajarkan kepada generasi-generasi baru NW supaya jangan sampai al-Qur'an hanya dijadikan jargon-jargon dalam acara seremoni seperti di acara hari ulang tahun (Hultah) NW. Di setiap acara Hultah NW selalu kita dengar istilah memperkuat ukhuwah islamiyah, sedangkan dalam realitas sosial mereka tetap memelihara perpecahan dan konflik. Jadi, kata-kata ukhuwah islamiyah hanya merupakan sebuah jargon, kata Malik. Dia menambahkan kelemahan NW selama ini terletak pada minimnya pemberdayaan

terhadap masyarakat bawah. Sebaliknya yang muncul adalah lebih banyak 'pendayaan', dengan kata lain konsep meminta lebih banyak daripada memberi atau lebih banyak dilayani daripada melayani. JemaahNW sering menilai diri mereka lebih hebat dibandingkan dengan jemaahdari kelompok Islam lainnya. Pada masa dulu ketika Tuan Guru Zainuddin masih hidup muncul alergi dengan Muhammadiyah, namun sekarang terjadi perubahan besar setelah Tuan Guru Bajang menjadi pemimpin NW, di mana alergi terhadap Muhammadiyah sedikit demi sedikit mulai hilang, bahkan sekarang beberapa tokoh NW banyak yang aktif di Muhammadiyah.

Abdur Razak (2008), tokoh senior dan Pengurus Muhammadiyah NTB, menilai bahwa konflik NW berasal dari kurangnya penghayatan terhadap ayat al-Qur'an: *'Innamal mukminuna ikhwatun'*. Razak mengatakan, dalil ini yang kurang dihayati oleh rekan-rekan yang terlibat dalam konflik, padahal di dalam lanjutan ayat tersebut: *'Faaslihu baina akhawaikum'* berfungsi sebagai perekat umat Islam. Sumber konflik adalah kaplingan kepentingan di kalangan elit-elit NW di samping mereka tidak menghayati dan mengamalkan ayat l-Qur'an. Di Muhammadiyah sangat berbeda sejak tahun 1912 tidak pernah terjadi konflik kepentingan atau konflik politik. Muhammadiyah tidak menolak dan meminta jatah politik meskipun Muhammadiyah merupakan pelopor demokrasi. Lebih jauh Razak mengungkapkan rasa penyesalannya terhadap konflik NW. Konflik dan kekerasan antara umat Islam hanya menciderai agama Islam itu sendiri. sangat menyesalkan konflik karena tugas dalam ormas Islam adalah *amar makruf, nahi mungkar*. Muhammadiyah dan NW serta ormas-ormas Islam lainnya di Lombok dan NTB saling bertentangan sehingga ke depan tidak ada rasa persaingan, tetapi lebih pada partner yang akan melakukan dakwah '*fastabikul khairot*'.

Respons kelompok Muhammadiyah di atas juga menginginkan supaya elit-elit NW untuk segera melakukan islah. NW harus mengedepankan kepentingan yang lebih luas, bukan hanya kepentingan pribadi dan kelompok. Kepentingan yang lebih luas di sini adalah kepentingan umat Islam, jika umat Islam pecah maka otomatis kepentingan dakwah tidak akan berjalan secara maksimal. Kelompok ini menyarankan supaya tokoh-tokoh NW kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melarang untuk saling membenci dan saling bertikai. Jika ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah diamalkan, maka mereka yakin persoalan NW akan selesai dengan cepat.

Respons tokoh Sunnah Salafi/Wahabi

Kelompok Sunnah Salafi atau yang lebih dikenal kelompok Wahabi juga memberikan respons yang tidak jauh berbeda dengan kelompok NU dan Muhammadiyah. H. Zakir (2008), tokoh senior Assunnah-Salafi Desa Suralaga melihat bahwa akar masalah konflik NW adalah masalah kekuasaan dan harta benda. Kecemburuan sosial dan emosional yang sangat tinggi antara elit-elit NW termasuk para tokoh agama atau tuan guru ikut memberikan andil terjadinya konflik dan kekerasan. Faktor lain adalah pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara dua kubu dan keinginan salah satu kubu untuk mendominasi yang lain. Tuan guru hanya diam dan membiarkan konflik terjadi antara jama'ah. Organisasinya juga pernah mengalami perpecahan,tetapi tidak sampai terjadi kekerasan yang melibatkan jama'ah. Setelah Tuan Guru Husni, Pendiri Wahabi di Lombok meninggal dunia, maka aset-aset organisasi seperti madrasah terbagi dua yang masing-masing dikelola oleh saudaranya, yaitu H. Manar dan H. Lutfi. Namun demikian tidak ada kekerasan yang terjadi meskipun terdapat konflik. Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ahmad, tokoh muda Wahabi, yang

menyayangkan NW sebagai organisasi besar dan mapan mengalami konflik dan kekerasan yang hebat. Ia berharap agar NW bersatu seperti sebelumnya ketika Tuan Guru Zainuddin memimpin NW.

Respons kelompok Wahabi di atas sangat menarik karena terdapat perbedaan pandangan dan sikap di kalangan Wahabi dengan NW mengenai fenomena konflik di dalam organisasi. Kelompok Wahabi tidak menafikan terjadinya konflik di kalangan organisasi mereka yang terpecah menjadi tiga kelompok, namun mereka tidak membiarkan terjadinya praktik kekerasan di masyarakat. Para elit tidak melibatkan masyarakat dalam konflik tersebut, sebaliknya mereka sendiri yang menyelesaikan persoalan hingga selesai. Berbeda dengan NW yang melibatkan masyarakat dalam konflik sehingga konflik bukannya semakin surut, tetapi semakin meluas. Kelompok ini menyarankan supaya tokoh-tokoh agama di NW lebih cerdas dan pintar dalam menyikapi persoalan konflik.

Respons tokoh Ahmadiyah

Kelompok Ahmadiyah memberikan respons yang beragam tentang konflik NW. Raham (2008), tokoh Ahmadiyah dari Pancor, melihat konflik NW disebabkan oleh harta dan kedudukan. Kelompok Ahmadiyah menyayangkan dan prihatin dengan jemaahNW yang terlibat konflik dan kekerasan, padahal sebagian besar dari mereka masih memiliki hubungan kekeluargaan. Lebih jauh, Raham berpendapat bahwa 'Konflik NW adalah urusan internal mereka dan kami dari kelompok Ahmadiyah tidak ikut-ikutan. Kita hanya prihatin saja, kok masih saudara bisa perang seperti itu. Kami secara lembaga tidak bisa berbuat apa-apa dan berharap mudah-mudahan mereka akur-akur saja. Kita tidak bisa berbuat banyak karena kami dari organisasi minoritas di NTB. Suara kami tidak mungkin didengar dan nanti ada kesan yang tidak enak kalau Ahamdiyah

memberi saran. Kami hanya berharap terjalinnya hubungan yang baik dengan warga NW karena kita hidup bertetangga'. Udin, tokoh Ahmadiyah lain mengatakan bahwa ia tidak tahu persis apa yang terjadi di internal NW. Dia hanya mendengar lewat media dan seminar-seminar tentang terjadinya pembunuhan selama konflik NW. 'Saya tidak tahu pasti berapa jumlah korban akibat konflik tersebut. Yang saya dengar terdapat 11 orang korban, masing-masing 5 orang dari pihak NW Pancor, dan 6 orang dari pihak NW Anjani. Kami dari Ahmadiyah tentu sangat menyayangkan kenapa terjadi konflik, padahal mereka sesama saudara bahkan satu agama. Secara kelembagaan, Ahmadiyah belum pernah ada upaya atau ikut andil untuk menyatukan NW. Ahmadiyah belum sampai kesana terlibat dalam proses rekonsiliasi. Sementara ini kita hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kita tidak mempunyai keuntungan sama sekali dengan terjadinya konflik NW, sebaliknya kita kasihan saja dengan mereka yang menjadi korban', katanya lebih jauh.

Najar (2008) mempunyai pandangan yang hampir sama bahwa 'Perpecahan NW merupakan sebuah fenomena sosial karena mereka masing-masing mempunyai keturunan. Mereka ingin melihat keturunan mereka dapat berperan dalam organisasi. Selain itu, persoalan politik memiliki kontribusi besar terhadap konflik NW. Tidak ada masalah keagamaan atau persoalan agama, hanya masalah warisan yaitu warisan institusi atau organisasi. Kami dari Ahmadiyah tetap mengharapkan NW harus dan wajib bersatu, kenapa mereka harus pecah. Tuan Guru Zainuddin sudah capek-capek membangun NW, kok sekarang malah pecah-belah'.

Respons kelompok Ahmadiyah di atas menunjukkan jika mereka tidak terlalu memahami persoalan internal NW. Mereka juga sadar sebagai kelompok minoritas suara mereka tidak akan didengar, meski demikian mereka sangat prihatin dengan konflik

NW dan berharap tokoh-tokoh NW mampu mencari solusi yang tepat atas konflik tersebut.

Respons pihak kepolisian Lombok Timur

Pihak kepolisian Kabupaten Lombok Timur (2008) menilai bahwa persoalan yang paling berat mereka hadapi dalam satu dekade ini adalah konflik NW. Pemerintah sudah berupaya maksimal untuk memfasilitasi rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang bertikai, namun selalu gagal. Kedua belah pihak merasa paling benar dengan menyalahkan kubu yang lain. Pihak Kepolisian Lotim bersyukur konflik dan kekerasan antara jemaahkedua kubu sudah mereda, meskipun NW belum bersatu. Yang penting dari kepolisian adalah tidak ada peperangan lagi di antara jemaahNW dan masyarakat bisa hidup dan berakitivitas normal. Kondisi ini terus terjaga supaya masyarakat NW khususnya dan Lombok Timur umumnya dapat melakukan aktifitas secara normal.

Respons bupati dan kepala Bappeda Lombok Timur

Mantan Bupati Lombok Timur Ali bin Dahlan (2008) dalam sebuah acara silaturrohmi di Kecamatan Suralaga mengungkapkan kesedihannya terhadap apa yang terjadi di Desa Suralaga berkaitan dengan konflik NW. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan sebuah kekeliruan sejarah yang tidak boleh terulang kembali karena tidak sesuai dengan adat dan kultur masyarakat Suralaga yang suka perdamaian. Agama Islam mengharamkan darah saudara, harta benda, dan kehormatan saudara sesama Islam. Ali mengutip ayat Al-Quran: *'Innamal mukminu na ikhwatun faaslihu baina akhawaikum'*. Perpecahan dan konflik itu sia-sia dan mubazir. Orang di luar Islam sibuk mencuri waktu untuk memajukan dirinya, sementara kita masih sibuk saling membicarakan, memusuhi dan

membunuh sesama saudara. Ali lebih lanjut mengatakan pentingnya untuk silaturRohmi dan berhenti melakukan tindak kekerasan. Saling memaafkan itu murah tidak mengeluarkan biaya apa-apa, sedangkan perpecahan, konflik dan kekerasan biayanya sangat mahal mengakibatkan kehancuran, kerugian harta benda dan hilangnya sanak keluarga yang mati dalam konflik. Oleh karena itu, menurut Ali, NW harus sadar dan segera melakukan islah.

Respons anggota DPRD tingkat I dan II

Najmul Ahyar (2008), anggota DPRD tingkat I dari PPP (2004-2009), merespons konflik NW sebagai bukti belum dewasanya tokoh-tokoh NW dalam menyikapi perbedaan dan konflik. Konflik bisa membuat tokoh-tokoh NW menjadi lebih dewasa, akan tetapi konflik tetap tidak menjadi pilihan kita. Ini pilihan yang terburuk dari yang terbaik. Membangun kedewasaan dengan membangun konflik bukan pilihan yang baik. Membesarkan masing-masing NW dengan memelihara konflik sangat tidak menarik. Padahal mereka bisa saling menghargai; Kubu Pancor menghargai Kubu Anjani dan sebaliknya dan ini baru luar biasa. Bagaimanapun kepentingan politik ikut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap konflik NW. Kalau sudah mencapai target yang mereka inginkan seperti menjadi anggota dewan, kita tidak pernah menyaksikan mereka berkelahi. Akhyar melihat akar konflik NW tidak hanya masalah keluarga, tetapi lebih pada persoalan ekonomi dan politik. Ada upaya-upaya dari kedua kubu memperebutkan kepentingan ekonomi dengan menguasai aset-aset NW. Siapa yang banyak menguasai aset-aset maka dia yang menang. Sedangkan dalam konteks politik lebih terkait dengan perebutan kekuasaan. Para elit ingin berkuasa di atas banyak orang, tidak senang kalau kepentingan mereka terganggu. Jika tidak ada kepentingan, apa sulitnya untuk

menyatukan NW?

Solusi yang harus diambil untuk mengatasi konflik dan perpecahan ini, yakni mulai dari masing-masing pribadi. Ukurannya kita dan kawan-kawan tidak bisa mendudukkan kedua Ummi. Kita sebagai pengikut duduk secara bersama-sama, sama-sama NW, bukan menonjolkan perbedaan. Kalau kita tetap menonjolkan perbedaan maka sulit untuk bertemu, sementara peran banyak pihak sangat dibutuhkan untuk menyatukan NW. Banyak orang yang ingin memelihara konflik ini karena mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Jika ketua umum NW hanya satu dan sekjen hanya satu, yang muncul adalah apa peran saya, di mana posisi saya di dalam NW. Akhyar menyerukan untuk membersihkan diri dari kepentingan politik dan kembali ke khittah NW. Kembalikan perjuangan Tuan Guru Zainuddin untuk sosial, pendidikan dan dakwah Islamiyah. Tentu pilihan ini sulit karena NW sudah masuk terlalu dalam di ranah politik.

Fauzi (2008), anggota Dewan Tingkat II Lotim mengatakan, konflik NW merupakan warisan sejarah yang disebabkan oleh faktor kepentingan. Ada ambisi-ambisi oleh tokoh-tokoh tertentu yang ingin berkuasa dalam tubuh NW. Elit-elit NW seharusnya belajar dari sejarah bagaimana konflik internal NW sudah jauh hari terjadi karena adanya persaingan kepentingan di kalangan elit-elit NW. Semestinya kader-kader NW sekarang harus banyak belajar, bukan kemudian ikut terjebak dalam konflik NW. Ia menyarankan kepada kader-kader NW supaya tidak hanya mencari makan di NW, tetapi bagaimana memberi makan NW. Banyak sekali tokoh-tokoh NW yang menggantungkan hidup di NW sehingga memosisikan NW sebagai lembaga yang rawan konflik. Ketika memosisikan NW pada posisi rawan konflik maka NW tidak akan pernah maju.

BAB 5
Politik Gender, Otoritas Kharisma, dan Konflik Tuan Guru

Banyak sekali pandai membaca
Tapi tak pandai mengkaji yang nyata
Kitab yang gundul dibaca nyata
Di kitab berbaris hatinya buta
(Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat Renungan Masa*, 2002: 20)

Super (um)mi: melawan takdir dan politisasi gender

Era reformasi adalah era baru titik perubahan sosial bangsa Indonesia pasca lengsernya Presiden Suharto oleh gerakan reformasi yang diprakarsai kaum intelektual dan mahasiswa. Perubahan akibat reformasi ini berdampak pada perubahan seluruh aspek kehidupan; politik, ekonomi, agama, budaya, dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dan partisipasi kaum perempuan di ranah publik pasca reformasi merupakan isu yang menarik karena sebelumnya peran dan akses mereka sangat terbatas. Walaupun Ibu Tien Suharto dikenal sebagai sosok kunci di balik kesuksesan Suharto, tetapi peran sosial dan agenda gendernya masih sangat lemah. Konstitusi negara juga belum menaruhnya pada porsi yang proporsional (Blackburn 2004; Masruchah 2009). Kultur dan sistem politik yang telah berubah pada

masa reformasi memunculkan perempuan-perempuan hebat seperti Sri Mulyani, Miranda Gultom, Dewi Fortuna Anwar, Marwah Daud Ibrahim, Rini Suwandi, Nurul Arifin, dan lain-lain. Tokoh-tokoh perempuan yang berkiprah di ranah politik terus bertambah ketika DPR membuat Undang-undang baru yang mengharuskan partai politik melibatkan 30% kepengurusan partai diisi oleh kaum perempuan (Soetjipto 2006; Subono 2006). Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meraih suara 30% pada Pemilu 1999 telah mengantarkan Ketua Umumnya Megawati Sukarno Puteri sebagai Wakil Presiden. Dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden, Megawati kemudian menggantikan Gus Dur yang diturunkan oleh MPR. Kemunculan Megawati sebagai orang nomor satu di Indonesia telah mengubah kultur sosial politik Indonesia yang selama ini dikuasai oleh laki-laki (*male domination*) (Blackburn 2004; Smith 2014).

Tapi jauh sebelum Megawati menjadi Presiden perempuan pertama, fenomena yang menarik terjadi di lingkungan organisasi NW di mana Ummi Raihanun muncul sebagai pemimpin perempuan pertama pasca Tuan Guru Zainuddin wafat. Terlepas dari pro dan kontra terpilihnya R2 sebagai Ketua Umum PB NW pada Muktamar NW ke-10 di Praya 1998, namun kehadirannya telah membuat sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah para tuan guru yang mendukung R2 sebagai Ketua Ormas Islam terbesar di NTB ini adalah langkah berani dan berseberangan dengan budaya lokal dan tradisi agama di Lombok (Hamdi 2011; Macdougall 2007; Smith dan Hamdi 2014).

Tampilnya R2 sebagai pemimpin NW banyak mengundang reaksi dari elit-elit NW terutama kubu kakaknya R1 yang tidak menginginkan adanya politisasi keluarga untuk kepentingan elit-elit tertentu. R1 sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak mau ikut

berkompetisi dalam bursa pencalonan sebagai ketua umum dengan alasan tidak mau mempertajam konflik keluarga. Dengan bahasa lain dia juga berharap bahwa saudaranya R2 tidak mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pendukungnya karena tidak akan menyelesaikan masalah di internal keluarga mereka. Pada Muktamar Praya Kubu R1 tidak pernah memprediksi jika R2 dicalonkan oleh pendukungnya. Kemenangan R2 tidak diterima oleh sebagian elit dan tokoh agama dari kubu R1 karena dinilai melanggar aturan organisasi NW yang menganut Mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan perempuan sebagai pemimpin (Hadi 2010; Hamdi dan Smith 2012; Muhtar 2010). R2 dikritik dan digugat karena statusnya sebagai perempuan. Alasan ini tentu bukan alasan utama karena mereka sebelumnya telah mengalami perpecahan dan konflik keluarga.

Meskipun isu gender memainkan peran penting dalam konflik yang melibatkan keluarga pendiri NW, tetapi saya melihat gender bukan satu-satunya faktor penyebab penolakan atas R2 sebagai pemimpin NW. Gender hanyalah sebagai alat untuk melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh kakaknya R1. R1 merasa tidak diperlakukan secara adil oleh elit-elit NW termasuk para tuan guru yang tidak pernah mengakui eksistensinya sebagai salah satu putri Tuan Guru Zainuddin, di mana dia juga mempunyai hak melanjutkan estafet kepemimpinan di NW, bahkan R1 dan pendukungnya cenderung mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil (Muhtar 2010; Nazri 2000; Smith dan Hamdi 2014). Konflik keluarga antara R1 dan R2 telah merembet ke konflik organisasi karena keduanya merupakan tokoh sentral di NW. Setelah Tuan Guru Zainuddin wafat tahun 1997 keduanya muncul sebagai pengganti bapaknya dan mewarisi kharisma dan otoritas kepemimpinannya.

Konflik yang berkepanjangan pasca Muktamar Praya membuat

R1 dan R2 harus berpisah sejak 1998 karena para pendukungnya tidak berhasil melakukan kompromi, sharing kekuasaan, dan negosiasi politik dengan pendukung kakaknya. Malah sebaliknya muncul klaim bahwa R2 dan keluarganya yang diberi mandat oleh ayahnya untuk memegang dan mengelola organisasi NW, bukan keluarga kakaknya R1. Klaim ini diperkuat dengan dikeluarkannya surat kuasa oleh Tuan Guru Zainuddin beberapa hari sebelum wafat. Wasiat verbal juga diberikan oleh Tuan Guru Zainuddin melalui para tuan guru untuk melibatkan R2 dalam setiap keputusan organisasi (Hamdi dan Smith 2012; Mugni 2013). Sementara Kubu R1 menilai semua ini sebagai rekayasa supaya R2 menjadi penguasa tunggal atas organisasi NW. R1 dan pendukung melakukan perlawanan dengan memprotes keras surat kuasa dan pemecatan suaminya sebagai Sekjen PB NW dan ketua STKIP. Peta politik NW yang mayoritas elit-elitnya termasuk para tuan guru dengan mudah telah mengantarkan R2 menuju kursi Ketua Umum PB NW pada Muktamar Praya.

Setelah R2 dan pendukungnya hijirah (migrasi) meninggalkan Pancor, kendali organisasi NW di Pancor dipegang oleh kakaknya R1. R2 dan pendukungnya melanjutkan kepengurusan NW hasil Muktamar Praya dengan berkantor di Desa Kalijaga kemudian pindah ke Desa Anjani. Mereka membuat lembaga-lembaga pendidikan baru yang hampir sama dengan lembaga pendidikan NW di Pancor. Kepindahan R2 yang diikuti oleh sebagian besar siswa, guru, dosen, tuan guru dan elit-elit lainnya sangat mempermudah dirinya untuk membangun lembaga baru tersebut (Hadi 2010; Hamdi 2011; Muhtar 2010). Lembaga-lembaga pendidikan ini diisi oleh para siswa yang dibawa pindah dari Pancor. R2 hingga sekarang masih mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PB NW, sedangkan R1 lebih mempercayakan pada anaknya. Langkah pertama R1 adalah merekomendasikan putranya sebagai

Ketua Umum PB NW melalui Muktamar Reformasi tahun 1999. Meskipun R1 tidak langsung menjadi ketua, tetapi perannya tetap sentral di NW, kebijakan-kebijakan organisasi harus melalui restu dirinya terlebih dahulu (Hamdi 2011; Muhtar 2010; Nazri 2000).

Yang menarik adalah tampilnya kedua putri Seikh sebagai pemimpin NW dan umat Islam di Lombok diterima begitu saja oleh masyarakat terlepas dari konflik keluarga. NW yang didominasi oleh kaum laki-laki baik sebagai guru, dosen, politisi, dan tuan guru mendukung kepemimpinan keduanya. Bahkan mereka berdua digelari *Ummi* (Nasri 2014; Smith dan Hamdi 2014; Smith 2014). Kata *ummi* berasal dari bahasa Arab yang berarti *ibuku*. Meskipun gelar ini telah jamak digunakan sebelumnya sebagai panggilan untuk istri-istri para tuan guru termasuk para istri Tuan Guru Zainuddin, tetapi gelar ini lebih populer di publik ketika keduanya menggunakan gelar tersebut. Kata-kata *ummi* memiliki kekuatan dan legitimasi sosial. Semua jemaahNW termasuk elit-elit NW memanggil keduanya dengan sebutan *ummi*. Wafatnya Tuan Guru Zainuddin tahun 1997 mempunyai dampak yang luas terhadap jemaahNW. Mereka seperti kehilangan seorang figur bapak, dan sekarang mereka membutuhkan figur ibu melalui kedua putri beliau, yaitu Ummi Rauhun dan Ummi Raihanun.

Munculnya kedua putri Tuan Guru Zainuddin sebagai pemimpin organisasi NW telah mengubah sistem kepemimpinan dari 'bapakisme' ke 'ibuisme'. Gelar *ummi* yang diberikan kepada keduanya menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh seorang ibu yang berperan sebagai pembimbing dan pemimpin umat. Fenomena ini bisa ditafsirkan bahwa sebagian dari pengikutnya keduanya berpartisipasi dalam proses mengkultuskan mereka. Lebih lanjut sebagian pengikut juga boleh dikatakan menganggap mereka sejenis 'dewi' yang perintahnya harus dilakukan dan yang akan

menyelamatkan dan memajukan rakyat (Hamdi dan Smith 2012; Macdougall 2004). Setiap kebijakan dan persoalan yang berkaitan dengan organisasi maupun politik harus melalui nasihat keduanya. Pengaruh dan kharisma yang mereka miliki tidak bisa dipisahkan dari nama besar orangtuannya yang dikenal sangat kharismatik. Terlepas dari bayang-bayang nama besar orangtuanya, keduanya telah membuktikan diri mereka sebagai pemimpin organisasi NW yang sukses meskipun di tengah konflik dan perpecahan internal NW. Setelah terpilihnya Tuan Guru Bajang sebagi Gubernur NTB, Syamsul Lutfi sebagai Wakil Bupati Lotim, dan juga Syamsul Mujahidin sebagai anggota DPR RI muncul istilah '*Supermi*' ' Surat Perintah Ummi' (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Muhtar 2010; Smith dan Hamdi 2014). Jika *Ummi* memberikan fatwa atau rekomendasi, maka seluruh jemaahNW harus taat dan mengikutinya.

Kedua *Ummi* pada prinsipnya mempunyai keinginan yang sama untuk mengelola dan mengembangkan NW. Namun karena kuatnya peran kelompok kepentingan di sekeliling mereka membuat keduanya seringkali berseberangan ide dan gagasan dalam menyikapi dan mengambil kebijakan organisasi. Keduanya telah membuktikan diri sebagai pemimpin perempuan yang paling berpengaruh di Lombok. Keduanya juga berhasil membuktikan diri sebagai pemimpin yang berhasil melakukan pembangunan di berbagai bidang. R2 misalnya, dalam beberapa tahun dia telah mampu menyulap Desa Anjani yang sebelumnya dikenal sebagai tempat penanaman 'tebu' menjadi salah satu pusat kota pendidikan. Dia telah mendirikan lembaga-lembaga baru mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain mendirikan lembaga pendidikan di Anjani, dia juga aktif membangun cabang-cabang pendidikan di kampung-kampung yang belum memiliki madrasah. Dia juga membuka cabang lembaga pendidikan di luar daerah seperti di Sulawesi, Bali, Kalimantan, dan Riau. R2 juga aktif di bidang

dakwah mengadakan pengajian keliling di desa-desa yang menjadi basis jama'ahnya. Di setiap pengajian inilah R2 mensosialisasikan kegiatan dan program organisasi serta dan kampanye politik. Selain itu, R2 juga sangat aktif dalam politik praktis baik di pentas lokal maupun nasional. Sejak 1998 hingga Pemilu 2009 dia telah bergabung ke berbagai partai seperti Golkar dan PBR. Di bawah kepemimpinannya, kader-kader NW mampu meraih suara yang signifikan duduk di kursi dewan sebagai anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Muhas 2009).

Sebagai kakak Ummi Rauhun juga tidak mau kalah dalam *fastabiqul khairat.* Dia mulai melakukan pembenahan dan restrukturisasi organisasi NW di Pancor pasca ditinggal oleh kubu adiknya R2. Dia merampungkan pembangunan gedung Perpustakaan Birrul Walidain yang dibangun sejak masa ayahnya dan merombak gedung-gedung sekolah yang lama dan membangun gedung baru seperti bangunan gedung STKIP Hamzanwadi dan IAIH Pancor. Dia juga membangun Stasiun Radio Hamzanwadi sebagai media dakwah. Selain itu R1 juga aktif turun ke lapangan melakukan pengajian ke desa-desa. Sama dengan adiknya, R1 mempunyai pengaruh yang sangat kuat sebagai tokoh politik. Dia mengarahkan NW Pancor berafiliasi ke Partai Bulan Bintang (Pemilu 2004 dan 2009) dan Partai Demokrat untuk Pemilu tahun 2014 serta memperoleh suara yang signifikan di setiap Pemilu di Lombok (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Muhas 2009; Muhtar 2010; Muslim 2014). Kesuksesan terbesarnya adalah mengantarkan ketiga anakanya duduk di lembaga eksekutif dan legislatif, yaitu Tuan Guru Bajang sebagai Gubernur NTB, Syamsul Lutfi sebagai Wakil Bupati Lombok Timur, dan Siti Rohmi Jalilah sebagai Ketua DPRD II Lombok Timur Periode 2009-2014.

Tuan Guru 'Bajang': Kharisma dan otoritas kepemimpinan

Di atas sudah disinggung bagaimana kepemimpinan diwariskan kepada kedua putri Tuan Guru Zainuddin. Maka dalam pembahasan ini saya juga akan mengeksplorasi warisan kepemimpinan kepada generasi selanjutnya, yaitu kepada cucu dari kedua putrinya, yaitu Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Astani. Ini sangat menarik karena kedua keturunan ini mengklaim sebagai pewaris yang paling sah dan paling cocok untuk mengganti Tuan Guru Zainuddin. Secara kebetulan kedua tokoh ini mendapat gelar yang sama, yaitu *Tuan Guru Bajang (TGB)* yang berarti *Tuan Guru Muda (Kiai Muda)*. Keduanya diharapkan mampu menggantikan posisi kakeknya sebagai pemimpin organisasi NW dan umat Islam, namun karena keduanya harus berhadapan dengan realitas perpecahan dan konflik keluarga, maka bukan kerjasama yang terbentuk, tetapi persaingan antara keduanya terutama pendukung masing-masing yang mengklaim sebagai pewaris yang lebih asli. Pemberian gelar TGB juga mengalami gugatan dari masing-masing kubu karena terpengaruh oleh konflik yang terjadi di antara mereka (Hamdi 2011; Smith dan Hamdi 2014). Gelar ini menjadi komoditas politik ketika masa Pilkada tahun 2008 dan mengalami politisasi yang menjurus pada tafsir subjektif kelompok. Padahal gelar TGB merupakan gelar simbolik atas proses regenerasi kepemimpinan generasi awal ke generasi berikutnya.

Kajian di sini tidak berbicara pada keaslian atau tidak, tetapi melihat realitas sosial yang mendekati ketokohan pendiri awal organisasi NW dan upaya perubahan yang dilakukan oleh keduanya. Secara etimologis, kata 'Tuan Guru Bajang' berasal dari kata 'Tuan Guru' dan 'Bajang'. Tuan guru adalah sebutan atau gelar bagi seorang tokoh agama (sama dengan kiai dalam budaya Jawa),

sedangkan istilah *bajang* berasal dari bahasa Sasak yang berarti *muda*. Kata *bajang* juga dalam tradisi masyarakat Sasak seringkali diidentikkan dengan sebutan orang yang statusnya belum menikah. Secara terminologis, TGB merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang masih muda dari segi usia tetapi memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas dan alim. Dengan demikian, gelar TGB diberikan karena orang tersebut selain masih muda juga mempunyai ilmu pengetahuan agama yang matang.

Gelar TGB pada umumnya telah digunakan oleh komunitas Muslim di Lombok, namun gelar TGB belakangan ini secara konsisten lebih banyak digunakan di komunitas NW sehingga gelar ini menjadi sebuah identitas yang melekat pada tokoh-tokoh NW, khususnya keturunan Tuan Guru Zainuddin. Dalam sejarahnya, gelar TGB mulai digunakan dan populer sejak tahun 1930-an ketika masyarakat memberi gelar ini kepada Tuan Guru Zainuddin setelah pulang dari Mekah. Pemberian gelar ini dilatarbelakangi oleh kekaguman masyarakat melihat sepak terjangnya dalam gerakan pembaruan Islam di usia yang masih relatif muda. Orang yang memberi gelar TGB kepada Tuan Guru Zainuddin adalah masyarakat, para jama'ah, dan murid-murid yang hadir di forum pengajiannya karena kagum dengan keilmuan agama yang dimilikinya, sedangkan umurnya masih muda. Mereka terkesan dengan kiprah dan gebrakan Tuan Guru Zainuddin melakukan perubahan di Lombok, di mana masyarakat Lombok pada waktu itu belum memahami dan mempraktikkan agama secara benar. Pemberian gelar TGB kepada Tuan Guru Zainuddin menjadi sebuah identitas baru yang melekat dan menyatu pada dirinya. Kapanpun dia selalu dipanggil TGB ketika masih di usia yang produktif. Gelar TGB tidak selamanya digunakan oleh penyandang gelar karena dibatasi oleh faktor usia; *bajang* yang berarti muda akan mengalami pergeseran menjadi tua '*toak*'. Maka secara otomatis, gelar TGB akan berubah menjadi

gelar yang sesuai dengan umur pemegang gelar tersebut. Tidak jelas kapan Tuan Guru Zainuddin berhenti dipanggil TGB karena ketika menginjak usia tua beliau dipanggil dengan beberapa gelar Tuan Guru *Toak* (TGT), Tuan Guru *Datok* (TGD), Tuan Guru *Wayah* (TGW) dan Tuan Guru *Lingsir* (TGL) (Nu'man 1999: 175). Semua gelar *toak, datok, wayah,* dan *lingsir* merupakan kata sinonim yang yang berarti *tua*. Dengan demikian, secara natural dan kultur gelar TGB tidak akan digunakan lagi setelah mengalami masa tua.

Pemberian gelar TGB muncul kembali di 1986 ketika lahir salah seorang cucu Tuan Guru Zainuddin yaitu Muhammad Zainuddin Astani, putra ke enam dari Raihanun. Nama Zainuddin Astani ini langsung diberikan oleh Tuan Guru Zainuddin kepada cucu kesayanganya ini. Sebagaimana dikutip oleh R2 (2008), Tuan Guru Zainuddin mengatakan:

> 'Cucu saya ini lahir pada bulan yang sama dengan bulan kelahiran saya. Sayalah yang memberi dia nama Muhammad Zainuddin Astani. Saya berikan nama yang sama dengan nama saya, yaitu Muhammad Zainuddin. Dari keturunannya kelak akan lahir Zainuddin Atsalis, Arrabi', dan seterusnya'.

Pemberian nama Zainuddin Astani menyebar ke seluruh masyarakat NW. Tuan Guru Zainuddin di beberapa kesempatan pengajian memberi tahu para jama'ahnya jika cucunya yang baru lahir dinamakan Zainuddin Astani. Menginjak usia empat tahun Tuan Guru Zainuddin memberinya gelar TGB. Tuan Guru Zainuddin sebagaimana diceritakan Raihanun mengatakan: *'Laek aku barukku datang leman Mekah Tuan Guru Bajang ta klek aku, nane gelar Tuan Guru Bajang aku turunang lek waingku Zainuddin*

Astani'. Pemberian gelar TGB kepada Sani merupakan peristiwa unik dan langka dalam sejarah NW. Pemberian gelar tersebut diberikan sejak dirinya masih usia anak-anak 4 tahun. Sulit untuk menafsirkan makna dari pemberian gelar TGB tersebut. Astani yang masih anak-anak terlalu prematur jika diberikan gelar 'tuan guru' karena dia belum menjadi seorang yang alim dan belum menunaikan haji. Padahal salah satu syarat menjadi seorang tuan guru harus melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Bagaimanapun pintar dan luas ilmu agama seseorang jika belum naik haji belum bisa diberi gelar tuan guru. Gelar 'bajang' juga tidak sesuai dengan kondisi umurnya karena belum menginjak masa remaja, sebaliknya dia adalah seorang anak yang belum memahami apa-apa pada waktu itu.

Pertanyaannya adalah kenapa dia diberi gelar 'Tuan Guru Bajang' oleh Tuan Guru Zainuddin? Kenapa gelar TGB tidak diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain yang lebih senior dan berpendidikan lebih tinggi. Pemberian gelar TGB kepada Astani menjadikan gelar ini populer kembali di kalangan jemaahNW pada tahun 1980-an. Nuansa mistik sangat kental mewarnai proses pemberian gelar tersebut. Astani sebagaimana kakeknya mengalami 'pengkultusan' dari sejak kecil hingga sekarang karena dianggap sebagai titisan dan pewaris ilmu kakeknya. Meskipun belum menunjukkan peran yang maksimal di masyarakat, tetapi jemaahNW yang setia dengan fatwa Tuan Guru Zainuddin meyakini suatu saat dia akan menjadi tokoh besar di dalam maupun di luar organisasi NW. Masyarakat mengetahui pemberian gelar TGB kepada Astani melalui pengajian-pengajian keliling yang dilakukan oleh Tuan Guru Zainuddin. Pada waktu usia 4 tahun Tuan Guru Zainuddin mulai mengajak cucunya Sani ikut pengajian keliling kampung. Di sela-sela pengajian itulah dia memperkenalkan dan mempromosikan cucunya kepada jemaahNW. Berbagai respons muncul menyikapi

pemberian gelar tersebut, sebagian bingung karena anak kecil diberi gelar TGB. Sebagian masyarakat sangat antusias dengan keberadaan TGB yang baru meskipun usianya masih kecil. Bagaikan seorang raja yang akan dinobatkan sebagai raja baru, Sani sangat dihormati. Sebagian masyarakat seringkali memintanya untuk mendoakan mereka, mereka percaya bahwa dia adalah titisan kakeknya yang memiliki banyak keistimewaan.

Pada tahun 1997 gelar TGB muncul kembali di tengah-tengah komunitas NW. Salah seorang cucu Tuan Guru Zainuddin dari anak pertamanya Ummi Rauhun yang bernama Muhammad Zainul Majdi mendapat gelar Tuan Guru Bajang (TGB). Menuru H. Khabir dari Suralaga (2008), salah seorang kepercayaan Tuan Guru Zainuddin ketika masih hidup, dari enam bersaudara hanya Muhammad Zainul Majdi yang diberikan nama langsung oleh Tuan Guru Zainuddin. Nama Muhammad Zainul Majdi diambil dari dua nama yang digabungkan, yaitu namanya sendiri Muhammad Zainuddin dan nama ayahnya Abdul Madjid. Jadi, Muhammad Zainul Majdi adalah kepanjangan dari Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Menurut Syakur (2006) dan informasi dari masyarakat, orang yang memberi gelar TGB kepada Zainul Majdi adalah masyarakat umum atau jemaahNW. Pada waktu itu Tuan Guru Zainul Majdi yang baru pulang dari Universitas Al-Azhar Mesir memberikan ceramah di Masjid At-Taqwa Pancor beberapa hari setelah Tuan Guru Zainuddin wafat. Melihat performanya yang memiliki ilmu agama yang dalam dan memiliki *skill* ceramah yang sangat bagus mengingatkan para jemaahNW akan kakeknya di awal-awal pulang dari Mekah. Alasan inilah yang membuat jemaahNW memberi gelar TGB kepadanya. Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi dianggap sebagai orang yang tepat menggantikan dan mewarisi keilmuan kakeknya sebagai tokoh agama yang kharismatik dan berpengetahuan luas. Dari sejak itulah beliau dipanggil TGB

oleh jemaahNW dan masyarakat di Lombok.

Dari sejarah munculnya gelar TGB di atas, maka terdapat tiga orang yang memiliki gelar TGB di NW, yaitu: Tuan Guru Zainuddin, Muh. Zainuddin Astani, dan Muhammad Zainul Madji. Pemberian gelar TGB dalam budaya dan tradisi NW tidak sembarangan karena tidak semua orang memperoleh gelar TGB meskipun dari keluarga Tuan Guru Zainuddin. Gelar TGB merupakan gelar yang memiliki nilai prestisius yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, ketiganya merupakan orang yang memiliki keistimewaan masing-masing. Tidak ada perbedaan yang substansial dari pemberian gelar kepada mereka sebagaimana yang banyak dipertanyakan dan diperdebatkan oleh jemaahNW yang notabenenya pendukung kedua kubu. Perbedaan pemberian gelar TGB untuk ketiganya hanya faktor sosio-historis yang melatarbelakangi pemberian gelar tersebut.

Ketika NW mengalami konflik internal, gelar TGB menjadi kontra produktif di tengah-tengah jemaahNW. Bahkan gelar TGB telah menjadi komoditas politik khususnya pada Pilkada 2008 oleh kelompok-kelompok tertentu baik di kalangan internal maupun eksternal NW. Gelar TGB mengalami gugatan historis dan otoritas oleh pendukung kedua kubu NW yang terlibat konflik. Konflik NW mempunyai bias terhadap eksistensi nilai, definisi, dan makna TGB. Bagi pendukung R2, gelar TGB hanya dimiliki oleh dua orang; Tuan Guru Zainuddin dan Muhammad Zainuddin Astani. Bagi kelompok ini, Astani merupakan TGB yang 'asli' karena gelar TGB diberikan langsung oleh Tuan Guru Zainuddin. Mereka juga memaknai bahwa pemberian nama dan gelar tersebut sebagai simbol jika dialah yang akan menggantikan kakeknya sebagai pemimpin NW, bukan tokoh NW yang lain.

Berbeda dengan pendukung R1 yang menilai pemberian gelar TGB kepada Zainul Majdi merupakan hal yang wajar karena selain keturunan Tuan Guru Zainuddin, dia mempunyai ilmu pengetahuan keagamaan yang tidak kalah dengan kakeknya. Pemberian gelar TGB oleh masyarakat kepada Zainul Majdi adalah pengulangan sejarah karena Tuan Guru Zainuddin diberi gelar TGB oleh masyarakat. Menurut pendukung dari Kubu R1 (2008), Zainul Majdi yang lebih pantas diberi gelar TGB karena sesuai dengan kapasitas keilmuan dan kapabilitasnya, bukan saudaranya yang lain. Mereka meyakini jika Zainul Majdi adalah orang yang mewarisi sifat dan keilmuan kakeknya sesuai dengan fakta di lapangan ketika beliau mengeluarkan fatwa. Menurut kubu ini, proses pemberian gelar TGB kepada Astani tidak lebih sebagai do'a supaya beliau menjadi tuan guru. Kubu R1 juga menilai pemberian gelar TGB kepada Astani adalah bagian dari rekayasa politik yang dimainkan oleh keluarganya supaya dapat menguasai NW. Mereka juga menggugat Astani yang dinilai belum mampu mengemban gelar TGB jika dilihat dari kiprahnya di masyarakat. Sangat berbeda dengan Zainul Majdi yang sudah membuktikan dirinya baik di tingkat lokal maupun nasional, bahkan internasional sebagai sosok yang punya integritas menggantikan posisi Tuan Guru Zainuddin dan sebagai pemimpin ummat.

Pendefinisian TGB sekarang ini mengalami pergeseran nilai dan makna karena pendefinisikan tersebut menurut batasan geografis dan kepentingan kelompok masing-masing. Kenyataannya, gelar TGB didefinisikan sesuai dengan kepentingan politik masing-masing kubu NW yang sedang terpecah menjadi dua kubu. Pertanyanya adalah: Apakah pemberian gelar TGB sarat dengan muatan politik? Ada apa di balik pemberian gelar TGB tersebut?

Saya berargumen bahwa segala sesuatu tidak bisa lepas dari

kepentingan politik, termasuk pemberian gelar TGB. Saya melihat di balik pemberian gelar TGB bukan persoalan gelarnya karena itu hanyalah simbol, namun substansi dari gelar TGB adalah sebuah pertarungan siapa yang akan menggantikan posisi Tuan Guru Zainuddin sebagai tokoh agama dan pemimpin NW ke depan? Saya tidak melihat perbedaan yang signifikan dalam proses pemberian gelar TGB baik yang diberikan oleh masyarakat maupun Tuan Guru Zainuddin secara langsung. Kedua-duanya sama-sama memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat, apalagi keduanya mempunyai hak yang sama mewarisi kepemimpinan di lingkungan NW sebagai salah satu keturunan Tuan Guru Zainuddin.

Di tengah-tengah konflik dan perpecahan NW, peran kedua TGB sangat penting untuk menyatukan NW. Di tangan kedua TGB inilah NW akan memperoleh kemajuan pesat jika mereka bersatu. Seandainya kedua TGB bersinergi, maka perubahan besar akan terjadi karena keduanya memiliki legitimasi sosial yang sama-sama kuat. Keduanya sangat dibanggakan dan diandalkan oleh pendukung masing-masing. Namun sayangnya, kedua TGB ini belum dapat bekerja sama, dan sebaliknya masih 'terjebak' dalam konflik organisasi. Bukannya mereka saling mendukung justru saling menggugat dan mengkritisi posisi masing-masing. TGB Zainuddin Astani menilai bahwa hanya dirinya yang diberi gelar TGB oleh kakeknya dan yang lain tidak memiliki legitimasi. Sementara TGB Zainul Majdi lebih moderat dalam melihat gelar TGB dan mengakui bahwa sepupunya juga mendapat gelar tersebut. Bahkan di beberapa pengajian, TGB Zainul Majdi mengatakan kepada pendukungnya bahwa di kubu NW Anjani juga terdapat TGB yang lain selain dirinya.

Perselisihan antara kedua keluarga putri Tuan Guru Zainuddin ini akhirnya melibatkan seluruh keluarga termasuk anak-anak

mereka. Konflik NW dapat dikatakan sebagai konflik warisan dari keluarga sebelumnya. Kedua TGB mewarisi persoalan keluarga dan konflik organisasi yang melibatkan keluarga besar mereka. Usaha-usaha untuk mempertemukan keduanya juga sudah dilakukan oleh pendukung kedua kubu tetapi selalu gagal. Jika saja keduanya dapat bertemu dan membangun kerja sama, dan keluar dari banyang-bayang konflik, maka NW akan meraih kesuksesan yang jauh lebih besar lagi. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya mempunyai basis massa yang besar yang dapat membawa pada perubahan yang lebih baik. Masing-masing pendukung percaya bahwa keduanya adalah titisan Tuan Guru Zainuddin baik secara biologis dan keilmuan yang akan membawa NW pada kesuksesan. Sementara ini, TGB Zainul Majdi lebih dikenal dan lebih banyak berperan di ranah publik, sedangkan TGB Zainuddin Astani masih menunggu waktu yang tepat untuk berkiprah secara total, walapun sudah mulai terjun di pendidikan dan organisasi.

Peran tuan guru dalam konflik

Tuan guru sebagaimana kiai di Jawa berperan sebagai pembimbing agama dan spiritual melalui majelis ta'lim, lembaga pendidikan formal, dan informal seperti pesantren dan madrasah. Peran ini merupakan peran yang normatif dan standar bagi seorang kiai atau tuan guru, peran ini bisa lebih luas tergantung pada kondisi sosio-politik yang berkembang di masyarakat (Dhofier 1994; Habibuddin 2005; Kingsley 2010; Muslim 2014). Peran tuan guru yang sangat penting di masyarakat telah menempatkan mereka sebagai kelompok elit yang sangat dihormati, dipuja, dan dimuliakan oleh para pengikutnya. Bahkan tidak jarang tuan guru diposisikan sebagai orang yang 'suci' atau dikultuskan oleh pengikutnya. Tuan guru ibarat raja-raja kecil yang sedang menjalankan kekuasaannya

di tengah-tengah masyarakat. Apa yang digambarkan oleh Dhofier (1994: 56) tentang kemiripan peran kiai di Jawa dengan seorang raja, tidak jauh berbeda dengan tuan guru di Lombok. Mereka diposisikan sebagai raja-raja kecil di masyarakat yang memiliki massa pendukung yang sangat loyal dan fanatik kepada mereka. Madrasah dan pesantren adalah kerajaan mereka, sedangkan yang menjadi rakyatnya adalah para santri yang belajar di pesantren. Di desa-desa tertentu para tuan guru telah memiliki wilayah *kaplingan* (sebagai wilayah kekuasaannya), tidak boleh tuan guru lain masuk ke wilayah tersebut (Hadi 2010; Hamdi 2013; Muhtar 2010).

Dari tahun ke tahun, sebagaimana kyai peran tuan guru juga mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Para tuan guru tidak hanya menjadi pembimbing spiritual dan tenaga pengajar di institusi pendidikan, tetapi mereka juga aktif di dunia politik praktis. Pergeseran ini disebabkan perubahan sosio-politik di Indonesia, di samping itu mereka juga merasa perlu memahami kehidupan politik (Habibuddin 2005; Hamdi 2011; Jamaludin 2011; Kingsley 2010; Turmudi 2004). Sepak terjang para tuan guru di dunia politik praktis telah mewarnai dinamika politik lokal dan nasional. Sebagian tuan guru pernah duduk di pentas politik nasional sebagai anggota MPR dan DPR RI pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa reformasi, jumlah tuan guru terus meningkat duduk di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif terutama di daerah (Fahrurrozi 2011; Muhas 2009; Muhtar 2010). Melebarnya peran tuan guru ini merupakan sesuatu yang wajar karena mereka memiliki modal sosial yang sangat besar di masyarakat. Mereka tidak hanya memiliki otoritas kharismatik dan tradisional, tetapi juga mempunyai massa yang riil yang mendukung dan melindungi mereka (Hadi 2010; Hamdi dan Smith 2012).

Relasi antara tuan guru dengan politik praktis sering

melahirkan konflik antara tuan guru dengan pemerintah, bahkan antara tuan guru sendiri. Konflik di internal tuan guru terjadi karena persaingan dalam memperebutkan posisi-posisi penting di pemerintahan dan masyarakat yang merupakan wilayah *kaplingan* mereka (Alfarisi 2014; Hamdi 2011; Jamaludin 2011; Kingsley 2010; Smith dan Hamdi 2014). Kasus tahun 1982 merupakan salah satu contoh penting bagaimana konflik menimpa para tuan guru dalam organisasi NW. Mereka tidak hanya menghadapi konflik dengan Golkar, tetapi juga sesama tuan guru di NW. Tuan guru yang memilih tetap di Golkar pada waktu itu harus keluar dari NW karena dianggap tidak loyal kepada pimpinan organisasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan konflik kepentingan yang muncul di kalangan para tuan guru di internal NW. Keluarnya sebagian tuan guru dari NW menguntungkan sebagian tuan guru yang belum memperoleh posisi di NW. Konflik dan perpecahan semakin terbuka antara tuan guru, mereka berkompetisi meraih simpati dari pemimpin, tidak jarang dari mereka saling menjatuhkan dan saling memfitnah (Fahrurrozi 2011; Hamdi 2011; Jamaludin 2011).

Telah menjadi *blue print* jika konflik dan perpecahan NW melibatkan para tuan guru. Tuan guru termasuk jajaran kelompok elit dalam struktur organisasi NW, selain mengajar di lembaga pendidikan seperti di madrasah dan perguruan tinggi, sebagian juga merangkap sebagai Wakil Ketua Umum PB NW dan Dewan Syuro PB NW. Sebagian mereka menduduki posisi di kepengurusan partai politik dan sebagai anggota dewan. Selama terjadi konflik dan perpecahan internal NW, tuan guru ikut mengalami konflik dan perpecahan (Hadi 2010; Muhtar 2010; Saprudin 2005; Smith dan Hamdi 2014). Tuan guru terbagi menjadi tiga kubu, pertama adalah kubu yang mendukung R1. Jumlah tuan guru yang mendukung R1 sangat kecil. Dari kalangan pengajar di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist yang mendukung R1, yaitu TGH. Yusuf Ma'mun, TGH.

Zahid Syarif, TGH. Tahir Azhari, dan TGH. Junaidi. Sedangkan dari kelompok JemaahWirid dia dukung oleh Ketua Koordinator JemaahWirid, yaitu TGH. Muhsin Maqbul. Mereka ini yang mengajar di Pancor dan menjadi kepercayaan Tuan Guru Zainuddin. Saya tidak menyebutkan secara detail para tuan guru yang mengajar di luar Pancor yang mendukungnya. Sedangkan para tuan guru yang mendukung Kubu R2 jauh lebih besar. Hampir semua tuan guru yang mengajar di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist mendukung R2 seperti TGH. Mahmud Yasin, TGH. Lalu Anas Hasyri, TGH. Zaini Abdul Hannan, TGH. Ruslan Zain, TGH. Mustami'uddin Ibrahim dan lain-lain (Mugni 2013; Muhtar 2010; Nazri 2000; Smith dan Hamdi 2014).

Yang menarik adalah keputusan para tuan guru yang mendukung salah satu putri Tuan Guru Zainuddin karena alasan loyalitas terhadap perintah Tuan Guru Zainuddin. Menurut tuan guru yang pro R2 (2008), setidaknya ada tiga alasan kenapa mereka mendukung R2, pertama, karena faktor wasiat Tuan Guru Zainuddin. Sebelum wafat Tuan Guru Zainuddin memanggil lima orang tuan guru menghadap kepadanya, yaitu TGH. Ruslan Zain, TGH. L. Anas Hasyri, TGH. Mahmud Yasin, TGH. Zaini Abdul Hannan, dan H. M. Thahir Azhari. Tuan Guru Zainuddin (1997) berpesan kepada mereka, 'Apa saja yang kamu kerjakan, musyawarahkan dulu dengan Raihanun'. Pesan ini dimaknai sebagai bentuk perintah untuk medukungan R2 sebagai pihak yang sah mengelola organisasi NW. Kedua, lahirnya surat kuasa dari Tuan Guru Zainuddin yang menunjuk R2 sebagai pewaris dan pengelola seluruh aset NW. Surat kuasa ini merupakan bukti tertulis jika Raihanun diberikan mandat untuk mengelola organisasi NW. Ketiga, Raihanun terpilih sebagai Ketua Umum PB NW yang sah pada Muktamar Praya.

Tidak jauh berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh

para tuan guru yang mendukung R1. Setidaknya ada dua alasan kenapa mereka mendukung R1, pertama mengikuti pesan Tuan Guru Zainuddin. Sebelum wafat, Tuan Guru Zainuddin (1997) memanggil TGH. Yusuf Ma'mun dan TGH. Muhsin Maqbul untuk menghadap dan berpesan kepada keduanya supaya tetap bersama menjaga R1. 'Jangan sampai kamu berpisah dari Rauhun', kata Tuan Guru Zainuddin. Pesan ini juga dimaknai sebagai perintah untuk mendukung R1. Kedua, mereka mendukung R1 karena rasa kasihan dia diperlakukan secara tidak adil oleh elit-elit NW yang pro R2 termasuk para tuan guru. R1 mengalami diskriminasi di lingkungan keluarga dan tidak diberikan askes untuk bertemu dengan Tuan Guru Zainuddin setelah perceraian anaknya dan pemecatan suaminya sebagai Wakil Sekjen PB NW. Bahkan menjenguk ayahnya yang sakit selalu dihalang-halangi oleh pendukung R2.

Meluasnya konflik dan kekerasan yang terjadi antara jemaahNW tidak lepas dari peran tuan guru. Kedua putri Tuan Guru Zainuddin di satu sisi menjadikan tuan guru sebagai alat kampanye mendukung kepemimpinan mereka. Keduanya juga sama-sama menggunakan pengajian (agama) sebagai media promosi dan sosialisasi (Hadi 2010; Hamdi 2011; Saprudin 2005). Di sisi lain, para tuan guru juga membutuhkan dukungan dari keluarga Tuan Guru Zainuddin sebagai bentuk legitimasi status sosial mereka. Tuan guru yang mendukung R2 aktif mengadakan pengajian ke masayarakat dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa merekalah kelompok yang benar karena dipilih dalam Muktamar Praya. Begitu juga dengan tuan guru di kelompok R1, mereka mengadakan pengajian ke masyarakat dan menerangkan jika mereka adalah kelompok yang benar yang tidak menyimpang dari aturan organisasi. Perang wacana antara tuan guru yang dilakukan melalui pengajian berdampak luas kepada masyarakat. Melalui indoktrinisasi agama dan ke-NW-an yang dijadikan sebagai dalil untuk menguatkan

pendapat mereka membuat masyarakat bingung dan terjebak dalam perpecahan. Dengan indoktrinisasi ini masyarakat menjadi fanatik kepada kubu masing-masing dan siap mati demi membela kubu mereka (Muhtar 2010; Saprudin 2005).

Konflik dan kekerasan antara jemaahNW seringkali terjadi pada waktu pengajian yang dipimpin oleh para tuan guru dari kedua belah pihak. Ini mengindikasikan kalau tuan guru benar-benar menjadi pemain dalam konflik NW. Dengan demikian, konflik NW bisa dikatakan sebagai konflik antara tuan guru (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012). Masyarakat rela mati hanya ingin membela tuan guru mereka masing-masing. Selama konflik NW, tuan guru menjadi target penyerangan massa dari kedua pendukung. Konflik dan kekerasan NW di Pancor misalnya, Tuan Guru Anas Hasyri, Tuan Guru Mahmud Yasin, Tuan Guru Tahir menjadi target penyerangan massa, rumah dan toko mereka dibakar. Hal yang sama terjadi di Kesik di mana Tuan Guru Bajang menjadi sasaran penyerangan massa. Pengajiannya dihadang dan digagalkan oleh massa pendukung R2 yang mau balas dendam. Peristiwa kekerasan di Paok Lombok juga tidak jauh berbeda karena para tuan guru menjadi target serangan seperti TGH. Junaidi, TGH. Athar Azhari, dan TGH. Nasruddin menjadi target oleh pendukung R2, begitu juga dengan TGH. Zaini Abdul Hannan dan TGH. Salehuddin adalah tokoh yang menjadi target pendukung R1.

Keterlibatan tuan guru dalam konflik NW merupakan sesuatu yang tidak wajar karena mereka seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan sebaliknya menjadi musuh masyarakat. Seandainya para tuan guru memosisikan mereka sebagai kelompok netral dalam menyikapi persoalan keluarga Tuan Guru Zainuddin, maka konflik tidak akan meluas. Keberpihakan mereka kepada salah satu putri Tuan Guru Zainuddin telah mempertajam konflik antara

kedua keluarganya. Padahal Tuan Guru Zainuddin dalam setiap kesempatan selalu memberi pesan untuk tidak membuang salah satu putrinya dan harus berlaku adil kepada keduanya. Tuan Guru Zainuddin mengatakan, 'Kedua putriku seperti kedua matakaku, kalau salah satu dihina maka sama dengan mencongkel salah satu mataku'. Apa yang dilakukan oleh para tuan guru merupakan sebuah kekeliruan dan penyimpangan dari keinginan dan wasiat Tuan Guru Zainuddin. Mungkinkah para tuan guru salah dalam menafsirkan fatwa-fatwa dan wasiat Tuan Guru Zainuddin?

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah keputusan tuan guru untuk berpihak kepada salah satu putri Tuan Guru Zainuddin merupakan sebuah kesetiaan atau penghianatan? Saya berargumen bahwa apa yang dilakukan tuan guru bukanlah sebuah kesetiaan, tetapi sebuah penghianatan karena mereka ikut memecah belah keluarga Tuan Guru Zainuddin. Terdapat konspirasi besar untuk memecah NW demi kepentingan kelompok masing-masing. Seandainya para tuan guru tidak terpengaruh dan terjebak dalam konflik, maka mereka dapat memainkan peran penting untuk menjaga persatuan keluarga Tuan Guru Zainuddin dan stabilitas organisasi NW. Kepentingan-kepentingan mereka telah mengarahkan mereka untuk memproduksi dan mereproduksi konflik di masyarakat dan di organisasi NW secara khusus.

Menggugat otoritas tuan guru

Wacana tentang tuan guru mulai banyak dibahas di dunia akademik. Dari tulisan-tulisan tentang tuan guru sebagian besar berisi tentang kritik dan gugatan terhadap peran dan otoritas tuan guru yang dipertanyakan kembali oleh sebagian sarjana. Seperti halnya kiai di Jawa yang akhir-akhir ini juga banyak mengalami gugatan karena perubahan peran dan orientasi kehidupan dan

politik mereka di era reformasi (Turmudi 2004: 2). Sebagian sarjana menilai tuan guru telah keluar dari tugas normatifnya sebagai tokoh agama dan pengayom masyarakat. Tuan guru dinilai lebih berperan ke dunia politik praktis daripada dunia keagamaan dan spiritual. Mereka seringkali mengeksploitasi otoritas kharisma dan tradisional mereka dengan memanfaatkan loyalitas masyarakat sebagai alat politik untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompoknya (Habibuddin 2005; Hamdi 2013; Jamaludin 2011; Kingsley 2010).

Munculnya gugatan dan kritikan terhadap otoritas tradisional dan kharisma tuan guru merupakan suatu yang lazim seiring terjadinya perubahan-perubahan peran sosial-politik di masyarakat yang berdampak pada perubahan relasi antara tuan guru dengan masyarakat (Hamdi 2011: Turmudi 2004). Apalagi istilah tuan guru merupakan konstruksi sosial yang masih bisa diotak-atik atau digugat. Kritikan dan gugatan tersebut memunculkan kembali pertanyaan, siapakah tuan guru yang sebenarnya dan apa peran mereka di masyarakat? Dari literatur-literatur yang mengkaji tentang tuan guru dan perannya di masyarakat, belum ada satu definisi yang definitif tentang istilah tuan guru. Para sarjana biasanya menyamakan istilah tuan guru dengan kiai (Jawa), *anjengan* (Sunda), *buya* (Minangkabau), dan *teungku* (Aceh). Meskipun terdapat persamaan dari istilah-itilah tersebut, tetapi nilai-nilai lokalitas dan dinamika sosio-kultural di tingkat lokal sangat mempengaruhi konstruksi istilah tersebut. Pendefinisian kiai di Jombang akan berbeda dengan tuan guru di Lombok (Alfarisi 2014; Dhofier 1994; Jamaludin 2011; Kingsley 2010; Turmudi 2004).

Secara etimologis, kata tuan guru berasal dari kata *tuan* yang berarti yang *mulia* dan *guru* yang berarti *pengajar*. Kata *tuan* dalam tradisi masyarakat Sasak juga digunakan sebagai sebutan bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Misalnya, seorang anak

memanggil orangtuanya yang telah naik haji dengan panggilan *pak tuan*, *mamiq tuan* (untuk bapak), atau *inak tuan* (untuk ibu). Dalam tradisi 'ketuanguruan' di Lombok, tidak ada standar yang baku dan kriteria khusus yang menjadi referensi dalam proses pemberian gelar tuan guru. Pemberian gelar tuan guru biasanya dilakukan secara alami oleh masyarakat dengan memanggil mereka dengan panggilan tuan guru setelah melihat performa keilmuan dan akhlak mereka. Namun secara normatif, gelar tuan guru harus memiliki dua unsur pokok, yaitu memiliki ilmu pengetahuan agama juga telah menunaikan ibadah haji (Alfarisi 2014; Habibuddin 2005; Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012; Jamaludin 2011; Kingsley 2010). Bagaimana pintar dan salehnya seseorang jika belum naik haji, maka dia belum bisa dipanggil sebagai tuan guru, dia cukup dipanggil ustadz atau guru. Di sinilah letak lemahnya proses pemberian gelar tuan guru karena tidak mempunyai kriteria yang berlaku secara umum. Pemberian gelar ini dapat dikatakan bersifat nisbi atau relatif tergantung masyarakat atau jemaahdi sekelilingnya yang akan memberikan gelar kepadanya.

Gelar tuan guru biasanya dapat diperoleh melalui beberapa jalan, yaitu, pertama, melalui keturunan. Sebagaimana kiai di Jawa, seorang tuan guru biasanya akan memproyeksikan keturunannya sebagai pengganti dirinya jika telah pensiun atau menjelang wafat. Dia akan memilih keluarga dan kerabatnya yang paling tepat yang memiliki potensi sebagai seorang tuan guru. Untuk melegitimasi pemberian gelar tersebut, mereka akan menyekolahkan anak-anaknya di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Mekah, Madinah, dan negara-negara Afrika seperti Mesir, Sudan, dan Yaman. Setelah mereka menamatkan studi di negara tersebut, kemudian kembali ke kampung halamannya dan secara bertahap dia akan diberi gelar tuan guru oleh masyarakat dan para jama'ahnya.

Kedua, dengan membangun dan membina sebuah lembaga pendidikan seperti madrasah atau pesantren. Biasanya orang yang membangun madrasah atau pesantren akan dipanggil tuan guru oleh para siswa dan masyarakat di sekitarnya. Gelar tersebut diberikan secara alami setelah diakui kiprah dan jasanya, keilmuan, dan moral sosial yang dimilikinya. Ketiga, melalui pendidikan. Gelar tuan guru bukanlah gelar yang diberikan oleh keluarga tertentu, tetapi merupakan gelar sosial yang bisa dimiliki oleh semua orang. Gelar tersebut dapat diraih jika seseorang memperoleh ilmu pengetahuan agama yang tinggi.

Keempat, aktif di organisasi sosial keagamaan. Gelar tuan guru tidak hanya milik organisasi sosial keagamaan tertentu, sebaliknya tuan guru adalah gelar yang berkembang di semua organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan di Lombok merupakan media dan alat produksi dan reproduksi tuan guru. Di organisasi NW misalnya, para tokoh dan jemaahNW akan memberikan gelar tuan guru kepada kader-kadernya yang dipandang potensial dan mampu mengemban tugas keagamaan. Begitu juga di organisasi Wahabi, para jemaahWahabi akan memberikan gelar tuan guru kepada tokoh-tokoh mereka yang dipandang mampu. Hal yang sama juga terjadi di dalam organinsasi NU, Maraqit Ta'limat, ataupun di komunitas Ampibi. Hanya organisasi Muhammadiyah yang tidak menggunakan istilah tuan guru di Lombok.

Pemberian gelar tuan guru sebagaimana saya jelaskan di atas menunjukkan sesuatu yang relatif atau bersifat nisbi. Pemberian gelar tuan guru sangat tergantung pada kondisi sosio-religius dan kultur masyarakat di wilayah masing-masing. Pada kenyataanya gelar tuan guru tidak hanya berkembang di Lombok, tetapi juga di negera-negara lain seperti di Malaysia dan Afrika. Gugatan-gugatan kepada tuan guru yang timbul lebih pada pergeseran peran mereka

yang hanya konsen dalam dunia politik praktis dan melupakan tugas utamanya sebagai pembimbing masyarakat dalam bidang agama dan spiritual. Tuan guru dinilai lebih mementingkan kepentingan politik dan hanya memanfaatkan masyarakat untuk mendukung kepentingan politik mereka. Keterlibatan tuan guru di dunia politik seringkali menempatkan mereka pada ranah konflik dan kekerasan. Fenomena inilah yang terjadi di organisasi Nahdlatul Wathan, dan tentunya juga terjadi di organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Selain itu, tuan guru juga dituntut dan dikritik karena terlibat sebagai aktor intelektual dalam konflik NW dan ketidakmampuan mereka dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.

Menuntut dan menggugat posisi tuan guru yang keluar dari tugas normatifnya merupakan sesuatu yang dilematis dan pelik bagi masyarakat karena tuan guru masih mempunyai otoritas dan kekuasaan yang sangat besar. Selama ini apa yang dikatakan oleh tuan guru tidak boleh ditentang oleh masyarakat, dan sebaliknya harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Meski demikian gugatan dan protes terhadap tuan guru terus bermunculan di masyarakat tergantung pada kasus yang mereka hadapi. Di NW misalnya, terjadi krisis kepercayaan terhadap tuan guru karena mereka telah membawa masyarakat pada perpecahan dan kekerasan. Para tuan guru bukannya mengayomi masyarakat, tetapi menciptakan konflik di internal masyarakat. Dengan demikian, banyak tuan guru yang menjadi musuh masyarakat.

Demokrasi setengah hati dalam rekrutmen kepemimpinan NW

Persoalan kepemimpinan merupakan persoalan yang lumrah dalam sebuah organisasi sosial, mulai dari perebutan kekuasaan, gugatan otoritas, dan sistem rekrutmen kepemimpinan. Sistem rekrutmen merupakan salah satu persoalan yang seringkali menimbulkan konflik dan perpecahan dalam organisasi. Organisasi

modern yang menganut sistem demokrasi secara terbuka dan transparan dalam proses rekrutmen kepemimpinan tidak akan menghadapi persoalan yang berarti karena sistem yang dibangun telah matang dan stabil. Sedikit berbeda dengan organisasi tradisional yang belum menganut sistem demokrasi seringkali dihadapkan pada dilemma dan kompleksitas dalam proses rekrutmen kepemimpinan. Demokrasi yang dijalankan oleh organisasi saya sebut sebagai 'demokrasi setengah hati', dalam arti bahwa mereka tidak menjalankan sistem yang telah disepakati secara penuh. Aturan organisasi dalam rekrutmen kepemimpinan tidak sejalan dengan praktiknya karena hadirnya gugatan-gugatan oleh pihak tertentu.

Dalam kasus NW misalnya, rekrutmen kepemimpinan seringkali menjadi persoalan yang kompleks karena status NW yang belum jelas, apakah NW adalah organisasi keluarga atau publik? Jika NW merupakan organisasi publik, maka NW harus siap untuk menerima dan mengakomodir pemimpin di luar garis keluarga atau kerabat pendirinya. Sementara realitas berbeda, status NW samar-samar, setengah milik publik dan setengah milik keluarga. NW hingga sekarang masih mengedepankan keluarga dan kerabat pendiri organisasi sebagai pemimpin NW, meskipun jabatan-jabatan lain sebagian besar dipegang oleh kelompok dari luar keluarga dan kerabatnya. Untuk posisi pemimpin pengurus organisasi NW selalu memprioritaskan unsur keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin walaupun tidak semua memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang cukup mengisi posisi tersebut. Dampaknya, NW sangat tergantung pada keturunan dan kerabat Tuan Guru Zainuddin sebagai bentuk legitimasi sosio-politik. Ketika NW dipimpin oleh orang di luar keluarga atau kerabat pendirinya, posisi mereka tidak sekuat keluarga atau kurang mendapat legitimatasi. Apalagi jika mereka tidak mendapat restu dari salah satu keluarga Tuan Guru Zainuddin, maka sulit untuk memegang jabatan atau

posisi tersebut.

Sistem rekrutmen kepemimpinan NW seperti yang digambarkan di atas memperlihatkan adanya unsur kelemahan. Celah-celah inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan untuk mendekati keluarga Tuan Guru Zainuddin demi mencapai kepentingan politik dan ekonomi. Siapa yang pintar melakukan pendekatan, dia akan memperoleh jabatan tersebut. Persoalan lain yang muncul adalah ketika terjadi persaingan antara keluarga dan kerabat Maulana Tuan Guru Zainuddin sendiri seringkali membuat masyarakat kebingungan untuk mendukung salah satu dari mereka. Pada waktu yang bersamaan, persaingan antara keluarga ini seringkali dimanfaatkan oleh para elit atau kelompok kepentingan sehingga menambah persoalan menjadi lebih kompleks. Masyarakat juga terjebak di dalam aksi dukung-mendukung ke salah satu kubu dari keluarga tersebut. Sementara pihak keluarga sendiri memiliki kepentingan terhadap elit-elit yang lain untuk mendukung mereka. Konsekuensinya perang saudara sulit untuk dihindari karena masing-masing merasa berhak sebagai pemimpin NW. Masyarakat akhirnya terjebak dan menjadi korban atas konflik dan perpecahan antara keluarga.

Mungkinkah proses rekrutmen kepemimpinan NW akan berubah ke depan, NW memberikan ruang yang sama ke semua kadernya? Beranikah NW keluar dari bayang-bayang keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin? Ini merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh elit-elit NW termasuk keluarga dan kerabat Tuan Guru Zainuddin. Saya berargumen bahwa meskipun NW meraih perkembangan yang signifikan ketika dipimpin oleh pihak keluarga, namun pada aspek-aspek lain perkembangan NW sangat lamban seperti kebebasan, keterbukaan, dan transparansi. NW berkembang karena nilai-nilai feodalistik yang kuat yang mengalami manipulasi

simbol oleh elit-elit NW. Sampai kapankah NW mampu bertahan dengan kondisi sekarang di tengah tuntutan demokrasi, kebebasan, dan transparansi?

Setelah Tuan Guru Zainuddin wafat, perubahan demi perubahan telah terjadi di organisasi NW. Saya melihat kedua kubu NW, Kubu R1 dan Kubu R2, memiliki perbedaan konsep dalam pengembangan organisasi. Kubu R2 atau NW Anjani lebih dikenal sebagai kelompok NW yang asli, tetap mempertahankan gaya kepemimpinan Tuan Guru Zainuddin. Sikap feodalistik, anti dialog, dan kaku mewarnai kepemimpinan NW Anjani. Sedangkan Kubu R1 atau NW Pancor dikenal sebagai kelompok NW Reformasi. NW Pancor lebih terbuka berdialog dengan organisasi di luar NW, mengedepankan sikap rasionalitas dan mengakomodir perbedaan-perbedaan yang terdapat di organisasi. Keberhasilan Tuan Guru Bajang Majdi selaku pemimpin NW Pancor sebagai Gubernur NTB 2008 merupakan hasil dari keberaniannya melakukan dialog dengan komunitas di luar NW.

BAB 6
Peta Rekonsiliasi Rekonsiliasi Nahdlatul Wathan

Wahai anakku Rauhun Raihanun
Tetapkan dirimu selangkah seayun
Membela NW turun temurun
Bertangga naik berjenjang turun
(Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, Wasiat Renungan Masa, 2002: 99)

Upaya rekonsiliasi yang selalu gagal

Rekonsiliasi atau islah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses resolusi konflik. Rekonsiliasi tidak hanya merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai, tetapi juga merupakan sebuah proses yang harus dijalani dan dilakukan oleh para pelaku dan korban konflik (Abdullah 2001; Bloomfield et.al 2006; Tambiyah 1996). Tujuan rekonsiliasi adalah membangun kembali kehidupan bersama antara pelaku dan korban pasca konflik dan kekerasan. Secara sederhana, rekonsiliasi adalah menemukan jalan untuk hidup berdampingan dengan mantan musuh, tidak harus mencintai mereka, atau memaafkan mereka, atau melupakan masa lalu, tetapi *co-exist* untuk mengembangkan tingkat kerjasama membagi kehidupan sosial masyarakat (Bloomfield et.al 2006; Bowen 1996;

Trijono 2004; Van Klinken 2005). Dengan demikian, semua memperoleh kehidupan yang lebih baik daripada hidup terpisah. Tujuan ini tentu tidak mudah untuk dicapai tergantung pada intensitas dan kompleksitas dari sebuah konflik itu sendiri yang terkadang membutuhkan waktu panjang.

Rekonsiliasi memiliki makna dan definisi yang berbeda-beda bagi setiap orang atau komunitas. Rekonsiliasi mengarah pada restorasi dan rekonstruksi struktur sosial yang mengalami kekacauan sosial (*disorder*) dan instabilitas akibat konflik dan kekerasan yang berkepanjangan. Rekonsiliasi juga identik dengan proses penyembuhan (*healing*) luka dan trauma masyarakat yang menjadi korban, mencari keadilan (*justice*) dan kebenaran (*truth*) dan saling memaafkan (*forgiveness*) antara korban dan pelaku kekerasan (Bloomfield et.al 2008: 14). Keempat hal tersebut; penyembuhan, keadilan, kebenaran, dan memaafkan merupakan unsur-unsur yang fundamental dalam proses rekonsiliasi. Keempat unsur tersebut saling terkait satu sama lain meskipun tidak semua harus terpenuhi dalam proses rekonsiliasi.

Proses rekonsiliasi bukan perkara mudah untuk direalisasikan pada kasus konflik dan kekerasan tertentu. Terkadang rekonsiliasi mengalami keberhasilan, dan terkadang juga banyak yang mengalami kegagalan total. Menurut Bloomfield et.al (2006: 22), rekonsiliasi harus dilihat sebagai proses yang panjang yang membutuhkan beberapa dekade bahkan beberapa generasi. Konflik komunal di Aceh, konflik agama di Ambon, konflik politik di Timor Timur, dan konflik etnik di Kalimantan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai rekonsiliasi. Pendekatan rekonsiliasi yang digunakan juga berbeda di setiap kasus, sebagian menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau atas ke bawah (*top-down*) tergantung pada pola-pola konflik yang berjalan (Abdullah

2001; Fakhri 2001; Sihbudi 2001; Tomagola 2006; Van Klinken 2005).

Konflik NW merupakan salah satu konflik di Indonesia yang mengalami kegagalan dalam mencapai rekonsiliasi untuk sementara waktu. Konflik NW yang telah menginjak satu dekade lebih belum memperlihatkan tanda-tanda akan terjadinya rekonsiliasi terutama pada tingkat struktrual. Proses rekonsiliasi belum mengalami kemajuan yang berarti, bahkan setiap adanya inisiasi dan upaya rekonsiliasi selalu kandas di tengah jalan (Hadi 2010; Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012; Muhtar 2010; Saprudin 2005). Salah satu kubu berusaha untuk rekonsiliasi, tetapi kubu yang lain berupaya mempertahankan konflik. Sebagian elit sengaja membiarkan konflik berjalan liar dan berupaya menciptakan konflik-konflik baru guna menjaga kepentingan individu dan kelompok mereka. Ibarat minyak dengan air, sulit mengintegrasikan kedua kubu yang bertikai (Hamdi 2011; Muhtar 2010). Fenomena yang muncul bahwa para elit sama-sama mempertahankan egoisme dan berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing kubu menilai bahwa kelompok merekalah yang paling benar dan menyalahkan kelompok yang lain sehingga tuntutan rekonsiliasi sebagai syarat tidak pernah terealisir. Ruang-ruang dialog sengaja dihindari, ditutupi demi mempertahankan konflik. Rekonsiliasi yang dicapai ketika Pilkada Lombok Tengah 2010 mental di tengah jalan. Hingga sekarang, belum ada upaya-upaya konkrit dari elit kedua kubu untuk rekonsiliasi lebih lanjut dalam rangka mencari resolusi yang tepat.

Meskipun konflik NW untuk sementara dapat dikatakan gagal dalam rekonsiliasi, tetapi proses rekonsiliasi masih terus berjalan. Dinamika yang muncul dalam konflik NW adalah terjadinya tarik ulur kepentingan antara kelompok *grass root* dengan kelompok elit. Sebagian kelompok elit ingin mempertahankan konflik di satu sisi,

dan sebagian kelompok *grass root* di sisi lain ingin mengakhiri konflik dan bersatu kembali seperti sediakala. Proses rekonsiliasi di tingkat *grass root* lebih terbuka dan berjalan secara natural serta kultural. Masyarakat mulai sadar dengan peristiwa konflik dan perpecahan yang menimpa mereka. Mereka mulai kembali saling menegur dan menyapa keluarga mereka yang berada di kubu yang lain. Mereka mulai saling mengundang dalam acara-acara adat, budaya, dan acara sosial lainnya seperti acara *begawe* untuk ritual sunatan, kematian, kurisan, perkawinan, dan lain-lain (Hamdi 2011; Hamdi dan Smith 2012).

Praktik-praktik adat, budaya, dan sosial di atas merupakan media rekonsiliasi masyarakat bawah yang memiliki kekuatan luarbiasa di tengah-tengah konflik NW. Perlahan-lahan tetapi pasti kekuatan kultural dan sistem kekeluargaan, kekerabatan, dan kolektivitas mengurangi memori konflik dan kekerasan yang telah terjadi. Praktik-praktik ini juga telah melahirkan kesadaran bagi masyarakat pentingnya untuk bersatu membangun kembali kehidupan bersama yang lebih baik. Kepentingan ekonomi secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi proses islah ini (Hamdi dan Smith 2012).

Masyarakat bawah mengharapkan rekonsiliasi dan merindukan bersatunya kembali NW seperti dulu, tapi apa lacur tidak serta-merta dijawab oleh sebagian elit NW. Hingga sekarang sebagian di antara mereka tidak mau bertemu dan saling menegur; kedua kubu tetap mempertahankan posisi masing-masing; dan tidak ada titik temu di antara mereka, meskipun keduanya mengatakan keinginannya untuk menyatukan NW secara organisatoris di bawah satu kepemimpinan. Kubu R1 misalnya, terus berupaya melakukan islah dengan mencoba mempertemukan kedua tokoh sentral, yaitu Ummi Rauhun dan Ummi Raihanun. Namun upaya tersebut

selalu dihalang-halangi oleh elit-elit R2 yang tidak setuju dengan islah. Upaya-upaya pihak ketiga untuk mempertemukan mereka termasuk pemerintah juga selalu *mentok* karena mereka tidak mau duduk dalam satu meja.

Terpilihnya Tuan Guru Bajang sebagai Gubernur NTB memberikan harapan untuk mempersatukan NW yang telah bercerai-berai dalam bingkai islah secara total. Tuan Guru Bajang Bajang meyakini posisinya sebagai kepala pemerintah daerah adalah modal sosial dalam menyelesaikan konflik. Upaya-upaya islah dari Tuan Guru Bajang setelah terpilih sebagai gubernur membuahkan hasil ketika memanfaatkan media politik sebagai alat rekonsiliasi (Hamdi 2011; 2013; Zulkarnain 2008). Ketika Pilkada 2010 untuk bupati di Lombok Tengah, Tuan Guru Sakti dicalonkan oleh NW Anjani. Untuk mendongkrak dan meningkatkan popularitas dan elektabilitas Tuan Guru Sakti, suara jemaahNW harus bersatu. Sedangkan faktanya NW masih terpecah dua dan belum ada kesepakatan islah.

Satu-satunya jalan untuk meng-*up grade* elektabilitas Tuan Guru Sakti adalah melalui jalan rekonsiliasi. Pengurus NW Pancor segera bergerak dan menginisiasi pertemuan dengan Pengurus NW Anjani yang diprakarsai oleh Mawardi Hamri (Sekum PB NW Pancor). Pertemuan dengan pihak NW Anjani termasuk dengan Ummi Raihanun membuahkan hasil. Keduanya sepakat untuk berislah demi memuluskan jalan Tuan Guru Sakti menuju kursi bupati. Untuk mengawali islah, kedua keluarga besar khususnya ibu mereka harus bertemu. Perlu dicatat bahwa hampir 12 tahun mereka tidak pernah bertemu sejak 1998 pasca Muktamar dan perpecahan konflik NW. Pertemuan ini adalah sejarah baru dalam perjalanan NW setelah ditinggal wafat oleh Tuan Guru Zainuddin (Hamdi 2011; Mugni 2013).

Pertemuan kedua tokoh sentral NW Ummi Rauhun dan Ummi Raihanun diadakan di lingkungan Musholla Al-Abror, tepatnya di makam Tuan Guru Zainuddin di Pancor. Semua jemaahmeneriakkan pekik “Allahu Akbar” dan sangat senang dengan bersatunya kembali kedua putri Tuan Guru Zainuddin. Mereka didampingi oleh masing-masing putra mereka, termasuk Tuan Guru BajangBajang dan Tuan Guru Sakti. Awak media yang sudah menunggu momentum ini tidak henti-hentinya mengambil gambar mereka. Setelah berdoa, mereka melanjutkan pertemuan di rumah kediaman R2 yang diadakan secara tertutup. Hanya satu orang petugas yang diberi kesempatan mengambil gambar mereka. Sangat terlihat adanya rasa kangen dan sayang di antara mereka sambil membicarakan strategi dan potensi kemenangan untuk Pilkada. Media massa mempublikasikan proses pertemuan kedua keluarga besar Tuan Guru Zainuddin. Kedua kubu juga mengadakan konvoi islah dan rekonsiliasi keliling Lombok yang melibatkan kedua jemaahNW.

Pertemuan-pertemuan lain juga terus dirancang sebagai bentuk penguatan *image* islah NW untuk menyatukan suara jemaahpada Pilkada tersebut. Kedua Ummi hadir pada acara kampanye Tuan Guru Sakti dan menjadi magnet dalam mendulang suara. Kehadiran keduanya secara otomatis mengundang jemaahNW dari kubu masing-masing. Pada putaran pertama, Tuan Guru Sakti berhasil menjadi nomor urut 1, namun harus menjalani putaran kedua. Kemenangan Tuan Guru Sakti di luar perkiraan karena sebelumnya dia tidak begitu dijagokan. Islah NW sangat berpengaruh pada perolehan suara Tuan Guru Sakti. Pada putaran kedua, tim sukses kubu Tuan Guru Sakti terlalu percaya diri dan mengklaim kemenangan sehingga islah NW tidak begitu digunakan, bahkan cenderung jalan di tempat. Kubu Tuan Guru Sakti jarang menggunakan isu islah NW dalam kampanyenya. Pada putaran

kedua ini, Tuan Guru Sakti harus mengakui kemenangan mutlak H. Suhaili yang didukung Partai Golkar. Kegagalan ini membuat proses islah menjadi buyar dan kedua kubu saling menyalahkan dan mengkambing-hitamkan kegagalan tersebut.

Kekalahan Tuan Guru Sakti sangat mempengaruhi jalannya proses islah. Kubu NW Anjani kecewa dengan tidak maksimalnya dukungan Kubu NW Pancor, sementara Kubu Pancor menilai Kubu NW Anjani kurang kooperatif dan *over confident* pada tahap kedua yang seolah-olah tidak butuh lagi dengan Kubu Pancor. Setelah kegagalan ini, hubungan keduanya mulai merenggang dan seperti tidak pernah lagi ada islah. Ini disebabkan karena wacana islah tersebut hanya sebatas islah keluarga, bukan organisasi. Padahal menurut pandangan saya, sulit untuk memisahkan urusan keluarga dengan organisasi. Seharusnya ketika kedua putri Tuan Guru Zainuddin sudah islah, maka semua unsur dan elemen perpecahan sudah dapat disatukan karena kuncinya ada di kedua Ummi tersebut.

Faktor kegagalan rekonsiliasi

Konflik NW merupakan konflik yang unik dan kompleks karena melibatkan berbagai unsur seperti keluarga, kerabat, ekonomi, politik, agama, dan kekuasaan. Faktor-faktor tersebut menyatu pada diri agen-agen konflik di tubuh organisasi NW. Kompleksitas ini membuat para agen konflik kesulitan untuk mencari format dan konsep rekonsiliasi, apalagi setelah munculnya dualisme kepemimpinan di dalam tubuh NW telah mempertegas perpecahan antara elit-elit NW. Di satu sisi munculnya dualisme kepemimpinan di NW bukanlah solusi yang terbaik bagi jemaahNW khususnya dalam jangka panjang, tetapi di lain sisi NW tidak punya banyak pilihan sehingga menjadi salah satu solusi alternatif karena NW sedang dilanda disintegrasi sosial. Pancor yang menjadi pusat

organisasi sangat membutuhkan pemimpin baru pasca ditinggal oleh Kubu R2 ke Anjani. Setidaknya, kehadiran pemimpin baru di Pancor dapat menyelamatkan aset-aset NW dan mengembangkan apa yang sudah ada. Meski demikian pada kenyataanya selama NW dalam dualisme kepemimpinan konflik terus mengalami reproduksi di komunitas NW.

Dualisme kepemimpinan NW telah melahirkan batasan atau sekat-sekat baru antara jemaahNW. Pendefinisian sebagai warga NW tidak lagi bermuara pada nilai-nilai universal ke-NW-an, tetapi pendefinisian menurut batasan geografis dan kelompok. Orang tidak lagi bertanya apakah anda orang NW atau Muhammadiyah atau Wahabi, tetapi orang akan bertanya apakah anda NW Anjani atau NW Pancor, NW pro Rauhun atau pro Raihanun (R1 atau R2), NW Reformasi atau NW Asli, NW Al-Fansyuri atau NW Al-Anfanani, atau NW Hizbullah atau Satgas Hamzanwadi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah menjadi praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari para jemaahdi desa-desa yang merupakan basis NW. Identitas NW terus mengalami redefinisi, rekonstruksi, dan gugatan-gugatan oleh agen-agen dan jemaahNW berdasarkan kepentingan kelompok dan individu.

Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat dan jemaahNW pesimis. Asmuni (2008) misalnya mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap proses rekonsiliasi NW. Dia mengatakan, 'seandainya malaikat turun untuk menyatukan NW tidak akan berhasil. Sangat sulit untuk menyatukan NW karena sebagian besar elit-elit NW menggantungkan hidup mereka di NW dan konflik akan memberikan ruang dan akses yang lebih. Ketergantungan yang luar biasa ini melahirkan kompetisi yang tinggi antara elit-elit NW sehingga berdampak pada tingginya potensi konflik antara mereka'. Pandangan lain menunjukkan bahwa sebagian warga NW justru

optimis terhadap bersatunya kembali jemaahNW. Mereka yakin NW akan bersatu hanya tinggal menunggu waktunya saja.

Kegagalan sebuah rekonsiliasi disebabkan oleh berbagai faktor. Saya melihat setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan kegagalan rekonsiliasi NW yaitu:

1. Faktor kepentingan

Kuatnya faktor kepentingan individu dan kelompok dalam organisasi NW menjadi salah satu penghambat proses rekonsiliasi. Kepentingan yang dimaksud di sini termasuk kepentingan ekonomi, politik, status, dan kekuasaan. Dari aspek ekonomi misalnya, NW merupakan salah satu sumber ekonomi bagi sebagian jemaahNW terutama kelompok yang memiliki kepentingan. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai guru, dosen, politisi, birokrat, dan sebagai tuan guru. Peluang-peluang ekonomi, politik, dan kekuasaan yang sangat prospek di NW menciptakan kompetisi yang ketat di kalangan para agen sosial di lingkungan NW. Tidak jarang persaingan ini melahirkan gesekan dan konflik karena tidak didasari dengan sikap profesional dan persaingan yang sehat. Maka demi memperoleh kepentingan dan mencapai taget tersebut, sebagian besar elit-elit NW tidak mau bersatu dan terjebak dalam kubu-kubu. Jika NW bersatu banyak orang kehilangan pekerjaan atau jabatannya, apalagi kedua kubu (Anjani dan Pancor) secara struktur, infrastruktur, dan super struktur mulai menunjukkan kemapanan. Salah satu cara untuk mempertahankan dan menjaga kepentingan individu dan kelompok mereka dengan memelihara dan menciptakan konflik-konflik baru supaya NW tidak akan pernah bisa bersatu.

2. Faktor gengsi

Faktor sikap gengsi juga menjadi penghambat proses

rekonsiliasi antara kedua kubu. Masing-masing merasa gengsi untuk menerima kepemimpinan salah satu kubu karena merasa diri mereka yang paling benar dan kubu yang lain salah. Kedua kubu juga merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan dan mengelola organisasi dan aset-asetnya yang diwariskan oleh Tuan Guru Zainuddin. Sikap gengsi inilah yang seringkali melahirkan perilaku-perilaku yang tidak bijak dan tidak rasional. Ada kesengajaan oleh salah satu pihak untuk menjatuhkan pihak yang lain di luar kubu mereka, meskipun salah satu kubu memperoleh prestasi atau keberhasilan tetapi tetap tidak mau diakui. Bahkan salah satu kubu secara kreatif membuat isu-isu yang tidak benar sehingga menimbulkan kontra-produktif di kalangan jemaahNW.

3. Faktor legalitas dan loyalitas

Faktor legalitas dan loyalitas juga menjadi faktor kegagalan rekonsiliasi NW. Salah satu kubu merasa bahwa kubu merekalah yang sah dan direstui oleh Tuan Guru Zainuddin untuk memegang dan mengelola organisasi NW. Kubu ini juga merasa sebagai kelompok yang paling loyal kepada Tuan Guru Zainuddin, sementara kubu yang lain dianggap tidak loyal sehingga tidak pernah mendapat restu untuk memegang organisasi. Bahkan keluarga dari salah satu kubu dianggap sebagai penentang dan pemberontak atas perintah-perintah Tuan Guru Zainuddin, oleh karena atas nama loyalitas dan legalitas dari pendiri NW inilah salah satu kubu tidak pernah mau menerima keterlibatan dari kubu yang lain. Artinya, terdapat upaya-upaya untuk menyingkirkan peran dari salah satu kubu sehingga melahirkan resistensi dan protes keras dari pendukung yang merasa didiskreditkan.

4. Lemahnya budaya dialog

Salah satu faktor penyebab kegagalan rekonsiliasi adalah lemahnya budaya dialog dikalangan jemaahNW. JemaahNW termasuk para elit jarang sekali berdialog secara terbuka memecahkan sebuah masalah. Tradisi dialog maupun diskusi ilmiah tergolong minim di lingkungan NW, apalagi di kalangan para tuan guru. Sebaliknya, tradisi yang berkembang adalah mengikuti apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh guru. Ideologi sufistik yang menekankan *sami'na wa atha'na* (mendengar dan menta'ati) menjadi sebuah doktrin yang tidak boleh dikritisi, ditanyakan, dan ditentang. Ketika NW menghadapi sebuah masalah besar yang membutuhkan dialog terbuka, para elit NW tidak mampu dan kelihatan kaku karena tidak terbiasa menghadapi perbedaan pandangan atau perbedaan penafsiran. Mereka lebih mengedepankan egoisme, arogansi, dan otoritas dalam menyelesaikan masalah.

Selama terjadi konflik dan kekerasan (1998-2010) belum pernah sekalipun tokoh-tokoh NW duduk bersama membicarakan akar persoalan konflik yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya secara bersama-sama. Mereka justru saling menyerang dan berdebat dari jarak jauh melalui media-media sosial dan media agama seperti pengajian. Bahkan sebagian tokoh NW mencoba menutupi persoalan ini yang seolah-olah tidak ada masalah. Apa yang dilakukan oleh elit-elit NW bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah. Ada ketakutan-ketakutan untuk saling bertemu sehingga seringkali terjadi miskomunikasi, mispersepsi, dan salah pengertian antara mereka. Sementara miskomunikasi seringkali berakibat fatal karena kedua kubu sedang dalam konflik. Praktik-praktik kekerasan yang liar sulit dikontrol dan dikendalikan. Pada kesempatan inilah orang ketiga atau provokator masuk memberikan informasi yang salah sehingga kekerasan dan konflik terus mengalami eskalasi di masyarakat.

5. Faktor wasiat Tuan Guru Zainuddin

Wasiat Tuan Guru Zainuddin juga menghambat proses rekonsiliasi NW karena sebagian besar jemaahNW percaya dan meyakini kebenaran isi wasiat tersebut. Jauh sebelum konflik Tuan Guru Zainuddin telah menulis buku wasiat yang berisi tentang pengalaman sehari-harinya baik dalam bidang spiritual, politik, ekonomi, maupun relasi sosial di masyarakat. Di buku wasiat ini juga memberikan prediksi-prediksi peristiwa yang akan datang seperti peristiwa alam yang akan terjadi di Indonesia dan di dunia. Selain itu terdapat juga tentang ramalan perjalanan NW pada masa depan termasuk ramalan akan munculnya sebuah konflik dan perpecahan antara keluarga dan jama'ah. Tuan Guru Zainuddin dalam buku wasiat tersebut telah meramalkan perpecahan dan konflik NW akan terjadi selama seperlima abad atau dua puluh tahun. Berikut adalah bunyi wasiatnya (Zainuddin, 2002):

> 'Seperlima abad anakku berpisah
> Selama itu timbullah fitnah
> Di sana-sini anakku berbantah
> bersama saudara di dalam *nahdlah*
>
> Wahai anakku mari kembali
> Kepada NW karya sendiri
> Tak usah lari kesana kemari
> Agar bersama sepanjang hari
>
> Aku melihat banyaknya fitnah
> Karena anakda berpisah-pisah
> Tidak seturut pada ayahanda
> *Masya'allah wa innalillah*'

Dari isi wasiat Tuan Guru Zainuddin di atas menunjukkan bahwa kedua putri dan murid-muridnya akan berpisah selama seperlima abad atau sekitar 20 tahun. Jika dihitung dari sejak terjadinya konflik dan perpecahan NW pada tahun 1998, maka NW akan bersatu pada tahun 2018. Karena sebagian jemaahNW sangat meyakini kebenaran wasiat tersebut, maka mereka percaya sekuat apapun usaha yang dilakukan untuk menyatukan NW, sementara ini tidak akan berhasil karena belum waktunya sebagaimana yang diramalkan dalam wasiat tersebut. Mereka yang percaya dengan wasiat ini merasa pasrah dengan konflik NW dan hanya menunggu saat terjadinya islah pada tahun 2018.

Rekonstruksi peta rekonsiliasi

Kegagalan rekonsiliasi NW sementara ini tidak serta merta membuat pintu rekonsiliasi tertutup secara total. Peluang rekonsiliasi masih terbuka lebar, hanya saja belum menemukan titik temu pada konsep rekonsiliasi yang akan dilakukan. Negosiasi terus dilakukan oleh elit-elit NW dari kedua kubu melalui tawaran kerjasama dalam di bidang politik dan *sharing* kekuasaan di internal maupun eksternal NW. Kelihatan di lapangan bahwa Kubu R1 lebih progresif dan terbuka dengan proses rekonsiliasi atau islah daripada R2 yang tetap bertahan pada pemisahan diri dan menolak proposal islah dari Kubu R1. Sebagai contoh, pada Pilkada 2008 Kubu R1 menawarkan paket koalisi politik dengan Kubu R2 demi terjadinya islah. Tuan Guru Bajang (Ketua Umum PB NW Pancor) mencalonkan diri sebagai Gubernur NTB dan untuk memenangkan jabatan politik tersebut dia membutuhkan dukungan suara dari jemaahNW terutama dari Kubu R2. Kaitannya dengan itu, dia sempat menawarkan kerjasama politik dengan memberikan beberapa pilihan posisi penting bagi elit-elit NW dari Kubu R2 seperti posisi Bupati dan Wakil Bupati

Lombok Timur atau sebagai Wakil Gubernur NTB.

Tawaran kerjasama dalam bidang politik dan *sharing* kekuasaan oleh Kubu R1 tidak pernah mendapat respons dari Kubu R2 karena kuatnya kepentingan dan gengsi politik di kalangan elit-elit R2. Para elit R2 justru mendukung calon dari luar NW dan berusaha menghadang laju calon dari Kubu R1. Selama kampanye, kedua kubu memperlihatkan permainan politik yang cantik. Tidak jarang elit-elit NW dari Kubu R2 melakukan kampanye hitam untuk menjatuhkan calon dari Kubu R1. Bahkan mereka membawa persoalan internal organisasi ke ranah politik praktis. Berbagai selebaran gelap muncul menjelang Pilkada yang bertujuan menyerang dan menjelekkan salah satu calon termasuk calon dari Kubu R1. Baliho besar terpampang di mana-mana yang berisi tentang ketidaksetujuan mereka atas pencalonan Tuan Guru Bajang sebagai calong Gubernur NTB. Kubu R2 menggunakan wacana konflik untuk kampanye politiknya, sementara Kubu R1 tidak terlalu merespons serangan R2 dan tetap fokus mewacanakan islah.

Meskipun Kubu R1 memenangkan kontestasi politik di NTB, gubernur dan bupati Lombok Timur, namun proses rekonsiliasi masih tersendat-sendat. Padahal pencalonan Tuan Guru Bajang sebagai Calon Gubernur NTB tidak lepas dari agendanya untuk menyatukan NW. Tuan Guru Bajang yakin bahwa jika dia memegang kekuasaan, maka dia dapat melakukan islah dengan tokoh-tokoh NW Anjani karena posisi tawarnya lebih kuat. Selama ini, dia seringkali didiskreditkan oleh Kubu R2 sehingga dia membutuhkan kekuasaan yang lebih besar untuk mengimbangi kekuatan rezim R2 tersebut. Tuan Guru BajangBajang yakin bahwa 'inilah satu-satunya jalan untuk melakukan islah dengan tokoh-tokoh di Kubu R2, yaitu melalui jalur kekuasaan'.

Dari Kubu R2 pada dasarnya sangat menginginkan islah NW

tetapi dengan beberapa syarat. Pengurus NW Anjani menginginkan kepengurusan NW Pancor membubarkan diri dan mengakui legalitas Kubu R2 sebagai pengurus yang sah karena terpilih dalam Muktamar NW ke-10 di Praya. Menurut R2 (2008) , 'kepengurusan NW Pancor telah melanggar wasiat Tuan Guru Zainuddin yang tidak membenarkan dualisme kepemimpinan dalam NW'. Hayyi Nu'man (2008) juga mempunyai pandangan yang sama dengan R2 mengatakan bahwa 'NW Anjani akan menyambut baik tawaran untuk islah jika memang benar ada niat untuk bersatu, tetapi dengan syarat membubarkan terlebih dahulu kepengurusan NW Reformasi di Pancor karena tidak sesuai dengan AD/RT organisasi. Lebih lanjut, Nu'man (2008) mengungkapkan bahwa 'Yang menjadi persoalan selama ini adalah adanya kepengurusan lain selain hasil Muktamar Praya. Seandainya mereka mengakui pimpinan NW yang terpilih pada Muktamar Praya dan tidak membuat kepengurusan baru, maka tidak akan pernah terjadi konflik dan kekerasan'. Sedangkan menurut tokoh dari R1, sebagaimana dikutip oleh Abdul Kabir, Tuan Guru Bajang (2008) mengatakan, dirinya dan jemaahNW Pancor sangat menginginkan untuk bersatu. Kita perlu duduk bersama membicarakan akar persoalan yang sebenarnya dan mencari solusi yang terbaik tanpa merugikan pihak manapun. Dia menambahkan NW Pancor belum bisa mengakui NW Anjani karena melanggar aturan organisasi NW yang menganut ajaran Mazhab Syafi'i. Alasannya, tidak pernah Imam Syafi'i membolehkan perempuan sebagai pemimpin termasuk sebagai pemimpin organisasi. Kita akan mengakui kepemimpinan perempuan jika aturan organisasi NW diubah terlebih dahulu tidak lagi menganut satu mazhab tetapi multi mazhab. Dia juga menambahkan, 'Yang terpenting adalah pertemuan antara tokoh-tokoh NW dalam satu meja untuk berdialog, maka persoalan NW akan dapat diselesaikan'.

Selain melalui dialog, Tuan Guru Bajang juga menawarkan

beberapa alternatif sebagai langkah resolusi konflik, yaitu melakukan otonomi kepengurusan NW berdasarkan teritori kekuasaan. NW Anjani akan mengatur dan mengelola sendiri amal usaha mereka, begitu juga dengan NW Pancor. Dia juga mengusulkan adanya pembagian tugas perjuangan melalui jalur struktural dan kultural. Dia mengatakan, 'Biarlah saya berjuang melalui jalur struktural atau pemerintahan, sedangkan saudara-saudara saya seperti Lalu Gede Sakti dan Zainuddin Astani berjuang melalui jalur kultural'. Dengan kata lain, Tuan Guru Bajang sangat setuju jika kepengurusan NW dipegang oleh saudara sepupunya tersebut, tetapi harus melalui mekanisme organisasi yang benar.

Di tengah *deadlock* atau buntunya jalan rekonsiliasi antara kedua kubu NW, beberapa peta rekonsiliasi dapat ditawarkan sebagai resolusi konflik di antaranya adalah:

Pertama, dualisme kepemimpinan organisasi harus melebur menjadi satu garis komando kepemimpinan. Salah satu pengurus NW apakah NW Pancor atau NW Anjani harus membubarkan diri dan bergabung ke dalam pengurus yang lain. Pilihan ini sangat sulit bagi kedua kubu karena banyaknya kepentingan yang akan terancam dan dikorbankan di kalangan elit-elit NW. Kedua, NW tetap berjalan seperti sekarang ini, yakni menganut dualisme kepemimpinan, tetapi harus ada kesepakatan untuk tidak memobilisasi atau memprovokasi massa melakukan tindak kekerasan. Rekonsiliasi makro sangat penting dilakukan untuk meminimalisir konflik NW supaya tidak meluas ke ranah-ranah lain. Pilihan ini tidak terlalu sulit karena masyarakat NW secara umum hanya menginginkan rasa aman dan nyaman meskipun NW terbagi menjadi dua kubu. Hanya saja konflik NW tidak akan pernah tuntas karena konflik menjadi bom waktu ketika terjadi benturan kepentingan antara kedua kubu.

Ketiga, masing-masing pengurus membubarkan diri dan

mengadakan Muktamar istimewa yang melibatkan kedua kubu untuk membentuk pengurus yang baru. Keluarga Tuan Guru Zainuddin harus mendapat porsi dan kedudukan yang adil di kepengurusan. Mereka kemudian menentukan formasi pengurus pendamping mereka di organisasi. Keempat, menyerahkan kepemimpinan NW ke ranah publik, di mana keluarga Tuan Guru Zainuddin tidak harus memegang tampuk kepemimpinan. NW harus keluar dari bayang-bayang keluarga Tuan Guru Zainuddin seperti Muhammadiyah dan NU. Seluruh aset NW dapat dikelola secara profesional dan melibatkan kaum profesional. Langkah ini akan mampu meminimalisir konflik karena akar konflik NW salah satunya adalah persaingan keluarga. Kelima, desentralisasi kekuasaan atau otonom daerah di tingkat pengurus yayasan. Pengurus organisasi di tingkat pusat harus melebur menjadi satu dengan menggabungkan kedua elit NW terutama dari unsur keluarga Tuan Guru Zainuddin sebagai pengurus inti, kemudian mereka bersama-sama membentuk pengurus yayasan yang otonom baik di Anjani maupun di Pancor. Dengan demikian, elit-elit NW di Anjani masih bisa menjalankan amal usahanya, begitu juga dengan elit-elit NW Pancor. Pilihan ini adalah pilihan yang paling ideal sebagai format rekonsiliasi NW.

Kesimpulan

KONFLIK Nahdlatul Wathan merupakan salah satu konflik lokal produk reformasi 1998 yang mengalami kegagalan dalam rekonsiliasi. Instabilitas negara akibat transisi dari rezim orde baru ke reformasi mempunyai pengaruh kuat secara tidak langsung terhadap konflik NW. Konflik NW pada awalnya hanya melibatkan kelompok elit dalam perebutan kekuasaan oleh berbagai agen seperti keluarga pendiri organisasi, tuan guru dan kaum intelektual yang mengalami transformasi kedalam konflik dan kekerasan komunal yang melibatkan sebagian besar jemaahNW. JemaahNW terpecah menjadi dua kubu yang dikenal dengan NW Pancor dan NW Anjani. Mereka terlibat dalam aksi kekerasan yang mengakibatkan ratusan rumah terbakar dan rusak dan juga puluhan korban jiwa.

Nahdlatul Wathan adalah kelompok mayoritas Muslim terbesar di Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Zainuddin mendirikan NW khusus untuk pemberdayaan masyarakat lokal sehingga NW sangat identik dengan ke-Sasakan-nya. Dia berhasil mengintegrasikan Islam ortodok dengan budaya lokal, menggunakan symbol-simbollokal budaya Sasak dalam dakwahnya seperti Gunung Rinjani, Dewi Anjani, kerajaan Selaparang, makam para wali dan Gauz Abdur Rozak. Pola singkritisme Islam, NW dan budaya Sasak ini berdampak luas terhadap konstruksi identitas NW yang co-exist dengan budaya Sasak. Identitas lokal NW di sisi lain telah menghambat proses migrasi keluar daerah karena selama empat dekade penekanan dakwah NW hanya di tingakt lokal. Perubahan telah nampak pasca reformasi di mana bendera NW semakin berkibar keluar daerah dan

semakin dikenal di tingkat nasional melalui kegiatan politik NW di legislative maupun eksekutive.

Kekuatan identitas NW salah satunya adalah pola Islam Sufi yang dibangun oleh Tuan Guru Zainuddin. Jargon sufistik yang besumber dari Al-Quran yaitu *'Sami'na Wa Ato'na'* (dengar dan taati) digunakan sebagai basis ideologi NW dalam membangun kekuasaan dan menata kehidupan berorganisasi. Para jemaahNW harus taat kepada mursyid, guru, tuan guru dan pimpinan organisasi secara umum, apa yang 'dikatakan' atau 'diperintahkan' oleh mereka harus diikuti dan dikerjakan. Begitu juga dengan kebijakan organisasi tidak boleh ditentang oleh satu jama'ahpun karena dianggap mengingkari perintah guru. Tradisi ini telah berkembang sejak Tuan Guru Zainuddin menanamkan nilai-nilai kesufian pada diri jemaahNW. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengorganisiran masyarakat untuk bersatu dan kompak dalam membangun NW lebih maju dan kuat. 'Kompak, Utuh dan Bersatulah' adalah jargon yang sering digunakan oleh Tuan Guru Zainuddin di setiap pengajiannya.

Begitu juga dengan jargon yang lain seperti 'Pokoknya NW, Poko NW Iman dan Takwa' adalah jargon yang memiliki kekuatan supaya jemaahNW tidak pernah keluar dari NW. NW lebih utama dari segalanya, dan jemaahNW harus memperkuat iman dak taqwa sebagai representasi dan identitas keagamaan jemaahNW. Penguatan ideologi sufistik NW juga dapat dilihat dari praktik ritual NW yakni membaca hizib, tareqat hizib, wirid, buku wasiat dan lagu-lagu yang disusun oleh Tuan Guru Zainuddin. Melalui media agama pengajian dan praktik-praktik ritual inilah proses internalisasi nilai-nilai ke-NW-an dilakukan dan terus direproduksi dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Dampaknya jemaahNW cukup 'fanatik' dan taat kepada pimpinan organisasi khususnya kepada Tuan Guru Zainuddin dan para tuan guru yang lain. Sayangnya, ajaran sufistik

ini seringkali mengalami eksploitasi oleh elit-elit tertentu untuk kepentingan politik dan ekonomi. Symbol-simbolkekuatan sufistik juga mengalami manipulasi dan politisasi yang berakibat pada konflik antarjamaah NW.

Konflik NW tidak disebabkan oleh satu faktor, tetapi banyak faktor yang ikut berkontribusi atas terjadinya konflik komunal yang disertai dengan kekerasan antarjemaahNW. Faktor internal antara lain adalah poligami, kekuasaan, kepentingan ekonomi, gensi dan legitimasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi politik lokal dan nasional yang tidak menentu karena arus reformasi di tingkat pusat. Meskipun sejak Tuan Guru Zainuddin masih hidup benih-benih konflik dan perpecahan telah mulai nampak di kalangan elit-elit NW, akan tetapi konflik mengalami puncak pada Muktamar NW 1998 di Praya Lombok Tengah. Konflik pada tafsir agama tentang status keabsahan 'kepeminpinan perempuan' menjadi perdebatan penting dan isu krusial yang menyebabkan perpecahan di internal elit NW. Ummi Raihanun yang ditentang pencalonannya oleh Kubu R1 berhasil memenangkan Muktamar ini di Praya. Karena tidak puas dengan hasil Muktamar Praya yang dinilai melanggar aturan organisasi yang menganut mazhab Syafi'i (melarang perempuan menjadi pemimpin), maka kubu R1 mengadakan Muktamar Reformasi yang disertai dengan agenda perubahan besar di tubuh organisasi NW. Dengan demikian secara *de facto* dan *de jure* kepengurusaan NW berada dalam dualisme kepemimpinan.

Perbedaan penafsiran tentang sah atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin organisasi adalah faktor teologis penyebab perpecahan dan kekerasan antarjemaahdari kedua Kubu. Kedua kubu membangun dan mensosialisasikan wacana keabsahan status kepemimpinan perempuan dan hasil muktamar lainnya

tersebut melalui pengajian. Di setiap pengajian pada waktu itu, kedua kubu mengaku sebagai pihak yang benar dan menyalahkan kubu yang lain, khususnya kubu NW Anjani yang yakin bahwa merekalah kubu yang sah dan direstui oleh Tuan Guru Zainuddin karena diberi surat kuasa. Sedangkan kubu NW Pancor mengklaim adanya kekeliruan dalam proses muktamar, namun lebih moderat dan mengajak untuk berdialog menyelesaikan persoalan ini. Para tuan guru dari kedua kubu hanya berdebat dari mimbar pengajian, tidak pernah ada dialog langsung secara akademik. Media pengajian 'agama' mengalami disfungsi sebagai alat untuk membangun wacana kekuasaan dan menumbangkan kekuasaan. Perang wacana ini berubah menjadi praktik kekerasan di kalangan jemaahNW dengan pola eskalasi dan reporduksi yang sama yaitu melalui pengajian.

Hijrahnya Kubu R2 dari Pancor ke Kalijaga kemudian ke Anjani tidak membuat konflik semakin surut. Konflik dan kekerasan mengalami eskalasi dan polarisasi ke desa-desa yang menjadi basis jemaahNW. Konflik tidak hanya mengenai hasil Muktamar Praya, tetapi juga menjadi ajang perebutan 'wilayah kekuasaan' di basis-basis massa NW. Kedua kubu berusaha untuk saling mengagalkan pengajian yang dilakukan oleh masing-masing karena adanya kekhawatiran bahwa jemaahmereka akan pindah ke kubu yag lain dan juga kecurigaan adanya upaya perebutan madrasah oleh salah satu kubu. Kasus kekerasan di Desa Gotong Royong, Kesik, Majuet, Tebaban, Paok Lombok, Suralaga, Wanasaba, Kota Raja, Kelayu, Pancor, Dasan Tumbuh dan Dasan Borok memiliki pola yang sama yaitu melalui pengajian. 'Agama' mengalami politisasi dan manupulasi untuk kekerasan sosial. Keterlibatan NW pada ranah politik praktis juga telah membuat konflik semakin kompleks. JemaahNW tidak hanya terbagi dalam kubu NW yang berbeda, tetapi pilihan partai politik juga ikut melahirkan segmentasi dan fragmentasi antarjemaahNW. Di setiap Pemilu, Pilkada dan Pilpres

jemaahNW terpecah ke dalam partai politik yang berbeda sesuai dengan afiliasi kubu mereka. Kepentingan politik inilah yang ikut mewarnai dan mempengaruhi tingkat intensitas dan produktivitas konflik NW.

Tafsir konflik yang muncul di kalangan jemaahNW bervariasi, sebagian menafisirkan bahwa konflik sebagai bagian dari pencarian identitas NW yang sebenarnya. Konflik tidak membuat NW semakin mundur atau bubar, tetapi justru semakin besar dan berkembang hingga ke tingkat nasional. Konflik NW juga ditafsirkan sebagai bentuk proses *sharing power* (pembagian kekuasaan) antara elit-elit NW. Selama ini NW didominasi oleh salah satu kubu, sedangkan kubu yang lain kurang mendapat peran sehingga muncul kecemburuan sosial dan ketidakadilan dalam proses *sharing* tersebut. Melalui konflik ini maka secara tidak langsung telah memaksa *sharing* kekuasaan antara kedua kubu yang berfungsi sebagai penyeimbang. Tasfir lain dari konflik NW adalah sebagai bentuk pembuktian diri kubu siapa yang lebih mampu dan pantas mengelola NW. Karena diskriminasi yang dialami oleh salah satu kubu membuat mereka tidak pernah secara maksimal menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebagian juga menafsirkan konflik NW sebagai ajang pembuktian kubu siapa yang benar dan siapa yang salah. Selama ini kedua kubu mengaku sama-sama benar dan menyalahkan kubu yang lain. Waktulah yang akan membuktikan kubu mana yang sesungguhnya benar. Yang benar akan bertahan dan yang salah akan tergusur sendiri sebagaimana hukum alam. Sebagian juga menafsirkan bahwa konflik NW merupakan sebuah takdir yang harus dijalani oleh jemaahNW untuk menguji sejauhmana eksistensi NW pasca konflik.

Upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh jemaahNW khususnya di tingkat elit pimpinan organisasi selalu mengalami kegagalan. Berbagai cara dan upaya dilakukan mengalami jalan buntu karena

kuatnya kelompok kepentingan yang ingin mempertahankan konflik selama mungkin untuk menjaga kepentingan mereka. Sementara di tingkat kultural sebagian besar jemaahNW telah 'bersatu' kembali dan tidak mepermasalahkan perbedaan pilihan afiliasi mereka. Mereka menginginkan NW seperti dahulu ketika zaman Tuan Guru Zainuddin yang tidak mengenal istilah Kubu Pancor atau Anjani. Setidaknya terdapat empat faktor yang menyebabkan kegagalan rekonsiliasi NW yaitu faktor kepentingan, lemahnya budaya dialog di kalangan elit dan jemaahNW, gengsi, legalitas, loyalitas dan faktor wasiat. Wasiat Tuan Guru Zainuddin yang telah memprediksi akan terjadi konflik selama seperlima abad atau 20 tahun diyakini mempengaruhi proses islah NW. Jika dihitung perpecahan NW sejak tahun 1998, maka NW akan bersatu pada tahun 2018. Bagaimanapun kuatnya usaha yang dilakukan untuk islah tidak akan pernah tercapai karena tidak sesuai dengan wasiat Tuan Guru Zainuddin.

Kegagalan rekonsiliasi NW ini tidak serta merta membuat pintu rekonsiliasi tertutup secara total. Peluang rekonsiliasi masih terbuka, hanya saja belum menemukan titik temu pada konsep rekonsiliasi yang akan dilakukan. Negosiasi terus dilakukan oleh elit-elit NW dari kedua kubu melalui tawaran kerjasama dalam di bidang politik dan *sharing* kekuasaan di internal maupun eksternal NW. Saya menawarkan beberapa langkah menuju rekonsiliasi yaitu, pertama, dualisme kepemimpinan organisasi harus melebur menjadi satu garis komando kepemimpinan. Salah satu pengurus NW harus membubarkan diri dan bergabung ke dalam pengurus yang lain. Kedua, NW tetap berjalan seperti sekarang ini, yakni menganut dualisme kepemimpinan, tetapi harus ada kesepakatan untuk tidak memobilisasi atau memprovokasi massa melakukan tindak kekerasan.

Ketiga, masing-masing pengurus membubarkan diri dan mengadakan Muktamar istimewa yang melibatkan kedua kubu untuk membentuk pengurus yang baru. Keluarga Tuan Guru Zainuddin harus mendapat porsi dan kedudukan yang adil di kepengurusan. Mereka kemudian menentukan formasi pengurus pendamping mereka di organisasi. Keempat, menyerahkan kepemimpinan NW ke ranah publik, di mana keluarga Tuan Guru Zainuddin tidak harus memegang tampuk kepemimpinan. NW harus keluar dari bayang-bayang keluarga Tuan Guru Zainuddin seperti Muhammadiyah dan NU. Seluruh aset NW dapat dikelola secara profesional yang melibatkan kaum profesional. Kelima, desentralisasi kekuasaan atau otonom daerah di tingkat pengurus yayasan. Pengurus organisasi di tingkat pusat harus melebur menjadi satu dengan menggabungkan kedua elit NW terutama dari unsur keluarga Tuan Guru Zainuddin sebagai pengurus inti, kemudian mereka bersama-sama membentuk pengurus yayasan yang otonom baik di Anjani maupun di Pancor.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. 2001. "Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnis di Indonesia", *Antropologi Indonesia,* vol. XXV, no. 66.

Alfarisi, Salman. 2014. *Kesenian Ale-ale Sebagai Kontestasi Ideologi Masyarakat Sasak.* Ringkasan Disertasi Program Master Studi Kajian Budaya Universitas Udayana Bali.

Anderson, Benedict, ed., 2001. *Violence and the State in Suharto's Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press.

Andrianto, Tuhana Taufiq. 2000. *Konflik Maluku.* Yogyakarta: Gama Global Media.

Anwar, D.F., Bouvier, Helen, Smith, Glenn dan Tol, Roben, ed., 2005. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik.* Jakarta: Kerjasama Yasasan Obor Indonesia, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV.

Avonius, Leena. 2004. *Reforming Wetu Telu: Islam, Adat and the Promises of Regionalism in Post-New Order Lombok.* Yliopistopaino: Helsinki.

Bagshaw, Dale. 2003. *Challanging Discourses of Violance and Promoting Discourses of Peace: A Role for Mediators in Our Conflicted Region.* Makalah disampaikan pada 2th Asia Pasific Mediation Forum: Developing Mediation Culture, Singapura: 19-22.

Baharuddin dan Rasmianto. 2004. *Maulana Lentera Kehidupan*

Ummat. Malang: Mintra Insan Cendekia.

Baharuddin. 2007. *Nahdlatul Wathan & Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Genta Press.

Bartholomew, J.R. 1999. *Alif Lam Mim: Reconciling Islam, Modernity and Tradition in an Indonesian Kampung.* Alih bahasa oleh Imron Rosyidi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Bennett, Linda Rae. 2005. *Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*. London & New York: Routledge Curzon.

Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia* . United Kingdom: Cambridge.

Bloomfield, David, Barnes, Teresa dan Huyse, Luck. 2006. *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook*. USA.

Bowen, J.R. 1996. "The Myth of Global Ethnic Conflict", *Journal of Democracy,* vol.7, no.4.

Bromley, D.G., dan Melton, J.G., Ed . 2002. *Cults, Religion and Violence.* United Kingdom: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice.* United Kingdom: Cambridge University Press.

BPS Provinsi NTB. 2008. *NTB dalam Angka.* Mataram: Pemprov NTB

BPS Lotim. 2006. *Lombok Timur dalam Angka.* Selong: Pemda Lotim

Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima.* Yogyakarta: LkiS.

Cady, Linell E, Simon, Sheldon W (Ed). 2007. *Religion and Conflict in South and Southeast Asia: Discrupting Violence.* London dan New York: Routledge.

Cederroth, Sven. 1981. *The Spell of the Ancestors and the Power of*

Mekah: A Sasak Community on Lombok. Sweden: Acta Universitatis Goyhoburgengsis.

Colombijn, Freek. 2001. "What is so Indonesian about Violence". Dalam Wessel, Ingrid dan Georgia, Wimhofer. *Violence in Indonesia.* Hamburg: Hem. Abera Press.

Coser, Lewis. 1956. *The Function of Social Conflict.* United State: The Free Press.

Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik.* Alih bahasa Ali Mandan, Jakarta: CV. Rajawali.

Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai.* Jakarta: LP3ES.

Elsenstadt. 1968. *Max Weber on Charisma and Institution on Building.* Chicago dan London: The University of Chicago Press.

Endang, Turmudi. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS.

Eriksen, T.H. 2001. *Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology.* London, Sterling dan Virginia: Pluto Press.

Fakhri, A.M. 2001. *Di Balik Tragedi Sampit: Data, Fakta dan Prospek Penyelesaian.* Jakarta: Sarana Media Investama.

Fahrurrozi . 2011. *Mobilisasi Politik Kader Nahdlatul Wathan Pancor dengan DPW Partai Buan Bintang (BB) NTB: (Studi Kasus Pilkada NTB 2008).* Tesis Program Master Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Foucault, Michel. 1970. *The Order of Discourse: An Archeology of the Human Sciences.* London: Tavistok.

-------------------- 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Diedit oleh Gordon, Colin dan

Harvester, Brighton, United State: Pantheon Books.

Fisher, S, Abdi, DI, Ludin, J, Williams, S, Smith, R, dan Williams, S. 2000. *Working with Conflict: Skill & Stratgies for Action.* London: The British Council.

Francis, Diana. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial.* Alih bahasa oleh Hendrik Muntu, Yogyakarta: PT. Quills.

Giddens, Anthony. I997. *Sociology.* Oxford: Polity Press

-------------------- 2003. *The Constitution of Society: The Out Line of the Theory of Structuration.* Alih bahasa oleh Adi Loka Sujono, Pasuruan: Pedati.

Gurr, R.T. 1993. *Minorities at Risk, A Global View of Ethnopolitical Conflict.* United State: Institute of Peace Press.

Habibuddin. 2005. *Peran Tuan Guru dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Tesis Program Master Jurusan IPS Universitas Negeri Yogyakarta.

Hamdi, Saipul. 2011. "Politik Islah: Renegosiasi Islah, Konflik dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Wathan di Lombok Timur". *Jurnal Kawistara Vol. (1)* 1: 1-14.

----------------- 2011. "Politik, Agama dan Kontestasi Kekuasaan Nahdlatul Wathan di Era Otonomi Daerah Lombok, NTB". *Jurnal Review Politik, Vol. (1) 2:130-147.*

------------------2011. "Ahmadiyah di Era Reformasi". *Jurnal Al-Ulum, Vol. (11), 1: 27-46.*

------------------ 2013. "Transformasi Agama dan Politik dalam Kepemimpinan TGB", *Lombok Pos* 02 September.

------------------ 2013. "TGB dan Kebangkitan Politik NW di Era Otonomi daerah", *Lombok Pos,* 25 Agustus.

Hamdi, Saipul, & Smith, Bianca J. 2012. "Sisters, Militias, & Islam

in Conflict: Questioning 'Reconciliation' in Nahdlatul Wathan, Lombok, Indonesia". *Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life, 6*(1), 29–43. Springer: USA.

Hall, Stuart ed., 1997: *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.* London: Sage.

Haryatmoko. 2003. "Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa", *BASIS menembus fakta*, vol. 52, no. 11-12.

Harker, Richard K, Mahar, Cheleen, Wilkes, Chris. 2006. *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Theory of Practice.* Alih bahasa oleh Pipit Maizier, Yogyakarta: Jalasutra.

Harrison. Paul M. 1959. *Authority and Power in the Free Church Tradition: A Social Case Study of the American Baptist Convention.* USA: Princeton University Press.

Hefner, Robert W. 1999. *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik.* Alih bahasa A Wisnu Wardana dan Imam Ahmad.Yogyakarta: LKIS.

Horowitz, D.L. 1985. *Ehtnicity Group in Conflict.* Los Angles: University of Berkeley Press.

Jamaludin. 2011. *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi Kasus Terhadap Tuan Guru).* Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI.

Kamlian. 2004. "Ethnic and Religious Conflict in the Philippines: The Bangsamoro Experience", dalam Trijono, L, Azka, M.N., dan Susdinarjanti, Tri. *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia.* Yogyakarta: Kerjasama CSPS UGM dengan SAREC dan Sida.

Kingsley, Jeremy J. Tuan Guru, Conflict and Community in Lombok

Indonesia. Disertasi Melbourne Law School The University of Melbourbe.

Kristiansen, Stein. 2003. Violent Youth Groups in Indonesia: The Cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat. *Sojourn*, vol. 18: 110-138.

Lan, Thung Ju. 2006. "Kelas Menengah Lombok: Kompetisi Kultural antara Kelas, Suku-Bangsa dan Agama". Dalam Henny Warsilah (editor), Kelas Menengah & Demokratisasi: *Partisipasi Kelas Menengah dalam Kontrol Sosial Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih: Studi Kasus di Kendari, Sulawesi Tenggara dan Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: PMB-LIPI, 2006.

Lessa, Lara. 2006. "Discoursive Struggles within Social Welfare: Retaging Teen Motherhood". *British Journal of Social Work,* vol, 36: 283-298.

Lingga, Abhoud Syed M. 2007. *Bangsamoro Self-determination dalam Voices from Moro Land: pespective from Stakeholders and Observer on the Conflict in the Southern Philippines.* Petaling Jaya: SIRD.

Macdougall. 2007. Criminality and the Political Economy of Security in Lombok dalam *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.

Masruchah. 2009. "Partisipasi Perempuan dalam Politik Indonesie". *Jurnal Perempuan* no. 62. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

May, R.J. 2005. "Mengapa Pasifik tidak Damai? Menilik Konflik-konflik Lokal di Melanesia", dalam Anwar, D.F., Bouvier, H, Smith, G dan Tol, R, Ed., *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik.* Jakarta: Kerjasama Yasasan Obor Indonesia, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV.

Mills, Sara. 1997. *Discourse.* London dan New York: Routledge

Mugni Sn, M. 2013. *Ibu Rumah Tangga Getarkan Lombok: Biografi Ummuna Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Majid.* Banten: CV Dunia Kata

Muhas, Dedi Mujaddid. 2009. *Respons Ormas NW dan Preferensi Kepartaian: Studi Penggalangan Pemilu di Lombok Timur.* Tesis Program Magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fisipol Uversitas Gadjah Mada.

Muhtar, Fathurrahman. 2010. *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren Organisasi Nahdlatul Watahn di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.* Disertasi Program Doktor UIN Sunan Ampel Surabaya.

Muslim, Muslihun. 2014. *Kiprah Nahdlatul Wathan: Dinamika dan Pemikiran NW.* Jakarta Timur: Bania Publishing

Nahdi, Khirjan. 2012. *Nahdlatul Wathan & Peran Modal: Studi Etnografis-Historis Modal Spiritual & Modal Sosial Kultural.* Yogyakarta: Insyira

Nasri, Ulyan. 2014. *Pemikiran Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Islam Perempuan Dan Implementasinya di Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah di Lombok*. Tesis Program Master Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nazri. 2000. *Membedah Konflik Rauhun-Raihanun.* Mataram NTB.

Nakamura, Mitsuo. 2012. *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of The Muhammadiyah Movement in Central Javanese Town, c.1970s-2010.* Singapura: ISEAS Publishing

Noor, Mohammad et al. 2004. *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan* Tuan guru *Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997.* Ciputat: PT. Logos

Wacana Ilmu bekerjasama dengan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta.

Nugroho, Fera, Dirdjosanjoto, Pradjarto, Kana, Nico L. 2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal.* Yogyakarta: Pustaka Percik & Pustaka Pelajar.

Nu'man, Hayyi. 1999. *Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Riwayat Hidup dan Perjuangannya.* NTB: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.

Perera, Jehan. 2005. "Peran Intervensi Pihak Ketiga dalam Memelihara Pergeseran Paradigma dalam Porses Perdamaian Srilanka", dalam Anwar et al, (ed). *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik.* Jakarta: Kerjasama Yasasan Obor Indonesia, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV.

Prasojo. Zaenuddin H. 2008. *Riots on the News in West Borneo*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.

Resnick, Stephen A, dan Wolff, Richard D. 2013. *Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR.* New York: Routledge

Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.* Alih bahasa oleh Wahono, S, Bilfagih, B, Huda, H, Helmi, M, Sutrisno, J, Manadi, H. Jakarta: Serambi.

Ridwan, Nur Khalik. 2010. *NU & Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Rozi, Syafuan. 2006. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rummel, R.J. 1976. *Understanding Conflict and War: The Conflict Helix.* United State: Sage Publication.

Santoso, Thomas, ed., 2002. *Teori-teori Kekerasan.* Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Saprudin. 2005. *Konflik Kekuasaan di Tubuh Organisasi Nahdlatul Wathan Antara Kubu Hajjah Siti Rauhun dengan Kubu Hajjah Siti Raihanun.* Tesis Program Master Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada.

Sjarifuddin, Nia. 2009. "Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan untuk Sebuah Perubahan". *Jurnal Perempuan No. 62.* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Sihbudi, R. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas.* Jakartar. Kerjasama PT Grasindo, Menristek dan LIPI.

Siregar. 2004. "Konflik Sparatis Papua", dalam Trijono, L, Azka, M.N., dan Susdinarjanti, Tri. *Potret Retak Nusantara: gStudi Kasus Konflik di Indonesia.* Yogyakarta: Kerjasama CSPS UGM dengan SAREC dan Sida.

Smith, Bianca J. 2012. "Re-orienting Female Spiritual Power in Islam: Narrating Conflict between Warriors, Witches and Militias in Lombok". *Indonesia and the Malay World,* 40(118): 249-271. Routledge: UK.

Smith, Bianca J. 2014. "Stealing Women, Stealing Men: Co-creating Cultures of Polygamy in a *Pesantren* Community in Eastern Indonesia". *Journal of International Women's Studies*, *11*(1), 189–207. Bridgewater State University: USA.

Smith, Bianca J., & Hamdi, Saipul. 2014. "Between Sufi and Salafi Subjects: Female Leadership, Spiritual Power and Gender Matters in Lombok". In B. J. Smith, & M. Woodward (Eds.), *Gender and power in Indonesian Islam: Leaders, feminists, Sufis and pesantren selves*. London and New York: Routledge.

Soetjipto, Ani. 2006. Pemenuhan Hak-hak Politik Perempuan, Sejauh Manakah? *Jurnal Perempuan* no. 45. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Sofyan, Muhammad. 1999. *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi.* Yogyakarta: Pressindo.

Subono, Nur. 2006. Tokoh Politik Perempuan di Asia. *Jurnal Perempuan no. 45.* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Syakur, Ahmad Abd. 2006. *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak. TGHKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Agen Pembaharuan Budaya Sasak 1904-1997.* Yogyakarta: Adab Press.

Tambiah, Stanley J. 1996. *Leveling Crods: Ethnonationalist Conflict and Collective violence in Sout Asia.* Berkeley, London dan Los Angeles: University of California Press.

Trijono, Lambang, ed., 2004. *The Making of Ethnic and Religious Conflict in Southeast Asia: Case and Resolution.* Yogyakarta: CSPS Book Universitas Gadjah Mada.

Trijono, Lambang, Azka, M.N., dan Susdinarjanti, Tri, ed., 2004. *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia.* Yogyakarta: Kerjasama CSPS UGM dengan SAREC dan Sida.

Tohir, Muh. 2003. *Peranan TGH. Zaenuddin Abdul Majid dalam Pembaharuan Islam di Lombok Timur.* Yogjakarta: Diva Press.

Tomagola, Tamrin Amal. 2006. *Republik Kapling.*Yogyakarta: Resist Book.

Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS

Van Klinken, G. 2005. "Pelaku Baru, Identitas Baru: Kekerasan

antar Suku pada Masa Pasca Suharto", dalam Anwar et al., (ed). *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik.* Jakarta: Kerjasama Yasasan Obor Indonesia, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV.

Van Beruinessen, Martin. 2007. Saints, Politicians and Sufi Bureaucrats: Mysticism and Politics in Indonesia dalam Van Bruinessen, Martin & Howel, Julia. *Sufism and the Modern in Islam.* New York: IB Tauris.

Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Puma Inves.

Weller, Robert P. 2008. "Asia and the Global Economic of Charisma" in *Religious Commodification in Asia, Marketing Gods.* USA and Canada: Routledge.

Wilson, Chris. 2008. *Ethno-Religious Violence in Indonesia, From Soil to God.* USA dan Canada: Routledge.

Woodward, Mark. 2007. Religious and the Globalization of Knowledge in Indonesian History dalam *Religion and Conflict in South and Southeast Asia: Discrupting Violence.* London dan New York: Routledge.

Yusuf, M. 1976. *Sejarah Ringkas Perguruan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah & Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah.* Selong: PB NW.

Zulkarnain. 2008. *TGB Berpolitik dengan Dakwah Berdakwah dengan Politik*. Kediri: Kaysa Media.

TENTANG PENULIS

Dr. Saipul Hamdi adalah dosen senior di jurusan Sosiologi, Fak. Fisipol Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia memperoleh gelar Doktor di bidang Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2011. Saipul Hamdi yang lebih dikenal dengan Pulham lahir di dusun Paok Lombok, Suralaga, Lombok Timur, NTB 1979. Topik risetnya fokus pada kajian gerakan Islam transnasional Jamaah Tabligh, Salafisme, politik lokal, radikalisme dan konflik Nahdlatul Wathan. Dia memperoleh beberapa research grant dari Kemenristek Dikti, Sylff foundation, Kemenag, dan Pemda NTB untuk riset di dalam dan di luar negeri seperti di Australia, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Jerman dan Amerika. Dia membuka layanan konsultasi akademik dan kritik di email shamdi@unram.ac.id. Sekarang dia diangkat sebagai Direktur Pusat Studi Islamic Culture and Society (ICS) Universitas Mataram untuk priode 2019-2024.

INDEKS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z